



**SEMINAR SEJARAH NASIONAL III**

**SEKSI  
SEJARAH  
MUTAKHIR  
(2)**

**Rektorat  
dayaan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PEKERJAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH  
NASIONAL**

**1982**

150.8  
SEM



**SEMINAR SEJARAH NASIONAL III**

**SEKSI  
SEJARAH  
MUTAKHIR**

**(2)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH  
NASIONAL**

**1982**

## DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	iii
PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA 1945 — 1947 .....	1
KEKUATAN GERILYA DI DAERAH PRIANGAN PADA WAKTU DIVISI SILIWANGI HIJRAH TH. 1948.....	36
LAHIRNYA BADAN-BADAN PERJUANGAN DAN BKR DI KOTA BANDUNG SAMPAI TIMBULNYA MDPP/MPPP... ..	47
PEMBENTUKAN UUD 1945 DAN PENETAPANNYA .....	60
QAHAR MUDZAKKAR PERGUMULAN DIDALAM SIRI' .....	79
PENGIRIMAN PERWIRA-PERWIRA SILIWANGI KE SUMATRA DALAM TAHUN .....	98
BOGOR SHU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG ( 1942 — 1945 ) .....	106
PERKEMBANGAN PERANAN ULAMA DALAM ARENA POLITIK ACEH UTARA .....	118
LAMPIRAN - LAMPIRAN.	

## KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa."

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam ruang lingkup dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejarahan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat dipertemukan berbagai pihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Di dalam forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Materi kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu: prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, DI Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin,

Palembang, Bima, Ujungpandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982  
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional

**SAMBUTAN DAN PENGARAHAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL III**

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktivitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktivitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan obyek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktivitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutuk oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar betapa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari studi sejarah, bahkan usaha meraih *judicium* yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (sense) dari sejarah manusiawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengusutan tentang hakikat dari realitas, baik sebagai keseluruhannya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti esensial dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbendaharaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apa-

kah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realitas itu dan di mana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip di sepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (counterpart) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subyektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar dirinya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di pihak lain, si pemikir telah memilih sejumlah bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarinya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Di dalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi di satu pihak dan di lain pihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup suggestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbendaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang suggestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu. Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai hal-ikhwal manusiawi. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrar dan kebetulan. Jadi sejarah mengenai seleksi dan kontruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwal manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kekacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwal yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping berada di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwal manusia sulit untuk melepas diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalanan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan di samping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia, pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan obyek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan membuat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau sedikitnya epistemologi, juga diperlukan di dalam mengali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poeitis orang seringkali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghanyutkan atau mengantarkan seseorang kesatu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekadar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (*raison d'etre*). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai arti? Sebaliknya, apakah satu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Di sini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. Kesesuaiannya, kalaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah

yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian. Arah yang berkelanjutan ini, walaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggapi sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat linear. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah tidak hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhi satu tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison d'etre" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morfologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morfologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyetop jalannya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, walaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphorik dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dilampauinya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morfologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan penghayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morfologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertiwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal dan datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meramban makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tuntutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang itu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini dimulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu kesengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan membina semangat persatuan dan kesatuan Bangsa, saya kira dapat digolongkan pada usaha yang didorong oleh semangat patriotik.

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana intrenasionalisme merupakan satu mode, di mana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa — tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional kè-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daed Joesoef

## PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

1945 — 1947

Oleh : Soetopo Soetanto

### Pendahuluan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, di mana pemerintahan negara kemudian diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri, sampai kini Jakarta telah mengalami beberapa pergantian pimpinan daerahnya. Para pemimpin yang pernah memegang pemerintahan daerah tersebut adalah Suwiryo, sebagai Walikota I, demikian juga setelah pengakuan kedaulatan RI Suwiryo tampil kembali sebagai Walikota ke II; tetapi karena Suwiryo kemudian aktif di pemerintahan Pusat, maka ia diganti oleh Syamsurizal, dan setelah itu Walikota ke III ini digantikan oleh Sudiro. Selanjutnya pimpinan pemerintahan daerah untuk Jakarta dipegang oleh seorang Gubernur, berturut-turut yakni : dr. Sumarno, Henk Ngantung, dr. Sumarno kembali, Ali Sadikin, dan Tjokropranolo (sekarang).

Dari sebanyak delapan kali pergantian pimpinan pemerintahan daerah itu sangatlah menarik untuk diketengahkan mengenai Pemerintahan Nasional Kota di bawah Walikota I Suwiryo (1945 - 1947). Pemerintahan itu juga dikenal dengan pemerintahan Balai Agung, karena roda pemerintahan tersebut diputar dari Balai Agung (sekarang Balai Kota). Menarik karena kita dapat melihat dinamika pemerintahan daerah tersebut, yang sebagai pemerintahan daerah yang pertama dihadapkan berbagai tantangan dan hambatan. Dengan demikian uraian makalah ini selanjutnya mempunyai aspek sejarah lokal, sebab gambaran sejarah lokal sebagai mikro-histori tidak sedikit gunanya untuk melengkapi dan memperjelas gambaran keaktifan kemanusiaan umum dalam sejarah nasional.

Terdapat suatu yang perlu dicatat mengenai peranan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dalam perjuangannya pada awal Proklamasi. Dalam hal ini ketabahan, keuletan dan ketaatan yang dimiliki Pemerintahan Nasional Kota serta rakyatnya menempatkan kesan tersendiri. Pada waktu itu Jakarta menjadi perebutan antara pihak Republik dan pihak Belanda. Dalam hal ini Belanda tidak begitu gampang untuk segera menghapuskan eksistensi Pemerintahan Nasional Kota yang dianggapnya menjadi perintang utama dalam mencapai tujuan rencananya, meskipun sejak 4 Januari 1946 Pemerintah Pusat telah pindah ke Yogyakarta. Pada usia yang sangat muda itu Pemerintahan Nasional Kota harus menghadapi tiga kekuatan asing sekaligus yang tidak jarang melakukan ofensif-ofensif militernya. Kekuatan asing tersebut adalah : Jepang yang bertugas menjaga *status-quo*, Serikat yang diwakili Inggris dan dalam kenyataannya kemudian membantu usaha-usaha Belanda, dan Nica Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Jakarta.

Dengan menyanggah tugas-tugas Serikat, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan pada akhirnya menyusun pemerintahan sendiri, yaitu **Allied Military Administration Civil Affairs Branch (Amacab)**, yang dikenal dengan pemerintahan Serikat. Dengan dibentuknya Amacab ini maka di Jakarta kemudian terdapat dua pemerintahan, yaitu Pemerintahan Nasional Kota dar Amacab; dan pada suatu ketika di Jakarta terjadi pemerintahan-rangkap.

Selanjutnya setelah Inggris meninggalkan Indonesia (Jakarta) maka Belanda, yang memang telah mempersiapkan diri di belakang Inggris, langsung menggantikan pemerintahannya dengan **Hoof Tijdelijke Bestuursdienst** Hindia Belanda. Pada mulanya Belanda datang ke Jakarta dengan membonceng kedudukan tentara Inggris (Serikat) yang mempunyai tugas antara lain menerima penyerahan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang dan tahanan Serikat, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. 1) dan pada akhirnya Belanda-lah yang mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota setelah melancarkan agresi militernya pada tanggal 21 Juli 1947.

### 1. Pengambil-alihan Kekuasaan dari tangan Jepang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Jakarta sebagai bagian dari bangsa Indonesia segera merealisasikan akan arti proklamasi tersebut. Pada waktu itu keadaan kedudukan kota Jakarta masih sama seperti pada waktu sebelumnya (di bawah pemerintahan balatentara Jepang), dalam arti belum ada perubahan. Kedudukan tata-pemerintahan daerah untuk kota Jakarta dikenal dengan **Jakarta Tokubetsu Shi**, yang berarti kotapraja khusus (istimewa). Kekuasaannya yaitu meskipun menurut tata-pemerintahan darah kedudukan **shi** adalah dibawah **shu**, tetapi status Jakarta disamakan serta langsung di bawah **Gunseikan** (Kepala Pemerintahan Militer). 2)

Menurut Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 disebutkan antara lain bahwa "Untuk sementara waktu kedudukan kota (gemeente) diteruskan seperti sekarang". 3) Sebab itu sejalan dengan ketentuan Aturan Tambahan tersebut maka kedudukan Jakarta **Tokubetsu Shi** masih berlangsung.

Pada waktu itu jabatan Kepala Pemerintahan Kota (Tokubetsu Shicho) dipegang oleh Hasegawa, seorang Jepang; sedangkan jabatan **Syoyaku I** dan **III** (Wakil Kepala **Tokubetsu Shi I** dan **III** dipegang oleh Suwiryo dan Baginda Dahlan Abdullah, keduanya orang Indonesia. Barulah untuk beberapa minggu kemudian susunan pimpinan pemerintahan untuk kota Jakarta berubah dengan digantinya Jakarta **Tokubetsu Shi** dengan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta sesuai dengan arti proklamasi kemerdekaan. Adapun arti dari pada Pemerintahan Nasional Kota adalah bahwa pemerintahan

daerah untuk kota Jakarta khususnya telah mempunyai corak tersendiri yang bersifat nasional, dan bukan suatu pemerintahan dari bangsa lain (terutama bukan pemerintahan dari Serikat ataupun bukan pemerintahan dari Belanda). 4)

Adapun realisasi pembentukan Pemerintahan Nasional Kota Takarta tersebut sebenarnya erat hubungannya dengan peranan Suwiryono dan Bagindo Dahlan Abdullah yang selama pemerintahan bala-tentara Jepang khususnya di Jakarta telah turut serta mengambil bagian di dalamnya. Bahkan mereka berdua mempunyai kedudukan yang cukup penting, yaitu sebagai **Syoyaku I** dan **Syoyaku III** yang untuk jabatan itu diangkat langsung oleh **Gunseikan**. 5)

Dalam rangka mempersiapkan pengumuman Proklamasi kemerdekaan, Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Suwiryono pada tanggal 15 Agustus 1945 telah menyiarkan berita hangat tentang kekalahan Jepang. Berita hangat tersebut telah disebarluaskan dalam rapat yang diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. 6)

Berita yang demikian itu untuk waktu yang cukup berbahaya dan akan mengakibatkan suatu resiko yang cukup besar, sebab pada waktu itu Jepang masih lengkap mempunyai kakitangan dan mata-matanya. Pada esok harinya, tanggal 16 Agustus 1945, beberapa pembesar Jepang yang diikuti oleh beberapa orang anggota **Kempetai** datang menemui Suwiryono di Balai Agung, kantor tempat Suwiryono bekerja, untuk mengusut berita yang telah disiarkan di Gedung Kesenian tersebut. Pengusutan mengarah kepada siapa yang menyiarkan berita kekalahan Jepang yang pertama kali. Tetapi Suwiryono tetap memegang teguh rahasia. Dalam pada itu sementara "dakwaan" tersebut belum menemui kejelasan, berita kekalahan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu menjadi kenyataan.

Secara formal Jakarta **Tokubetsu shi** Hasegawa masih berkuasa, tapi dengan tiada diketahuinya Suwiryono (sebagai wakilnya) telah mengambil bagian sebagai anggota panitia untuk mempersiapkan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Usaha Suwiryono bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu saja, tentunya umum tidak mengetahui. Semula panitia tersebut merencanakan upacara Proklamasi Kemerdekaan diadakan di Lapangan Ikada sekarang Lapangan Monas, tetapi juga pernah dikenal dengan Lapangan Gambir atau Lapangan Merdeka).

Dalam hal ini penyelenggaraan upacara tersebut dibebankan pada Suwiryono, mengingat kedudukannya yang pada waktu masih menjadi pejabat Pemerintahan Kota. Dengan demikian akan lebih mudah mendapatkan fasilitas serta tenaga, meskipun bersifat rahasia. Tetapi, karena pelaksanaan tugas itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Suwiryono, maka olehnya tugas itu disampaikan kepada bawahannya. Dan karena kekurangan telitian di dalam melakukan perintah-perintah selanjutnya kepada bawahannya, maka rencana persiapan upacara itu diketahui oleh Jepang. Pada malam harinya Mah Suwiryono didatangi oleh 3 anggota **Kempetai** Jepang. Ke-

datangan tiga orang Jepang tersebut adalah untuk menanyakan tentang rencana rapat (upacara) yang akan diadakan di Lapangan Ikada itu, serta pula menanyakan apakah rapat itu nanti telah mendapat izin dari **Shicho** (Kepala Pemerintahan Kota Jakarta). Akhirnya, karena adanya hal-hal yang akan menyulitkan pelaksanaan upacara itu nanti, maka diputuskan bahwa rencana tempat upacara di Ikada di batalkan. Untuk selanjutnya diambil keputusan yaitu mengambil tempat upacara di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56, tempat kediaman **Bung Karno** pada waktu itu. 7)

Demikianlah dengan kurir-kurir yang segera dikerahkan untuk menghubungi organisasi-organisasi pemuda dan rakyat, akhirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diadakan di Pegangsaan Timur 56. Upacara tersebut dibuka oleh dr. Muwardi selaku Ketua Panitia Upacara, kemudian disusul oleh pembicara kedua yaitu Suwiryo (sebelum naskah Proklamasi dibacakan oleh **Bung Karno**). Suwiryo berbicara selaku Wakil Pemerintahan Kota. Selanjutnya disusul oleh **Bung Hatta** dan baru **Bung Karno** membacakan naskah Proklamasi. Dengan selesainya upacara Proklamasi tersebut maka selesai tugas Panitia Upacara itu.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan itu maka kalangan para pegawai di Balai Agung khususnya maupun rakyat Jakarta pada umumnya, ingin segera merealisasi adanya "Pemerintahan Balai Agung" Karena Jakarta adalah kota yang memegang peranan penting dalam perjuangan rakyat Indonesia, sebagai pencetus revolusi, serta sejalan dengan telah adanya pemerintahan Nasional Pusat yang berkedudukan di Jakarta, maka untuk pemerintahan daerah kota tersebut perlu adanya pemerintahan daerah yang bercorak nasional.

Demikianlah, pada tanggal 17/18 Agustus 1945 (malam), berlangsung suatu pertemuan yang diadakan di Jalan Prapatan 10 Jakarta (Asrama Mahasiswa Ika Daigaku). Pada pertemuan tersebut hadir antara lain : **Bung Karno**, **Bung Hatta**, **Suwiryo**, dan lain-lain pemuda. Pada pertemuan tersebut para pemuda mendesak **Suwiryo** untuk menjadi Walikota Jakarta dan merebutnya dari tangan Jepang, bersama-sama dengan pegawai-pegawai Balai Agung. 8)

Untuk mengambil-alih kekuasaan dari tangan para pejabat Jepang, maka di lingkungan pegawai Jakarta **Tokubetsu Shi** dibentuk tugas panitia yang diketuai oleh **Martoatmodjo**. Panitia ini bertugas untuk mengambil alih tanggung-jawab atas Jakarta **Tokubetsu Shi** dari tangan **Hasegawa** kepada **Suwiryo**.

Pada tanggal 7 September 1945 Panitia tersebut menyelenggarakan rapat besar yang dikunjungi oleh seluruh pegawai Jakarta **Tokubetsu Shi**. Rapat mengambil keputusan bahwa tanggung-jawab atas Jakarta **Tokubetsu Shi** harus segera diserahkan kepada **Suwiryo**. Pada malam harinya, pergilah suatu delegasi yang mewakili seluruh pegawai Jakarta **Tokubetsu Shi** ke rumah **Hasegawa** untuk meminta secara damai agar pembesar Jepang tersebut bersedia menyerahkan kekuasaan dan tanggung-jawab atas Pemerintahan Kota Jakarta ke-

pada Suwiryo. Permintaan tersebut ternyata tidak dikabulkan. Tetapi keesokan harinya serta hari-hari berikutnya Hasegawa tidak masuk ke Kantor Balai Agung lagi. Sebab itu beberapa hari kemudian jabatan **Tokubetsu Schichp** kemudian diambil-alih oleh Suwiryo dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretarisnya, sedangkan untuk selanjutnya nama Jakarta **Tokubetsu Shi** dsiganti dengan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Selanjutnya semua kepala Jawatan/Bagian berkumpul di ruangan Balai Agung mengangkat sumpah menyatakan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia serta kepada Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Dengan adanya perubahan pergantian pemerintahan kota tersebut kemudian semua bangsa Jepang mengundurkan diri dan tidak masuk bekerja lagi. 9)

Demikianlah, sementara sebelum ada penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, pimpinan atas pemerintahan daerah untuk kota Jakarta dijalankan oleh Suwiryo sebagai pimpinan umum, sedang wakilnya ialah Bagindo Dahlan Abdullah, dan Sekretaris-Kotanya, Suratno Sastroamidjojo. Akhirnya pada tanggal 29 September 1945 Suwiryo dengan resmi diangkat sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. 10) Dan sesudah itu pada tanggal 1 Oktober 1945 Walikota Suwiryo mengambil sumpah para kepala jawatan tertinggi untuk setia kepada Presiden Republik Indonesia. 11).

Bertepatan dengan pengangkatan Suwiryo secara resmi sebagai Walikota Jakarta itu, mendaratlah pasukan Serikat di Jakarta. Di Jakarta, Inggris sebagai wakil Serikat telah mendapatkan keadaan yang di luar dugaan semula. Walikota Suwiryo telah menguasai dengan "sempurna" kota Jakarta. Semua **public-utilities** seperti listrik, air, trem kota, telpon, malahan dinas pembuangan sampah juga telah ada di pihaknya.

Beberapa hari kemudian ternyata Brigadir Jenderal King, pimpinan militer Serikat untuk Jakarta, memerlukan tambahan listrik, saluran airnya perlu diperbaiki, gas dan telpon segera dipasang lagi, serta sampah-sampah yang telah tertimbun di rumahnya perlu dibersihkan atau dibuang. Di samping itu bahwa pasukan-pasukannya akan senantiasa memerlukan kerjasama dengan Pemerintah Kota. Bahkan pada pertemuan yang pertama secara otomatis Brigadir Jenderal King telah menyebut Walikota Suwiryo dengan kata-kata "Mr. Mayor". Sebagai kesimpulan bahwa hal itu sudah berarti pengakuan **de facto** atas Pemerintah Nasional Kota Jakarta. 12)

## 2. Pertumbuhan Otonomi Daerah

Tepat sebulan sebelum pelantikan Suwiryo sebagai Walikota tersebut, pada tanggal 29 Agustus 1945 pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), oleh Presiden Sukarno, yang mengambil tempat di Gedung Kesenian (sebelumnya disebut Gedung Komidi) Jakarta. 13) Komite Nasional tersebut sebetulnya dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI bersamaan dengan pembentukan BKR.

Menurut penetapan PPKI yang juga menetapkan UUD 1945, maka KNI dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Di samping itu bahwa Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dapat ditambahkan bahwa tugas Komite Nasional Indonesia itu juga harus memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite Daerah (KND)

Selanjutnya, setelah keluarnya keputusan PPKI itu, maka berangsur-angsur kemudian di berbagai daerah dibentuk KND, yaitu di propinsi, keresidenan, regentschap dan kota. Bahkan beberapa daerah KND dibentuk pula di desa-desa. Di daerah kota Jakarta dibentuk Komite Nasional pada tingkat Kawedanan dan kelurahan, yang berturut-turut dinamakan Komite Nasional Cabang dan Komite Nasional Indonesia Ranting. 14) Sebagai Ketua KND untuk Jakarta adalah Mr. Mohammad Roem.

Namun beberapa waktu kemudian kedudukan KND itu menimbulkan suatu persoalan, yaitu mengenai fungsi badan tersebut terhadap pemerintah daerah. Persoalannya, apakah badan itu merupakan suatu alat pemerintahan daerah atau bukan. Persoalan itu kemudian dibawa dan disidangkan untuk diperbincangkan oleh Komite Nasional Pusat, pada tanggal 30 Oktober 1945 dikeluarkan Pengumuman No. 2 mengenai Rencana Undang-Undang tentang kedudukan KND. Dalam pengumuman itu dinyatakan bahwa Badan Pekerja KNIP telah mengajukan sebuah rencana Undang-Undang kepada Presiden (sebagai usul) untuk mengatur kedudukan KND, sesuai dengan keadaan di pusat.

Usul Badan Pekerja itu disetujui oleh Pemerintah. Pada tanggal 23 Nopember ditetapkan Undang-Undang 1945/No. 1 Ketentuan dalam peraturan itu selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1. Komite Nasional Daerah diadakan, kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di Keresidenan, di Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Meteri Dalam Negeri.

Pasal 2. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya.

Pasal 3. Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang sebanyak 5 orang sebagai badan Eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu.

Pasal 4. Ketua Komite Nasional Daerah lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 5. Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah harus selesai dalam waktu yang selambat-lambatnya 14 hari. 15)

Kemudian oleh **Kementerian Dalam Negeri** Undang-Undang 1945/No. 1 itu diberi penjelasan mengenai tujuan Undang-undang tersebut. Penjelasan tersebut sebagai berikut : Tujuan yang pertama bagi diadakannya Undang-Undang 1945/no. 1 adalah untuk menarik kekuasaan pemerintahan dari tangan KND. Hal itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan :

- a. Semua KND dibentuk sebagai pembantu pemerintahan daerah di mana kekuasaan sipil, pangreh praja, polisi dan alat-alat pemerintahan lainnya masih di tangan Jepang.
- b. Setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang KND dalam prakteknya mengganti pangreh praja dan polisi di samping pangreh praja dan polisi sebenarnya yang menjadi pegawai RI.
- c. Dualisme yang demikian itu sangat melemahkan kedudukan dan kekuasaan pangreh praja dan polisi sebagai alat-alat pemerintahan yang resmi.

Oleh karena itu kini tiba waktunya untuk mengembalikan tugas pekerjaan KND itu kepada alat-alat pemerintahan yang sebenarnya. Selanjutnya, sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat yang sedang berkobar dan selekas mungkin diberi tempat, maka KND yang terdiri dari wakil-wakil segenap rakyat dijelmakan menjadi **Badan Perwakilan rakyat Daerah (BPRD)**.

Adapun wewenang Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) sebagai Badan Legislatif meliputi 3 (tiga) bagian :

- a. Kemerdekaan mengadakan peraturan-peraturan untuk kepentingan daerahnya (otonomi).
- b. Pertolongan kepada pemerintah atasan untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah itu (medebewind dan zelfgovernment).
- c. Membuat peraturan mengenai suatu hal yang diperintahkan oleh Undang-undang umum, dengan ketentuan bahwa peraturan itu harus disyahkan lebih dulu oleh pemerintah atasan (termasuk dengan otonomi dan zelfgovernment).

Pembatasan terhadap otonomi itu hanyalah asal tidak bertentangan dengan peraturan pusat atau daerah yang lebih tinggi. 16)

KND memilih di antara para anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk menjadi Badan Eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kepala daerah karena jabatannya adalah Ketua merangkap anggota badan ini. Dengan demikian badan eksekutif terdiri dari 6 orang. Dalam memutuskan sesuatu, apabila ternyata jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama, maka bila mengenai perseorangan keputusannya ditetapkan dengan undian; bila mengenai suatu hak usul itu dianggap tidak disetujui

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang otonomi maupun medebewind, Badan Eksekutif dan Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Komite Nasional Daerah.

Demikianlah, selanjutnya Ketua KND yang lama ditetapkan menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif maupun Badan Eksekutif. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan menjalankan kewajibannya, maka kedudukannya sebagai ketua badan legislatif diwakili oleh Wakil Ketua (Ketua KND lama), tetapi kedudukannya sebagai ketua badan eksekutif digantikan oleh Wakil Kepala Daerah (yaitu Wakil Residen, Patih atau Wakil Walikota). 17)

Untuk Jakarta sebagaimana telah diketengahkan di muka, sejalan dengan pembentukan Komite Nasional Daerah Kota Jakarta yang diketuai Mr. Mohammad Roem. Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam bidang desentralisasi tersebut di atas, maka fungsi dan susunan KND Kota Jakarta disesuaikan seperlunya menurut ketentuan yang baru itu.

Pada bulan April 1946 KND Kota Jakarta diresmikan menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun susunan anggota dari kelurahan-kelurahan di antaranya termasuk seorang Tionghoa, 2 orang dari Partai sosialis, 5 orang dari Partai Nasional Indonesia, 1 orang dari Barisan Buruh Indonesia, 2 orang dari golongan Arab, dan 4 orang dari perkumpulan sosial di antaranya seorang wanita.

Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari perlu dibentuk Badan Eksekutif. Untuk itu dipilih 5 orang dari anggotanya (anggota KND tersebut) yang kemudian mereka melakukan pemerintahan sehari-hari di bawah pimpinan walikota. Badan eksekutif yang pertama itu terdiri pula dari wakil-wakil: 2 orang dari Partai Sosialis, 1 dari PNI, 1 dari Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan 1 orang lagi dari Kelurahan. 18) Badan ini bersidang dua kali seminggu; yang untuk masa-masa menjelang akhir tahun 1946 diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu. Adapun anggota-anggota Badan Eksekutif pada waktu itu serta pembagian pekerjaannya, adalah :

1. T. Pamentjak - urusan umum dan ekonomi
2. J. Yahya - urusan pamong praja, sosial, polisi
3. Motik - urusan kesehatan, perhewan, keuangan
4. Iskandar - urusan pengajaran, agama
5. Supranoto - urusan penerangan, teknik, pemadam kebar. 19)

Untuk anggota BPRD Kota Jakarta sampai akhir tahun 1946 sudah mengalami perkembangan dan berjumlah 39 orang, di antaranya 28 orang dari kelurahan-kelurahan, 2 dari Partai Sosialis, 5 orang dari golongan Arab dan 4 orang dari perkumpulan sosial. Namun demikian apabila dilihat dari ketentuan jumlah anggota untuk kota Jakarta yang seharusnya 60 orang, maka pada saat itu berarti masih ada 21 tempat belum terisi. Baru pada akhir masa Pemerintahan Nasional Kota, jumlah anggota itu menjadi bertambah dengan wakil-wakil dari organisasi lainnya seperti Masyumi, golongan Kristen,

golongan Tionghoa dan lain-lainnya. dengan demikian sampai akhir masa Pemerintahan Nasional Kota jumlah anggota Badan Legislatif menjadi 54 orang, sedang anggota Badan Eksekutifnya ada 4 orang. Untuk nama-nama anggota Badan Legislatif adalah seperti terlampir ; sedangkan nama-nama anggota badan Eksekutif adalah : 20)

1. Nur St. Iskandar
2. J. Yahya
3. Supranoto
4. Burai

Demikianlah mengenai perkembangan jumlah anggota Badan Legislatif dan Badan Eksekutif untuk Pemerintahan Daerah Kota Jakarta selama masa Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Perlu diketengahkan di sini bahwa baik Badan Eksekutif maupun Badan Legislatif itu keduanya diketuai oleh Walikota Suwiryo. Di samping itu dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Suwiryo memegang pula pimpinan atas Korps Pamongpraja dan Kepolisian di kota Jakarta. 21)

### **3. Struktur Organisasi Pemerintahan "Pemerintahan Nasional Kota"**

Untuk mempelajari struktur aparatur Pemerintahan Nasional Kota Jakarta secara relatif lengkap, barulah dapat diperoleh setelah menjelang berakhirnya Pemerintahan Nasional Kota. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa di samping Pemerintahan Nasional Kota baru dalam taraf penyusunan aparat pemerintahannya, pada waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tata pemerintahan daerah. Undang-undang itu baru berhasil dikeluarkan pada tahun 1948 yaitu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948. 22). Dengan demikian dalam situasi kacau itu Pemerintahan Nasional Kota berada dalam taraf penyusunan, penyesuaian dan penyempurnaan aparat pemerintahannya. Karena itu struktur pemerintahannya baru dapat dikatakan relatif lengkap setelah menjelang akhir pemerintahannya. Adapun susunan organisasi pemerintahan menjelang berakhirnya Pemerintahan Nasional Kota tersebut (kira-kira bulan Mei 1947) adalah sebagai berikut : 23)

#### **I. Jawatan Sekretariat, meliputi :**

1. Sekretariat
2. Bagian Urusan Pegawai
3. Bagian Perbaikan Gedung Balai Agung
4. Bagian Penerangan
5. Bagian Mobil-mobil
6. Bagian Pajak
7. Bagian Urusan Surat-surat
8. Bagian Arsip
9. Bagian Kamar Ketik.
10. Bagian Pengiriman Surat.

## II. Jawatan Tata Keuangan, terdiri dari :

1. Bagian Perhitungan Keuangan
2. Bagian Keuangan Negeri
3. Bagian Alat-alat
4. Bagian Pemeriksaan Bendahari
5. Bagian Urusan Tanah
6. Bagian Urusan Air
7. Bagian Bendahari.

## III. Jawatan Pamongpraja, dibedakan dalam :

1. Pusat Pamongpraja
2. Pamongpraja Daerah-daerah

## IV. Jawatan Pendidikan dan Pengajaran

### V. Jawatan Kesehatan Kota

1. Kesehatan Kota
2. Budi Kemuliaan
3. Kesehatan Kota (Pegawai Negeri)

## VI. Jawatan Kesehatan Kehewan

## VII. Jawatan Teknik

## VIII. Jawatan Ekonomi

### IX. Jawatan Sosial

Demikianlah struktur organisasi pemerintahan untuk Pemerintahan Nasional Kota Jakarta di bawah pimpinan Walikota Suwiryo. Untuk jumlah/banyaknya pegawai semuanya (termasuk pamongpraja) ada 1410 orang. 24)

Dapatlah dimengerti di sini mengenai personalia Jawatan Sekretariat cq. Bagian Sekretarisnya. Sengaja dikemukakan mengenai bagian ini, karena pada hakikatnya orang-orang itulah yang memegang/mengendalikan roda pemerintahan sehari-hari di masa suasana yang kacau itu. Berdasarkan **besluit** Kepala Pemerintahan Nasional Kota **Jakarta** tanggal 13 Januari 1947, personalia Bagian Sekretariat adalah : 250

1. R. Suwiryo
2. H.B. Dahlan Abdullah
3. R. Achmadsyah Sastrawinangun
4. Mr. Roosdiono
5. N.J.J. Woworuntu
6. H. Bastoni
7. Sumarsono Sastrosendjojo
8. R.M. Wiriadinata
9. J.T. Salim

10. R Achmad
11. N Harnah
12. Roro Djumunah
13. Husen
14. R. Roosman.

Adapun susunan pegawai/pekerja secara lengkap dari Pemerintahan Nasional Kota dapat dilihat pada **Arsip Balai Kota**, (arsip Bagian Urusan Pegawai Pemerintahan Nasional Jakarta, bertanggal 3 Mei 1947), **footnote** no. 23.

Dilihat dari sudut surat permintaan pihak Gubernur Jawa Barat dengan surat-surat susulannya sebanyak dua kali (surat susulan yang kedua adalah surat telegram), maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sampai akhir tahun 1946 atau awal 1947 pihak Pemerintahan Nasional Kota Jakarta belum menyusun daftar susunan pegawai/pekerja yang lengkap dan sempurna dalam arti yang sebenarnya. Baru kemudian pada tanggal 3 Mei 1947 permintaan Gubernur Jawa Barat tentang susunan pegawai Pemerintahan Nasional Kota dapat dikirimkan, meskipun satu macam permintaan yang lain belum dapat dipenuhi, yaitu tentang daftar susunan pegawai (formasi) yang menurut pertimbangan Walikota perlu ditetapkan.

Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dimengerti oleh karena keadaan waktu itu bagi Pemerintah Nasional Kota Jakarta lebih banyak diisi oleh kekacauan-kekacauan. Sehingga Pemerintahan Nasional Kota lebih banyak terlibat konsentrasi perjuangan politik. Oleh karena itulah permintaan pihak Gubernur Jawa Barat baru dapat dipenuhi pada bulan Mei 1947, jadi sudah menjelang akhir Pemerintahan Nasional Kota.

Mengenai daerah kekuasaan bagi Pemerintahan Nasional kota Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, tentang daerah Republik Indonesia. Penetapan itu adalah yang kemudian dipakai sebagai dasar bagi daerah kekuasaan Pemerintah Nasional Kota Jakarta khususnya. Dalam hubungan ini yang penting dari penetapan PPKI tersebut adalah penetapan no. 2 dan no. 3, sebagai pasal-pasal dari Aturan Tambahan. 26). Penetapan yang dimaksud berbunyi sebagai berikut. Bahwa untuk sementara waktu kedudukan Kochi dan sebagainya serta kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan seperti sekarang (pada waktu itu). 27)

Demikianlah, oleh karena kedudukan kota Jakarta pada waktu itu adalah seperti selama Panitia Persiapan Kemerdekaan menyusun penetapannya, maka dengan sendirinya untuk kota Jakarta tersebut masih berlaku kedudukan seperti kota Jakarta pada waktu zaman Jepang, yaitu Jakarta Tokubetsu Shi. Berarti pula untuk Pemerintahan Nasional Kota Jakarta wilayahnya sama dengan wilayah pada waktu kota itu di bawah pemerintahan balatentara Jepang. Dan memang selama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta,

mengenai wilayah pemerintahannya tidak ada perubahan. 28)

Namun demikian, dapatlah dikemukakan tentang wilayah kekuasaan pemerintahannya yang terbagi atas 7 Pamongpraja Daerah (yang masing-masing dikepalai oleh seorang Wedana), dengan 36 Kelurahan. Ketujuh Pamongpraja Daerah dan wilayah kelurahannya itu ialah : 29)

**I. Pamongpraja Daerah Mangga Besar :**

1. Kelurahan Mangga Besar
2. " Kebon Jeruk
3. " Pasar Baru/Gunung Sari
4. " Kebon Kelapa

**II. Pamongpraja Daerah Penjaringan :**

5. Kelurahan Angke Duri/Jembatan Lima
6. " Penjaringan
7. " Krukut
8. " (Bangsa Arab).

**III. Pamongpraja Daerah Tanjung Priok :**

9. Kelurahan Jembatan Tinggi
10. " Sunter (Ancol)

**IV. Pamongpraja Daerah Petamburan :**

11. Kelurahan Petojo
12. " Slipi
13. " Jati
14. " Palmerah

**V. Pamongpraja Daerah Gambir :**

**15. Kelurahan Gambir**

15. Kelurahan Gambir
16. " Menteng
17. " Tanah Abang
18. " Karet
19. " Tionghoa (Gambir)

**VI. Pamongpraja Daerah Pasar Senen :**

20. Kelurahan Pasar Senen
21. " Kemayoran (Cempaka Putih)
22. " Kemayoran
23. " Tanah Tinggi
24. " Kramat
25. " Salemba
26. " Rawasari
27. " Tionghoa (Pasar Senen)

**VII. Pamongpraja Daerah Jatinegara**

28. Kelurahan Matraman
29. " Solitude
30. " Balimeester

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 31. | " | Pisangan        |
| 32. | " | Rawabangke      |
| 33. | " | Bidaracina      |
| 34. | " | Melayu Besar    |
| 35. | " | Utun Kayu       |
| 36. | " | Jati Rawamangun |

Demikianlah wilayah pemerintahan Nasional Kota Jakarta pada waktu itu, yang sebetulnya wilayah itu adalah kelanjutan pemerintahan Jakarta **Tokubetsu Shi** pendudukan Jepang. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa dalam struktur pemerintahannya tidak terdapat kedudukan Camat seperti sekarang. Untuk tugas sehari-hari maka **wedana** langsung berhubungan (membawahi) para **lurah**. Di samping itu pada daftar adanya kelurahan-kelurahan tersebut di atas terdapat Kelurahan Tionghoa. Memang semula status kelurahan untuk orang-orang Tionghoa disendirikan, tetapi kemudian status adanya kelurahan-kelurahan Tionghoa tersebut ditiadakan (dalam arti kemudian tidak mempunyai kedudukan tersendiri). Dengan demikian segala masalah yang menyangkut orang-orang Tionghoa berada bersama-sama dalam pengaturan kelurahan-kelurahan yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 30).

#### 4. Pemerintah Rangkap di Jakarta

Tentara Serikat yang mendarat di **Jakarta** pada akhir September 1945 kemudian menduduki beberapa bagian wilayah kota dan menimbulkan kekacauan-kekacauan di **Jakarta**. Dengan mendaratnya tentara pendudukan Serikat di Jakarta, kemudian di kota Jakarta terdapat dua buah pemerintahan, yaitu Pemerintahan Nasional Kota dan Pemerintahan Militer Serikat. **Demikianlah**, maka di Jakarta dengan sendirinya terdapat dua pusat pemerintahan yakni Balai Agung sebagai pusat Pemerintahan Nasional Kota dan Markas Besar Tentara Serikat (yang terletak di Jln. Merdeka Timur 13), sebagai pusat Pemerintahan Militer Serikat.

Adanya **Pemerintahan** Militer Serikat tersebut adalah berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal DC Hawthorn Panglima Tentara Serikat di Jawa, Madura dan Bali - Lombok pada tanggal 31 Oktober 1945. Dengan maklumat itu kota Jakarta berada di bawah pemilikan Pemerintahan Militer Serikat, dengan batasbatasnya :

- di sebelah Barat dengan Banjir Kanal
- di sebelah Selatan dengan Banjir Kanal - jalan Kereta api dari Barat ke Timur, termasuk pula bagian Jatinegara sebelah Selatan.
- di sebelah Timur dengan Kali Buaran dan Kali Cakung terus ke Utara.
- di sebelah Utara dengan Tanjung Priok dan Kampung Koja. 31)

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kedatangan Serikat itu bertugas untuk melucuti bala-tentara Jepang dan mengurus pembebasan/pengambil-alihan Allied Prisoners of War and Interness (APWI), yaitu tawanan perang Serikat. Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta khususnya tidaklah demikian. Tentara Serikat yang diwakili Inggris telah **terikat** oleh suatu perjanjian dengan Belanda yaitu "Civil Affairs Agreement" tanggal 24 Agustus 1945. Isi perjanjian itu ialah bahwa Inggris setuju akan membantu Belanda dalam usaha mendapatkan wilayah Hindia Belanda kembali, setelah dibebaskan dari tangan Jepang. Untuk sementara waktu sebagai fase pertama akan dilangsungkan suatu Pemerintahan Militer Serikat (dalam hal ini di Jakarta khususnya) dengan dibantu oleh Netherlands Indies Civil Affairs-Officere (pejabat-pejabat pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang akan mengurus pemerintahan sipilnya.

Karena perjanjian itulah dibelakang tentara pendudukan Serikat yang mendarat di Indonesia, membongceng pula alat perlengkapan NICA yang berusaha keras menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak akhir September 1945 pemerintahan Nica terdiri dari **CCO-Nica** (Chief Commanding Officer Nica) yang merangkap jabatan Gubernur dan pejabat CO-Nica yang melakukan tugas kekuasaan Residen serta Sub CO-Nica (Sub Commanding Officers Nica) yang menyarankan fungsi **asisten residen**.

Pada awal Nopember 1945 Nica diganti dengan **Allied Military Administration Civil Affairs Branch** (disingkat **AMACAB**). 32 Pejabat-pejabat organisasi pemerintahan ini terdiri dari **CCO-Amacab** (**Chief Commanding Officers Amacab**) yang merangkap jabatan gubernur dan beberapa **CO-Amacab** (**Commanding Officer Amacab**) yang menjalankan tugas kekuasaan residen.

Demikianlah untuk kota akarta kemudian diadakan suatu **CO-Amacab** (**Commanding Officer Amacab**) yang menjalankan tugas kekuasaan residen.

Demikianlah untuk kota Jakarta kemudian diadakan suatu **CO-Amacab Batavia**. Pemerintahan Amacab ini mengurus pula soal-soal :

- a. keamanan
- b. pembagian bahan makanan (distribusi)
- c. mengadakan peraturan-peraturan tersendiri dalam lapangan keamanan dan lain-lain.

Di samping itu oleh pihak Amacab dilakukan pula pengangkatan-pengangkatan pejabat pamongpraja.

Dengan adanya pemerintahan Amacab ini, maka di Jakarta terjadi dua pemerintahan atau **pemerintahan rangkap**, yang masing-masing kemudian bersaing dalam menjalankan pemerintahannya. Karena itulah jalannya Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dalam mengatur rumah-tangganya (rumah tangga daerahnya) menjadi tidak begitu lancar. Maka kemudian diadakan kerjasama antara

Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dengan Pemerintahan Militer Serikat, untuk merundingkan dan memecahkan masalah serta kepentingan penduduk dalam kota.

Demikianlah pada tanggal 21 November 1945 dibentuk sebuah Panitia Penghubung (**Contact Committee**) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pemerintahan Nasional Kota dan Pemerintahan Militer Serikat. Adapun wakil-wakil dari pihak Pemerintahan Nasional Kota antara lain duduk Suwiryo (Walikota) dan beberapa pejabat-pejabat lain seperti Ketua Komite Nasional Daerah, Ketua Persiapan Tentara Keamanan Rakyat kota Jakarta, dan lain-lain. Dapat dikatakan panitia ini sedikit banyaknya telah membawa hasil yaitu adanya saling pengertian yang baik antara kedua belah pihak dan usaha-usaha ke arah kerjasama yang baik seperti dalam masalah pembentukan **Civil Police** dan **Rural Police**.<sup>33</sup> Demikian pula antara Polisi Militer Serikat (**Allied Military Police**) dan Kantor Besar Polisi diadakan permusyawaratan bersama; sebagai hasilnya disetujui bahwa **Military Police** dan Polisi Republik Indonesia akan mengadakan kerjasama satu sama lain tidak saling membawahkan.<sup>34</sup>

Mundurinya tentara Inggris dari Indonesia (30 November 1946) khususnya di Jakarta, tidaklah berarti bahwa Pemerintahan Nasional Kota adalah satu-satunya pemerintahan yang ada; akan tetapi pemerintahan rangkap tetap berlangsung. Pada waktu itu Belanda telah dapat memperkokoh kedudukannya di Indonesia, terutama di Jakarta. Pihak Belanda lah yang menggantikan kedudukan Pemerintahan Serikat di Indonesia, di Jakarta amacab digantikan oleh **Tijdelijke Bestuursdienst Hindia Belanda**. Demikian pula pejabat CO-amacab di Jakarta digantikan oleh suatu **Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst**.<sup>35</sup>

Selanjutnya antara Indonesia dan Belanda dibentuk suatu "**Joint Committee**" dan terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. **Joint Committee for the truce**
2. **Joint Committee for Political Truce application**
3. **Joint Committee for Civil Affairs**.

Di samping itu diadakan sub-sub Panitia Daerah yang harus menghadapi soal-soal khusus yang timbul karena adanya **truce** tersebut. Hal itu ditempuh oleh pemerintah kita dalam usahanya agar dalam suatu daerah hanya ada "satu kekuasaan" yang diakui oleh rakyat dan diakui oleh penduduk daerah itu. Adapun anggota-anggota dari Urusan Pemerintahan Sipil Pusat dari pihak kita terdiri dari Mr. Latuharhary sebagai Ketua, dan anggota-anggotanya ialah : Suwiryo (Walikota), M. Sutardjo Kartohadikusumo dan Sultan Yoga.

Di dalam suatu pertemuan dari komisi ini pada tanggal 2 Desember 1946 diputuskan bahwa untuk kota Jakarta dibentuk suatu Panitia Daerah (**Locale Commissie**) Urusan Pemerintahan Sipil. Langkah itu diambil untuk melenyapkan kesukaran-kesukaran (jalannya pemerintahan) di dalam kota Jakarta Anggota-anggota Panitia Daerah ini, dari pihak Indonesia terdiri dari : Ketua, Suwiryo

dengan anggota-anggotanya : Yusuf Yahya, Mr. Supangkat; Sekretaris, M. Bustomi; sedang dari pihak Belanda terdiri dari : Ketua Mr. Ysbaert, anggota-anggotanya Drs. Bogaart dan Van der Veen; Sekretarisnya A.M. Venselaar.36)

Usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak Indonesia dengan Belanda itu ternyata tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Meskipun pada tanggal 25 Maret 1947 telah ditandatangani Perseutujuan Linggarjati, tetapi di Jakarta tetap berlangsung pemerintahan rangkap bahkan pihak Belanda setapak demi setapak meluaskan daerah kekuasaannya dengan membentuk badan-badan resmi, serta pelbagai usaha dalam mencapai tujuan melenyapkan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

### **5. Keadaan Keamanan di Jakarta**

#### **a) Kepolisian dan Pengadilan menjadi sasaran utama**

Sebagai peningkatan terhadap pembentukan BKR, pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintahan mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat keamanan negara.37) Sehubungan dengan itu di Jakarta diadakan panggilan terhadap para pemuda bekas Peta, Heiho, Kaigun Heiho, KNIL, Hizbullah, Barisan Tani, Barisan Pelopor, para pelajar dan mahasiswa, untuk masuk menjadi anggota TKR. 38) Sambutan dari para pemuda cukup besar dan membanjir; bahkan melebihi dari maksimum yang diperlukan pada waktu itu. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 7 oktober 1945 di Jakarta, terbentuklah TKR yang diharapkan, dengan dilantikannya Resimen Tentara untuk daerah Jakarta.

Untuk Jakarta terdapat dua resimen TKR; tetapi kemudian kedua resimen itu harus berpisah disebabkan masing-masing harus berpindah ke tempat lain sebagai markasnya yang baru. Resimen I yang berada di bawah pimpinan Mayor Singgih dipindahkan ke Tangerang, sedangkan Resimen II yang berada di bawah pimpinan Mayor Muffreini pindah ke Cikampek.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 19 November 1945 Pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat yang menyerukan agar supaya anggota-anggota TKR seluruhnya ditempatkan/dipusatkan di daerah-daerah perbatasan kota, dan mengosongkan kota Jakarta, 39) karena kota Jakarta diumumkan sebagai "kota diplomasi". Segera maklumat itu dilaksanakan; tetapi untuk pelaksanaannya bagi TKR Jakarta mengalami kesukaran, terutama dalam hal memindahkan alat-alat ke luar kota Jakarta telah dijaga oleh tentara-tentara Serikat dan Belanda. Dalam hal ini peranan para pemuda dan pemudi Jakarta dan juga Palang Merah Indonesia (PMI) cukup besar. Oleh merekalah senjata-senjata serta peralatan lainnya berhasil diselundupkan lolos secara ilegal ke luar kota. Demikianlah karena adanya perintah pengosongan kota Jakarta sebagai kota diplomasi, maka kemudian tugas-tugas keamanan dilakukan oleh para pemuda.

Sebagai perbatasan untuk daerah yang berada di bawah kekuasaan Serikat (yang menggunakan undang-undang perang) dengan daerah Republik yang menjadi daerah kekuasaan TKR sebagai penjaga keamanan ialah Kali Cakung. Namun kenyataannya demakrasi itu dilanggar sendiri oleh Serikat. Pada bulan Desember 1945, tentara Inggris dengan pasukan tank yang lengkap dengan alat-alat senjata modern, menyerbu menuju Bekasi. Hal itu memberi inspirasi pujangga muda Chairil anwar yang pada waktu itu berada di daerah pertempuran, melukiskan dengan sajaknya yang penuh semangat pengabdian, yaitu "Karawang Bekasi".

Untuk menuju penyerbuan itu pihak Serikat menciptakan perang urat syaraf seperti :

- a. dengan melewati tapal batas supaya disergap oleh tentara kita
- b. dengan kesatuan-kesatuan kecil mengganggu daerah pedalaman kemudian membakar rumah-rumah rakyat, merusak panen padi dan mengganggu perjalanan kereta api
- c. melewati garis pertempuran di mana tentara kita tidak ada
- d. menyiapkan kekuatan lengkap. untuk selanjutnya menyerbu Bekasi. 40)

Selanjutnya perlu diketengahkan mengenai organisasi keamanan di Jakarta yang justru menjadi sasaran pertama dari pihak Belanda untuk dikuasai. Organisasi keamanan yang dimaksud itu ialah Kepolisian Negara. Setelah Proklamasi Kemerdekaan segera para pemuda Indonesia di Jakarta mengambil-alih tugas kepolisian dengan menduduki markas-markas Polisi. Dalam hal pengambil-alihan ini ternyata terpaksa dipakai cara kekerasan, karena terdapat juga anggota kepolisian Jepang yang tidak mau menyerahkannya. Sebagai contoh. di Detasemen Polisi Cililitan Besar terpaksa peristiwa tersebut terjadi yang mengakibatkan banyak anggota Polisi menjadi korban. Untuk selanjutnya tugas-tugas kepolisian berada di tangan bangsa Indonesia, yang sejalan dengan itu di kampung-kampung dibentuk BKR-BKR; hal ini membantu tugas-tugas penjagaan.

Segera setelah Serikat datang, pada tanggal 30 September 1945 diadakan perundingan mengenai pembagian tugas yang menyangkut bidang kepolisian dengan Republik. Dalam perundingan itu pihak Serikat diwakili oleh van der Plas (Belanda) sedangkan untuk pihak Republik diwakili Sosrodanukusumo, Kepala Kantor Besar Polisi. Perundingan tersebut diadakan di Markas Besar Serikat Gambir Timur 13. Dalam perundingan itu van der Plas gagal membujuk pihak Polisi Republik untuk memihak kepadanya. Kegagalan itu terutama karena Sosrodanukusumo menyerahkan persoalan itu kepada Pemerintah RI. Dari peristiwa itu nampak jelas bahwa kepolisian adalah alat negara RI yang pertama-tama akan dikuasai.

karena Belanda gagal membujuk Kepolisian Republik untuk memihaknya, maka pihak Belanda kemudian mengambil jalan lain.

jalan kekerasan. Dengan dibantu oleh pasukan Inggris yang bersenjata ringan, mereka mendatangi Kantor Besar Polisi menuntut penyerahan kamar senjata. 41) Pada waktu itu Polisi Republik yang berada di Kantor markas Besar itu hanya berjumlah kurang lebih 50 orang saja. Karena jumlah pasukan Inggris dan Belanda jauh lebih besar daripada orang-orang Republik yang ada, maka akhirnya tuntutan itu tidak dapat dielakkan. Demikian juga peristiwa yang sama terjadi di markas polisi yang lain. Markas Polisi di Prapatan tidak luput dari serbuan yang sama, selanjutnya diduduki oleh pasukan Inggris dan Belanda.

Pada tanggal 29 Desember 1945 semua kantor polisi di Jakarta dengan tiba-tiba diserbut secara serentak oleh pasukan Inggris dan Belanda. 42) Semua Polisi dilucuti dan seterusnya dikumpulkan di Markas Besar Polisi untuk beberapa waktu. Sebagai akibat daripada tindakan Inggris yang demikian itu selanjutnya oleh Serikat dibentuk Civile Police (CP). 43) Dalam hal ini di Jakarta terdapat Polisi Indonesia dan Polisi Belanda, sedangkan pihak Inggris sebagai peneungannya. Kantor Besar Polisi kemudian terpaksa dibagi dua, sebagian untuk Polisi Indonesia dan sebagian untuk Polisi Belanda. Dengan komposisi kepolisian yang demikian itu, maka di Jakarta kemudian terdapat tiga unsur kepolisian, yakni Indonesia, Belanda, dan Inggris. Dengan adanya tiga unsur itu maka organisasi itu bersifat internasional; sebab itu untuk selanjutnya di Jakarta dikenal Polisi Internasional.

Sebelum terbentuknya Polisi Internasional untuk Jakarta itu, dalam kota tersebut hanya ada dua alat keamanan (polisi), yaitu Polisi RI dan Military Policy Serikat, yang satu sama lain tidak saling membawahkan. Tetapi karena perkembangan situasi yang sejalan dengan strategi diplomatik di tingkat pemerintahan pusat, maka tugas kepolisian untuk Jakarta mulai berangsur-angsur terdapat peranan Belanda di dalamnya. Dengan terbentuknya Polisi Internasional itu, maka Belanda mempunyai polisi yang berkedudukan sama dengan Polisi RI. Meskipun demikian sampai saat itu Polisi Indonesia masih mempunyai kekuatan.

Pemerintahan Nasional Kota dalam hubungannya dengan Polisi Indonesia sebagai anggota Polisi Internasional, mempunyai kurang-lebih 300 orang pegawai polisi. Dalam persenjataan, pakaian seragam (uniform) dan kendaraan, menjadi tanggungjawab Serikat.

Ketentuan-ketentuan mengenai daerah wilayah Polisi Internasional (CP) tersebut, yang bermarkas di Gambir Barat, bekas Kantor Besar Polisi dahulu, ialah daerah AMA (**Allied Military Administration**) yang batas-batasnya sebagai berikut :

- di sebelah utara : Laut Jawa
- di sebelah barat : Jln. Kereta Api Tanah Abang - Kota dan Jln. Jati Petamburan.
- di sebelah selatan : Banjir Kanal - Jln. Halimun Jln

Kawi - Jln. Payakumbuh - Jln. Kebayoran - Kerkstraat.  
- di sebelah timur : Kerkstraat - Jln. Yap Jened - Jln. Ke-  
reta api Jatinegara - Jln. Kramat — Jln. Kalibaru Timur - Kali  
Sunter - Jln. Kereta api Kota - Tanjung Priok dan juga termasuk  
daerah Pelabuhan. 45)

Daerah-daerah CP tersebut dibagi dalam 6 (enam) Seksi yaitu :

- Seksi A : Tanjung Priok
- Seksi B : Penjaringan
- Seksi C : Pasar Baru
- Seksi D : Tanah Abang
- Seksi E : Gambir
- Seksi F : Jatinegara

Adapun batas-batas masing-masing Seksi adalah sbg. berikut :

**Seksi a** ; Daerah Tanjung Priok - melalui Jln. Kereta api Tanjung  
Priok - Kota sampai ancol.

**Seksi b** : Kali Sunter - Kemayoran Gempol - Vliegvelddlaan -  
Schoolweglaan - Gunung Sahari Kanal - Tanjung Priok Kanal.

**Seksi C** : Jln. Ancol - Molenvliet Timur - Jln. Ketapang - Jln.  
Kereta Api Tanah Abang Kota.

**Seksi D** : Gg. Ketapang — Molenvliet Barat - Rijsweg - Postweg  
- Schoolweg - Vliedvelddlaan - Kemayoran Gempol - Kalibaru Timur -  
Kramatplein - Prapatan - Oud Tamrindelaan - Jln. Kebonjati Jem-  
batan Tinggi - Gg. harian Banjir Kanal.

**Seksi E** : Jati Petamburan - Jembatan Tinggi - Jln. Kebonjati -  
Oud Tamrindelaan - Prapatan - Kramatplein - Jln. Kereta Api Kra-  
mat - Jatinegara - Jln. Anyer - Jln. Sindanglaya - Banjir Kanal.

**Seksi F** : Banjir Kanal - Jln. Sindanglaya - Jln. Anyer - Oranye  
Loulevaard - GangTengah - Jln. Kereta Api Jatinegara - Kramat -  
Jln. Yap Jened Kerkstraat - Jln. Kebayoran - Bukitduri Tanjakan -  
Jln. Payakumbuh - Jln. Kawi - Jln. Halimun - Banjir Kanal.

Tiap-tiapseksi terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian Indonesia dan  
bagian Belanda; dan mempunyai 2 (dua) ranting, satu ranting di-  
urus oleh cp Indonesia dan yang satu lagi diurus oleh CP Belanda.

Maksud utama pembentukan Polisi Internasional tersebut  
adalah supaya tiap bangsa (di Jakarta) dapat diurus oleh bangsanya  
sendiri. Misalnya jika pihak CP Belanda menangkap seorang Indo-  
nesia dalam persoalan kepolisian, maka orang tersebut (tersangka)  
akan diserahkan kepada pihak CP Indonesia. Demikian pula sebalik-  
nya, apabila pihak CP Indonesia menangkap seorang Belanda maka  
penyelesaian perkaranya diserahkan kepada CP Belanda. Untuk  
orang-orang Tionghoa dan Arab untuk sementara diurus oleh CP  
Indonesia. 46).

Dalam hal pakaian, baik CP Belanda maupun CP Indonesia  
mempunyai pakaian yang sama; kemeja dan celana panjang warna  
abu-abu, memakai topi. Tanda-tanda lain yang menunjukkan ke-  
bangsaan tidak diperbolehkan lagi; sebagai penggantinya pada baju

CP tersebut memakai tulisan CP. Kesulitan yang dirasakan bagi penduduk Jakarta adalah adanya kaki tangan Nica - Inlander yang juga memakai pakaian serupa, hanya saja mereka tidak memakai band. Dan perlu diketahui bahwa justru Nica di Jakarta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Polisi Internasional, mereka tetap melakukan provokasi-provokasi. Karena itu penduduk sulit membedakan mana lawan dan mana kawan. 47) Dalam hubungan ini Pihak Nica sering menggunakan fasilitas Serikat, seperti serdadu India untuk mengadakan perampokan, memakai kendaraan bertanda RAPWI dan sebagainya.

Adanya pemerintahan rangkap di Jakarta, maka untuk kota Jakarta terdapat 2 (dua) buah pengadilan, yaitu Pengadilan republik dan Pengadilan Belanda. Selanjutnya setelah pihak Serikat - Inggris melihat hasil usahanya mengembalikan kekuasaan Belanda di Jakarta mulai nampak, maka adanya 2 (dua) pengadilan tersebut, yang bagi RI sebenarnya merupakan kerugian besar, dihapuskan samasekali dan diganti dengan 1 (satu) Pengadilan Serikat. Pengadilan Serikat itu mulai berlaku terhitung tanggal 12 agustus 1946. Dengan keputusan dari pihak Serikat tersebut mulai tanggal 12 Agustus 1946 itu Pengadilan Negara RI di kota Jakarta oleh Serikat tidak diakui lagi. Sedangkan landasan hukum yang dipakai oleh pengadilan itu adalah Undang-undang Belanda.

Dalam hal ini Serikat menulis surat secara resmi yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Mr. Suwandi. Isi suratnya meminta kepada Pemerintah RI agar pengadilan kita mulai tanggal 12 Agustus 1946 ditutup saja. Sebagai alasannya dikemukakan supaya daerah yang diduduki Serikat itu jangan sampai ada kebingungan dengan adanya 2 macam pengadilan, yaitu Pengadilan Republik dan pengadilan Belanda. 48)

Sehubungan dengan penutupan pengadilan RI di Jakarta itu, pada tanggal 6 Agustus (sebelum berlakunya keputusan itu) terjadilah suatu resolusi bersama antara Masyumi, Partai Sosialis dan PNI Cabang Jakarta. Resolusi itu menyatakan protes terhadap maksud Serikat untuk menutup pengadilan RI di Jakarta dan menggantinya dengan pengadilan Amcab. Mengharap supaya tindakan tersebut ditunda sampai selesainya perundingan Indonesia - Belanda. 49)

Resolusi bersama 3 (tiga) buah partai tingkat Cabang Jakarta itu kemudian disusul oleh protes Pemerintah RI terhadap Serikat, melalui Menteri Luar Negeri RI yang ditujukan kepada Markas Besar Tentara Serikat. Menteri Luar Negeri RI menyatakan bahwa dengan adanya hanya satu pengadilan di daerah Serikat itu yang berdasarkan undang-undang Belanda, berarti akan merobah kedaulatan Indonesia; hal itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kepentingan-kepentingan. 50)

Langkah penutupan RI di Jakarta itu dilakukan karena pihak Serikat Inggris mempunyai perhitungan bahwa Belanda telah mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di samping itu Inggris sendiri

sedang dalam persiapan-persiapan untuk menarik semua pasukannya dari Indonesia. Dalam hal ini ofensif-ofensif bulan-bulan sebelumnya dipakai Inggris sebagai ukuran dalam menilai kekuatan Belanda.

b) Ofensif-ofensif tentara Serikat/Belanda di Jakarta

Dapatlah dimengerti kiranya bahwa keadaan di Jakarta pada waktu itu tidak terjamin samasekali. Di samping penduduk menghadapi keganasan tindakan pihak Jepang, di pihak lain penduduk dikacau oleh Nica dan Serikat-Inggris. Dapat dikatakan bahwa justru dari pihak Nica dan Inggris itu tidak kurang kejamnya di Kebayoran selama 8 hari (dari 11 sampai 18 Oktober 1945), terjadi pengacauan yang (dilakukan) oleh pihak Nica. Mereka mengadakan perampokan dan melancarkan tembakan terhadap penduduk yang berada di Pasar Kebayoran. Pada peristiwa itu pihak Nica menderita korban 3 orang tewas, sedang dari pihak penduduk terdapat 1 orang meninggal dunia. Perlu dicatat pula bahwa dalam pertempuran itu 4 orang wanita kita turut mengadakan perlawanan. 51)

Pada tanggal 15 Oktober 1945 dengan menggunakan kendaraan Palang Merah pihak Nica datang menangkap Wedana Cawang yang pada waktu itu sedang mengurus korban mayat akibat pertempuran yang terjadi di sebelah kawedanan. Wedana tersebut kemudian di bawa ke markas Cililitan dan mendapat perlakuan yang tidak wajar. Setelah itu baru dikembalikan dengan menggunakan kendaraan RAPWI. Di samping Nica tersebut melakukan penangkapan terhadap Wedana Cawang, mereka juga mengadakan perampasan persediaan makanan yang disimpan di Kawedanan. 52)

Menurut hemat kita, bahwa Nica bermaksud ingin mendapatkan perhatian rakyat; untuk supaya rakyat takut dan segera memihaknya maka wedananya ditangkap. Nica mencoba melakukan tindakan psikologis, namun semua langkah yang telah diambil itu meleset dari perhitungannya. Di mana-mana setiap tindakan pengacauan selalu mendapat perlawanan. Tindakan psikologis lain yang telah ditempuh ialah melakukan intimidasi terhadap rakyat Jakarta (dalam hal ini ditujukan terhadap penduduk daerah Menteng). Pada tanggal 31 Desember 1945 mereka melakukan penyebaran pamflet yang isinya :

"Waktoe malam orang-orang haroes menjingkirkan diri dari sini, karena kota maoe dibom dari oedara kalaoc penghambat-penghambat jalan tidak dibocang didalam tempo satoc djam dan oentoek mendjaga keselamatan pendoedock jang tidak bersalah haroeslah keloe ar dari sini sekoerang-koerangnya 1 km" 53.

Selanjutnya sebagaimana sikap para pemuda serta rakyat Jakarta yang tidak takut akan adanya ancaman-ancaman dari pihak Nica-Belanda, maka sikap itu telah dibuktikan pada peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Medan Senen". Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945, di mana pihak Republik telah

membayarnya dengan korban seorang anggota polisi Indonesia yang pada waktu itu terkenal di hati rakyat dengan sebutan Pahlawan Muda **Senen Mat Sukur**. Ia tewas tertembak oleh Nica yang menggunakan serdadu India. 54)

Pada hakekatnya memang Proklamasi Kemerdekaan itu didukung oleh seluruh rakyat. Perjuangan untuk mempertebal semangat rakyat dilakukan dimana-mana, termasuk juga di mesjid. Salim bin Jendan di depan para Ulama, Kyai dan orang-orang Muslim bertempat di Mesjid Matraman, pada awal Januari 1946 dengan tugas menyerukan agar tetap setia pada Republik dan tidak memihak Nica. 55)

Pada awal Januari 1946 Nica membakar ratusan rumah penduduk Jatinegara, sehingga banyak penduduk yang tewas dan luka-luka. Selain terhadap penduduk Jatinegara Nica juga membuat keonaran dan melepaskan tembakan-tembakan di Jln. Kemuning, Pasar Mede Jatinegara. Dengan menggunakan truck yang berisi serdadu-serdadu Nica melakukan tembakan-tembakan terhadap orang-orang yang sedang berjalan tanpa pandang bulu. 56)

**Kekacauan dan pertempuran seterusnya terjadi di mana-mana. Di Cilincing pada tanggal 21 April 1946, penjaga pantai Indonesia dengan tiba-tiba diserang oleh Nica, Nica - Inlander dan Gurkha yang bersenjata lengkap. Mereka datang pada malam hari dengan menggunakan 5 buah truk. Serangan berlangsung mulai pukul 11.00 pagi dan baru berakhir pada pukul 14.00 siang karena ketabahan para pemuda penjaga pantai yang berhasil memukul mundur terhadapnya. Kekalahan Nica itu membuatnya mereka membabi buta sehingga sambil mereka mundur mereka membakar 10 rumah penduduk yang tidak bersalah. Dalam pertempuran itu 2 orang pemuda tewas dan 1 orang luka-luka. 57)**

Nampak bahwa mulai tahun 1946 itu keadaan di Jakarta mulai berubah. Nica - Belanda dan tentara Inggris (Serikat) telah memperoleh kedudukan yang mantap. Pada waktu itu pusat Pemerintahan RI sejak 4 Januari 1946 telah pindah ke Yogyakarta, karena alasan keamanan; karena itu kekacauan mulai menjadi-jadi yang ditimbulkan oleh pihak Nica - Belanda. Padahal untuk waktu-waktu sebelumnya, baik Nica Belanda maupun Inggris tidak begitu berani masuk jauh ke daerah-daerah kampung, dan setiap mereka masuk ke kampung oleh penduduk berhasil dihancurkan.

Tetapi kini keadaannya telah berubah, karena para pemuda banyak yang telah diculik. Dan di daerah-daerah ini sekarang Nica membuas untuk membalas dendam. Setiap hari mereka datang ke kampung-kampung dan membawa penduduk atau menculiknya. Suasana garis pertempuran di sekitar Jakarta pada akhir bulan April 1946 semakin genting. Pertempuran itu telah berlangsung kurang lebih sebulan semenjak akhir bulan Maret, di sana-sini terjadi pertempuran antara rakyat dengan Belanda dan Inggris di Klender, Cileungsi, Peking dan lain-lainnya. Dapat dicatat bahwa 4 orang dari

pasukan penyelundup rakyat yang berhasil menyerbu ke dalam garis pertahanan Belanda/Inggris pada 22 April 1946 ditawan musuh; sebaliknya dari pihak Belanda 4 orang ditawan oleh pasukan rakyat.

Peristiwa lain yang perlu diketengahkan adalah bahwa pihak Belanda dalam hal ini Anderson, Kepala MP Belanda di Bidaracina, melepas seorang tawanan mereka yang disuruh membawa surat untuk meminta kepada pemimpin pasukan rakyat supaya diadakan penukaran tawanan. Anderson meminta supaya 4 orang serdadu Belanda yang ditawan, ditukar dengan 4 orang anggota pasukan rakyat yang ditawan. Permintaan terlaksana dan pertukaran tawanan berlangsung pada tanggal 26 April 1946 pukul 10.00. Di samping itu pertempuran lain terjadi karena pertahanan TRI di Cakung diserang oleh Belanda totok, Jepang dan Gurkha, 58)

Pada bulan-bulan selanjutnya, terutama bulan Juli, pertempuran, penculikan dan perampokan meningkat di mana-mana. Di Kampung Duri Pos Stasiun misalnya, 4 orang Nica datang meminta uang sewa tanah. Karena permintaan ditolak mereka kemudian melakukan perampokan beras milik penduduk; dan salah seorang yang mengadakan laporan kepada MP Serikat kemudian diculik. Demikian pula peristiwa yang hampir semacam dalam arti perampasan terhadap milik penduduk terjadi di Sawah Besar, 2 orang Nica mengambil radio penduduk. 59)

Sementara itu pihak serdadu-serdadu Inggris dan India menduduki rumah bupati dan Kantor Kabupaten Jatinegara, Kantor dan rumah tersebut kemudian oleh Serikat dipergunakan sebagai tempat "Sosial" untuk Palang Merah nya. Dan pada waktu yang bersamaan pihak Nica melakukan penggeledahan di Kebon Kosong, Gg. Lontar Kramat, dan di Pasar Jembatan Lima. Tetapi di lain pihak Lasykar Rakyat Jakarta berhasil merebut kembali Teluk Pucung yang terletak kurang lebih 5 km di sebelah utara Bekasi. Dalam pada itu seperti telah terjadi di mana-mana di tengah-tengah keramaian orang berjual-beli di Pasar Tanah Abang, Nica mengadakan pengacauan melepaskan tembakan-tembakan. Sudah barang tentu suasana pasar menjadi ribut dan panik. 60)

Mengikuti perkembangan situasi dan peristiwa-peristiwa selama itu yang sengaja ditimbulkan oleh Serikat, terutama Nica - Belanda di Jakarta, maka Pemerintah RI memprotes terhadap Serikat. Protes tersebut terutama disebabkan cara-cara Serikat di Jakarta menggeledah dan memeriksa penduduk yang sangat bertentangan dengan paham dan penghargaan terhadap manusia sopan. Surat protes tersebut ditujukan kepada Letnan Jenderal E.C. Mansergh, Panglima Markas Tertinggi Serikat di Jakarta. 61)

Sementara itu sadar akan tanggungjawab sebagai warga kota khususnya dan sebagai warga rakyat Indonesia umumnya, pada tgl. 1 Juli 1946 para pedagang Jakarta mengadakan pertemuan yg mengambil tempat di Balai Agung. Dalam pertemuan tersebut hadir Walikota Suwiryo dan beberapa orang terkemuka lainnya dari Pe-

merintahan Nasional Kota; sedang sebagai Ketua pertemuan itu adalah B.R. Motik. Hasil rapat tersebut adalah kebulatar tekad para pedagang Jakarta untuk membantu usaha-usaha pemerintah dalam situasi yang demikian kacau itu. 62)

Demikian juga untuk **menyanggah** adanya **issue-issue** bahwa Jawatan Kereta Api telah menyerang di pihak musuh (Belanda) maka jpada bulan Juli itu juga Badan Perwakilan Kereta Api Jakarta mengumumkan dirinya tetap berdiri di belakang Republik. Pengumuman itu mewakili 6000 orang pegawai dan pekerja **Jawatan Kereta Api** dan Trem Jakarta Raya. Memang pihak musuh selalu mengarahkan perhatiannya terhadap Jawatan itu, tetapi usahanya selalu gagal 63)

**Kedudukan** Belanda di Jakarta semakin kuat karena kesempatan dan perlindungan yang diberikan pihak Serikat — Inggris terhadapnya. Pihak Republik di Jakarta selain menghadapi Belanda yang selalu mengadakan pengacauan dan **pendudukan** kantor-kantor Republik, juga harus menghadapi perbuatan-perbuatan Inggris yang semacam dalam rangka membantu usaha Belanda. Demikianlah, pada 13 Agustus 1946 sore hari Inggris (yang memakai nama Serikat) menduduki **Penjara Cipinang** dengan cara **paksa**. Pada hari berikutnya mereka datang menyerbu an menduduki Kantor Pengadilan Negeri Molenvliet Barat, Jakarta. Di hari yang sama pada pagi-pagi hari daerah Kelurahan Kebon Kacang dan Kampung Bali Tanah Abang telah dikurung oleh serdadu, India dan Belanda, **dengan alasan** untuk mengadakan penggeledahan senjata di kalangan penduduk. Sebagai tindakan terakhir, mereka membawa 4 orang jpenduduk untuk diperiksa dan ditahan. Berbagai cara dan usaha ditempuh Belanda dalam usaha membuat kegaduhan, kepanikan di kalangan penduduk. Sebagai contoh lain lagi, pada 12 Agustus 1946 Belanda mengambil tindakan melakukan pemeriksaan surat pembelian terhadap penduduk yang bersepeda melalui Jln. Jawa. Penduduk yang lewat dengan bersepeda ditahan dan digeledahnya. Dengan peristiwa-peristiwa tersebut pihak penduduk merasa kurang aman, dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berkuasa di Jakarta tempat diumumkannya Proklamasi itu. 64)

## 6. Akhir Pemerintahan Nasional Kota

Dari Uraian-uraian di muka dapat diketahui bahwa perjalanan waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan di Jakarta telah diisi oleh peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan semakin hilangnya gedung-gedung Republik. Melihat kenyataan yang demikian itu, pada tgl 4 Mei 1947, Badan Perwakilan Rakyat Kota Jakarta di Balai Agung mengadakan mosinya, agar Belanda khususnya melaksanakan pasal 1 Persetujuan Linggarjati, yaitu pengembalian daerah-daerah yang sampai saat itu diduduki tentara Belanda kepada republik. Isi mosi itu antara lain :

- a. adanya hanya satu pemerintahan di kota Jakarta, yaitu Pemerintahan Nasional Kota Jakarta
- b. Pengembalian alat-alat pemerintahan seperti kepolisian, pengadilan dan jawatan-jawatan lain kepada Republik
- c. Pengembalian gedung-gedung pemerintah (termasuk gedung sekolah) kepada Pemerintahan Nasional Kota Jakarta
- d. Pengembalian pelabuhan Tanjung Priok kepada Republik.<sup>65)</sup>

Memang setelah terjadi dan tercapainya Persetujuan Linggarjati keadaan di Indonesia dan kota Jakarta khususnya bukan semakin terjamin, tetapi bahkan sebaliknya. Dengan persetujuan yang sama-sama telah disepakati itu seharusnya dapat diharapkan saling pengertian, namun kenyataannya hasil perundingan itu kemudian dipakai Belanda sebagai suatu alasan untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Republik, setelah dirinya menilai kekuatan dan merasa telah kuat. Membaca isi mosi Badan Perwakilan Rakyat Kota Jakarta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pemerintahan Nasional Kota telah demikian terjepit.

Pelaksanaan hasil Persetujuan Linggarjati oleh Belanda di buatkan menjadi suatu persengketaan dengan Republik. Belanda sengaja membuat interpretasi lain dengan maksud agar dapat menghancurkan Negara Republik Indonesia. Sebagai hasil usaha yang terus menerus dalam rangka memperkuat potensi militernya, maka Belanda pada pertengahan tahun 1947 itu telah selesai menyusun kekuatannya termasuk mendatangkan beberapa divisi KL (Koninklijk Leger) yang baru di samping kekuatan-kekuatan KNIL yang sudah ada. Dengan demikian Belanda telah siap untuk mengadakan aksi militernya terhadap Republik.

Selanjutnya sejalan dengan situasi nasional pada waktu pecahnya Aksi Militer Belanda I, dapat diketengahkan situasi di kota Jakarta menjelang pecahnya aksi militer tersebut. Dalam hal ini Belanda telah mengambil tindakan sendiri di dalam kota. Pada hari Minggu malam Senin tanggal 21 Juli 1947, semua gedung dan bangunan yang sampai saat itu masih di bawah kekuasaan Republik (termasuk gedung Balai Agung) diduduki oleh tentara Belanda. Sejumlah orang ditawan untuk "diperiksa" lebih lanjut.

Sebelum peristiwa pendudukan gedung-gedung tersebut, Belanda telah menyebarkan panflet-panflet. Isi panflet yang ditandatangani Jenderal Spoor, berbunyi: "Keterangan ini mendjamin keselamatan pematja dan semoea pendoedoek". Lebih lanjut dikatakan pula:

"Maksoed kedatangan tentara adalah mentjiptakan djaminan bagi keselamatan yang tetap, keadilan dan perdamaian. Maka dari itoe:

1. Djangan melarikan diri. Djangan meninggalkan kamoe poenya desa dan kamoe poenja pekerdjaan.
2. Tjegahlah segala pengroesakan dan taktik boemi hangoes.

segala apa jang orang hendak meroesaknya ada perloe bagi keboetoehan hidoep dari pendoeboek sendiri.

3. Mereka jang meroesak sesoeatu apa, tentoe akan dihoekoem.

4. Toenjoekkanlah kepada tentara semoea orang djahat dan mereka jang menimboelkan kekaloeetan serta toendjoekkanlah itoe semoea orang jang mengantjam atawa membikin takoet pada pendoeboek.

5. Terimakanlah segala apa jang kamoe haroes melindoengi atawa goena mana kamoe mendapat perintah boeat meroesaknja kepada Tentara dalam keadaan sebaik moengkin.

Pikirlah baik. Tiada seorang pengroesak akan loepoet dari hoekoem-annja.

6. Letakanlah kamoe poenja sendjat. Djanganlah permainan kamoe djiwa setjara tidak perloe. Tanah air memboetoehkan kamoe semoea dan djoega tenaga-tenaga pemoeda, maepoew lelaki atawa perempuan.

Kepada pihak Binnenlands Bestuur :

7. Lakoekanlah tetap kamoe poenja kewadajiban. Tjegahlah segala pertjobaan boeat meroesak, djoega kamoe poenja ada tanggoeng djawab boeat keselamatan pendoeboek.

8. Kepada kaoem Imam. Kamoe diminta boeat tetap mendjalankan kewadjabannja jang soetji."

Kata-kata terakhir berbunyi : "Pertjajalah pada tentara Kera-djaan". 66)

Membaca isi pamflet itu maka dapat disimpulkan bahwa Belanda berusaha mempengaruhi dan sekaligus menakuti penduduk agar tidak melakukan perlawanan (dengan kata-kata dihukum), serta mengharap penduduk untuk berada di pihaknya.

Demikianlah dengan peristiwa Minggu malam Senin 21 Juli 1947 dengan didudukinya semua gedung-gedung Republik di Jakarta serta Gedung Agung, maka berakhirilah masa Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Dengan peristiwa itu "Lambang Kedaulatan RI" di Jakarta telah jatuh atau hilang. Pada malam itu juga Walikota Suwiryo diambil dari tempat kediamannya dan seterusnya dibawa ke-tempat tahanan di Kamp. Gg. Chasse (Jln. Pembangunan). Dalam tahanan tersebut terdapat pula anggota pimpinan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta Yusuf Yahya serta Mr. Supangkat (Yang pada waktu itu telah menjabat Residen Bogor), dan lain-lainnya. Dari Kamp. Gg. Chasse itu kemudian Suwiryo dipindahkan ditawan di Tangerang; selanjutnya pada akhir 1947 ia dikembalikan ke Yogya-karta. 67)

Akhirnya perlu dicatat di sini, bahwa dengan didudukinya Balai Agung oleh tentara Belanda tersebut suatu Aksi Militer Belanda (yang pertama) telah meletus. Aksi Militer itu bukan hanya ditujukan terhadap kota Jakarta, melainkan ditujukan pula terhadap kota daerah Republik lainnya. Untuk Jawa Barat misalnya (dalam hal ini erat hubungannya dengan Jakarta). Operasi militer dilancarkan pada

pukul 05.30 tanggal 21 Juli 1947 itu juga. 68)

Dengan meletusnya Aksi Militer Belanda I itu selanjutnya bermulalah babak baru bagi sejarah pemerintahan kota Jakarta. Pemerintahan Nasional Kota kemudian diganti dengan Pemerintahan Federal (ciptaan Belanda); hal ini berarti tercapainya tujuan utamanya untuk taraf pertama (merebut lambang kedaulatan), yang dipersiapkannya hampir dua tahun di Indonesia.

### Kesimpulan

Meskipun usia Pemerintahan Nasional Kota Jakarta hanya mampu bertahan selama 23 bulan, namun pada diri Pemerintahan Nasional Kota mempunyai arti penting bagi perjuangan nasional. Dalam hal ini Pemerintahan Nasional Kota telah menunjukkan keuletan dan ketabahan serta kepatuhan dalam mempertahankan Kedaulatan RI khususnya di Jakarta. Semua itu karena Pemerintahan Nasional Kota selalu memegang teguh patokan-patokan serta petunjuk-petunjuk Pemerintah Pusat, yakni :

- Kota Jakarta harus dipertahankan sebagai Ibu Kota RI
- Kota Jakarta jangan dijadikan kota pertempuran
- Kota Jakarta harus bekerjasama dengan tentara pendudukan Serikat. 69)

Memang kita lihat Pemerintahan Nasional Kota tidak pernah menyaksikan kedamaian di lingkungan wilayahnya. Pemerintahan Nasional Kota belum sempat melihat arti kemerdekaan bagi warganya. Semua itu dikarenakan tindakan-tindakan dari pihak Belanda khususnya serta pihak Serikat - Inggris yang telah terikat dan terpengaruh oleh usaha Belanda untuk kembali berkuasa di Jakarta.

Namun demikian arti politis cukup besar bagi perjuangan nasional bangsa Indonesia adalah dengan bertahannya Pemerintahan Nasional Kota di tengah-tengah kekuatan asing tersebut, berarti RI di Jakarta selama itu dapat menunjukkan kedaulatannya. Sejalan dengan strategi diplomasi pemerintah pusat pada waktu itu, Pemerintahan Nasional Kota menjadi penghubung (liaison) dari setiap perundingan: yang dilakukan di Jakarta antara pihak Republik dan pihak Belanda. Setiap perundingan yang dilakukan di Jakarta, pihak Pemerintah Nasional Kota turutserta mengirimkan wakilnya. Di situ lah Pemerintahan Nasional Kota selalu mendampingi Pemerintah Pusat dalam menempuh perjuangan diplomasinya.

Akhirnya untuk kesimpulan akan nasib yang dialami Pemerintah Nasional Kota, yang kemudian berhasil ditiadakan oleh Belanda dengan meletusnya Aksi Militer Belanda I itu, ialah :

1. Pihak Belanda jauh lebih unggul di bidang persenjataannya, serta adanya kesempatan dan bantuan dari pihak Inggris (yang sebenarnya mengemban tugas internasional). Di samping itu banyak para pemuda dan penduduk yang diculik, diteror, di mana pada waktu-waktu belakangan Pemerintahan Nasional Kota tidak lagi mempunyai alat-alat keamanan. Polisi Indonesia oleh Serikat di-

bubarkan dan diganti dengan Polisi Internasional, yang prakteknya polisi Belanda yang beroperasi.

2. Semuanya itu adalah sah satu akibat adanya ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat yang harus diperhatikan. Sebagai "kota diplomasi" Jakarta harus dikosongkan dari alat-alat keamanan dan bahwa Jakarta jangan sampai dijadikan daerah pertempuran.

Dengan demikian maka mengenai nasib lenyapnya Pemerintahan Nasional Kota Jakarta adalah konsekuensi positif akan perjuangan dan ketaatannya terhadap pemerintah nasionalnya. Berlangsungnya Pemerintahan Nasional Kota selama hampir dua tahun itu untuk situasi pada waktu itu adalah perjuangan yang maksimal.

## Lampiran : I

Daftar nama-nama jang tertjantum sebagai anggota Badan Legislatif dan /Badan Eksekutif Pemerintahan Nasional Kota Djakarta mendjelang achir pemerintahannya.

### A. Badan Legislatif :

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. A.a. Alyadrus      | 28. Moh. alwi                         |
| 2. Abdul Manaf        | 29. Moh. Aui                          |
| 3. Asa Bafagih        | 30. Muhadjir                          |
| 4. A.F. Gultom        | 31. Moh. Mussah                       |
| 5. A.J. Supit         | 32.M. Ahmad Tjarawardhana             |
| 6. A. Wahab           | 33. Moh. Baseri                       |
| 7. Abd. Martin        | 34. Mr. Asmaun                        |
| 8. Asmad              | 35. M. Dachlan                        |
| 9. A. Muis A.S.       | 36. Nurasjid                          |
| 10. Asnawai           | 37. Nn. RA. Minarsih Wiranatakusumah. |
| 11. B.R. Motik        | 38. Usman                             |
| 12. Bahri             | 39. Ubeid                             |
| 13. Dr. A.N. Utama    | 40. R.M.S. Mangkudipura               |
| 14. Dr. Diran         | 41. R.Sumarjono                       |
| 15. Dr. Ouw Eng Liang | R. Gatot Sutadipradja                 |
| 16. Djokolaksamono    | 43. R. Muharam A. Sutisna             |
| 17. G.S. Pandjaitan   | 44. R. Sukardjo                       |
| 18. Hanafi            | 45. Ramelan                           |
| 19. M. Moh. Gesin     | 46. Sri Juliani                       |
| 20. Iskandar Wahono   | 47. Supadi Notosuparto                |
| 21. Ibrahim           | 48. Sumardji                          |
| 22. K.St. Pamuntjak   | 49. Suprpto                           |
| 23. Khon Eng Tjiang   | 50. Sjawal                            |
| 24. L.A. Naim         | 51. Surjasumitra                      |
| 25. M. Hasmoni        | 52. St. Sanif                         |
| 26. Muhammad          | 53. Sabikin                           |
| 27. M. Saman          | 54. Sjamsudin Saat.                   |

### B. Badan Eksekutif :

1. Nur St. Iskandar
2. J. Jahja
3. Supranoto
4. Burai

## Lampiran : II

### Resolusi Masjoemi, Partai Sosialis dan PNI TJABANG DJAKARTA

#### Menentang Penoetoean Pengadilan

Resoloesi bersama yang diambil tgl. 6 Agoestoes 1946 oleh Masjoemi, Partai Sosialis dan PNI, menjatakan protes terhadap maksoed Serikat oentoek menoeoep Pengadilan Republik di Djakarta dan menggantinja dengan Pengadilan Amacab.

Mengharap soepaja tindakan itoe ditoenda sampai selesainja peroen-  
dingan Indonesia - Belanda.

#### Resolusi a.l. sbb. :

- Mengetahoei** : Bahwa Serikat telah mengeloearkan perintah soe-  
paja pengadilan Repoeblik di Djakarta ditoetoe  
mulai tgl. 12 Agoestoes sehingga selandjoetnja  
pengadilan atas Rakyat Repoeblik dioeroes  
oleh Amacab.
- Mengingat** : Bahwa Pengadilan Amacab ini didjalankan oleh  
hakim Belanda dengan hoekoem "Hindida Belan-  
da" lama atas nama "Ratoe Wilhelmina";  
bahwa hoekoem jang telah banjak didjatoehkan  
oleh pengadilan Amacab ini atas bangsa Indonesia  
berarti hidoepnja kembali pengadilan kolonial  
jang lebih hebat dari jang doeloe.
- Mengerti** : Bahwa pemerintah ini berarti menjerahkan rakjat  
Repoeblik di Djakarta dengan paksa kepada ke-  
koeasaan Belanda; bahwa malapetaka ini ditem-  
patkan atas rakjat Repoeblik 5 hari sebelum mera-  
jakan "Hari Kemerdekaan" tgl. 17 Agoestoes  
moengkin atas desakan Belanda.
- Merasa menyesal** : Bahwa perintah Serikat itoe berarti menjam-  
poeri (intervensi) kehidoepan politik Indonesia.  
Bahwa Serikat mengambil sikap begini pada wak-  
toe hendak meninggalkan Indonesia karena  
sebagian besar kewajibannya (soal Djepang dan  
Apwi) soedah dibereskan oleh pihak Indonesia  
dengan meminta balasan djasa.
- Menimbang** : Bahwa rakjat Repoeblik di Jakarta diharoeskan  
toendoek pada hoekoem dan pengadilan Belanda,  
sedang rakjat Repoeblik hanja rela dan wadjib  
toendoek kepada hoekoem dan Pengadilan  
Repoeblik;

bahwa karena itoe perasaan rakjat Repoeblik sangat diloekai; bahwa bagi rakjat Repoeblik di Djakarta tidak akan ada lagi djaminan keadilan tidak ada lagi rechtszekerheid.

- Memoetoeskan :
1. Menjatakan protes atas sikap Serikat ini.
  2. Memohon kepada Pemerintah soepaja :
    - a. memprotes hal ini kepada jang berwajib menerima protes ataoe beroesaha soepaya soal ini ditoenda sampai peroendingan antara Belanda dan Indonesia selesai.
    - b. Kalaoe semoea ini tidak berhasil soepaja Pemerintah mengambil tindakan jang tepat oentoek keselamatan rakjat serta kehormatan Negara.

### Lampiran : III

#### **Soerat protes Kementerian Loear Negeri RI jang dikirimkan kepada Let. Djen. E. C. Manserch, Panglima Markas Tertinggi serikat di Djakarta**

"Toean, tgl. 17 dan 18 Djoeni pasoean-pasoean Serikat telah mengadakan pemeriksaan dan pengeledahan didaerah Kramat, Tanah Tinggi, Djakarta, oentoek mentjari orang2 jang bersangkoetan. Jang aneh pada pekerdjaan ini ialah tjaranja dilakoekan dengan tidak pandang siapa, semoea orang jang agak sehat kelihatannja dikoempoelkan dan digiring pada waktoe pagi2 boeta, sehingga banjak diantara mereka tidak berkesempatan berpakaian setjoekoepnja. Dengan diiringi oleh kata2 dan perlakoean jang tidak baik, orang2 disoeroeh berjalan dan mereka meroepakan satoe tontonan.

Ditempat jang ditoedjoe senioea disoeroeh djongkok diatas tanah jang tidak dapat dikatakan bersih. Sesoesdah itoe tiap2 orang bergilir melewati seboeah troeck jang ditoetoepi oleh kain jang mempunjai beberapa lobang pelihat. Soeara dari dalam troeck memberi isjarat oentoek menahan deradjat manusia. Dokter, pegawai2 dan orang2 lainnja jang tidak bersalah digiring bersama-sama seolah-olah mereka itoe adalah hewan dan dibawa sebagai pengangkoet pendjahat.

Semoea orang jang menderita perlakoean ini, kami sama menjela pasoean2 jang bersangkoetan, akan tetapi tidak berboeat apa2 karena pendjaga2 bersendjata.

Kami minta soepaja ini mendapat perhatian toean, dan kami berpendapat bahwa kedjadian2 seroepa ini jpasti tidak akan memberikan penghargaan dari pihak Indonesia terhadap pendapat Barat tentang penghargaan terhadap manoesia dan terhadap kedjoedjoeran.

Akan tetapi kami yakin bahwa jang tersebut diatas hanja pekerdjaan dari mereka jang merdjalankan kewadajiban disatoe-satoe tempat sadja.

Mereka ini tidak maoe membedakan orang jang baik dan orang jang disangka pendjahat oleh sebab itoe kami harap toean soedi mengambil tindakan, soepaja jang seroepa terseboet diatas tidak terdjadi lagi".

**Catatan :**

1. George Mc Turnan Kahin, **Nationalism and Revolution in Indonesia**, New York, Cornell University Press, 1970, hal 141
2. Menurut tata pemerintahan daerah dalam Undang-undang no.27, daerah **Shi** sama dengan "residen" dahulu yang terbagi atas **Shi** dan **Ken**. Daerah **Shi** sama dengan daerah "stadsgemeente" dahulu, sedang daerah **Ken** sama dengan "regenstschap" dahulu; Prof Mr. A.G. Pringgodigdo, **Tata Negara di Jawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942**, Jajasan Fonds Universiteit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1952, hal 22.
3. **Pantja Raya** Jakarta, Balai Pustaka, Th. I, No. 1, 15 November 1945, hal. 7
4. Wawancara dengan Mr. Supangkat, 16 April 1971 di Jakarta.
5. The Liang Gie, **Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta**, Kota-praja Djakarta Raya, 1958, hal 106.
6. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raya**, Kementerian Penerangan RI, hal. 73-74.
7. **Bingkisan Nasional : Kenangan 10 Tahun Revolusi Indonesia 17-8-1945 — 17-8-1955**, Jakarta, PT. Upeni, hal 22 - 26.  
(Rencana tersebut di atas di maksudkan agar supaya proklamasi itu dapat dihadiri oleh rakyat banyak; sebab itu untuk membuktikan bahwa proklamasi benar-benar didukung rakyat maka pada tanggal 19 September 1945 diadakan rapat besar di Ikada kembali)
8. Adam Malik, **Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945**, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1970, hal 58; Wawancara dengan bekas penghuni Asrama Prapatan 10, dr. Eri Sudewo, dr. Suyono (Markas0, 20 November 1979, 4 Januari 1980).
9. The Liang Gie, **Op.Cit.**, hal 10.
10. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raya**, hal. 76
11. **Merdeka**, 2 Oktober 1945.
12. Moh. Roem, "Beberapa Penilaian Sedjarah Perdjangan". **Komunikasi**, Jakarta, No. 22/Th. I, 25 Mei 1970, hal 18.
13. Osman Raliby, **Documenta Historica**, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1953, hal 22-23. Daniswara. **Dokumentasi Sewindu : Berisi Peristiwa2 yang penting dan bersedjarah disekitar Tanah Air Indonesia**, Jakarta, Jajasan Pendidikan Kedjuruan, 1953, hal 17.
14. "Pengumuman Pemerintahan Nasional Kota Djakarta tanggal 10 April 1946", **Berita Republik Indonesia**. II/14, 1 Djuni 1946, hal. 136.
15. The Liang Gie, **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia**, Jakarta, Gunung Agung, Jilid I, MCMLXVII, hal 56; **Berita Republik Indonesia**, Th. I/no. 2, 1 Desember 1945.

16. The Liang Gie. **Op.Cit.** hal 56; (Kutipan dari buku Koesnodi-prodjo. **Himpunan Undang-Undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945**, hal 23 - 31.
17. The Liang Gie. **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia**, Jakarta, PT Gunung Agung, Jilid I, 1967, hal 63.
18. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raya**, hal 172.
19. **Merdeka**, 8 Oktober 1946.
20. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raya**, hal. 172 - 174.
21. M. Oudang. **Perkembangan Kepolisian di Indonesia**, Jakarta, Pen. Mahabarata, 1952, hal 55.
22. Sutardjokartohadikusumo. "Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah", **10 Intelligensia tentang pembangunan Masyarakat Negara Republik Indonesia**, Pen. Penerbitan Indonesia, hal 25.
23. **Arsip Balai Kota**, Arsip Bagian Urusan Pegawai No. 1377, Pemerintahan Nasional Kota Djakarta, tanggal 3 Mei 1947, tentang "Susunan dan Keadaan Pegawai-pegawai Pemerintah Nasional Kota". dibuat memenuhi surat Gubernur Jawa Barat No. B 16/1/8 tanggal 30 September 1946 dan surat Gubernur Jawa Barat No. B 16/1/8 tanggal 11 Nopember 1946 dan surat Tilgram tanggal penerimaan 20 Februari 1947.
24. The Liang Gie. **Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta**, hal 113.
25. **Arsip Balai Kota, Op. Cit.** hal.
26. Aturan Tambahan ini terdapat pada penetapan PPKI mengenai UUD 1945 yang terdiri dari : Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 16 Bab yang berisi 37 pasal; Aturan Peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan Atruan Tambahan yang terdiri dari 3 pasal (dalam penyajian di atas dipakai istilah nomor), Mr. Muhammad Yamin, **Proklamsi dan Konstitusi Republik Indonesia**, Jakarta, Pen. Djembatan, 1953, hal 189 - 198.
27. **Pantja Raya**, Th. I, No. I, 15 Nopember 1945, hal 7.
28. Wawancara dengan Supranoto, 20 Januari 1971 di Jakarta.
29. Berkas Arsip Balai Kota, **Op. Cit.**,
30. Wawancara dengan Mr. Supangkat, 16 April 1971 di Jakarta.
31. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja**, hal 77. Bandingkan dengan H. Rosihan Anwar, **Kisah-Kisah Zaman Revolusi, kenang-kenangan seorang Wartawan : 1946 - 1949**, Pustaka Jaya, 1975, hal. 30 - 38.
32. The Liang Gie. **Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta**, hal.114, Tempat bekas gedung pusat pemerintahan Amacab (Taman Wijayakusuma, sekarang dibangun Mesjid istiqlal, wawancara dengan ;
  - (1). Mr. R. Mudjaswardi, 11-1-1971, (2). Supranoto, 20-1-1971,
  - (3). Mr. Supangkat, 16-4-1971, (4). Dra. J. Masdani, 2-7-1971.
33. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja**, hal 78 - 79.
34. M. Oudang, **Op. Cit.**, hal 66

35. The Liang Gie. **Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta**, hal 115.
36. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja**, hal 80-81.
37. Kol. A.H. Nasution, **Tentara Nasional Indonesia I**. Bandung, Penerbit Ganaco NV., 1963, hal 127.
38. **BERITA Indonesia**, 4 November 1945; Kol A.H. Nasution, **Ibid.**, hal 121.
39. Kol. A.H. Nasution, **Ibid.**, hal 167.
40. **Republik Indonesia : Kotapradja Djakarta Raja**, hal 214.
41. **Ibid.**, hal 237.
42. Dalam hal ini Kantor Besar Polisi bekas Chian-Bu yang terletak di ln. Nusantara tidak luput jatuh ke tangan tentara pendudukan Amerika-Inggris, M. Oudang, **Op. Cit.**, hal. 66.
43. Bersamaan dengan itu Polisi Negara RI dibubarkan oleh Pimpinan tentara Serikat; osman Raliby, **Documenta Historica I**, hal. 171.
44. M. Oudang, **Op. Cit.**, hal 66.
45. **Berita Indonesia**. 17 Januari 1946
46. **Ibid.**
47. **Ibid.**, 19 Januari 1946.
48. **Merdeka**, 10 Agustus 1946; "Pidato Presiden, 17 Agustus 1946", **Amanat Proklamasi : Pidato 17 Agustus dalam alam Revolusi Physik 1945 - 1949**, jakarta, Dep. Penerangan, Pradjaparamita, 1964, hal 20.
49. Untuk resolusi selengkapnya periksa lampiran II.
50. **Merdeka**, 14 Agustus 1946.
51. **Berita Indonesia**, 23 Oktober 1945.
52. **Ibid.** 25 Oktober 1945.
53. **Ibid.**, 2 Januari 1946.
54. **Ibid.**, 2 November 1945.
55. **Merdeka**, 4 Januari 1946.
56. **Ibid.**
57. **Antara**, 24 April 1946
58. **Antara**, 27 dan 29 April 1946
59. **Merdeka**, 2 dan 4 Juli 1946.
60. **Merdeka**, 6 Juli 1946
61. Isi surat selengkapnya : Lampiran III.
62. **Merdeka**, 2 Juli 1946.
63. **Ibid.**, 24 Juli 1946.
64. **Merdeka**, 14 Agustus 1946.
65. **Masyarakat**, 11 Mei 1947.
66. **Min Pao**, 22 Juli 1947
67. Wawancara dengan Mr. Supangkat, 16 April 1971; Major Suhendi, **Djakarta : Aneka Daja Tunggal Sakti**, Jakarta, Sedjarah Militer Kodam V/Djaja, Jilid I, 1966, hal. 103 ; Republik Indonesia.

# **KEKUATAN GERILYA DI DAERAH PRIANGAN PADA WAKTU DIVISI SILIWANGI HIJRAH TAHUN 1948**

Oleh : **Tanu Suberly**  
Pusat Sejarah Dan Perpustakaan ABRI

## **1. Pengantar**

Sebagian besar usaha menyusun tulisan ini adalah hasil wawancara dengan beberapa tokoh pelaku, ketika penyusun membantu menulis buku "Siliwangi DARI Masa Ke Masa" pada tahun 1967. Dan pada tahun 1977 ketika DR. A.H. Nasution menyempurnakan naskah buku "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" khususnya jilid 7 penyusun telah diminta bantuan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh pelaku yang telah ditugaskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat pada waktu Divisi Siliwangi hijrah.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih harus dilengkapi dengan beberapa penelitian kembali. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan atau mungkin kekeliruan dalam tulisan ini, akan mendapat tanggapan terutama dari para pelaku menyumbangkan penjelasan-penjelasan serta kelengkapan lainnya.

## **2. Pendahuluan**

Pada waktu perundingan di kapal Renville sedang berjalan, para komandan kesatuan Divisi Siliwangi sudah dapat membayangkan hasil-hasil yang akan dicapai khususnya mengenai wilayah Jawa Barat. Mengingat usaha Belanda untuk mendirikan Negara Pasundan melalui Konferensi Jawa Barat kesatu dan kedua yang diadakan sebelum perundingan Renville selalu gagal, dan Konferensi selalu menekankan pada masalah keamanan yang harus diciptakan lebih dahulu.

Di dalam persetujuan gencatan senjata Renville, wilayah Jawa Barat sangat diistimewakan, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 persetujuan tersebut. Dengan dihijrahkannya pasukan Divisi Siliwangi, maka bagi pihak Belanda berarti bahwa usul-usul Konferensi Jawa Barat kesatu dan kedua sudah terpenuhi, membuka jalan ke arah berhasilnya mendirikan Negara Pasundan.

Keadaan ini disadari oleh rakyat Jawa Barat terutama mereka-mereka yang pada waktu itu lazim disebut golongan "republikein", bahwa usaha Belanda sekarang pasti akan berhasil oleh kemungkinan-kemungkinan yang terbuka setelah persetujuan Renville. Oleh karena itu, keadaan memaksa untuk taktik dari sikap non-kooperasi kepada kooperasi, sebab taktik perjuangan tidak dapat melepaskan kenyataan-kenyataan yang ada di Jawa Barat waktu itu.

Kelemahan-kelemahan pihak republikein di daerah-daerah pendudukan Belanda itu disadari oleh Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan maklumat

memperkenankan orang-orang republikain di daerah pendudukan Belanda untuk ikutserta dalam pemilihan umum baik memilih maupun dipilih yang diadakan oleh pihak Belanda. 1)

Adanya kekuasaan pendudukan Belanda harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang tidak dapat disangkal. Segala siasat dan taktik perjuangan tidak dapat melepaskan kenyataan-kenyataan yang ada dan sedang berjalan. Apakah berdasarkan kenyataan-kenyataan itu harus diadakan penyusupan ke dalamnya sebagai salah satu siasat, atau akan berjuang tanpa penyusupan? Akhirnya semua jalan telah dilakukan, ada yang kedalam mempergunakan Negara Pasundan sebagai media perjuangan dan bergerak di lapangan sosial-politik, di samping itu ada yang terus bergerak di daerah kantong-kantong gerilya serta membina pemerintah republik bayangan di kampung-kampung di luar kota. 2)

Maka sekalipun Wilayah Jawa Barat kecuali daerah Banten setelah Persetujuan Renville resminya dikosongkan oleh pasukan Siliwangi, namun kekuatan-kekuatan republikain tetap melakukan tugasnya secara bergerilya. Pemerintah Bayangan di samping adanya pemerintah Negara Pasundan berjalan terus secara bergerilya, bersama-sama pasukan bersenjata yang tidak ikut hijrah. Hal ini berarti bahwa kekuatan republikain rakyat Jawa Barat tetap tinggi, sebab suatu kekuatan bersenjata tidak dapat tahan lama apabila rakyat di daerah itu tidak menjamahnya.

Daerah pendudukan Belanda adalah daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda secara militer, yang dengan usaha keras memaksakan konsepsi politiknya membentuk negara boneka yang akan dihadapkan untuk mengepung Republik Indonesia dalam bidang diplomasi. Terhadap langkah-langkah itulah yang harus diperhitungkan secara masak oleh orang-orang republikain di daerah pendudukan Belanda, baik oleh pejuang-pejuang di bidang bersenjata maupun di bidang lainnya.

Pada waktu Divisi Siliwangi mendapat perintah harus hijrah meninggalkan Jawa Barat, tidak semua kekuatannya dihijrahkan. Panglima Divisi Siliwangi merencanakan supaya perjuangan bersenjata tetap terbina. Rencana pembentukan pasukan gerilya TNI, ditugaskan kepada Komanda Batalyon 30 Kapten Moch. Sudarman pada awal bulan Januari 1948. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komandan Batalyon 30 segera mengadakan rapat kilat dengan semua komandan kompi di Kampung Cigalugur, Kelurahan Mandalasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Hasil rapat memutuskan bahwa satu seksi (peleton) dari Kompi I dan dua seksi dari Kompi II supaya tetap tinggal di Jawa Barat, untuk membina kantong gerilya dan mengembangkannya dengan sasaran utama kota Bandung. Sebagai pejabat markas basis gerilya ditunjuk Letda Memed Suparna dari Kompi Markas Batalyon 30 yang pada waktu itu di Kampung Ciluweung, daerah Garut Selatan.

Dimulai dari kekuatan pasukan inilah, makalah ini akan mencoba mengemukakan hasil penelitian. Kekurangan atau mungkin kekeliruan dalam tulisan ini, mudah-mudahan tidak menimbulkan anggapan-anggapan bahwa penulis sengaja mengelirukan kejadian yang sebenarnya.

### 3. Gerilya Galunggung

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada tiga peleton menghadapi daerah yang demikian luasnya, pada tahun pertama diputuskan untuk membereskan beberapa orang ke kota Bandung sebagai siswa sekolah menengah, dengan tugas mengadakan penyelidikan kemungkinan-kemungkinan untuk merembeskan pasukan ke kota Bandung serta mencari informasi tentang pasukan-pasukan lain yang tetap tinggal di Jawa Barat.

Untuk tugas tersebut dikirimkan Serma Momon, Letda Darsa dan Letnan Muda Rachmat Barma, ketiga orang ini adalah anggota dari markas Batalyon 30. 3)

Informasi yang dibicarakan dari hasil penyelidikan mereka diantaranya ialah bahwa, pasukan-pasukan yang tidak ikut hijrah dan bertahan di daerah kantong di sekitar Bandung dan lain-lain tempat banyak sekali, ialah :

- a. Dari Biro Perjuangan di bawah pimpinan Suhendro terdiri dari :
  - 1). Kompi Pesindo pimpinan Tatang Suardi di daerah Parabonan, Arcamanik, Kecamatan Ujungberung, Bandung ;
  - 2). Lasykar Rakyat pimpinan Hamid di daerah Cimenyan, Bandung Timur ;
  - 3). Psukan Hizbullah pimpinan Kurnia di daerah Cicalengka ;
  - 4). Pasukan Hizbullah pimpinan Zainal Abidin di daerah Balubur Limbangan, Garut ;
  - 5). Pasukan Sabilillah pimpinan Enoch di daerah Wanaraja, Garut.;
  - 6). Pasukan Sabilillah pimpinan Oni di daerah Gunung Cupu, Cikoneng, Ciamis.
- b. Batalyon 22 di bawah pimpinan Kapten Sugiharto di daerah Cililin, Bandung, yang kelak bernama gerilya Jaya Pangrengot meliputi daerah Cianjur.
- c. Batalyon Hadi di daerah Buahdua, Sumedang.
- d. Lasykar Rakyat Haji Rusdi di daerah Lembang.
- e. Bambu Runcing pimpinan Chaerul Saleh meliputi daerah Bogor dan Karesidenan Jakarta sebelah barat.
- f. Barisan Hitam ( BH — 88 ) yang selanjutnya berubah nama menjadi Satuan Perjuangan ( SP - 88 ) pimpinan Oesman Somantri di daerah Cikampek.

Dan masih banyak lagi pasukan-pasukan tersebar di seluruh daerah Jawa Barat, yang anggota-anggotanya menyamar dalam masyarakat di kampung-kampung dan kota. 4)

Berdasarkan informasi itu diputuskan segera merembeskan sebagian pasukan ke kota Bandung, dan sebagian lagi tetap di daerah kantong gerilya sebagai basis gerilya.

Yang dirembeskan ke kota sebanyak dua peleton, ialah Peleton Letda Masdju dari Kompi I dan Peleton Letda Adidji dari Kompi II. Kedua peleton itu dikoordinasi oleh Letda Tatang Somantri. Sedang pasukan dari Kompi II lainnya sebanyak satu peleton langsung dipimpin oleh Lettu Tjutju Adiwinata, yang semula berkedudukan di daerah Salwu-Tasikmalaya dipindahkan ke Kampung Banyuresmi - Garut dan dijadikan pasukan basis gerilya. 5)

Pasukan yang dirembeskan ke daerah Bandung Timur pada bulan Maret 1948 mulai mengadakan aksi-aksi pengacauan, sabotase-sabotase dan memperlancar hubungan melalui anggota-anggota yang dirembeskan ke kota dalam instansi-instansi pendudukan Belanda serta orang-orang republikein yang menjadi pedagang, supir, kondektur dan pegawai DKA, pamongpraja, guru, anak sekolah, kesenian dan lain-lain.

Peleton Endang Surjana yang ditempatkan di Cinunuk, Wanareja, Garut, yang semula langsung di bawah pimpinan Lettu Tjutju Adiwinata, mengadakan aksi gerakan merebut persenjataan polisi perkebunan di perkebunan-perkebunan daerah Garut di samping mengadakan aksi-aksi ke kota Garut. Pasukan ini dijadikan pasukan pengawal markas gerilya dan selanjutnya menjadi pasukan basis gerilya.

Ketiga peleton itu dikordinasi oleh Lettu Tjutju Adiwinata, yang sejak bulan maret 1948 berkat aksi-aksi yang dilancarkan mulai banyak pasukan yang menggabungkan kekuatannya. Pasukan-pasukan yang bergabung antara bulan Maret - Juni 1948 ialah :

- a. Pangerah Papak, di bawah pimpinan Serma Sukarja dengan kekuatan 80 orang, diantaranya 9 orang Jepang pimpinan Abubakar. Pasukan ini berasal dari Batalyon Kokasih yang berangkat hijrah
- b. BBRI, sebanyak satu peleton pimpinan Letda Suwatu, berasal dari Batalyon Rachmat Sulaeman.
- c. Dipati Ukur, sebanyak satu peleton di bawah pimpinan Lettu Aming, berasal dari Batalyon Pelupasi. 6)

Dengan bertambah kuatnya pasukan yang tadinya bersifat menyelundup yang kadang-kadang menyamar dengan nama Sabilillah, setelah menjadi besar dan makin tampak sebagai pasukan yang mudah diketahui lawan, untuk menjaga keselamatan dan pengembangan pasukan dengan memperhatikan keadaan medan dan kedudukan markas serta lancarnya perhubungan, maka kedudukan markas gerilya dari Banyuresmi Garut dipindahkan ke hutan Dora dekat Kampung Parentas di pinggir hutan tutupan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, sekitar bulan Juni 1948. Sejak itu pasukan gerilya ini memakai nama "Gerilya Galunggung".

#### 4. Gerilya Galunggung menjadi Brigade Citarum

Setelah Gerilya Galunggung bertambah besar dan persenjataan-nya bertambah kuat, maka hubungan-hubungan dengan Yogyakarta dan kerjasama dengan gerilya lainnya di Jawa Barat semakin bertambah lancar. Dengan meningkatnya aktivitas gerilya di Jawa Barat, dari Yogyakarta diremehkan ke Jawa Barat Letkol Sutoko untuk memimpin gerilya menuju daerah Tasikmalaya. Akan tetapi malang nasibnya, karena pada bulan Agustus 1948 tertangkap Belanda di Taraju Tasikmalaya dan dipenjarakan di Kebon Waru - Bandung 7)

Melalui kurir ibu-ibu yang berkunjung ke Penjara Kebon Waru, pimpinan Gerilya Galunggung mendapat pesan dari Letkol Sutoko bahwa kegiatan gerilya harus terus ditingkatkan dan terserah akan memakai nama pa saja yang diinginkan.

Setelah pimpinan Gerilya Galunggung mendapat pesan dari Letkol Sutoko, segera mengadakan rapat membicarakan rencana pengembangan organisasi, peningkatan kegiatan-kegiatan dan kepentingan lainnya di dalam gerakan gerilya. Sejalan dengan rencana pengembangan organisasi, Lettu Tjutju Adiwinata mengusulkan perubahan nama Gerilya Galunggung menjadi Brigade Citarum, nama ini mengandung arti :

- Citarum adalah sungai terbesar di Jawa Barat; mengandung pengertian bahwa gerilya itu harus berusaha terus supaya menjadi kuat dan besar.
- Sungai Citarum mempunyai banyak sekali anak sungai : mengandung pengertian bahwa gerilya itu harus banyak cabangnya di mana-mana meliputi seluruh daerah Jawa Barat.
- Sungai Citarum mengalir tenang ; mengandung pengertian bahwa pasukan gerilya harus bersifat tenang di dalam menghadapi segala kesulitan dan tugas apapun.
- Air sungai Citarum berguna bagi masyarakat; mengandung pengertian bahwa pasukan gerilya harus berguna bagi masyarakat, tugas gerilya membela kepentingan masyarakat.
- Sungai Citarum mengalir melalui hutan, gunung, sawah, kampung dan kota; mengandung pengertian bahwa pasukan gerilya harus mampu bergerak dimana saja.
- Aliran Sungai Citarum menghilang di Sanghiang Tikoro ; mengandung pengertian bahwa pasukan gerilya harus bisa menghilang apabila perlu.
- Apabila Sungai Citarum banjir tidak ada yang dapat menahannya; mengandung pengertian bahwa pasukan gerilya harus selalu siap dan mampu bergerak untuk mengadakan serangan terhadap pasukan lawan apa pun 8)

Perubahan nama ini terjadi pada bulan Agustus 1948 dan selanjutnya diputuskan pula, bahwa untuk memperlancar hubungan komando ke seluruh kedudukan gerilya, kedudukan pimpinan gerilya

supaya berada di kota. Rapat memutuskan menunjuk Lettu Suprpto, yang tadinya adalah Ajudan Letkol Sutoko, sebagai pimpinan dan bermarkas di Pasar Babatan - Bandung dengan nama samaran Djajeng Rono.

## 5. Mengembangkan kekuatan

Setelah pimpinan gerilya berkedudukan di Pasar Babatan, usaha mengembangkan kekuatan makin bertambah lancar berkat jalur hubungan yang tambah luas melalui kurir-kurir di antaranya :

- a. Sebagai kurir istimewa antara gerilya dengan basis pasukan gerilya di Gunung Galunggung ialah guru SD Warung Peuteuy, Pak Ejed.
- b. Melalui Kereta Api dengan mempergunakan para kondektur dan pegawai DKA lainnya, supir-supir baik untuk perhubungan jarak jauh Jawa Barat - Yogya maupun sekitar Jawa Barat.
- c. Mempergunakan perkumpulan kesenian tembang Sunda (Kacapi Jenaka Sunda) terutama apabila mengadakan rapat-rapat rahasia untuk mengelabui alat-alat pendudukan Belanda.
- d. Penghubung ke daerah R.I. Yogyakarta ialah Serma Endang Surjana dan Sersan Udje.

Memasukkan anggota-anggota gerilya menjadi pegawai atau anggota pasukan Belanda, di antaranya :

- a. Letda Memed Suparna jadi jongos opsir Belanda di jalan Dago Bandung
- b. Letda Karna Adiwisastra bekerja di Apotek De Vijzel Jalan Dago
- c. Letda Djaka Sumedi jadi anggota Polisi di Tegalega Bandung
- d. Letda Tatang Somantri jadi guru SD Babakan Surabaya Bandung
- e. Muchtar jadi pegawai kesehatan

Sebagai pedagang di antaranya Iwih Tarwin sebagai pedagang barabandan di Pasar Andir dan Idjan pedagang kain di Pasar Babatan Bandung.

- a. Mado Miharna sebagai pengurus PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia)
- b. Rachman Sainan sebagai pengurus Buruh Becak
- c. Radi sebagai pengurus PPDI
- d. Memed Ardiwilaga mendekati pemerintahan Negara Pasundan.

Demikian makin lancarnya hubungan dan kegiatan-kegiatan yang makin meningkat, setelah bulan Agustus 1948 bertambah banyak pasukan-pasukan yang bergabung ke dalam kesatuan Brigade Citarum, di antaranya :

1. Paris (Pasundan Seluruh Indonesia) pimpinan Letda Buntaran yang bergerak di kota Garut
2. Hayam Wuruk pimpinan Kusnadi dan Endjum di daerah Cisarupan Garut)
3. PRI pimpinan seorang Guru (Pak Arum) di daerah Samarang Garut

4. Pasukan pemuda pimpinan Toha di daerah Cilawu Ngamplang Garut
5. Jaya Baya pimpinan Lettu Slamet yang bergerak di daerah Tasikmalaya
6. FRAP (Front Anti Penjajah) di daerah Ciamis
7. Bahu Reksa pimpinan Ojon di daerah Cipaku Majalaya Bandung
8. Detasemen Citarik pimpinan Kartika di daerah Paseh Majalaya Bandung
9. Barisan Pemuda pimpinan Letda Tarmedi di daerah Ciparay Bandung
10. Pasukan Jago pimpinan Ojo Tosin di daerah Cangkring, Manggahang, Ciparay, Bandung
11. Gagak Lumayung pimpinan Djodjo di daerah Ciater Subang
12. Detasemen Cisangkuy di daerah Banjaran Bandung
13. Pasukan Samiaji pimpinan Cece Subrata di daerah Sukabumi

Organisasi gerilya disusun secara bertingkat dengan pucuk pimpinan berkedudukan di kota Bandung, Lettu Suprpto dengan nama samaran Djajeng Rono. Di tiap-tiap kabupaten diadakan koordinator yang mengurus pasukan-pasukan di daerah kabupaten masing-masing sampai ke tingkat kelurahan dibarengi dengan pembinaan pemerintahan bayangan.

Logika untuk membiayai pasukan serta anggota gerilya lainnya didukung dari rakyat melalui pemerintahan bayangan, organisasi-organisasi massa, para dermawan di antaranya dari Ali Oemar Mansjur, pemilik pabrik gelas di Cisadas Bandung, para pedagang, dan hasil hasil sergapan perlengkapan musuh.

Di samping kekuatan pasukan yang makin besar, pembinaan masyarakat melalui pemerintahan bayangan menambah simpati masyarakat kepada gerilya. Dari laporan-laporan masyarakat dengan mudah diketahui siapa-siapa dan kekuatan-kekuatan apa di luar kekuatan Belanda yang memusuhi R.I. Pada mulanya hubungan dengan pasukan Sabilillah dan Hizbullah kurang lebih selama tiga bulan selalu baik. Tetapi kemudian menjadi retak dan pecah dan selanjutnya menjadi bermusuhan, sesudah pasukan-pasukan Sabilillah Hizbullah memusatkan kekuatannya di daerah Gunung Cupu, Cikoneng, Ciamis dalam usahanya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

#### **6. Usaha memperkuat gerilya Brigade Citarum.**

Setelah berdirinya Negara Pasundan perjuangan pasukan gerilya di Jawa Barat makin bertambah berat, sehingga pimpinan gerilya Brigade Citarum merasa perlu segera mengirim caraka ke Yogyakarta untuk melaporkan keadaan di Jawa barat dan minta supaya dirembeskan pasukan yang dihijrahkan karena sekarang gerilya harus menghadapi dua front : Belanda dan tentara federal Negara Pasundan, serta Hizbullah - Sabilillah Gunung Cupu.

Suatu kebetulan dari Yogya pada akhir bulan Agustus 1948 datang kurir dikirim oleh Mayor Moch. Sudarman minta laporan keadaan gerilya. Orang yang dikirim sebagai kurir itu ialah Kopral Yahya tidak dikembalikan lagi ke Yogya, tetapi dikirim orang lain ialah Serma Endang Surjana dan Sersan Udje, membawa obat-obatan yang didapat dari para pejuang dan bekerja di Apotik serta membawa laporan yang isinya ialah : 10)

- a. Melaporkan bahwa Letkol Sutoko telah tertangkap Belanda
- b. Situasi di Jawa Barat dengan terbentuknya tentera federal Pasundan dan gerakan D.I. Gunung Cupu sangat membahayakan kedudukan gerilya R.I
- c. Mengingat hal-hal tersebut titik a dan b meminta supaya diadakan perembesan pasukan Siliwangi ke Jawa Barat

Di Yogyakarta kurir bertemu dengan Mayor Moch Sudarman dan menghubungi Sewaka (Gubernur Jawa Barat) serta menghadap Kolonel A.H. Nasution, melaporkan situasi Jawa Barat dan khususnya keadaan gerilya Brigade Citarum.

Dari Mayor Moch. Sudarman kurir membawa surat perintah dan advis mengenai gerakan gerilya, yang antara lain isi pokoknya sebagai berikut : 11)

- a. Jangan mengirimkan apa-apa pergunakan saja untuk kepentingan gerilya
- b. Karena Sutoko tertangkap, usahakan menemui Mashudi di Jalan Cikini No. 9 Jakarta
- c. Pasukan gerilya Siliwangi sebanyak satu batalyon sedang dalam perjalanan menuju daerah Jawa Barat dengan arah Ciremei

Setelah menerima perintah dan advis tersebut pimpinan gerilya segera mengadakan rapat di Dora, Parentas - Cisayong - Tasikmalaya membicarakan peningkatan gerakan dan pengembangan hubungan dengan pasukan-pasukan lain dan pasukan gerilya Siliwangi (Batalyon Rukman) yang dirembeskan ke daerah Ciremei. Diputuskan pula supaya segera mengirim kurir ke Jakarta untuk menghubungi Mashudi.

Ternyata kegiatan di Dora itu sudah tercium oleh Belanda yang tidak lama kemudian setelah rapat selesai pasukan Belanda mengadakan serangan. Notulis rapat seorang Jepang bernama Abubakar tertangkap beserta catetan-catatan yang ditulisnya dengan huruf Jepang, yang kemudian ditembak mati oleh pasukan Belanda. 12)

Pimpinan gerilya segera menghubungi Mashudi di Cikini no. 9 Jakarta untuk menyampaikan pesan dari Yogyakarta supaya beliau bersedia memegang pucuk pimpinan gerilya. Tetapi kesibukan-kesibukan yang dihadapi oleh Mashudi di Jakarta tidak memungkinkan beliau untuk memegang pucuk pimpinan gerilya. 13) Oleh karena itu, praktis pimpinan gerilya dilaksanakan oleh Lettu Suprpto dengan empat kedudukan yang tetap di Pasar Babatan, dan Lettu Tjutju Adiwinata memegang komando pelaksana gerakan sedangkan aksi-aksi gerilya dilimpahkan kepada kebijaksanaan

komandan-komandan pasukan bekerjasama dengan setiap pasukan lainnya. Untuk pengamanan surat-surat perintah dan lain-lain yang dibawa kurir, abjad yang dipergunakan untuk menulis dirubah susunannya sehingga hanya dapat dibaca oleh orang-orang tertentu saja.

a. Setiap huruf tetap tidak mendapatkan perubahan.

b. Untuk huruf mati diadakan penukaran sebagai berikut :

b c d f g h j k l m

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

z x w v t s r q p n

Hurub b ditukar dengan z dan z dengan b, c diturkar dengan x dan x dengan c dan seterusnya seperti susunan di atas. Sehingga apabila menulis **Rapat kilat**, cara menulisnya adalah **Jalag cipag**.<sup>14)</sup>

Kegiatan pembinaan masyarakat di samping pengembangan kekuatan pasukan semakin ditingkatkan, jalur hubungan semakin bertambah luas dan lancar berkat bantuan masyarakat dalam pembinaan pemerintahan bayangan.

## 7. Memperlancar kembalinya pasukan Divisi Siliwangi

Dengan tetap terpeliharanya daerah-daerah kantong gerilya di Jawa Barat khususnya di daerah Priangan, maka ketika pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat (Long March— setelah pecahnya Agresi Militer Belanda kedua, pada dasarnya tidak banyak mengalami kesulitan sekalipun di Jawa Barat telah timbul kekuatan DI/TII Kartosuwiryo dengan pusat kekuatannya di daerah Priangan Timur, sebagai lawan baru dan menganggap pasukan Siliwangi sebagai musuh. Demikian di antaranya Staf Divisi Siliwangi menuju Buah Dua, Sumedang, karena di daerah itu berkedudukan Batalyon Hadi yang tidak dihjraikan. Berkat jalinan kerjasama antara pasukan gerilya dengan pemerintahan bayangan dalam membina masyarakat.

Setelah kembalinya pasukan Siliwangi makin bertambah besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bayangan. Sebagaimana diakui oleh Jenderal Angles selaku penguasa militer Belanda di Jawa Barat pada pertemuan tanggal 9 November 1949 dengan Sewaka selaku anggota IJC, bahwa pemerintah Negara Pasundan kurang memiliki wibawa terhadap rakyat disebabkan oleh adanya pemerintahan bayangan sipil pihak republik. 15)

## 8. Kesimpulan

Setelah Persetujuan Renville ditandatangani dan pasukan Siliwangi harus hijrah ke belakang garis Van Mook, maka keadaan di Jawa Barat sangat menguntungkan sekali pihak Belanda khususnya dalam usahanya untuk mendirikan Negara Pasundan. Keadaan itu disadari oleh Pemerintah R.I. yang pada tanggal 2 Februari 1948 mengeluarkan pengumuman No. 3 tahun 1948, bahwa orang-orang dan pegawai-pegawai Republik di daerah pendudukan Belanda diperkenankan untuk ikutserta dalam konferensi-konferensi dan pemilihan-pemilihan, baik untuk dipilih maupun untuk memilih yang diadakan oleh pemerintah pendudukan Belanda. Mulailah banyak yang turun ke kota bagi orang-orang yang sudah terjepit dalam penghidupan pengungsian, dan orang-orang dari golongan politik mulai menceburkan diri ikutserta dalam konferensi dan pemilihan dengan tujuan mempergunakan Negara Pasundan sebagai media perjuangan. Di samping itu bagi orang-orang yang masih kuat untuk mengadakan gerilya tetap melancarkan kegiatannya, baik gerilya di bidang bersenjata maupun di bidang pemerintahan sipil dengan membentuk Pemerintah R.I. bayangan. Bahwa kegiatan gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah, merupakan salah satu objek penelitian yang perlu mendapat perhatian para peneliti dan penulis sejarah. Pengalaman para gerilyawan di bidang bersenjata untuk daerah Jawa Barat yang penelitiannya dimulai dari daerah Priangan Timur, merupakan titik tolak daerah penelitian karena kedudukan komando berada di daerah itu, sebelum berangkat hijrah ke daerah Jawa Tengah.

Sebagai salah satu objek penelitian, pengalaman gerilyawan di daerah Priangan (gerilyawan R.I.) baik yang bergerak di bidang perjuangan bersenjata maupun sosial-politik, merupakan objek penelitian dalam rangka menggali pengalaman awal tumbuhnya Dwifungsi ABRI, doktrin Hankamrata, hubungan sipil-militer dalam rangka kemanunggalan ABRI dan Rakyat.-

**tanu suherly**

## Catatan

1. Bureau Wk. Perdana Menteri Republik Indonesia, Bag. Penerangan, **Sari Pers No. 51**, Djakarta, 3 Pebruari 1948, hal. 13.
2. Sewaka, **Tjorat-tjoret dari djaman kedjaman**, Bandung, 1955, hal. 107 - 108.
3. Tjutju Adiwinata, Momon, **Wawancara**, Bandung, 15 September 1967.
3. Tjutju Adiwinata, Momon, **Wawancara**, Bandung, 15 September 1967.
4. **Ibid.**
5. **Ibid**, Catatan yang sama pada waktu diadakan wawancara oleh DR. A.H. Nasution di Jakarta tahun 1977. Lihat DR. A.H. Nasution, **Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Periode Renville**, jilid 7, Bandung, 1978, hal 225.
6. Tjutju Adiwinata, Momon, **op. cit.**,
7. **Ibid.**
8. **Ibid.**
9. Tjutju Adiwinata, Karna Adiwisastra, Endang Surjana, Ibu Mar-konah Mado Moharna, **Wawancara**, Oktober 1967.
10. Endang Surjana, **Wawancara**, Oktober 1967.
11. Tjutju Adiwinata, Endang Surjana, **Wawancara**, Oktober 1967.
12. **Ibid.**
13. **Ibid.**
14. **Ibid.**
15. Sewaka, **op. cit.**, hal 108.

## LAHIRNYA BADAN-BADAN PERJUANGAN DAN BKR DI KOTA BANDUNG SAMPAI TIMBULNYA MDPP/MPPP

Oleh : J. Jogaswara

### 1. Kota Bandung pada waktu Proklamasi Kemerdekaan

Beberapa pemimpin rakyat di Kota Bandung telah mendengar desas-desus, bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Untuk membuktikan kebenaran berita itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka mengutus R. Djerman Prawirawinata pergi ke Jakarta. Ternyata berita itu benar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.30 Waktu Jawa Jaman Jepang atau jam. 10.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Tidak lama kemudian kira-kira pada jam 11.15 Waktu Jaman Jepang salah seorang mar-konis dari Kantor Berita DOMEI Bandung menerima teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Kantor DOMEI Pusat Jakarta berbunyi :

Berita Radio DOMEI Bandung

bra djam 1200 aug tg 17

domei : 007 Djakarta = (proklamasi)

kami bangsa INDONESIA dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia titik hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan dll diselenggarakan dgn tjara seksama dan dlm tempo jang se-singkat-singkatnja titik djakarta hari toedjoh belas boelan de-lapan 2605 titik atas nama bangsa INDONESIA soekarno strip hatta

rd at 1205.1)

Kemudian teks Proklamasi itu dengan cepat diserahkan kepada Redaksi DOMEI Bandung yang terdiri dari A.Z. Palindih, Muhamad Adam, Lalu Damila dan Matulesy. Teks Proklamasi disalin dengan huruf-huruf besar lalu ditempelkan di salah satu papan tulis yang ada di depan Kantor DOMEI ditepi Jalan Dago (sekarang Jalan Ir. H.Juanda) Bandung.

Ketika Bupati Bandung, Suriasaputra mendengar berita adanya teks Proklamasi di Kantor DOMEI, segera menilpon dan berpesan agar teks Proklamasi diperbanyak dan disebarluaskan kepada rakyat banyak. Radio Hosokyoku (kemudian bernama RRI) Bandung menerima selebar teks Proklamasi dan disiarkan pada malam harinya.

Masih pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 siang Redaktur surat kabar "Tjahaja" telah menerima telegram dari Kantor Berita DOMEI Pusat Jakarta, isinya berita Proklamasi Kemerdekaan. Pimpinan dan Pegawai surat kabar "Tjahaja" setelah yakin bahwa isi telegram ini adalah berita yang di tunggu-tunggu, kemudian teks Proklamsi ditulis dengan huruf-huruf besar di papan tulis oleh Barry Rukman dan diletakkan di muka Kantor surat kabar

"Tjahaja". Maksudnya agar supaya dapat segera dibaca dan diketahui umum. Dalam waktu yang singkat banyak orang lewat berhenti untuk membaca apa yang tertera di papan tulis itu. Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan segera tersebar ke seluruh pelosok Kota Bandung. Rupa-rupanya Jepang mengetahuinya lalu menyuruh mengambil papan tulis itu, dengan alasan adanya berita susulan dari DOMEI yang isinya adalah sebagai berikut :

bra djam 1300 aug tg 17  
domei : 009 (perhatikan)  
haroes haroes segera diberitahoekan  
kepada kantor2 ssk dan kantor2  
tjabang goenhoedoeboe didaerah masing2 habis  
010 pada hari tanggal 17 boelan 8 taohen 2605  
moengkin soedah disiarkan kabar tentang pernyataan  
kemerdekaan negara INDONESIA akan tetapi berita tsb  
sama sekali dilarang oleh goenhoedoeboe oentoek disiarkan  
titik tindakan2 pemerintah belatentara terhadap kemerdekaan  
Indonesia tidak ada perobahan sesoeatoepoen habis

rd at 1307.22

Atje Bastaman seorang wartawan surat kabar "Tjahaja" (kelak diganti namanya menjadi surat kabar "Soeara Merdeka") dan Lili Sasmita berusaha mencetak Teks Proklamasi untuk disebarluaskan, tetapi ternyata kedahuluhan oleh Percetakan "Siliwangi" yang telah berhasil mencetak dan menyebarkan selebaran teks Proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Selebaran teks Proklamasi itu dicetak dengan tinta merah. Percetakan "Siliwangi" memperoleh teks Proklamasi dari pemuda-pemuda yang datang dari Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 malam. 3)

Pemancar Radio Bandung yang telah menerima selebar teks Proklamasi menyiarkan teks itu pada malam tanggal 17 Agustus 1945 sebanyak limakali, empat kali dalam bahasa Indonesia dan satu kali dalam bahasa Inggris. Pembacaan teks Proklamasi dilakukan oleh tiga orang penyiar secara bergiliran. Mereka itu adalah Sakti Alamsyah, Sam Amir dan Abdul Hanan. Setiap selesai pembacaan teks Proklamasi selalu diselingi dengan instrumental lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Proklamasi dilakukan di Stasiun Radio Tegallega Bandung. Sementara itu Pemancar Radio Bandung sudah mengumandangkan sebutan Radio Republik Indonesia. Penyiaran teks Proklamasi berhasil dengan baik berkat keberanian dan kerjasama antara pemuda-pemuda Radio Bandung dengan para pemuda PTT, sehingga dapat didengar di seluruh Indonesia dan luar negeri, misalnya di Asia, Australia dan Amerika Serikat. 4)

Atje Bastaman untuk kedua kalinya berusaha menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia singgah dulu di panggung Tegallega, lalu me-

ngumpulkan orang-orang yang ada di sana. Ia membaca teks Proklamasi di hadapan mereka. Mereka menyambut berita itu dengan gembira. Bahkan seorang tukang obat bernama Jajuli sebelum menjual obat, terlebih dahulu dikatakan di luar kepala teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di hadapan penonton-penontonnya, disertai komentar bahwa Negara Indonesia telah merdeka. Begitu pula dalang Partasuwanda dan pesinden (biduan) Ibu Arnesah pada waktu pertunjukan wayang turut menyebarkan berita kepada para penonton bahwa Indonesia sudah menjadi negara merdeka.5)

## **2. Lahirnya Badan-badan Perjuangan.**

Badan-badan Perjuangan atau Badan-badan Kelayakaran adalah barisan atau pasukan rakyat di mana anggota-anggotanya kebanyakan terdiri dari para pemuda yang dibentuk pada awal Revolusi Fisik (dalam tahun 1945) dengan senjata sederhana, seperti golok, pedang, bambu runcing dan senjata api. Ada badan perjuangan yang didirikan di jaman Jepang, tetapi tetap hidup di masa Revolusi Fisik, yaitu Hizbullah, Sabilillah, Barisan Pelopor atau Suisintai dan Pasukan Berani Mati.

Barisan Pelopor merupakan badan semi militer yang didirikan pada tanggal 1 Nopember 1944. Kemudian didirikan Barisan Berani Mati (Jibakutai) pada tanggal 8 Desember 1944 dan Hizbullah atau Kaikyo Seinen Teishintai pada tanggal 15 Desember 1944. Anggota Barisan Pelopor harus berusia sekurang-kurangnya 20 tahun. Barisan Pelopor termasuk salah satu organisasi semi militer yang tetap hidup sesudah akhir jaman pendudukan Jepang dan memainkan peranan dalam awal Revolusi Fisik. 6)

Barisan Berani Mati atau Jibakutai diilhami oleh adanya penerbang bunuh diri Kamikaze. Jibakutai merupakan ungkapan dari pada tekad pemuda Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya terhadap musuh (pada waktu itu adalah Sekutu). Jumlah anggota Barisan Berani Mati diperkirakan 50.000 orang. Di Kota Bandung pada awal Revolusi Fisik terdapat nama Barisan Berani Mati dipimpin oleh Efendi. 7)

Hizbullah artinya "Tentara Allah" direncanakan sebagai korps cadangan bagi Peta. Beberapa perwira Hizbullah yang terdiri dari kiai diberi tugas untuk melatih pasukan-pasukan baru. Hizbullah secara eksplisit adalah tentara Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada pertengahan bulan Desember 1944 perwakilan Federasi Islam telah mengadakan suatu perjalanan keliling Pulau Jawa dengan maksud mengadakan inspeksi terhadap Sukarelawan Hizbullah di semua keresidenan. 8)

Tanggapan positif Umat Islam Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan, khususnya dalam mengisi dan menegakkan Negara Republik Indonesia dengan mengadakan Konggres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 di Yogyakarta. Konggres itu telah menghasilkan tiga keputusan sebagai berikut :

1. Memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi'sabilillah
2. Memperkuat pertahanan Indonesia dengan berbagai-bagai usaha yang diwajibkan oleh agama Islam
3. Menyesuaikan susunan dari sifat Masyumi sebagai Pusat Persatuan Umat Islam Indonesia, sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan Umat Islam Indonesia seluruhnya. 9)

Di Jawa Barat pada awal revolusi terdapat dua divisi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainal Bakhri dan Samsul Bakhri. Pada waktu itu banyak anggota Hizbullah yang telah mendapat latihan di Cibarusana dan Gunung Kasur. Sedangkan di kota Bandung terdapat beberapa kelompok Hizbullah, tetapi yang menonjol ada dua, pertama yang dipimpin oleh Aminuddin Hamzah berlokasi di daerah Cicadas (daerah kota Bandung sebelah timur), dan yang kedua dipimpin oleh Husinsyah berlokasi di pinggir kota Bandung sebelah barat-daya. Anggota-anggota Hizbullah kota Bandung selain santri juga terdiri dari para pemuda Islam, sedangkan anggota-anggota Hizbullah di luar kota kebanyakan terdiri dari santri (murid/siswa yang sedang belajar agama Islam di pesantren). Satu kompi anggota-anggota Hizbullah pimpinan Aminuddin Hamzah kebanyakan bukan santri. Komandan Hizbullah kota Bandung adalah Z. Mutaqin. Tokoh-tokoh Hizbullah lainnya adalah: Kamran, Hutariah, Gofur Ismail, H. Juanidi, Zainal, Kadar Solihat, dan Mokhtar. 10)

Selain Hizbullah ada lagi organisasi perjuangan Islam yang lain, yaitu Sabilillah singkatan dari kata jihat fi'sabilillah. Anggota-anggota Sabilillah terdiri dari anggota-anggota Masyumi tanpa batas umur. Akibatnya sebagian besar anggota-anggota Sabilillah berasal dari golongan tua. Tokoh-tokoh Sabilillah Keresidenan Priangan adalah Ismail Napu, Isa Anahari, Rusyad Nurdin, Haji Zaenudin, Haji Akhdia, Ajengan Taho, A. Mukhtar dan Kiai Yusuf Tajiri.

Dalam tahun 1945 Sutomo atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BBRI di Surabaya. Ia juga turut aktif dalam organisasi yang bernama Pemuda Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 September 1945 di Surabaya. Begitu pula di kota Bandung didirikan BPRI yang merupakan cabang dari BPRI Surabaya. Anggotanya kebanyakan bekas anggota Pasukan Pelopor yang didirikan di masa pendudukan Jepang. Pada waktu itu Pasukan Pelopor Kota Bandung dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Sebagian dari Pasukan Pelopor sesudah Proklamasi Kemerdekaan menjadi anggota BPRI Bandung yang dipimpin oleh Suryadi dan Rivai.

Pada waktu Revolusi Fisik dokter Muwardi, Sudiri, Ahmad Santoso dan Mulyaadi Joyomartono mendirikan Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI di Kota Sala. Di kota Bandung didirikan BBRI yang merupakan cabang dari BBRI Sala dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuncak dan Idao Garnida. Barisan Banteng

Republik Kota Bandung mempunyai pasukan penggempur dipimpin oleh Rakhmat Sulaeman dengan disertai oleh pemuda-pemuda Ben Alamsyah, Toha Jonjon, Isak, Tirtaatmaja dan lain-lain. 11)

Jumlah anggota BBRI Kota Bandung ketika dibentuk berjumlah 25 orang, kebanyakan terdiri dari pemuda-pemuda daerah Banceuy. Mula-mula Markas BBRI terletak di daerah Banceuy, kemudian dipindahkan ke Bjonggaok - Situsaeur - Jamika. Pasukan Peggempur BBRI memiliki 11 pusuk karaben Jepang dan sebuah senapan mesin. Tanda anggota Pasukan BBRI berupa sepotong kain yang bergambar kepala banteng berwarna merah dalam sebuah bulatan berwarna merah. Tanda anggota itu dipasang pada lengan sebelah kiri. 12)

Di kota Bandung terdapat pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka datang ke Kota Bandung bermaksud untuk mencari ilmu, berdagang dan bekerja. Pada waktu Revolusi Fisik, mereka sebagai pemuda Indonesia dengan penuh kesadaran dan keikhlasan turut aktif berjuang di kota Bandung. Pemuda-pemuda dari Maluku mendirikan suatu organisasi perjuangan yang diberi nama Pemuda Indonesia Maluku atau PIM dipimpin oleh Pellaupessy. Sedangkan para pemuda yang berasal dari Sulawesi mendirikan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS dengan tokoh-tokohnya antara lain Karundeng dan Rorimpandey.

Begitu pula para pemuda dari daerah Tapanuli tidak mau ketinggalan dengan mendirikan Pasukan Istimewa (PI). Tokoh-tokoh PI antara lain Pakpahan, Hutauruk, Pohan, Yosef Simanjuntak dan Ali Nafiah. Anggota-anggota PI adayang berasal dari polisi, pemuda, pelajar dan mahasiswa. Mereka yang berasal dari polisi ketika pindah ke PI membawa senapan dan mesiu. Markas PI terletak di daerah Kebon Kelapa. 13)

Pada tanggal 1 September 1945 di Markas Menteng 31 Jakarta telah dibentuk sebuah organisasi yang disebut Angkatan Pemuda Indonesia (API). Ketua API Pusat di Jakarta adalah Wikana. Dalam awal Revolusi Fisik Angkatan Pemuda Indonesia Cabang Bandung dibentuk dengan pimpinannya antara lain Astrawinata, Maulama, Wasito dan Heru Sutrisno. Markas API tereltek di Jalan Lengkong Besar No. 74 Bandung. API Karesidenan Priangan tidak mau meleburkan diri ke dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 10 Nopember 1945 di Yogyakarta. 13)

Pada akhir Agustus 1945 di kota Bandung didirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang bermarkas di Jalan Tamblong. Ketua PPPI adalah Suprpto. Kemudian PPPI berubah namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Markas PRI di Gedung Cioda (sekarang Toko "Kota Tujuh" Jalan Asia Afrika) Bandung. Pada pertengahan bulan Oktober 1945 Markas PRI pindah ke Kebon Cau.

PRI mempunyai pasukan di setiap kantor yang dipersiapkan untuk mengambilalih kekuasaan dari tangan Jepang. Selain dari pada itu PRI mempunyai pasukan-pasukan di Andir, Sukajadi,

Pasirkaliki, Kaca-kaca Wetan, Kosambi, Kiaracondong dan Cicadas. Pemimpin dari semua pasukan-pasukan PRI adalah Suwasis. Ketua PRI adalah Sujono, pimpinan bagian pembelaan yaitu Sutoko, Mashudi, Suryono dan Abdul Jabar. Kemudian PRI meleburkan diri kedalam Pesindo bersama-sama dengan API, Angkatan Muda PTT dan Angkatan Muda Kereta Api sebagai realisasi Konggres Pemuda tanggal 10 Nopember 1945 di Yogyakarta. 14)

Laskar Rakyat dibentuk oleh Walikota Bandung Syamsurizal dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara ketenteraman Kota Bandung. Pada waktu Laskar Rakyat dibentuk keadaan kota Bandung kurang aman. Anggaran Dasar organisasi ini dibuat oleh Walikota Bandung Syamsurizal bersama-sama dengan Sekretaris Kota Bandung Basuni. Pimpinan Lasykar Rakyat Kota Bandung diserahkan oleh Walikota Bandung kepada R. Ema Bratakusumah. Markasnya terletak di Jalan Kautaman Istri, yaitu di rumah R. Ema Bratakusumah. 15)

Pasukan Beruang Merah dipimpin oleh Abdulah Saleh. Pasukan ini mula-mula adalah Pasukan Pengawal Komite Nasional Indonesia Propinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh Oto Iskandardinata. KNI nya adalah Oto Iskandardinata. Ada beberapa bekas perwira Peta yang diangkat menjadi anggota Pasukan Pengawal KNI Jawa Barat. Kantor KNI Jawa Barat bertempat di Gedung Pakuan (sekarang tempat kediaman resmi Gubernur Jawa Barat). Kemudian ketika KNI Jawa Barat pindah ke Tasikmalaya Pasukan Pengawal pun turutserta. Di tempat yang baru ini Pasukan Pengawal KNI Jawa Barat dibiayai oleh KNI Kabupaten Tasikmalaya.

Pasukan Pengawal KNI Jawa Barat makin lama makin bertambah banyak anggotanya, sehingga mencapai satu batalion dan sejak itu diberi nama pasukan "Beruang Merah". Pasukan ini diharapkan akan menjadi lawan tangguh dari "**Fighting Cock**" (Divisi India ke 23 yang mempunyai lambang ayam jago/jantan yang dapat menahan serangan tentara Jepang ke India). Dalam tahun 1945 sebagian dari divisi 23 bertugas dikota Bandung. Karena keadaan kota Bandung makin lama makin gawat di mana kekuatan di pihak kita perlu ditambah, maka pasukan Beruang Merah kembali bertugas di kota Bandung. markasnya bertempat di daerah Pesawahan. Persenjataan Pasukan Beruang Merah cukup bahkan memiliki beberapa buah mortir. 16).

Badan perjuangan lain yang didirikan di kota Bandung adalah Pasukan Garuda Putih yang dipimpin oleh Sinaga, dan Barisan Merah Putih atau BMP dipimpin antara lain oleh Nukman, Abdulah Rais dan A.Saat. Markas BMP terletak di daerah Ciateul.

Di kota Bandung terdapat pasukan wanita yang diberi nama Lasykar Wanita Indonesia atau Lasywi. Dengan demikian kaum wanita tidak mau ketinggalan dari kaum pria dalam perjuangan kemerdekaan. Lasywi didirikan oleh Ibu Yati Aruji Karta-

winata pada tanggal 12 Oktober 1945 di paviliun Socitet Mardiharjo Jalan Pangeran Sumedang No. 91 (sekarang jalan Oto Iskandardinata) Bandung. Tempat ini adalah rumah Ibu Yati Aruji Kartawinata dan dijadikan Markas Lasymi. Mula-mula jumlah anggota 21 orang, lama kelamaan anggotanya bertambah terutama gadis-gadis SMP, SGA, SMT, dan gadis-gadis lain yang berumur 18 tahun ke atas, sehingga mencapai jumlah 300 orang. Adapun susunan pengurus Lasymi adalah sebagai berikut :

1. Pelindung/ Penasehat :
  - a. Bapak Aruji Kartawinata
  - b. Bapak Omom Abdurakhman
  - c. Bapak Syamsu
  - d. Ibu D. Parjaman
  - e. Ibu Kurniasih Suranata
2. Ketua : Ibu Yati Aruji Kartawinata
3. Wakil Ketua : Ibu Juhaeni Maskun
4. Penulis I : Teja Setiasih (Eja)
- Penulis II : Kusmartinah
5. Bendahara I : Maemunah
- Bendahara II : Siti Sabariah
6. Pembantu Umum :
  - a. Kustiani
  - b. Suliah
7. Ajudan :
  - a. Surati
  - b. Nani Ramani

Seksi - seksi :

1. Perlengkapan : Yayat
2. Dapur Umum :
  - a. Rosmana
  - b. Imun Mulyani
3. Palang Merah :
  - a. Yahtiamah
  - b. Roosmini
4. Sosial :
  - a. Kayati
  - b. Jootje
5. Intelijen :
  - a. Nani Sumarni
  - b. Sisbandiyah
6. Penghubung :
  - a. Atikah
  - b. Perry

Kelasykaran dibagi menjadi dua seksi dan 8 brigade (regu) :

1. Kepala Seksi I : Sariah
2. Kepala Seksi II : Sisbandiyah
3. Kepala Brigade I : Tuti Kartabrata
4. Kepala Brigade 2 : Arinah
5. Kepala Brigade 3 : Hermiati
6. Kepala Brigade 4 : Suprapti
7. Kepala Brigade 5 : Sukarmi
8. Kepala Brigade 6 : Sekarningsih
9. Kepala Brigade 7 : Hartini

10. Kepala Brigade 8 : Hindun  
11. Ordonans : Willy 15)

Mengapa Lasywi sejak berdirinya sudah mempunyai susunan organisasi yang baik ? Hal itu bisa terjadi karena Ketua Lasywi memiliki pendidikan dan pengalaman berorganisasi yang baik. Pada waktu remaja putri, ibu Yati Aruji Kartawinata telah mendapat yang cukup, yaitu HIS dan Normal Kweekschool. Pengalaman di bidang jorganisasi dimulai ketika menjadi pimpinan SIAP (Syarikat Islam Afdeling Pandu Putri), kemudian di Kepanduan Muslimin Indonesia dan dari tahun 1936 sampai tahun 1940 menjadi Ketua Departemen Wanita PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Selain itu juga berkat bimbingan suaminya sendiri, yaitu Bapak Aruji Kartawinata. Adapun yang mendorong untuk terjun ke dalam perjuangan kemerdekaan, karena ingin meneruskan cita-cita dan perjuangan R.A. Kartini. Dengan demikian ia dapat menghidupkan jiwa perjuangan R.A. Kartini di dalam hati para wanita pada waktu itu (1945 - 1949). 16)

Pengalaman dan peranan Lasywi dalam masa Perjuangan Kemerdekaan cukup banyak, mendebarakan hati, mengerikan dan meminta pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 25 Nopember 1945 Cikapundung banjir sehingga menelan korban tidak sedikit di kalangan penduduk kota Bandung. Mereka kehilangan rumah tempat tinggal, barang atau harta-benda bahkan banyak yang meninggal dunia. Tentu yang luka-luka pun banyak, bangkai binatang bergelimpangan di bekas banjir. Melihat kenyataan itu Lasywi tidak tinggal diam, bahkan segera turuntangan untuk membantu para korban dengan memberikan pertolongan pertama dan membawa mereka ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota Bandung. Mayat-mayat yang bergelimpangan di daerah bekas banjir di angkut ke Pos-pos Palang Merah. Selain itu untuk meringankan para korban yang kehilangan tempat tinggal dan harta-benda, segera dibuka dapur umum. Anggota-anggota Seksi Palang Merah Lasywi turut aktif membantu di rumah sakit-rumah sakit.

Pada tanggal 21 dan 23 Desember 1945 Cicadas dibom oleh pesawat terbang dan diserbu oleh pasukan serta tank Inggris. Menurut laporan Pemerintah Kota dan Badan Pekerja KNI Daerah kota Bandung akibat pemboman dan serangan itu 335 buah rumah dan gedung hancur rata dengan tanah, 50 buah rumah rusak berat, korban jiwa sebanyak 60 orang Cina dan 15 orang Indonesia. Selain itu pemboman tersebut mengakibatkan lebih kurang 8000 orang rakyat mengungsi di antaranya 1500 orang kehilangan tempat tinggal. 17) Lasywi segera mengerahkan dua regu Palang Merah dan dua regu Dapur Umum. Mereka juga berusaha untuk membantu penduduk yang hendak mengungsi ke luar kota atau ke tempat-tempat yang aman.

Dalam bulan Januari 1946 regu intelijen Lasywi ditugaskan untuk mengadakan penyelidikan di daerah Bandung Utara. Pada

waktu itu Bandung Utara dikuasai oleh tentara Inggris. Mereka terdiri dari dua orang anggota Lasywi, yaitu Nani Sumarni dan Siti Sabariyah serta empat anggota TRIP. Regu intelijen itu mengalami nasib sial. Sebab tertangkap oleh tentara Gurkha dan dibawa ke-Penjara Glodok di Jakarta, kecuali Siswadi dari TRIP dibuang ke-Nusakambangan. Nani Sumarni dan Siti Sabariyah ditahan selama dua minggu, kemudian dibebaskan setelah ditukar dengan tawanan tentara Gurkha.

Bertepatan dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, Lasywi bersama semua pejuang dan rakyat meninggalkan kota Bandung bergerak menuju ke Ciparay di daerah Bandung Selatan. Di tempat yang baru ini Lasywi bergabung dengan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MPPP. Kemudian Lasywi diserahi tugas untuk mengurus Dapur Umum bagi para pejuang yang ada di daerah pertempuran sektor Bandung Selatan. Berhubung dengan itu maka para anggota Lasywi disebar ke setiap kesatuan untuk menyelenggarakan Dapur Umum dan Palang Merah.

Dapur Pusat diadakan di Ciparay yang mendapat tugas mengurus makanan untuk pasukan-pasukan yang berada di front Dayeuhkolot. Mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat mulai dari mencari bahan makanan, mengolahnya menjadi makanan sampai mengantarnya ke garis depan. Nani Ramani diberi tugas untuk mengawal makanan ke garis depan di Dayeuhkolot. Sedangkan sopir yang mengemudikan gerobag-gerobag Lasywi adalah Willy yang bertindak sebagai ordonans. Bila kebetulan sedang tidak ada kendaraan untuk mengangkut "Ompreng", Nani Ramani tidak segan-segan untuk mencegat kendaraan-kendaraan perorangan, bahkan pernah suatu ketika mobil Panglima Divisi, Kolonel A.H. Nasution dipergunakan untuk mengangkut dan mengantarkan makanan ke garis depan. Ketika musuh mulai mengarahkan sasaran tembakan mortir dan meriam ke Ciparay, maka Markas Lasywi dipindahkan ke Majalaya.

Lasywi kekurangan tenaga dan mendapat bantuan tenaga dari PPI Garut serta Lasywi dari Yogyakarta, Madiun, Sala dan Magelang. Ketika Majalaya mengalami pemboman empat orang anggota Lasywi gugur dan 10 orang menderita luka-luka. Kemudian Markas Lasywi dipindahkan ke Tasikmalaya dan menggabungkan diri dengan Residen Tentara Perjuangan atau RTP yang bermarkas di Padayungan. Karena Tasikmalaya cukup aman maka sebagian dari anggota Lasywi diperbantukan di Jawatan Sosial mengurus para pengungsi, sedangkan sebagian lagi mengerjakan administrasi di Staf RTP. 18)

Banyak pemuda-pemuda yang turutserta dalam perjuangan kemerdekaan. Para pegawai negeri yang masih muda tidak mau ketinggalan dalam mempertahankan negara dari ancaman yang datang dari luar, maupun dari orang-orang/bangsa asing yang sudah

ada di Indonesia. Mereka membentuk organisasi-organisasi tersendiri di lingkungan kerjanya masing-masing, misalnya Angkatan Muda Pos Telegram dan Telepon atau AMPTT, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA), dan Angkatan Muda Kota Besar Bandung. Tokoh-tokoh AMPTT adalah Sutoko, Nawawi Alif, Cahyana, Moh. Yusuf dan lain-lain. Angkatan Muda Kereta Api antara lain dipimpin oleh A. Supian dan Akhmad Tirto. Angkatan Muda Kota Besar Bandung dipimpin oleh Ir. Juanda, Suprayogi dan lain-lain. 19)

Pada tanggal 20 Agustus 1945 di Jakarta didirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan Keamanan Rakyat atau BKR merupakan bagian dari BPKKP. BKR dibentuk untuk menangani masalah keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengambil-alih tanggungjawab dalam soal pembentukan BKR. Badan ini dibentuk bersama-sama Komite Nasional Indonesia dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pemerintah RI secara resmi mensahkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 30 Agustus 1945.

### **3. Terbentuknya BKR Kota Bandung**

BKR Kota Bandung dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan waktunya dengan pembentukan KNI kota Bandung. Ketika itu di Markas BKR Jalan Pasirkaliki No. 45 Bandung (gedung milik Boussee) berkumpul bekas perwira Peta, antara lain Aruji Kartawinata, Ilyas Sasmita, Sutralaksana, Parjaman, Sofyan Iskandar, Gandawijaya, Samsu, Suhari dan Sukanda Bratamanggala.

Aruji Kartawinata memanggil melalui radio pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, KNIL, pelajar dan mahasiswa agar menjadi anggota BKR Kota Bandung. Penerimaan anggota BKR Kota Bandung dilakukan di Markas BKR Jalan Pasirkaliki No. 45 Bandung. Keesokan harinya berkumpul calon-calon anggota di depan Markas BKR. Pada waktu itu datanglah pula A.H. Nasution melaporkan, bahwa ia mempunyai 200 orang anggota Seinendan di Cigere-leng. Kemudian mereka bergabung ke dalam BKR.

Adapun pemimpin-pemimpin BKR yang telah terpilih adalah sebagai berikut :

1. a. Pemimpin BKR Kota Bandung : Suhari Wirasaputra  
b. Pemimpin BKR Bandung Utara : Sukanda Bratamanggala
2. Pemimpin BKR Kabupaten Bandung : Gandawijaya
3. Pemimpin BKR Kabupaten Sumedang : Umang Karyasujana
4. Pemimpin BKR KABUPATEN Garut : Ponto
5. Pemimpin BKR Kabupaten Tasikmalaya : Gandanegara
6. Pemimpin BKR Kabupaten Ciamis : Gumilar. 20)

#### 4. MDPP / MPPP

Terbentuknya atau lahirnya badan-badan lasykar-lasykar perjuangan menimbulkan berbagai masalah bagi tokoh-tokoh perjuangan. Oleh sebab itu sebaiknya ada sebuah badan yang tugasnya mengkoordinir pasukan-pasukan perjuangan sehingga dapat bekerjasama dan berada di bawah satu komando. Berdasarkan alasan tersebut maka pada tanggal 15 September 1945 sebuah Badan Koordinasi yang disebut Markas Daerah Perjuangan Pertahanan Priangan atau MDPP. Badan ini bertugas mengkoordinasikan pasukan-pasukan dan lasykar-lasykar yang tergabung di dalamnya, baik yang bersenjata maupun yang tidak. Dengan demikian tujuan pasukan-pasukan dan lasykar-lasykar dapat terarah dan berguna bagi perjuangan kemerdekaan. Di dalam MDPP itu mereka diberi pengertian tentang siasat, dan taktik berperang.

MDPP dipimpin oleh Sutoko dibantu oleh wakil-wakil dari pasukan-pasukan yang tergabung di dalamnya, seperti Astrawinata dan Warsito dari API, Pakpahan dari PI, Pellaupessy dari PIM, Suyadi dari BPRI, Sujono dari Pesindo, Nukman dari BMP, Abdulah Saleh dari Beruang Merah, Karundeng dari KRIS, Duyeh Suharsa dan Ema Bratakusumah dari Lasykar Rakyat, Kamaran dan Husinsyah, dan Rakhmat Sulaeman dari BBRI.

Sebenarnya tugas MDPP ada dua, pertama mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan kedua membantu serta saling bahu-membahu dengan BKR dalam bidang pertahanan. MDPP mempunyai empat bagian yang memegang peranan penting untuk melancarkan jalannya organisasi, yaitu bagian pertahanan atau pembealaan, perlengkapan, sosial dan penerangan.

Pada tanggal 14 Desember 1945 nama MDPP diubah menjadi Majelis Persatuan Perjuangan Priangan disingkat MPPP/MP3. Kamran adalah pemimpin MDPP. Majelis Persatuan Perjuangan Priangan berjasa besar dan memainkan peranan penting dalam memimpin koordinasi dan konsolidasi seluruh rakyat. Segenap badan-badan perjuangan berada dalam satu komando waktu terjadinya pertempuran dan seluruh fron pertempuran. Anggota MPPP terdiri dari 61 organisasi yang ada pada waktu itu di Keresidenan Priangan.

MPPP mempunyai tiga biro, yaitu :

1. Biro Politik dipimpin oleh R. Djerman Prawirawinata
2. Biro Tata Usaha dipimpin oleh Sanusi Hardjadinata
3. Biro Pertahanan dipimpin oleh M. Sutoko

Majelis ini mencakup semua pasukan, kelasykaran, jawatan-jawatan sipil dan Perwakilan TKR. 21)

1. J. Jogaswara, *Perjuangan Rakjat Kota Bandung dalam awal Revolusi Fisik (17 Agustus 1945 - Maret 1946)*, Skripsi Sadjana Sedjarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 1966, hal 55.
2. *Ibid*, hal. 56.
3. Djajusman, *Bandung Lautan Api*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1975, hal 15.
4. Hardosukoyo, "Sam Amir penyiar naskah Proklamasi tidak peduli larangan tentara Jepang", *Suara Karya*, 16 Agustus 1977.
5. Drs. Y. Yogaswara, *Situasi Kota Bandung dalam tahun 1945 ditinjau dari sudut politik dan militer*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, Bandung, 1981, hal. 35.
6. Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada jaman pendudukan jepang di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1979, hal 46 - 47.
7. Djen Amar, *Bandung Lautan Api*, Penerbit Dwiwantara, Bandung, 1963, hal. 57.
8. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal. 216.
9. *Masjarakat*, 12 Desember 1945.
10. Pemerintah Kotamadya Derah Tingkat II Bandung dan Unpad, *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1950)*, Bandung, 1981, hal.122.
11. Wawancara dengan Omo Ahmad bekas Komandan Seksi BBRI Bandung, Bandung 23 September 1981.
12. Wawancara dengan Simamora bekas Kepala Perbekalan PI Bandung, Bandung 6 Mei 1980.
13. Djen amar, op. cit, hal. 57 dan 126.
14. *Ibid*.
15. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Unpad, op. cit, hal. 124.
16. Wawancara dengan Abdulah Saleh bekas Komandan Beruang Merah, Bandung 8 Mei 1980.
15. *Sejarah Perjuangan Lasykar Wanita Indonesia*, Jakarta, 1979, hal. 1.
16. Tintin Kartini, *Peranan Laykar Wanita dalam Perang Kemerdekaan di Priangan 1945 - 1948*, Skripsi Sejarah. Fakultas Sastra Unpad, Bandung 1980, hal 13 s/d 16.
17. Semaoen Bakry, *Setahoen Peristiwa Bandoeng*, Tasikmalaya, 1946, hal. 19.
18. Disjarahdam VI Siliwangi, *Siliwangi dari masa ke masa*, edisi ke-2, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979, hal 51 - 52.
20. Omon Abdurakhman, "Pertumbuhan TNI di Bandung", *Vidya Yudha*, 1979, hal. 37.
21. Djajusman, hal 22 dan 23.

## SUMBER

### I. Buku dan majalah :

Abdurakhman, Omon, "Pertumbuhan TNI di Bandung", *Vidya Ydha*, No. 35 dan 37, 1979.

Amar, Djen, *Bandung Lautan Api*, Penerbit Dwiwantara, Bandung, 1963.

Bakry, Semaoen, *Setahoen Peristiwa Bandoeng*, Tasikmalaya, 1946.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia* Djajusman, *Bandung Lautan api*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1975.

Disjarahdam VI Siliwangi, *Siliwangi dari masa ke masa*, Edisi kedua, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979.

Hadosukayo, "Sam Amir penyiar naskah Proklamasi tidak peduli larangan tentara Jepang," *Soeara Karya*, 16 Agustus 1977.

Kartini, Tintin, *Pernan Laykar Wanita Indonesia dalam Perang Kemerdekaan di Priangan 1945 - 1948*, Skripsi Sarjana Muda Sejarah, Fakultas Sastra Unpad, Bandung 1980.

Notosusanto, Nugroho, *Tentara Peta pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta 1979.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Unpad, *Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950)*, Bandung 1981.

*Sejarah Perjuangan Lasykar Wanita Indonesia*, Jakarta, 1979.

Yogaswara, Y. *Perjuangan Rakjat Kota Bandung dalam awal Revolusi Fisik (17 Agustus 1945 - Maret 1946)* Skripsi Sadjana Fakultas Sastra Unpad, Bandung, 1966.

-----, *Situasi Kota Bandung dalam tahun 1945 ditinjau dari sudut politik dan militer*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, Bandung, 1981.

### II. Surat Kabar :

Masyarakat, 12 Desember 1945.

Soeara Karya, 16 Agustus 1977.

### III. Wawancara :

Abdulah Saleh

Omo Ahmad.

Simamora.

## PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

### dan penetapannya

Oleh : Drs. Moela Marboen

#### **Pendahuluan.**

Tulisan ini berjudul Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan penetapannya. Kami batasi dengan diawali pembentukan **Dokuritsu Junbi Coosakai** (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia = BPUPKI) dan diakhiri dengan sidang atau rapat pertama dari **Dokuritsu Junbi Inka** (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia = PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika rancangan undang-undang dasar dari BPUPKI dipakai sebagai bahan dasar dalam merumuskan Undang-undang Dasar dan kemudian untuk menetapkannya menjadi Undang-undang Dasar bagi Negara yang baru diproklamasikan itu dan dilanjutkan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, wilayah Indonesia dibagi dalam tiga penguasaan, yakni : a) Wilayah Jawa dan Madura di bawah tentara Keenambelas dengan pusat di Jakarta; b) Wilayah Sumatera dan sekitarnya di bawah tentara Keduapuluhlima dengan pusat di Bukittinggi dan ; c) Wilayah Indonesia bagian Timur di bawah penguasaan Angkatan Laut dengan pusat di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Ketiga wilayah penguasaan pendudukan Jepang itu berpusat di Dalath Saigon. Marsekal Terachi yang membawahi seluruh jajaran tentara Jepang dibagian Selatan.

Makalah ini dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Bagian pertama, berisi penguraian masa-masa sidang dari BPUPKI serta hasil-hasil yang diperoleh selama sidang-sidangnya. Bagian kedua proses dan pernyataan Proklamasi Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian ketiga PPKI membicarakan naskah undang-undang dasar dan menetapkannya dengan mengambil bahan dasar naskah undang-undang dasar dari BPUPKI, PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, semasih tegak kekuasaan Jepang di Indonesia dan belum pernah bersidang.

#### **1. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)**

Perdana Menteri Jepang Tojo pada bulan September 1944 menyatakan "Indonesia akan dimerdekakan kelak kemudian hari"1) Sejalan dengan pernyataan Tjo tersebut di Jakarta ada perubahan-perubahan, misalnya lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan; Sang Merah Putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Desember 1944 beberapa orang Indonesia diangkat jadi Sanjo (penasihat untuk tiap-tiap departemen, mereka dianggap sebagai

wakil ketua dari departemen itu yang dijabat oleh orang Jepang, kesempatan ini adalah untuk melatih orang Indonesia).

Pada tanggal 29 April 1945, Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura mengumumkan pembentukan **Dokuritsu Junbi Coosakai** (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI). Badan ini beranggotakan 60 orang, 1 orang Ketua dijabat oleh Dr. Radjiman Wedyoningrat dan 1 orang lagi Wakil dijabat oleh R.P. Suroso. Di samping Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota-anggota disebut ada lagi 8 orang Jepang sebagai anggota istimewa. Adapun kewajiban dari Badan ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu urusan yang penting mengenai hal-hal politik, ekonomi, tata-usaha pemerintahan, pembelaan tanah air, lalu lintas dan sebagainya.2). Badan ini mempunyai Kantor Tata Usaha dan sebagai Kepala Kantor dirangkap oleh R.P. Suroso. Karena banyaknya tugas-tugas administrasi, kemudian diangkat Mr. A.G. Pringgodigdo untuk membantu tugas-tugas tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 1945, badan ini dilantik atau diresmikan oleh Saiko Shikikan dan Gunseikan. Saiko Shikikan mengatakan : "..... **Dokuritsu Coosakai** untuk menyelidiki serta merencanakan dasar usaha itu dengan sedalam-dalamnya dan seteliti-telitinya. ....betapa penting dan beratnya kewajiban tuan-tuan serta memenuhi kewajiban tuan-tuan untuk menyelesaikan usaha yang mulia itu sehingga tercatatlah peristiwa yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan Negara Indonesia Merdeka."3)

Besok harinya, pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1. Juni 1945 dimulailah sidang badan ini Ketua Badan Penyelidik ini dalam kata pembukaannya mengemukakan kepada sidang : "Negara yang kita bentuk itu apa dasarnya ?. Nampaklah bahwa ketua agak menyimpang dari tugas yang sebenarnya dari badan penyelidik ini seperti disebut di atas. Namun demikian, tidaklah menimbulkan permasalahan baik bagi Jepang maupun bagi rapat itu sendiri.

Anggota-anggota yang terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan Ketua itu. Karena takut akan membawa pertikaian filosofis yang berkepanjangan, yang akan memakan waktu banyak. Jadi kebanyakan dari mereka menghindari pertanyaan tersebut. Sementara ada juga dari anggota mengemukakan "Mana yang baik dalam masa peralihan merdeka adalah demokrasi parlementer atau demokrasi kabinet presidensial seperti di Amerika". Hari pertama itu, yaitu tanggal 29 Mei, Mr. Muh. Yamin juga mengemukakan gagasannya.4)

Pada hari ketiga Prof. Dr. Mr. Supomo mengemukakan gagasannya5) dan pada hari itu juga Mr. Muh. Yamin mengemukakan gagasannya lagi mengenai daerah negara.6)Sejak dari hari pertama sampai dengan hari ketiga cukup banyak anggota mengemukakan gagasan-

gagasan atau pendapat sehubungan dengan tugas BPUPKI baik secara langsung ataupun tidak untuk menjawab pertanyaan ketua badan tersebut. 7)

Peristiwa yang amat penting ialah pada tanggal 1 Juni 1945, hari keempat di mana Ir. Sukarno mengemukakan pendapatnya dan sekaligus menjawab pertanyaan Ketua Badan Penyelidik mengenai Dasar Negara seperti tersebut di atas. Beliau mengatakan : "Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka.8) Selanjutnya dalam pidato beliau itu disebutkan pula , "saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, tidak akan ada kemiskinan di alam Indonesia Merdeka."9)

Disebutkan, tanggal 1 Juni 1945 itu penting, karena pada hari itulah Ir. Sukarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara yang akan didirikan itu, gagasan itu dengan istilah Pancasila. Ir. Sukarno dalam pidatonya itu mengajukan 5 (lima) dasar bagi negara yang akan didirikan itu, yakni : 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau kebangsaan; 3) Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.10) Mengenai nama dari 5 (lima) prinsip ini beliau mengatakan, "..... tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila. 11)

Menurut Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, dalam tulisannya : Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka, 1981 : Ada tiga anggota Badan Penyelidik yang mengemukakan konsep-konsep dasar negara sebagai jawaban atas pertanyaan ketua Badan Penyelidik. Ketiga anggota itu ialah : I. Yamin (29 Mei 1945) dengan konsep :

1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Rakyat. II. Supomo ( 31 Mei 1945) dengan konsep : 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan Lahir dan Batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan Rakyat. III. Sukarno (1 Juni 1945) dengan konsep seperti disebut di atas.

Dengan selesainya persidangan pertama itu, dibentuk pula suatu panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan anggota-anggota lainnya : Dr. Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasijm, Ki Bagus Hadikusumo. Oto Iskandardinata, Mr. Muh. Yamin dan Mr. A.A. Maramis. Tugas dari panitia ini adalah menampung saran, usul dan konsep2 dari anggota serta masyarakat. Ketua Badan Penyelidik meminta kepada Sekretariat Badan Penyelidik agar menyerahkan kepada panitia ini semua usul, saran dan pidato-pidato baik tertulis maupun yang tidak tertulis selama persidangan badan penyelidik ini berlangsung. Ketua panitia kecil dengan prakarsa sendiri dan atas dorongan dari beberapa anggota Dhuo Sangi-in yang juga merangkap keanggotaan Badan Penyelidik seluruhnya 38 orang, mengadakan pertemuan di Jalan

Pejambon No. 2 Jakarta pada tanggal 22 Juni. Pada pertemuan ini juga telah ditampung lebih luas lagi saran, usul dari pihak yang hadir. Pertemuan ini akhirnya melahirkan satu panitia, Panitia sembilan, terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasijm, Abikusno Tjokrosujoso dan Hadji Agus Salim. Panitia sembilan ini dibentuk untuk mencari modus kompromis antar golongan Islam dengan golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Karena memang sejak permulaan sidang pleno Badan Penyelidik masalah ini hangat diperdebatkan masing-masing golongan. Bahkan untuk sidang-sidang atau rapat-rapat selanjutnya pun masalah agama dan negara ini selalu muncul. Panitia sembilan berhasil merumuskan modus kompromis itu, dan diberi nama rancangan pembukaan hukum dasar Mr. Muh. Yamin kemudian memberi namanya dengan Piagam Jakarta. 12)

Rumusan Panitia sembilan ini diterima baik oleh panitia dan menjadi bahan untuk dilaporkan kepada sidang pleno Badan Penyelidik yang diadakan pada tanggal 10 Juli 1945.

Sidang BPUPKI II diadakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 di tempat yang sama pula. Dalam pembukaan ini Ketua Dr. Radjiman Wedyoningrat memberitahukan penambahan anggota 6 orang. Beliau juga mengatakan dengan tegas : "agar para anggota bebas mengeluarkan pikiran masing-masing, jangan takut-takut oleh karena, ..... Jika tidak demikian keputusan yang harus ditentukan persidangan ini bukan pendapat Badan Penyelidik sejati." 13)

Kemudian disusul dengan anggota-anggota untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Dan pada hari itu juga Ir. Sukarno melaporkan apa yang mereka kerjakan bersama semua anggota Chuo Sangi-in yang merangkap menjadi anggota BPUPKI bersama dengan usul-usul lainnya yakni ; untuk menentukan bentuk negara ; menyusun undang-undang dasar, meminta kepada Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan undang-undang dasar; meminta membentuk badan atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk menyelenggarakan Indonesia Merdeka di atas undang-undang dasar yang akan ditentukan oleh BPUPKI dan melantik pemerintahan nasional. 14) Dan selanjutnya Ir. Sukarno khusus sebagai pribadi mengajak para hadirin : "..... marilah kita bersidang yang kedua ini untuk menyelesaikan hukum dasar, dan jangan kita pulang kalau hukum dasar itu belum selesai. Sidang yang kedua ini hendaknya sidang yang terakhir dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka." 15) (Usul ini memperingatkan kepada sumpah para wakil rakyat Perancis pada bulan Juni 1789 untuk tidak bubar sebelum menyelesaikan sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, yang akan mengatur dan membatasi kekuasaan raja, yang ketika itu bersifat absolut).

Kemudian setelah dilakukan pembicaraan beberapa waktu. Dan terhadap beberapa permasalahan tertentu yang belum mendapat kesepakatan dilakukanlah pemungutan suara (voting). Misalnya seperti mengenai bentuk negara : negara yang akan dibentuk itu apakah republik atau kerajaan ? Ternyata yang menginginkan bentuk republik mendapat suara 55; yang kerajaan mendapat suara 6; dua suara lain dan satu suara blanko. 64 jumlah suara seluruhnya. 16) Rapat tanggal 11 Juli membicarakan mengenai luas dan batas wilayah negara. Ketika itu ada tiga usul, yakni : 1) Hindia Belanda dulu; 2) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sek. Kalimantan Utara), Irian Timur, Timor Portugis (sek. Timor Timur sudah masuk wilayah Negara Republik Indonesia) dan; 3) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi Irian Barat. Dari sejumlah 66 suara yang hadir; memilih butir 1 = 19; memilih butir 2 = 39; sedang memilih butir 3 = 6 lain-lain daerah 1 dan 1 blanko. Butir 2 disebut di atas menggambarkan keinginan para anggota "**Indonesia Raya**" yaitu keinginan untuk mempersatukan seluruh Kepulauan Indonesia dalam satu wilayah negara. 17) Keputusan-keputusan yang penting diambil dalam rapat tersebut membentuk 3 panitia : 1) Panitia merencanakan hukum dasar, panitia ini diketuai oleh Ir. Sukarno dengan anggota 19 orang termasuk Ir. Sukarno sendiri. Panitia ini didampingi seorang anggota istimewa Jepang bernama Myano; 2) Panitia menyelidiki soal-soal keuangan dan ekonomi, panitia ini diketuai oleh Drs. Hatta dengan 23 orang termasuk Drs. Moh. Hatta sendiri dengan didampingi oleh seorang anggota istimewa Jepang bersama Tokonami Kakka ; 3) Panitia pembelaan tanah air, panitia ini diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso dengan anggota 23 orang termasuk Abikusno Tjokrosujoso sendiri dengan didampingi 2 orang anggota istimewa Jepang bernama Tanaka Kakka dan Matuura.

Sementara itu ada usul dari beberapa anggota, yang merasa dirinya kurang tepat ditempatkan, misalnya seperti Liem Koon Han, ia ditempatkan pada panitia pembelaan tanah air, ia mengusulkan Tan Eng Hoa, sebab beliau itu telah duduk dalam kepengurusan. Keibootai, Ir. Sukarno mengusulkan, agar Mr. Muh. Yamin ditempatkan pada panitia keuangan dan ekonomi.

Mr. Muh. Yamin : "Saya menyesal sekali tidak dapat menerima keanggotaan dalam panitia keuangan dan ekonomi karena kurang pengetahuan, jadi saya tidak ada sumbangan buat panitia itu. Saya tidak menerima."

Ketua Rajiman : "Sudah selesai. Sebetulnya saya harus membebaskan lagi tuan Yamin, tetapi itu tidak bisa." 18) Demikianlah Ketua Badan Penyelidik ini tetap tidak mengubah keputusannya, bahwa mereka yang sudah ditempatkan agar tetap menerima penempatannya masing-masing. 19) Besar kemungkinan bahwa penunjukannya anggota-anggota untuk masing-masing panitia adalah dari pemerintah pendudukan Jepang.

Setelah selesai pembagian panitia, maka Ketua Badan Penyelidik mempersilahkan masing-masing panitia untuk mengadakan rapat masing-masing pada ruangan-ruangan yang berada di bilangan gedung Jalan Pejambon No. 2 itu. Dalam rapatnya pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang Hukum Dasar dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan yang diambil dari hasil rumusan panitia sembilan. Dan selanjutnya mereka mengadakan pembahasan-pembahasan mengenai **Unitarisme** dan **federalisme**,<sup>20</sup>; mengenai soal agama dan negara, misalnya ke Tuhanan, dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; soal pimpinan negara satu orang atau beberapa orang; soal nama Kepala Negara Presiden atau Raja; soal warga-negara, Ketua Panitia Perancang selalu mengatkan agar selalu berpegang pada pembukaan yang telah diterima dan karena itu masalahnya dianggap sudah selesai.<sup>21</sup>)

Selanjutnya rapat Panitia Perancang Hukum Dasar ini membentuk suatu panitia kecil perancang hukum dasar yang diketahui oleh Prof Dr. Supomo dengan anggota-anggota lain Mr. Wongso-negoro Mr. Ahmad Subardjo. Mr. A.A. Maramis, Mr. Singgih, Agus Salim dan Dr. Sukiman, kesemuanya ada tujuh orang, diantaranya ada lima orang sarjana umum. <sup>22</sup>).

Dua hari kemudian, yakni tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar mengadakan sidangnya untuk menerima laporan panitia kecilnya. Panitia kecil menguraikan dasar rancangan undang-undang dasar, antaranya yang penting-penting, yakni : kedaulatan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berdsidang sekali dalam lima tahun. Dalam membentuk undang-undang, Presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Buat sehari-hari Presiden Penyelenggara Pemerintahan yang tertinggi, ia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-menteri, yang bertanggung jawab kepadanya dan sebagainya. <sup>23</sup>)

Para anggota panitia perancang undang-undang dasar itu memberikan tanggapan dan usul-usulnya dalam rangka penyempurnaan laporan darij panitia kecilnya, barulah kemudian dibentuk sebuah panitia penghalus bahasa, yang terdiri dari Prof. Dr. Husein Djayadinigrat, Agus Salim dan Prof. Dr. Supomo untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar itu. <sup>24</sup>)

Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno badan Penyelidik dalam rangka persidangan keduanya untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Ir. Sukarno selaku Ketua Panitia melaporkan tiga hasil Panitia yaitu :

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
3. Undang-Undang Dasar sendiri (batang tubuhnya) <sup>25</sup>)

Konsep Pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama panitia sembilan dengan sisipan yang panjang sekali, terutama di antara alinea pertama dan alinea kedua.

Sedangkan konsep pembukaan undang-undang dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat panitia sembilan. 26) Setelah Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar selesai melaporkan hasil-hasil yang mereka capai, maka dimulailah pembahasannya.

Para anggota Badan Penyelidik mengemukakan pendapatnya atas tiga materi tersebut. Perdebatan cukup hangat, karena masing-masing tarik tambang dengan mengajukan argumentasi-argumentasinya. Di antara masalah-masalah yang cukup mendapat perhatian adalah mengenai dasar negara, agama resmi negara dengan menyebut satu agama tertentu menjadi agama resmi negara. Untuk itu mereka menekankan agar dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan jelas dan tegas disebutkan dan sebagainya.

Hal lain yang tidak kurang penting ialah mengenai hak-hak azasi. Seperti diketahui, bahwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak azasi. Dalam membicarakan hak-hak azasi, para anggota badan penyelidik sedikit banyak dipengaruhi oleh alam pikiran tentara pendudukan Jepang, yang mempunyai kepentingan untuk memperkecil makna dari hak-hak azasi. Karena takut akan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh tentara militer Jepang terhadap beberapa hak-hak azasi.

Selain itu para anggota badan penyelidik berbeda pendapat mengenai hak-hak azasi "apakah harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan atas dasar apa". Disatu pihak pendapat-pendapat pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh "Declaration des droits de l'homme et du citoyen", yang dianggap ketika itu sebagai sumber dari faham atau teori individualisme. Maka itu dianggap bertentangan dengan azas kekeluargaan dan gotong-royong. Mengenai materi hak-hak azasi ini Ir. Sukarno mengatakan: "Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya". 27) Dalam hal ini pun Prof. Dr. Mr. Supomo sependapat dengan Ir. Sukarno. 28)

Sebaliknya Drs. Moh. Hatta dan Mr. Muh. Yamin mengatakan, walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan, beberapa hak dari warganegara, jangan sampai timbul negara kekuasaan (machtstaat-negara penindas). 29) Akhirnya dapatlah dimengerti, kenapa hak-hak azasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak lengkap. (dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950, hak-hak azasi itu lengkap). Hak ketidaklengkapan itu kemudian tidak dapat dirasakan oleh orang Indonesia sendiri dalam masa Demokrasi Terpimpin, karena betapa gampangya diselewengkan untuk kepentingan penguasa yang ambisius, disebabkan kurang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kurang adanya jaminan dalam undang-undang yang ada. Maka dari itu tidaklah mengherankan sesudah terjadinya G 30 S/PKI, salah satu tujuan dari Orde Baru

adalah melaksanakan hak-hak azasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha melengkapi Pelengkap Penjelasan Undang-Undang Dasar dan Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warganegara. Usaha dan upaya kearah itu dilakukan oleh MPRS Orde Baru dengan menugaskan suatu Panitia MPRS untuk menyusun suatu Rancangan Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warganegara yang seyogyanya akan ditetapkan untuk menjadi ketetapan MPRS pada Sidang Umum MPRS V tahun 1968. Karena terjadi kemacetan akhirnya diputuskan untuk tidak membicarakan mengenai rancangan piagam itu. Rupa-rupanya timbul perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi yang tidak dapat diatasi, walaupun sejak semula semua fraksi turutserta merancang dan merumuskan piagam itu. Hal-hal lain juga dibicarakan misalnya mengenai sistematik Undang-Undang Dasar, perpindahan pasal-pasal disesuaikan dengan materi-materi kelompok (pengelompokan) dan sebagainya. Setelah para anggota selesai memberikan pendapat, maka materi pasal-pasal itu diterimallah. Dalam hal ini Ketua Badan Penyelidik dalam kata akhirnya tanggal 16 Juli 1945, mengatakan : 'Naskah Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Maka untuk itu saya minta kepada mereka yang setuju agar berdiri. Para anggota semua berdiri, kecuali satu orang tidak berdiri.'<sup>30</sup> Demikian pula dengan Pleno BPUPKI tanggal 17 Juli membicarakan usul-usul dari panitia dan ekonomi serta panitia pembelaan tanah air.

Dengan diterimanya hasil-hasil dari ketiga panitia tersebut, maka selesailah sudah tugas BPUPKI dan semua rancangan atau hasil-hasil dari BPUPKI diserahkan kepada **Cunsekan** dan dengan sendirinya BPUPKI membubarkan dirinya, sesuai dengan maklumat pembentukannya. 31)

## **2. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia**

Berita mengenai kapitulasi Jepang dan rencana Belanda untuk kembali di Indonesia untuk menjajah dengan cepat tersiar dimanamana di Jakarta. Berita itu membuat para pemuda di Jakarta bergerak dengan cepat. Mereka merasakan saatnya telah tiba bertindak untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Segera mereka menemui tokoh-tokoh senior pergerakan nasional, seperti Ir. Sukarno, Drs. Moh, Hatta dan lain-lain.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta kembali dari Dalath, setelah bertemu dengan Marsekal Te-rauchi untuk menerima pengakuan Pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Beberapa saat sebelum Drs. Moh. Hatta tiba di tempat kediamannya, Sutan Syahrir sudah ada menunggu. Sutan Syahrir menjelaskan, bahwa Jepang sudah berkapitulasi terhadap Serikat, sekarang sudah tiba saatnya untuk negara memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, lepas dari keterlibatan pihak Jepang.

Kemudian mereka berdua berangkat menemui Ir. Sukarno untuk membicarakan tentang kapitulasi Jepang dan usul Sutan Syahrir tersebut. Dalam pertemuan di rumah Ir. Sukarno itu, sama-sama berbuat sesuatu yang tepat untuk menentukan nasib bangsa baik sekarang maupun untuk masa depan. Namun demikian Ir. Sukarno tidak sependapat dengan Sutan Syahrir, karena hak itu adalah hak dan tugas PPKI yang saya sendiri Ketuanya. 32)

Drs. Moh. Hatta menambahkan "bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu lagi direbut dari tangan Jepang, tetapi hanya diselenggarakan." 33)

Keesokan harinya Ir. Sukarno. Drs. Moh. Hatta disertai Mr. Subardjo menemui **Gunseikanbu** dengan tujuan untuk mendapatkan berita resmi mengenai kapitulasi Jepang itu, tetapi **Gunseikanbu** kosong, tidak ada satu orang pun pejabat Jepang yang berwenang untuk ditanyakan mengenai kapitulasi Jepang itu. Dari tempat ini mereka beranjak menemui Laksamana Maeda. Laksamana Maeda mengatakan : "Memang ada berita kapitulasi Jepang itu disiarkan Serikat, di sini belum ada lagi mendapat berita dari Tokyo."

Demikianlah, setelah mereka tidak berhasil mendapat berita resmi itu, mufakatlah untuk mengadakan sidang PPKI besuknya, tanggal 16 Agustus 1945. Tugas mempersiapkan sidang ini dan mengundang para anggota yang telah berada di Jakarta diserahkan kepada Mr. Ahmad Subardjo. Ketika itu telah berada anggota-anggota PPKI yang berasal dari daerah, seperti Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abbas dan DR. Amir yang mewakili Sumatera dan begitu juga dari daerah-daerah lainnya.

Rapat yang sedianya akan diadakan tanggal 16 Agustus itu tidak jadi karena pada tanggal 16 Agustus jam 06.00 (Tokyo) pagi-pagi para pemuda mengambil Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta dan membawa kedua tokoh itu ke Rengasdengklok, kurang lebih 85 km dari Jakarta.

Para pemuda membawa Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta setelah gagal memaksa tokoh senior itu untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menurut kemauan dan cara pemuda itu. 34) Jadi pengambilan dan kemudian membawa kedua tokoh senior itu adalah karena perbedaan mengenai **prosedure** dan saat memproklamasikan kemerdekaan itu.

Selama satu hari penuh mereka berada di Rengasdengklok tanpa diapa-apakan oleh yang membawanya. Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta baru kembali dari Rengasdengklok setelah Mr. Ahmad Subardjo datang menjemputnya 16 Agustus jam 19.30 (Tokyo). Dan pada malam hari itu juga mereka tiba di Jakarta jam 01.00 (Tokyo). Sekarang mereka mengusahakan lagi untuk memanggil anggota PPKI untuk berapat. Untuk mengatur rapat ini pun diserahkan pengaturannya kepada Mr. Ahmad Subardjo, rapat ini semula direncanakan di Hotel Des Indes (sek. Kompleks Duta Merlin). Rapat tidak jadi dilakukan di Hotel tersebut, karena adanya peraturan-

an yang melarang lewat jam 10.00 (Tokyo) malam tidak diperbolehkan lagi mengadakan pertemuan<sup>2</sup> atau rapat-rapat. Itulah sebabnya Mr. Ahmad Subardjo menghubungi Laksamana Maeda untuk minta kesediaan beliau memberikan tempat kediamannya dipakai untuk rapat, ditambah pula, bila di rumah Maeda ini diadakan rapat, kemungkinan besar tidak akan ada gangguan dari Kempetai. Jadi amanlah para **decicien makera** itu untuk mencapai kebulatan suara antara semua golongan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah itu mereka rumuskan dan ketika itu juga ditanda tangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri dibacakan pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 jam 12.00 (Tokyo) oleh Ir. Sukarno didampingi Drs. Moh. Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sek. Jalan Proklamasi) 35). Proklamasi itu, yang merupakan "**de hoogste politieke beslissing van de Indonesische natie**" mendapat sambutan yang hangat dan spontan dari rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air.

### 3. Persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945

Di muka disebutkan, bahwa dalam rapat Pleno BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Ir. Sukarno anggota BPUPKI mengusulkan, agar secepat-cepatnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas sekedar menyelenggarakan Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi dari Dalath mengirim telegram kepada komando jajaran bawahannya. Telegram itu mengandung beberapa hal antara lain yakni : Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 36) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada masa masih tegaknya kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia beranggotakan 21 orang merupakan wakil-wakil utusan daerah. Berlainan baik jumlah anggota maupun daerah yang diwakilinya dari pada keanggotaan BPUPKI yang hanya terdiri dari orang-orang yang berdomisili di Jawa saja, walaupun ada juga putra-putra dari daerah. 37)

PPKI tidak dibubarkan, bahkan keanggotaannya ditambah 6 orang lagi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah diucapkan Proklamasi Kemerdekaan itu, sehingga sekarang PPKI beranggotakan 27 orang, Ketua dan Wakil Ketua PPKI masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta (lampiran).

Dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu, berarti Bangsa Indonesia memegang dan menentukan nasibnya dalam tangannya sendiri. Namun demikian belum jelas corak dan bentuk serta isi dari Negara Indonesia yang baru diproklamasikan itu, sehingga undang-undang dasarnya dan segala peraturan-peraturan Negara sewajarnya harus bersumber kepada kemerdekaan nasional.

Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, utusan **Kalgun** (Angkatan Laut Jepang di bagian Indonesia Timur yang bermarkas di Makasar (sek. Ujung Pandang) menghubungi Drs. Moh. Hatta mengatakan : "ada sesuatu yang cukup penting untuk dibicarakan." Utusan itu mengemukakan, bahwa "wakil-wakil Protestan dan Katolik yang berada di wilayah penguasaan **Kalgun** berkeberatan atas bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat : 'ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'"38) Utusan itu mengakui bahwa kalimat itu adalah mengenai rakyat yang beragama Islam. Seperti diketahui, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan dibicarakan dalam rapat atau sidang PPKI besoknya, tanggal 18 Agustus 1945, adalah hasil rumusan Panitia Sembilan tertanggal 22 Juni 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah memuat cita-cita hukum, dan kedudukan cita-cita hukum adalah lebih tinggi daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Berarti mengadakan diskriminasi terhadap rakyat Indonesia yang menganut agama lain. Karenanya ada kemungkinan mereka berada di luar Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Drs. Moh. Hatta menilai, bahwa utusan itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka, mengingat pula semboyan selama ini : "Bersatu kita teguh, berpecah kita jatuh." Tokoh-tokoh pergerakan nasional sejak tahun 1920-an keluar masuk penjara untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka dan bersatu. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sekarang dihadapkan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan akhirnya, Drs. Moh. Hatta mengatakan kepada utusan tersebut, bahwa "akan membawa masalah itu besok pagi pada sidang PPKI." 39)

Demikianlah tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang dimulai atau dibuka Ketua PPKI, Drs. Moh. Hatta mengajak anggota-anggota PPKI : Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasijm, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah dari golongan rakyat yang beragama lain atas kata-kata : "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya."40)

Masalah yang begitu prinsip dan serius, yang bisa membahayakan keutuhan bangsa, mereka dapat selesaikan hanya dengan waktu 15 menit, dari situ dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa para pemimpin kita itu benar-benar mementingkan dan meletakkan segala sesuatunya itu atas dasar persatuan bangsa. Dan sekarang tibalah saatnya ketua PPKI membuka sidang pleno PPKI secara resmi. yang sifatnya telah berubah menjadi badan nasional Indonesia. Ketua PPKI dalam kata pembukaannya mengatakan mengenai pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar ini, menganjurkan "agar mengikuti garis-garis yang dihasilkan oleh BPUPKI. perubahan-perubahan yang penting-penting dan yang pokok-pokok saja dilakukan. Sedang hal-hal yang kecil-kecil dikesampingkan saja dulu, agar pada hari PPKI selesai menyusun Undang-Undang

Dasar dan memilih Presiden serta Wakil Presiden."41) Selanjutnya Ketua PPKI mengatakan : "Ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih baik tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna."42) Sebelum melanjutkan kepada pembahasan, maka Prof. Dr. Supomo terlebih dahulu memberikan penjelasan. 43) Misalnya, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menganut azas kedaulatan Rakyat. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan seterusnya. 44)

Perubahan-perubahan untuk mengganti hal-hal yang pokok, yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional Indonesia dilakukan selama rapat tersebut. Seperti, misalnya dengan Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dalam sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, tidak dipakai lagi. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar baru adalah konsep yang dirumuskan oleh panitia sembilan, yang kemudian diperoleh panitia kecil. Konsep itu diterima dengan perubahan penting, yakni : Sila pertama dari dasar negara tercantum di dalam pembukaan itu, yang semula berbunyi : "Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan : "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Pasal-pasal yang ada hubungannya atau menyangkut dengan pemerintah pendudukan Jepang dihapuskan.

Dalam pada itu, ada baiknya lagi dikemukakan dibawah ini hal-hal pokok dan penting dalam perubahan-perubahan yang dilakukan dalam sidang tersebut :

### **I. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar**

1. Kata Allah dalam alinea ketiga : Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa, diubah menjadi Tuhan Yang Mahakuasa atas permintaan anggota dari Bali. 45)

2. Pada Aline keempat yang berisi Pancasila dasar negara, kalimat berdasar kepada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **II. Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar :**

1. Jumlah pasal dari 42, dijadikan 37 pasal (XVI bab), dengan 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan.

2. Pasal 4 ayat 1 : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Pasal 4 ayat 2 : Perkataan dua Wakil Presiden dijadikan satu Wakil Presiden.
4. Pasal 2 ayat 3 : dihapuskan.
5. Kepada pasal 5 ditambahkan ayat 2 berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Pasal 6 ayat 1 diganti menjadi : Presiden ialah orang Indonesia asli.
7. Pasal 6 ayat 2 dijadikan : Presiden dan Wakil Presiden (tidak lagi Wakil-wakil).
8. Pasal 7 menjadi : Presiden dan Wakil Presiden.
9. Pasal 8 diubah sehingga menjadi : ia diganti oleh Wakil Presiden.
10. Pasal 8 tidak memakai ayat 2 lagi.
11. Kepada Pasal 9 kalimat pertama ditambahkan kalimat : Presiden dan Wakil Presiden. Perkataan mengabdikan dalam pasal 9 menurut rancangan diganti dengan kata "berbakti", dan menjadi seperti rumusan sekarang ini.
12. Kepada pasal 23 ayat 1 ditambahkan kalimat : Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu, sehingga ayat 1 itu seluruhnya berbunyi seperti rumusan sekarang ini.
13. Kepada pasal 23 ayat 5 ditambahkan kalimat : Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ayat 5 itu berbunyi seperti rumusan sekarang ini.
14. Kepada pasal 24 ayat 1 ditambah perkataan : menurut undang-undang, sehingga seluruh ayat 1 berbunyi seperti rumusan sekarang ini.
15. Kepada pasal 25 ditambahkan kata : "dan untuk diberhentikan", sehingga kalimat pasal 25 itu seluruhnya berbunyi seperti rumusan sekarang ini.

### **III. Menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar yang diterima oleh BPUPKI tanggal 16 Juli sebagai berikut :**

1. Bab. XVI, pasal 37 tentang perubahan dan cara mengubah Undang-Undang Dasar.
2. Aturan Peralihan : pasal I - IV, seperti sekarang ini.
3. Aturan Tambahan : angka 1 dan 2, seperti sekarang ini.

Demikianlah setelah mengadakan perubahan dan tambahan atas naskah undang-undang itu, maka Sidang Pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkannya dengan suara bulat menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berlaku bagi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia sejak saat ditetapkannya.

Setelah selesai menetapkan Undang-Undang Dasar tersebut, PPKI meningkat pada pemilihan dan pengangkatan Presiden dan

Wakil Presiden. Dan secara aklamasi mereka memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar dan terpilihnya Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh PPKI, maka secara formal telah berdiri Negara Republik Indonesia. Karena umumnya dianggap, bahwa negara terjadi dari empat unsur, yakni : 1) Penduduk, 2) Wilayah, 3) Pemerintah dan, 4) Kedaulatan. 46)

### Catatan belakang

1. Moh. Hatta, **Memoir**, Jakarta, Tinta mas, 1979. hal 434.
2. **Kan Po**, No. 66, hal. 9
3. Prof Mr. Muh. yamin, **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945**, I, Jakarta, Prapanca, 1959, hal 804.
4. **Ibid**, hal 87 - 107.
5. **Ibid** hal. 109 - 124.
6. **Ibid**, hal. 135 - 141.
7. Diperkirakan ada 46 anggota yang mengemukakan pendapatnya selama sidang pertama itu, termasuk Drs. Moh. Hatta yang mempersoalkan : persatuan negara atau negara serikat, perhubungan negara dengan agama dan republik atau monarki. Dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, susunan Yamin, hanya memuat 4 naskah pidato dari tiga anggota (Yamin, Supomo dan Sukarno).
8. **ibid**, hal 61
9. **Ibid**, hal 75.
10. **Ibid**, hal 61 - 81.
11. **Ibid**, hal 78.
12. **Ibid**, Hal. 153 - 154, 228. (lampiran I).
13. **Ibid**, hal 146.
14. **Ibid** hal 14, 151. Lihat : Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo, **Sejarah singkat berdirinya Republik Indonesia**, Surabaya, N.V. Pustaka Indonesia, 1958, hal 28.
15. Prof Mr. Muh. Yamin **op. cit**, hal. 155.
16. **Ibid**, hal 184.
17. **Ibid**, hal 254.
19. **Ibid**, hal 253
20. **Ibid**, hal. 258.
21. **Ibid**, hal 259.
22. **Ibid**, hal 160. Sejak rapat panitia kecil hukum dasar, hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar.
23. **Ibid**. hal 260.
24. **Ibid**. hal 263.
25. **Ibid**, hal 264 - 274.
26. **Ibid**, hal. 273 - 276.
27. **Ibid**, hal. 287 - 298.
28. **ibid**, hal 357 - 358.
29. **ibid**, hal 299 - 300.
30. **Ibid**, hal. 306.
31. **Kan Po**, No. 66, hal. 10.
32. Moh. Htta, **Sekitar Proklamasi**, cet. kedua, Jakarta, Tinta mas, 1970, hal 30.
33. **Ibid**, hal 10.

34. Beberapa versi timbul mengenai pengambil tokoh senior pergerakan nasional tersebut, untuk itu lihatlah ; **Ibid**, hal. 37 - 38; Adam Malik, *Riwayat Proklamasi*, cet. Keempat, Jakarta, Wijaya, 1962, hal 30 - 40; Cindy Adnus, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat* (Terjemahan Abdul Bar Salim), Jakarta, Gunung Agung, 1966. hal 320-321.
35. Nugroho Notokusanto, **Naskah Proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila yang etentik**, cet. kedua, Jakarta, Pusat Sejarah Abri, 1976, hal 39.
36. Nugroho Notokusanto, **Tentara Peta**, Jakarta, Gramedia, 1979, hal. 38; **Kan Po**. No. 72, hal 11.
37. Prof Mr. Muh. Yamin, **op. cit.** hal 60, 399.
38. Moh. Hatta, **Memoir**, hal. 458.
39. **ibid**, hal 459.
40. **ibid**,
41. Prof Mr. Muh. Yamin, **op. cit.** hal. 400.
42. **ibid**, hal 410
43. Kemudian Penjelasan ini dijadikan Penjelasan UUD 1945.
44. Prof Mr. Yamin, **Moh. Hal.** 407 - 409.
45. **Ibid**, hal 406. Seharusnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea Ketiga berlaku sekarang ini, kata-kata Allah diganti dengan kata "Tuhan", agar sesuai dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
46. Miriam Budiardjo, MA. **Dasar-dasar Ilmu Politik**, cet. Pertama, Jakarta, Dian Rakyat, 1972, hal. 33 - 35.

## Lampiran

### RAPAT PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Pada tanggal 18 bulan 3 tahun 2605 +)

Ketua : Ir Soekarno

Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta

- Anggota :
1. Supomo
  2. Radjiman
  3. Suroso
  4. Sutardjo
  5. W. Hasjim
  6. Ki Bagus Hadikusumo
  7. Moh. Iskandardinata
  8. Abdul Kadir
  9. Surjohamidjojo
  10. Purobojo
  11. Yap Tjwan Bing
  12. Latuharhary
  13. Dr. Amir
  14. Abdul Abbas
  15. Moh. Hassan
16. Hamdhani
17. Ratulangi
  18. Andipangeran
  19. J. Gusti Ktut Pudja
  20. Wiranatakusuma
  21. Ki hadjar Dewantara
  22. Mr. Kasman
- tambahan :
23. Sajuti
  24. Kusuma Sumantri
  25. Subardjo.

## Kepustakaan

1. Al Rasijid, Harun, Sh. **Sekitar Proklamasi Konstitusi dan Dekrit Presiden.** Jakarta, Pelita Ilmu, 1968.
2. Anwar, Rosihan, **Mengenang Sjahrir,** Jakarta, Gramedia, 1980
3. Baharuddin, Z., **Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Dasar Baru,** Jakarta, Tintamas, 1957.
4. Budiardjo, Miriam, MA., **Dasar-dasar Ilmu Politik,** cet. pertama, Jakarta, Dian Rakyat, 1972.
5. Cindy Adam, **Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat** (Terjemahan : Abdul Bar Salim), Jakarta, Gunung Agung, 1966.
6. Hatta, Moh., **Sekitar Proklamasi,** Jakarta, Tintamas, 1970.
7. Hatta, Moh., **Memoir,** Jakarta, Tintamas, 1979.
9. **Hasil Karya Panitia-panitia Ad Hoc MPRS Yang Bertugas Menyusun Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga negara menurut Sistem UUD '45 Dan Menyusun Rancangan Perengkapan UUD '45 Serta Menyusun Perincian Hak-hak Azasi Manusia,** Buku Kesebelasan, III MPRS Jakarta, MPRS, 1972.
9. **Kan Po, No. 66, 72. 2605 (1945).**
10. Kartodirdjo, Sartono, dkk., **SEjarah Nasional Indonesia, VI,** Jakarta, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
11. Kusnardi, Moh., dkk., **Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia,** cet. Kedua, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tatanegara FHUI, 1978.
12. Malik, Adam, **Riwayat Dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,** cet. Keempat, Jakarta, Wijaya, 1962.
13. Notosusanto, Nugroho, **Naskah Proklamasi Yang Otentik Dan Perumusan Pancasila Yang Otentik,** cet. Kedua, Jakarta, Pusat Sejarah ABRI, 1976.
14. Notosusanto, **Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara,** cet. Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, 1981.
15. Notosusanto, **Tentara Peta,** Jakarta, Gramedia, 1979.
16. Prodjodikoro, Wijoyo, Dr. sH. **Azas-Azas Tatanegara di Indonesia,** cet. Ketiga, Jakarta, Dian Rakyat, 1977.
17. **Putusan-putusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia dan Konstituante,** Buku Kedua, Jakarta, MPRS, 1972
18. Suny, Ismail, Prof. Dr. SH., **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,** cet. Ketiga, Jakarta, Aksara Baru, 1977.
19. Subardjo, Ahmad, Prof. Dr., **Kesadaran Nasional,** Jakarta, Gunung Agung 1978.
20. Simorangkir, SH. dkk., **Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945.** cet. Kedelapan, Jakarta, Jambatan, 1975.

21. Wahjono, Padmo Prof., SH., **Negara Republik Indonesia**, Jakarta, Academica, 1980.
22. Yamin. Muh., Prof Mr. **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. I**, Jakarta, Prapanca, 1959.
23. Yamin Muh., **Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia**, Jakarta, Prapanca, 1960.
24. yamin Muh., **Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia**, cet. Keenam, Jakarta Jambatan, 1975.

# QAHHAR MUDZAKKAR : PERGUMULAN DI DALAM SIRI'

(Suatu Sisi Situasi Gerakan Pemberontakan DI/TII  
di Sulawesi Selatan Pada 1950 - 1965)

Oleh : Anhar Gonggong

## PENDAHULUAN

"Sulawesi Selatan adalah daerah kaya yang paling menderita" 1) Situasi yang demikian telah diungkapkan oleh Mayor Jenderal Akhmad Yani (waktu itu KSAD, 1964) se usai melakukan peninjauan ke tempat-tempat pasukannya yang sedang melakukan operasi militer untuk penumpasan perlawanan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di daerah Sulawesi Selatan. Situasi "kontras" yang digambarkannya di atas itu memang tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan di daerah ini yang telah berkembang sejak tahun 1950. Sampai dengan hari peninjauan KSAD waktu itu, bekas Letkol (Abdul) Qahhar Mudzakkar bersama dengan pasukan pendukungnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia (RI) di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Adanya perlawanan gerakan DI/TII itu telah menyebabkan timbulnya ketidak tenteraman di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama sekali di daerah pedalaman. Situasi yang demikian dengan sendirinya menghambat pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai warga masyarakatnya. Petani, misalnya tidak dapat menggarap sawahnya dengan sepenuhnya karena adanya rasa "takut", tidak hanya kepada pasukan gerombolan DI/TII tetapi juga kepada pasukan-pasukan pemerintah. Masyarakat nampak dijangkiti sikap apatis dan sebagai akibatnya daerah pertanian menjadi padanglalang, pengairan tidak berfungsi dan karena nya keadaan pertanian pada umumnya buruk 2)

Akar situasi tidak tenteram yang melahirkan daerah kaya yang paling menderita itu, tidak dapat dilepaskan dari situasi yang berkembang ketika pecahnya revolusi phisik di negeri kita dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Negara RI yang telah dinyatakan oleh Sukarno - Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pada waktu itu telah berkembang situasi revolusioner dengan pelbagai aspeknya, 3) seperti munculnya pelbagai golongan dengan kekuatan-kekuatan politik-phisik (misalnya organisasi kelasykaran), adanya kontrol pemerintah yang makin melemah, terjadinya tindakan kekerasan, berjangkitnya kekhawatiran oleh karena ketidak tentuan situasi yang dihadapi dan lain-lain; situasi yang demikian telah berkembang pula di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Dalam situasi yang demikian terjadi pertentangan-pertentangan di antara golongan-golongan masyarakat yang ada di daerah ini pada waktu itu, misalnya antara golongan yang pro RI-Kesatuan dengan yang pro RI-Serikat. Bahkan juga di antara golongan yang pro RI-Kesatuan sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu, di Sulawesi Selatan telah pula bermunculan sekian banyak lasykar-lasykar gerilya 4) yang dibentuk oleh kaum Repu-

blikein dengan pelbagai namanya pula. Pada umumnya lasykar-lasykar yang dibentuk ini diberi nama sesuai dengan nama tempat lasykar tersebut dibentuk. Demikian pula pembentuk dan pemimpinya pada umumnya adalah salah seorang "aristokrat" di daerah yang bersangkutan. Ini merupakan gejala umum di daerah ini. Sedang yang menggunakan nama yang ada hubungannya dengan agama (Islam) hanya dua kelasyakaran.<sup>5)</sup>

Jumlah lasykar gerilya perlawanan yang berjumlah cukup banyak itu pada akhirnya menimbulkan masalah, yaitu yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah terhadap mereka yang tidak memuaskan anggota lasykar-lasykar ini. Ketika pemerintah melangkah kepada usaha-usaha untuk mereorganisasi lasykar-lasykar ini untuk dimasukkan ke dalam lingkungan Angkatan Perang RI (APRI) atau mengembalikannya ke tengah-tengah masyarakat, maka timbullah masalah oleh karena perbedaan pendapat diantara lasykar-lasykar ini dengan pemerintah pada waktu itu. Perbedaan itu terutama terletak pada keinginan para anggota kelasyakaran itu, yang waktu itu telah mempunyai satu organisasi kelasyakaran dengan nama Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS), untuk diresmikan menjadi anggota APRI secara keseluruhan dalam satu kesatuan tersendiri bertingkat Brigade yaitu Brigade Hasanuddin. Tuntutan KGSS ini telah ditolak oleh Pimpinan APRI karena adanya keadaan yang tidak memungkinkannya. Personil APRI dianggap telah mencukupi kebutuhan ketika itu, bahkan sebenarnya dianggap telah melebihi kebutuhan yang diperlukan. Karena itu di kalangan APRI sendiri ada usaha untuk mengurangi personil APRI dan mengembalikan sebagian anggota nya ke kehidupan masyarakat sebagai rakyat biasa. 6)

Penolakan itu tentu mengecewakan para anggota KGSS; sebuah kekecewaan yang dilandasi oleh sikap menentramkan. Dari sinilah bermulanya situasi ketidak tentraman yang melahirkan daerah kaya yang paling menderita, sebagaimana yang diungkapkan oleh KSAD pada tahun 1964.

Dalam situasi yang demikian Qahhar Mudzakar telah tampil sebagai pemimpin di kalangan gerilya di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Tokoh inilah yang menjadi pusat dari situasi ketidak tentraman keamanan di Sulawesi Selatan selama tidak kurang dari 15 tahun, suatu jangka waktu yang tidak dikatakan singkat. Penampilannya tampak didukung oleh situasi yang berkembang ketika itu dan perjalanan hidup pribadinya sejak pecahnya revolusi phisik untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu. Ia muncul sebagai salah seorang tokoh gerilya yang berasal dari Sulawesi (Selatan) yang mampu mengorganisir tidak hanya orang-orang yang seasal dengannya tetapi juga orang-orang lain yang berasal dari luar pulau Jawa yang lainnya. Ia membentuk organisasi untuk perlawanan dan pernah menjadi Sekertaris KRIS, organisasi gerilya yang cukup punya kemampuan perlawanan yang

tinggi di pulau Jawa pada waktu itu, khususnya di sekitar Jakarta dan Krawang. Ia juga telah muncul sebagai "putra daerah" Sulawesi Selatan satu-satunya yang telah menyandang pangkat yang cukup tinggi, yaitu Letnan Kolonel.

Adanya situasi "kacau" di Sulawesi Selatan pada sekitar tahun 1950 - 1951, dan situasi inilah nanti yang membawa perkembangan situasi tidak tentram sampai dengan 1965, didukung pula oleh situasi yang berkembang secara nasional. Adanya keputusan KMB yang memungkinkan peleburan para bekas KNIL ke dalam tubuh APRIS, dan juga beberapa bulan sebelumnya telah dibentuk Negara Islam Indonesia (NII) yang dinyatakan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949, merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Adanya peleburan KNIL ke dalam tubuh APRIS sangat mengecewakan para gerilya (KGSS) yang justru ditolak keinginannya untuk melanjutkan kariernya di dalam lingkungan APRIS itu. Bukankah mereka telah mempertaruhkan segala-galanya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara RI, dan di dalam rangka itu justru yang dihadapinya adalah KNIL, yang kini memperoleh kesempatan luas untuk menjadi anggota APRI. Logika pikiran sederhana mereka tidak sampai kepada ketentuan perjanjian KMB. Kekecewaan di kalangan mereka pun tak dapat dibendung. Terbetik semacam ketidakadilan yang telah menimpa dirinya. Pengharagaan yang diharapkannya sebagai "balas jasa" tidak diperolehnya.

Lahirnya NII-Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tahun 1949 telah membuka peluang bagi para "bekas" pejuang ini untuk memperoleh penyaluran kekecewaan yang mendorongnya untuk menyatakan diri dengan gerakan DI/TII di Jawa Barat untuk merealisasi NII-Kartosuwiryo di Jawa Barat. Qahhar Mudzakar sebagai pemimpin KGSS kemudian menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan DI/TII-Kartosuwiryo di Jawa Barat dan ini dinyatakannya pada 7 Agustus 1953; ia menempatkan Indonesia Timur sebagai bagian dari NII Jawa Barat yang diimami oleh Kartosuwiryo.

Berlangsungnya perlawanan-pemberontakan Qahhar Mudzakar bersama pendukungnya dalam waktu yang cukup lama itu, (tidak kurang dari 15 tahun, 1950-1965) perlu dipahami sebagai suatu permasalahan historis dengan pelbagai latarbelakang yang menunjangnya. Dalam rangka ini agaknya usaha pemahaman kita dapat dikaitkan dengan suatu faktor budaya masyarakat Bugis-Makassar yang memang telah menyatu dalam kehidupannya baik dalam pengertian individu maupun kelompok. Faktor budaya yang dimaksud ialah apa yang dikenal dengan 'Siri'. Bagi orang Bugis - Makassar siri' mempunyai kedudukan penting karena ia mengintegrasikan secara organis semua unsur-unsur pokok dari **panngendereng**, yaitu sistem norma dan aturan-aturan adat yang keramat dan sakral dalam kehidupan orang-orang Bugis - Makasar. 8). Adapun unsur-unsur pokok yang membawa adanya peristiwa siri'

adalah : 1) pemuliaan soal-soal kepercayaan (keagamaan); 2) kesetiaan memegang amanat (**paseng**) atau janji (**ulu-ada**) yang telah dibuatnya; 3) kesetiaan pada persahabatan; 4) mudah melibatkan diri kepada persoalan orang lain, dan 5) memelihara ketertiban kawin-mawin.9) Karena siri' merupakan bagian dari budaya masyarakatnya, maka bagi orang Bugis-Makassar menghayati arti siri' merupakan panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk mempertahankan nilai sesuatu yang dihormatinya. Karena itu bagi orang Bugis - Makassar -- sebagaimana yang dikatakan oleh Mattulada -- sesuatu yang dihargai, dihormati dan dimilikinya mempunyai arti essensiil, baik bagi dirinya maupun bagi persekuatannya. 10)

Terkaitnya Qahhar Mudzakkar bersama para pendukungnya dengan siri' tidak dapat pula dipahami tanpa mengetahui tujuan yang selama ini dituntutnya. Kegagalan untuk mewujudkan tuntutan yang diinginkannya merupakan pula bagian yang tak terpisahkan dari siri' yang dihayatinya sebagai orang Bugis - Makassar. Dalam kaitan itulah, tujuan yang selama ini dituntutnya melalui bentuk perlawanan-pemberontakan perlu pula memperoleh perhatian kita secara khusus. Tujuan yang dituntutnya tentu tidak pula dapat dipisahkan dengan "kemampuan diri" yang dimilikinya. Dengan kemampuan diri di sini dimaksudkan kedudukan dan pengaruh yang dimilikinya selama ini. Pertumbuhan dari tuntutan yang selama ini diperjuangkannya selama berlangsungnya perlawanan mereka (1950 - 1965) yang dihadapkan dengan situasi kemampuan dirinya, perlu pula memperoleh perhatian kita dalam rangka uraian ini. Untuk langkah penguraian terhadap persoalan ini, penulis akan menggunakan teori **Relative Deprivation (RD)** yang berasal dari **Robert Ted Gurr, Why Men Rebel**. 11) RD didefinisikan dengan : "**as actors perception discrepancy between their value expectation and their value capabilities**". . 12) Adanya ketidaksesuaian -- yang dipersepsikan oleh sang aktor -- antara **value expectation** dengan **value capabilities**, maka dirasakan olehnya adanya **sesuatu yang hilang**. Dalam hubungan dengan RD, perlu dicatat di sini bahwa dalam rangka uraian di dalam makalah ini, yang dimaksud dengan **value expectation** ialah tuntutan-tuntutan Qahhar-Mudzakkar bersama pendukungnya baik ketika masih sebagai anggota KGSS maupun di dalam rangka gerakan DI/TII ; sedang yang dimaksud dengan **value capabilities** ialah kemampuan diri dan kedudukan Qahhar Mudzakkar sejak dari masa KGSS sampai ketika meninggal dengan menamakan diri sebagai Presiden Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) pada tahun 1965. Pencaharian Qahhar Mudzakkar untuk memperoleh tuntutannya yang hilang itu dan yang berkaitan dengan kemampuan diri beserta pendukungnya, menyebabkan "pergumulannya di dalam siri'".

Dengan berpedoman pada keterangan-keterangan yang tertera diatas, penulis akan melanjutkan uraiannya seperti di bawah ini.

## QAHHAR MUZZAKKAR & DI/TII : GAMBARAN TENTANG DIRI DIRI DAN TUJUAN

Penampilan Qahhar Mudzakkar sebagai top figur, 13) sebagaimana yang diistilahkan oleh Qahhar Mudzakkar sendiri, di dalam pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dengan perjalanan hidupnya di waktu-waktu sebelumnya. Baik ketika ia masih tinggal di daerah kelahirannya (Palopo) maupun ketika ia menetap di Pulau Jawa di mana ia telah muncul sebagai salah seorang pemimpin gerilya pembela kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada tahun 1945. Di kalangan pemimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan ia memang muncul sebagai pemimpin yang memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain. Kecerdasan keberanian, bahkan juga ketampanan wajah. Bahar Mattalioe menggambarkannya sebagai berwajah tampan, berkulit hitam dan berbadan kekar. Tetapi di balik itu, menurut Bahar Mattalioe yang pernah menjadi teman Qahhar Mudzakkar di dalam gerakan DI/TII, terdapat diartikan kebengisan, kekejaman dan kedurjaniannya. 14)

Qahhar Mudzakkar lahir pada tahun 1921 di Palopo dan berasal dari keluarga yang baik-baik dan memiliki cukup harta kekayaan menghidupi keluarganya. Dilihat dari segi pelapisan sosial di Sulawesi Selatan (khusus Bugis - Makassar) Qahhar Mudzakkar lahir dari keluarga lapisan elit, yaitu yang disebut dengan **To-Warani**. Pada pelapisan masyarakat Sulawesi Selatan, To-Warani (orang berani) mempunyai kedudukan yang cukup terhormat. Ia dapat berasal dari pelapisan bangsawan maupun orang biasa. 15) Qahhar Mudzakkar masih termasuk di dalam lingkaran bangsawan "rendah" (**a member of the lowest ranks of the aristocracy**) 16), masih ada hubungan keluarga dengan Andi Mak' ulau, putera dari Andi Jemma yaitu **Datu Luwu**. Ia menamatkan pendidikan sekolah rakyat di Palopo dan sampai dengan masuknya Jepang di Indonesia ia masih menetap di daerah kelahirannya itu.

Kedatangan Jepang menyebabkan Qahhar Mudzakkar harus kembali menetap di Jawa untuk keduanya, yaitu karena harus meninggalkan daerah kelahirannya sebagai pelaksanaan hukum adat yang disebut : **ripaoppangitana**. Menurut H.M. Sanusi Daeng Mattata pelaksanaan hukuman itu adalah akibat kelicikan Harada, seorang Jepang, yang telah menuduh Qahhar Mudzakkar mencuri emas dari kas tempat perusahaan dimana ia bekerja. Tetapi ternyata kemudian tidak benar. 17) Pengusiran itu dilakukan demi kepentingan penguasa Jepang, karena Qahhar Mudzakkar dianggap sebagai salah seorang yang banyak menghalangi tindakan Jepang pada waktu itu 18) Sejak itu ia tidak kembali lagi ke daerah kelahirannya sampai pecahnya revolusi fisik yang juga diterjuni dengan mengorganisir lasykar perlawanan di daerah-daerah Jawa. Ia membentuk GEPIS,

kemudian meleburnya ke dalam KRIS dimana ia menjadi sekretarisnya dan ketuanya adalah Dr. Ratulangi. 19) Di dalam situasi yang demikian ia tampil dengan pelbagai kegiatan di bidang kemiliteran, bahkan memperoleh pangkat yang cukup tinggi, yaitu Letnan Kolonel. Ia pernah menjadi Komandan Komando Groep Seberang dengan tugas untuk mengirimkan pasukan-pasukan territorial ke-daerah-daerah luar Pulau Jawa. 20)

Suasana di Sulawesi Selatan telah berkembang menjadi tidak tenteram oleh karena adanya persoalan yang menyangkut dengan kebijaksanaan pemerintah yang tidak menerima tuntutan KGSS untuk menjadi anggota APRI. Qahhar Mudzakkar diutus ke Sulawesi Selatan untuk mencari bentuk penyelesaian dalam masalah gerilya ini. Tetapi apa yang diperoleh ialah melanjutnya masalah ini menjadi persoalan yang tidak berujung pangkal. Tuntutannya untuk menjadi Komandan Brigade Hasanuddin ditolak oleh pimpinan APRI. Ia menghempaskan tanda pangkatnya di atas meja di depan Kolonel Kawilarang 21) dan meninggalkan Makassar menuju ke Pirang untuk kemudian ke hutan-hutan dan melakukan perlawanan terhadap Pemerintah RI.

Sejak masih "berjoang" di Jawa (Yogyakarta) tampaknya Qahhar Mudzakkar telah berhadapan dengan situasi yang menghambat kariernya di lingkungan APRI. Ketika dibentuk Brigade XVI ia tidak berhasil menaiki jenjang Komandan dan hanya sebagai wakil, sedang komandannya adalah Letkol. Warouw. Ketika berada di lingkungan Brigade XVI ini juga telah timbul pertentangan antara Qahhar Mudzakkar/pendukungnya dengan anggota KRIS yang lainnya. Ketika itu Letnan Kolonel Lembong tidak senang dengan Qahhar Mudzakkar bersama anak buahnya. Sehingga timbul persaingan. Qahhar Mudzakkar pun sangat tidak senang dengan orang ini, karena Letkol. Lembong sebenarnya adalah bekas KNIL yang berhasil memperoleh rekomendasi dari Dr. Ratulangi dan kemudian memperoleh kedudukan yang tinggi pada staf Brigade XVI. Bahkan menurut Jenderal Nasution, Letkol. Lembong hampir saja diangkat sebagai Komandan Brigade XVI. Hanya karena ada oposisi, dengan tuduhan KNIL, maka ia tidak jadi diangkat sebagai komandan dan diserahkan kepada Letkol. Warow. 22) Pertentangan Qahhar Mudzakkar dengan Lembong tampaknya tidak dapat diselesaikan dan pada suatu hari sepasukan anak buah Qahhar Mudzakkar menangkap Lembong dan membawanya ke Klaten. Tindakan ini tidak diterima oleh KRIS, dan mengirimkan pula pasukannya untuk membebaskan Lembong. 23)

Hambatan itu berlanjut setelah kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1950, dengan tugas untuk mencari penyelesaian masalah gerilya di daerah ini. KGSS sepenuhnya memberi dukungannya untuk mengangkatnya sebagai komandan Brigade Hasanuddin. Pada saat yang demikian terbukalah kesempatan bagi Kartosuwiryo untuk memperoleh dukungan dari padanya. Pada tahun 1953, ia

menerima jabatan Menteri Muda Pertahanan dan Komandan Brigade IV di lingkungan NII - Kartosuwiryo. Dengan demikian tujuannya kini berubah, dari sebuah tuntutan yang bersifat "balas jasa", berpisah ke tuntutan yang lebih mendasar, lebih hakiki, yaitu berlakunya perangkat-perangkat ajaran Islam sebagai landasan pengaturan hidup sebagai bangsa merdeka, bersifat ideologis.

Selama pemberontakannya sebagai salah seorang pemimpin gerakan DI/TII tampak bahwa di samping melakukan perlawanan fisik bersenjata terhadap Pemerintah RI, ia juga telah melangkah ke perumusan-perumusan tujuannya di dalam rangka pembentukan NII sebagai pengganti RI Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan sebagai salah seorang pemimpin gerakan DI/TII, ia tiak selalu sejalan dengan imam NII Kartosuwiryo. Bahkan pada akhirnya terjadi perpisahan di antara keduanya. Kenyataan seperti ini juga merupakan gejala yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pengungkapan kaitan-kaitan yang melatarbelakangi pemberontakan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

memberikan semacam "cetak biru" perumusan tujuan yang dikehendaki oleh Qahhar Mudzakkar tidaklah selalu mudah. Ini disebabkan oleh karena ia sendiri sering tidak jelas di dalam memberikan kerangka pemikirannya. Kita misalnya melihat ketika ia memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkannya dengan "revolusi individuil" dalam hubungannya dengan revolusi fisik di Indonesia yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula ketika ia memberikan babakan revolusi yang terjadi di Indonesia. Walaupun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, Qahhar Mudzakkar membagi revolusi Indonesia dalam 4 tahap yaitu : 1) revolusi individuil ; 2) revolusi golongan bangsa Indonesia ; 3) revolusi kemerdekaan, dan 4) revolusi persaudaraan umat manusia 24) Di dalam penglihatan Qahhar Mudzakkar, tahap revolusi yang sedang dijalani oleh bangsa Indonesia dewasa ini (pada waktu itu 1962) ialah tahap kedua. Dalam penglihatan Qahhar Mudzakkar dewasa ini di Indonesia sedang berlangsung pelbagai bentuk perlawanan perang kemerdekaan di kalangan suku-suku bangsa di Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan negara kesatuan DI/TII di PBB. Dalam penglihatan Hasan di Tiro periode 1945-1950 Mudzakkar yang demikian sejalan dengan pemikiran Hasan di Tiro (tokoh DI/TII Aceh yang beberapa waktu yang lalu pernah membentuk Aceh Merdeka) yang menyebut dirinya sebagai duta besar DI/TII di PBB. Dalam penglihatan Hasan di Tiro periode 1945 - 1950 merupakan masa pemindahan akte kekuasaan dari satu kekuasaan imperialis kepada imperialis yang lainnya, yaitu pemindahan kekuasaan atas seluruh Kepulauan Indonesia dari imperialis Belanda ke imperialis Jawa. Dalam kerangka ini daerah kekuasaan negara Hindia Belanda dipelihara sebulat-bulatnya. Pemeliharaan yang demikian itu sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Belanda. Tindakan yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan oleh Hasan

di Tiro. Yang benar menurut Hasa di Tiro ialah mengembalikan bentuk **status qua' anto**, yaitu ke keadaan sebelum penjajahan atau kolonialisme. Dengan demikian -- menurut Hasan di Tiro -- seluruh pulau di Indonesia setelah perginya penjajahan Belanda harus dikembalikan kepada suku-suku bangsa atau bangsa yang merupakan bangsa pemilik kepulauan yang bersangkutan. Sumatera harus dikembalikan kepada bangsa Sumatera, Pulau Sulawesi harus dikembalikan kepada bangsa Sulawesi, Maluku harus diserahkan kembali kepada bangsa Maluku, demikian kepulauan lainnya. 26) Di lain pihak, SM. Kartosuwiryo telah memberikan pandangannya tentang revolusi yang berlaku di Indonesia **setelah** pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pandangan Kartosuwiryo revolusi Indonesia mempunyai dua tahap yaitu tahap revolusi nasional dan tahap revolusi sosial. Pada tahap revolusi nasional yang diperjuangkan ialah memperoleh pengakuan dari bangsa-bangsa lainnya sebagai bangsa merdeka. Sedang pada tahap revolusi sosial bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus berjuang untuk membangun sebuah negara yang berdasarkan perangkat ajaran agama Islam, darul Islam, negara islam. 27).

Sejajar dengan revolusi sosial sebagaimana dikehendaki oleh Kartosuwiryo yang disebut di atas, demikian pula sejalan dengan pandangan Hasan di Tiro, Qahhar Mudzakkar menghendaki bangunan sebuah negara Indonesia yang bersifat atau berbentuk federasi yang di dalamnya perangkat-perangkat ajaran Islam akan menjadi landasan ideologi untuk pengaturan kehidupan negara. Dengan demikian menurut Qahhar Mudzakkar dapat dibentuk sekian banyak negara bagian di dalam rangka negara federasi Indonesia. Pembentukan negara bagian itu harus dilandasi oleh hal-hal yang bersifat yuridis-historis dan memperhatikan batas-batas daerah dan keinginan dari golongan sukubangsa yang ada di daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa masing-masing golongan sukubangsa akan mempunyai bentuk pemerintahan negara bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan keadaan sukubangsa yang bersangkutan. Tentang ini Qahhar Mudzakkar menjabarkannya sebagai berikut :

"Kita umpamakan : Negara bagian Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang terdiri dari beberapa sukubangsa, seperti : suku Makassar, Suku Bugis, suku Luwu, suku Pamana (campuran), suku Drui, suku Toraja, suku Mandar, suku Mekongga, suku Marunen, suku Buton, suku Muna, dsb. yang menganut agama Islam dan agama Nasrani ..... akan mengatur kehidupannya sesuai dengan agama dan keadaan kebudayaannya masing-masing. 28)

Sebagai konsekuensi dari langkah ke pembentukan negara yang dimaksud, yaitu negara dengan perangkat-perangkat ajaran Islam sebagai landasan pengaturan kehidupannya, maka dengan sendiri-

nya ia menghendaki pula perubahan dasar negara dari Pancasila ke Islam. Atau Pancasila dapat dipertahankan dengan persyaratan bahwa sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa harus diganti rumusannya sesuai dengan kehendak Qahar Mudzakkar. Sehubungan dengan itu di dalam salah satu suratnya ke Zulkifli Lubis, yang merupakan balasan surat yang pernah dikirimkan kepadanya untuk mengajak Qahar Mudzakkar kembali ke pangkuan RI, ia mengusulkan agar Zulkifli Luabis terlebih dahulu minta kepada presiden untuk menerima usulnya mengganti rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan : Ketuhanan yang berdasarkan atas ajaran Islam dan ajaran agama yang dianut oleh segenap golongan sukubangsa Indonesia. Sejalan dengan itu maka diusulkannya pula supaya pimpinan negara menggariskan dan mendekritkan program politik negara yang tegas anti komunis, melenyapkan komunis di Indonesia.<sup>29)</sup>

Pola pikiran di atas di dalam hubungannya dengan dasar negara RI, merupakan pola yang melingkupi tujuan perlawanan Qahar Mudzakkar terhadap pemerintah RI pimpinan Presiden Sukarno pada waktu itu. Karena itu setiap ia memperoleh kesempatan untuk mengirimkan surat kepada Sukarno dan juga Kolonel (Andi) Muhammad Yusuf yang waktu itu Pangdam Kodam XIV Hasanuddin,<sup>30)</sup> pola itu pula yang selalu diajukannya. Sampai dengan tertembak matinya pada 1965 ia tidak pernah bergeser dari tujuannya itu.

#### KETIDAKSESUAIAN MAKIN MENJARAK : PERGUMULAN DI DALAM SIRI'

Di dalam salah satu bukunya Qahar Mudzakkar berkata sebagai berikut :

"Sedjak ketjil saja tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saja dalam perkelahian, dan sedjak dewasa saja tidak pernah menjadi "Pak Turut" pendapat seseorang diluar Adjaran Islam.<sup>31)</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan berkata :

"Djangankan Sukarno dengan proklamasi 17 Agustus 1945, bahkan dengan Imam Kartosuwirjo dan Tengku Muhammad Daud Boureueh, keduanya saja akui Pemimpin Besar Ummat Islam Bangsa Indonesia, akan saja tinggalkan dalam perdjongan, akan saja engkari, bila ternjata bahwa mereka tidak berdasarkan kejaqinan Hidupnja pada Al-Quran dan Hadits Shahih (sadja).<sup>32)</sup>

Dari kedua kutipan yang tertera di atas tampak dua hal yang menunjukkan sikap Qahar Mudzakkar di dalam hidupnya; yang pertama ialah ketidakmauannya untuk tunduk kepada seseorang, lawannya, dan ini merupakan sesuatu pembawaan dari sejak sebelum ia dewasa. Kedua hal ini saling menjalin di dalam perkembangannya sebagai pemimpin perlawanan-pemberontakan gerakan DI/TII.

Yang pertama adalah sikap pribadinya dan kedua adalah tujuan yang dituntutnya melalui prawanan pemberontakannya. Kedua hal ini dapat melahirkan siri' di dalam dirinya. Dalam kaitan ini perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa siri' adalah suatu yang abstrak, 33) yang di dalamnya perasaan malu merupakan sesuatu yang dominan; dan siri' jika **dibahasaindonesiakan** memang sinonim dengan malu. Dengan demikian perasaan lebih mendominasi diri seseorang yang bersiri'. Karena sifatnya yang abstrak dan karena faktor perasaan yang lebih mendominasi, tentu tidak mudah untuk mengetahui tindakan yang dilandasi oleh siri'. Yang dapat menjadi pegangan kita untuk mengetahuinya adalah melalui perbuatan dan kata-katanya. Dalam rangka ini penulis menanggapi relevan untuk mengutip-kata-kata Qahhar Mudzakar seperti di atas.

Di dalam pergumulannya di dalam siri' Qahhar Mudzakar tidak dapat dilepaskan dari proses perkembangan tujuan yang dituntutnya (**value expectation**) dan kenyataan kemampuan diri dan kedudukannya (**value capabilities**), dari ketika ia masih sebagai pimpinan KGSS dan kemudian sebagai pimpinan gerakan DI/III Sulawesi Selatan yang kemudian berlanjut dengan "jabatan kepresidenannya" di dalam negara yang dibentuknya dengan nama: Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). 34) Dalam proses yang berlangsung selama 15 tahun itu, kita melihat adanya sebagaimana yang dipersepsikan oleh Qahhar Mudzakar bersama pendukungnya, terdapat "ketidaksesuaian antara **value expectation** dengan **value capabilities** Dalam kenyataan yang demikian inilah Qahhar Mudzakar melakukan pergumulannya di dalam siri'.

Pergumulan di dalam siri' sebenarnya telah dimulai sejak masih tinggal di Jawa (Yogyakarta) sebagai seorang perwira dengan pangkat Letkol. Di dalam pelbagai hal nampak bahwa ia tidak mendapat tempat yang diinginkannya di lingkungan APRI, bahkan menurut pengakuannya sendiri yang diungkapkannya di dalam salah satu suratnya kepada pimpinan APRI tertanggal 30 April 1950 — ia dianggap salah dan **indisiplincer** dan dianggap pengacau di dalam tubuh APRI. 35) Selanjutnya Qahhar Mudzakar mengucapkan pula bahwa:

"Dan kiranya bukan suatu rahasia lagi, bahwa kami sebagai perwira dari Angkatan Perang tidak dipercaya oleh pimpinan, sehingga kami menjadi perwira "nganggur" dan perwira tidak mempunyai tanggung jawab, **sekalipun keadaan-keadaan di Indonesia Timur dewasa ini erang-terangan memanggil dan membutuhkan kami sebagai seorang pradjurit.**36)

Dari keterangan Qahhar Mudzakar di atas telah nampak menjaraknya antara apa yang dituntutnya (**value expectation**) dengan kemampuan diri dan kedudukan yang dimilikinya (**value capabilities**), yaitu sebagai perwira. Dari apa yang dikutip di atas dan keseluruhan isi suratnya kepada pimpinan APRI, ia sebenarnya menuntut sesuatu

"tempat" yang wajar di lingkungan APRI. 37) Tetapi ia adalah orang yang tidak dipercaya sehingga apa yang dituntutnya tidak dapat diperolehnya. Sebagai perwira dengan pangkat yang cukup langka ketika itu, ia merasa mampu untuk memperoleh suatu tempat "yang wajar" di lingkungan APRI. Ketika Brigade XVI dibentuk, yaitu Brigade yang dibentuk atas peleburan beberapa lasykar perlawanan, termasuk sebuah kesatuan yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar, kesempatan untuk memperoleh kedudukan yang dianggapnya sesuai dengan kemampuan untuk memperoleh kedudukan yang diharapkan itu pun tidak diraihinya. Yang diangkat sebagai Komandan Brigade ini ternyata bukan Qahhar Mudzakkar, tetapi Letkol. Warouw. Ia hanya memperoleh posisi sebagai kepala staf brigade ini dan itu berarti bahwa ia menduduki jabatan yang sebenarnya tidak diinginkanya.

Pada tahun 1949 Qahhar Mudzakkar telah mendapat kesempatan untuk menjadi komandan dari apa yang disebut dengan Komando Groep Seberang. Kemampuan dirinya dengan apa yang dituntutnya pada kesempatan ini (yang berjalan tidak begitu lama) dapat dikatakan berjalan sejajar. Tetapi setelah menjalankan tugasnya untuk mengirimkan pasukan-pasukan territorial, tidak lagi terdengar beritanya sebagai komandan. Kemudian ia tampil di Sulawesi Selatan sebagai pemimpin KGSS dalam rangka penyelesaian masalah gerilya di daerah ini. Pada kesempatan ini ia pun tidak memperoleh apa yang dituntutnya. Ia gagal memperoleh kedudukan sebagai komandan Brigade Hasanuddin sebagaimana yang dituntut oleh KGSS walaupun ia memperoleh dukungan yang cukup besar baik di lingkungan KGSS dapat dikatakan memperoleh dukungan sepenuhnya — maupun di dalam masyarakat. Dukungan masyarakat pada waktu itu, tampaknya erat hubungannya dengan sikap emosional masyarakat dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai pejuang menghadapi penjajah di dalam revolusi fisik. Namun, pimpinan APRI tidak menerima tuntutan KGSS tersebut dan dengan demikian kesempatan bagi Qahhar Madzakkar untuk memperoleh kedudukan seperti yang diinginkanya, tertutup kembali.

Penolakan Kolonel Kawilarang atas nama pimpinan APRI pada waktu itu terhadap usul pembentukan Brigade Hasanuddin tidak hanya menggagalkan keinginan Qahar Mudzakkar untuk memperoleh kedudukan yang wajar menurut yang diinginkanya, tetapi juga mengecewakan sekitar 15.00 orang 38) gerilya bekas pejuang yang sebenarnya sangat menghendaki kelanjutan kariernya di lingkungan APRI pada waktu itu. Keinginan yang demikian tidaklah dapat dilepaskan dari persoalan status anggota APRI di dalam masyarakat ketika itu. Masyarakat cukup memberikan tempat yang tinggi kepada mereka, sehingga jika ada di antara keluarganya yang menjadi anggota APRI, itu merupakan lambang status. Sebenarnya usaha untuk memberikan penerangan kepada para anggota gerilya ini tentang kedudukan APRI di dalam masyarakat, yaitu bahwa menjadi anggota

APRI sama saja dengan anggota masyarakat lainnya, telah diusahakan juga oleh anggota APRI sendiri. Kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Mayor Bardosono 39) telah dijelaskan bahwa kedudukan di dalam Angkatan Perang tidak memberi keistimewaan sebagai manusia". Tetapi tentu saja tidak semua para anggota gerilya menerima penjelasan seperti itu, karena faktor-faktor nyata yang dilihatnya secara langsung yang menyangkut dengan kehidupan anggota APRI ketika itu, yang relatif memang lebih baik daripada anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian kekecewaan yang terdapat di dalam diri Qahhar Mudzakar bertemu, dan saling mendukung, dengan kekecewaan yang terdapat di dalam diri para bekas pejuang gerilya ini; dan di dalam perkembangannya, para gerilya inilah yang terus memberikan dukungannya kepada Qahhar Mudzakar di dalam perlawanan pemberontakannya yang mampu berlangsung selama kurang-lebih 15 tahun.

Pertemuan dua rasa kecewa (antara Qahhar Mudzakar dan anggota KGSS) tersebut mempertemukan pula dua perasaan yang dilandasi oleh siri' karena kegagalan mereka untuk meraih apa yang diinginkannya masing-masing. Qahhar Mudzakar gagal menjadi komandan Brigade Hasanuddin di satu pihak, sedang di pihak lain para anggota KGSS gagal menjadi anggota APRI yang selama ini sebenarnya sangat diharapkannya. Kegagalan menjadi anggota APRI melahirkan rasa malu di dalam dirinya, dan inilah salah satu bentuk siri' dari anggota KGSS itu, karena telah merasa gagal memperoleh status yang selama ini diharapkannya dan lebih dari itu juga diharapkan oleh keluarga dan rekan-rekan lainnya di masyarakat lingkungannya.

Jika kita memperhatikan keterangan yang ada kaitannya dengan Qahhar Mudzakar di atas dan kemudian dilihat berdasar teori RD, maka pada periode ini (revolusi fisik, 1945 — 1950) akan nampak dua pola dari teori tersebut, yaitu pola **Decremental deprivation** dan **Aspirational deprivation**. Kedua pola ini menunjukkan adanya pergeseran yang membuat antara keduanya makin menjarak dari dua **value** (yaitu **value expectation** dan **value capabilities**) disebabkan oleh karena situasi yang dihadapi. **Decremental deprivation** menunjukkan **value expectation** dan **value capabilities** yang pada waktu tertentu sejajar, tetapi pada suatu ketika **value capabilities** makin menurun. Sedangkan **aspirational deprivation** menunjukkan adanya jarak antara kedua **value** itu karena kedua **value** yang tadinya berjalan sejajar pada suatu saat tertentu tidak lagi berjalan sejajar karena makin meningkatnya **value expectation** sedang **value capabilities** tetap. 40) Pada periode ini kita melihat adanya kemampuan diri Qahhar Mudzakar sebagai pemimpin "relatif" berjalan sejajar dengan apa yang dituntutnya. Ia tampil sebagai seorang pemimpin dalam pelbagai organisasi dan bahkan memperoleh kedudukan dan pangkat sesuai dengan kemampuan dirinya. Keadaan seperti ini berjalan dari tahun 1945 sampai sekitar pertengahan atau awal 1950. Tetapi memasuki pertengahan atau akhir tahun 1950 tampak bahwa kedudukannya dan pangkatnya tetap,

tetapi tuntutananya lebih meningkat. Sebagai seorang perwira yang hanya satu-satunya dari Sulawesi Selatan (Bugis - Makassar, pangkat letkol) ia menuntut suatu kedudukan yang lebih dari apa yang diperolehnya. Tetapi apa yang dituntutnya itu tidak diperolehnya. Ia gagal menjadi Komandan Brigade Hasanuddin. Pada periode ini nampak bahwa Qahhar telah mempersepsikan, sebagai aktor, adanya ketidaksesuaian antara **value expectation** dan **value capabilities** yang dimilikinya.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Qahhar Mudzakar pada akhirnya menempatkan daerah Indonesia Timur sebagai agian dari NII - Kartosuwiryo di Jawa Barat. Di dalam lingkungan "NII" nya Kartosuwiryo ini Qahhar Mudzakar tampak memperoleh kedudukan sebagai Menteri Muda Pertahanan dari NII nya Kartosuwiryo. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian, kita melihat adanya kecenderungan terlihatnya salah satu pada lainnya dari RD yaitu **Progressive deprivation**. Karena pada waktu terlihat adanya kenaikan dari kedua **value** yang dimaksud, **value expectation** dan **value capabilities**. Artinya kedudukan Qahhar Mudzakar menaik secara cepat dan sejajar dengan apa yang dituntutnya. Kenyataan ini di lingkungan NII-Kartosuwiryo dapat berjalan sekitar tahun 1952 — 1959. Tetapi setelah itu dan mulai pada sekitar 1960 nampak adanya kecenderungan makin menurunnya posisinya (**value capabilities**) sebaliknya tuntutananya makin meningkat; bahkan ia berusaha untuk tampil sebagai tokoh utama di NII dan menggeser Kartosuwiryo. hal ini terbukti dengan langkah untuk tidak mengakui kepemimpinan imam Kartosuwiryo dengan melakukan pembatalan dua proklamasi yang pernah dilakukan, secara sekaligus, yaitu membatalkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan juga proklamasi NII-Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Kedua proklamasi tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menurut pengertian Qahhar Mudzakar. Pembatalan kedua Proklamasi yang dimaksud dilakukannya bersama dengan Proklamasi berdirinya Negara Republik Persatuan Islam Indonesia, yang dinyatakannya pada tanggal 14 Mei 1962. Sekaligus juga telah mengangkat dirinya sebagai (pejabat) presiden dari negara yang diproklamasikannya itu.41)

Adanya tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa di lingkungan NII-Kartosuwiryo pun nampak ia tidak memperoleh tempat sebagaimana yang didambakannya. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan tuntutananya yang makin meningkat. Tampak ia menuntut suatu kedudukan yang lebih tinggi dan menurut persepsi pikirannya adalah sesuai dengan kemampuan dirinya. Bahkan ia menuntut jabatan presiden. Tetapi bersamaan dengan yang demikian, nampak pula bahwa kedudukan dan kemampuan dirinya sebagai aktor pemimpin makin menurun. Kepercayaan rekan-rekannya kepada dirinya makin menurun dan ini kita melihat dimulai oleh kembalinya Bahar Mattalioe ke pangkuan Republik Indonesia beberapa saat setelah dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli. Perten-

tangganya dengan pemimpin pemberontak lainnya adalah merupakan pertanda dari makin menurunnya kemampuan dirinya. Makin menjaraknya antara **value expectation** dengan **value capabilities** sebagaimana yang digambarkan di atas merupakan beban diri Qahhar Mudzakkar yang menyebabkannya harus bergumul di dalam siri'. Kegagalannya untuk mencapai apa yang dituntutnya mulai dari Komandan Brigade Hasanuddin sampai kepada langkah-langkahnya untuk mencapai kedudukan yang tertinggi di dalam negara (Islam) yang diinginkannya, merupakan bebannya di dalam rangka siri' sebagai seorang pemimpin dari gerakan perlawanannya yang telah berlangsung dengan tiada bayangan akan hasil yang didambakannya.

Di balik itu suatu hal yang tidak dapat pula dilepaskan dari perasaan siri' yang tersimpan di dalam diri Qahhar Mudzakkar ialah keinginannya untuk "menampilkan dirinya kembali" di tengah-tengah masyarakat yang pernah "membuangnya". Setidaknya suatu penampakan diri di hadapan Datu (raja) Luwu yang pernah menghukumnya dengan suatu hukuman adat kerajaan di masa pendudukan Jepang, yaitu dalam bentuk **ripaoppangitana**. Dengan hukuman ini maka ia sebenarnya tidak diperkenankan lagi untuk menginjakkan kakinya di Luwu sampai akhir hidupnya. Menurut hukum ini, sesamanya warga masyarakat samasekali tidak menerimanya lagi untuk berdiam di antara mereka. 42) Namun, oleh karena perubahan situasi yang lahir oleh karena kemerdekaan yang telah diumumkan dan bahkan Qahhar Mudzakkar telah tampil sebagai seorang tokoh dengan pangkat yang cukup tinggi, ia kembali ke Sulawesi Selatan sebagai orang "terpandang" kembali. Dalam situasi yang demikian ia melangkah kepada suatu tindakan yang memang sangat langka terjadinya, yaitu mempersunting seorang keturunan (cucu) dari datu Luwu, bernama Andi Halia. Ini disebutnya sebagai suatu langkah untuk menghapuskan sistem feodalisme di daerah ini. 43) tetapi langkah yang ditempuhnya ini pun tidaklah memberikan peluang bagi dirinya untuk tampil dalam keadaan yang normal, sebagai seorang pemberontak pada negara. Demikian pula langkahnya untuk penampilan dirinya di depan Datu Luwu sebagai "bekas hukuman yang berhasil menjadi besar, tidak berhasil. Datu Luwu (Andi Jemma) beserta keluarganya tetap dihormati oleh rakyatnya karena ia adalah seorang tokoh bear yang tidak pernah berkompromi dengan Belanda. Qahhar Mudzakkar tidak berhasil "menyaingi" kebesaran sang datu walaupun ia juga adalah orang yang menentang penjajah. Kedudukannya sebagai pemberontak kepada negara RI bukan sesuatu yang membuka jalan untuk penampilan dirinya kembali di tengah-tengah masyarakat tempat kelahirannya.

Dan dalam hubungan ini, ia juga sebenarnya berhadapan kembali dengan sekian banyak golongan bangsawan termasuk dengan Andi Jemma yang tidak setuju dengan langkah yang ditempuhnya.

Tak satu pun dari tujuan yang dituntutnya berhasil dicapainya secara wajar, sebagaimana yang dipersepsikannya di dalam pikiran-

nya sebagai seorang tokoh. **Ketowaranlannya** (kepemberaniannya) dan kejantannya sebagaimana yang ia artikan dri namanya (Abdul-Qahhar Mudzakkar diartikannya dengan: "Hamba Tuhan yang bersifat jantan" 44) tidak cukup alat untuk mencapai serangkaian tujuan yang dituntutnya. Kegagalan-kegagalan ini telah makin mendorongnya lebih dalam ke dunia siri' yang digumulinya. Bukankah sebagaimana yang dikatakan oleh Hendrik Th. Chabot kegagalan akan membawa malu (siri') pada diri orang Bugis — Makasar, 45) di dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan atau kedudukan yang lebih baik.

## PENUTUP

Jika kita memperhatikan pengertian siri' — sebagaimana yang diterangkan pada pendahuluan makalah ini, maka tujuan Qahhar Mudzakkar untuk membentuk suatu negara Islam **federatif** berupa RPII dapat pula dilihat berdasarkan konsep siri'. Salah satu dasar yang digunakan untuk mendirikan Negara Islam yang dimaksud ialah bahwa penganut agama Islam di Indonesia adalah yang terbesar. Bersumber dari sinilah lahirnya siri' yang dimaksud. Tampaknya Qahhar Mudzakkar "merasa malu dan marah" oleh karena di dalam negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tidak dapat membentuk negara dengan perangkat-perangkat ajaran Islam yang menjadi dasarnya. Hal yang demikian ini dapat diketahui jika kita memperhatikan ketiga bukunya yang juga digunakan di dalam menulis makalah ini. Buku-buku tersebut diterbitkan sekitar tahun 1960-an, 46).

Berkaitan dengan keterangan di atas, maka tampaknya "kurang tepat" pendapat orang yang mengatakan Qahhar Mudzakkar telah memperalat agama Islam di dalam pemberontakannya untuk membentuk negara Islam yang dicita-citakannya. Dalam rangka langkah-langkahnya di dalam mewujudkan cita-citanya itu, ia sebenarnya juga bergumul di dalam siri'. Pada sisi ini nampak bahwa ia tidak menyelami suatu kenyataan di dalam pertarungan di bidang politik/ideologis, yaitu bahwa "tidak selalu yang berjumlah banyak dapat menyingkirkan yang sedikit". Sehubungan dengan itu penulis ingin mengutip keterangan Hamka, ulama besar yang telah tiada, ketika memberikan penilaiannya terhadap langkah yang diambil oleh Kartosuwiryo melalui pemberontakan DI/TII-nya. Ia berkata:

"Kartosuwiryo adalah "mudjtahid" politik yang salah melakukan "idjtihad", karena sempit pandangan atas kemungkinan. 47) Keterangan Hamka di atas pasti dapat pula digunakan untuk menilai langkah yang telah ditempuh oleh Qahhar Mudzakkar, yang penulis maksudkan ialah bahwa Qahhar Mudzakkar pun telah melangkah ke suatu tindakan keliru, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kartosuwiryo, dengan pemberontakannya melalui gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Qahhar Mudzakkar tidak mampu menggunakan fikiran jernihnya di dalam melihat situasi yang dihadapinya. Tetapi orang yang sedang bergumul di dalam siri', memang tidak dapat diharapkan untuk menggunakan fikiran jernihnya di dalam melihat situasi yang dihadapinya. Tetapi orang yang sedang bergumul di dalam siri', memang tidak dapat diharapkan untuk menggunakan fikiran jernihnya. Perasaan lebih menguasai dirinya daripada fikiran jernihnya juga merupakan salah satu sifat dari siri'.

## CATATAN

1. **Harian Tanah Air**, Makassar, 22 Oktober, 1964.
2. Radik Djawadi, (penjusun), **Pradjurit Mengabdikan Gumpalan Perang Kemerdekaan Bataljon Y**, Pusat Sedjarah Militer, Bandung, tanpa angka tahun, hal 128.
3. Untuk memperoleh gambaran situasi Negara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, lihat Sartono Kartodirdjo. "Wajah Revolusi Indonesia dipandang dari Peerspektivisme Struktural", **Prisma**, 8 Agustus 1981, hal. 3 — 13.
4. Di dalam buku **Propinsi Sulawesi** (keluaran Kementerian Pengerangan, 1953, disebutkan adanya 19 organisasi Kelayakaran di daerah Sulawesi Selatan yang pada 1946 membentuk suatu organisasi koordinator bernama LAPRIS; kemudian pada tahun 1949 terbentuk lagi suatu organisasi kelayakaran sebagai koordinator dengan nama KGSS. Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian pada bagian selanjutnya.
5. Organisasi yang dimaksud bernama Hizbullah dan Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS - Muda); untuk keterangan lebih lanjut lihat **Rangkaian Sedjarah Kelayakaran, Kesatuan2 Dan Badan2 Perjoangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan/Tenggara 1945 — 1949**, Dihimpun oleh Koordinator Urusan Veteran RI. Daerah Sulawesi Selatan/Tenggara. Bagian Screening, untuk dipergunakan sebagai bahan penentuan dalam pemberian pengakuan Veteran Pedjoang Kemerdekaan Republik Indonesia, 1958, hal. 132 — 135.
6. **Propinsi Sulawesi**, hal. 334 — 364.
7. **Ibid.**
8. Mattulada, "Kebudayaan Bugis — Makassar", di dalam Koentjaraningrat. **Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia**, Djambatan Jakarta, 1970, hal. 272.
9. Mattulada, "Latoa", **Disertasi** untuk dokter di UI, 1975, hal. 68.
10. **Ibid.**, hal 67.
11. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih jelas tentang teori **Relative Deprivation** tersebut, lihat Robert Ted Gurr, **Why Men Rebel**. Princeton University Press, New Jersey, 1970, **PASSIM**.
12. **Ibid.**, hal. 24.
13. Abdul Qahhar Mudzakkar, **Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia** Hasanudin, tanpa nama tempat, 1380 h., hal. 5.
14. Bahar Mattalioe, **Kahar Muzakkar Dengan Petualangannya**, Delegasi, Djakarta, hal. 14.
15. Mattulada, **Disertasi**, hal. 36.
16. Barbara Sillers Harvey, "Tradition, Islam And Rebellion; Suth Sulawesi", **disertasi** (Cornell University, 1974, hal. 181).
17. H.M. Sanusi Daeng Mattata, **Luwu Dalam Revolusi**, (stensil), Makasar, 1967, hal. 105.

18. **Ibid.**
19. Bahar Mattalioe, **op. cit.**, hal. 27.
20. Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi, **Siliwangi Dari Masa Kemasa**, Fakta Mahjuma, Djakarta, 1968, hal. 567.
21. Bahar Mattalioe, **op. cit.**, hal. 37.
22. A.H. Nasution, **TNI** (jilid II), hal. 210 — 211.
23. Barbara Sillers Harvey, **op. cit.**, hal. 184 — 185.
24. Abdul Qahhar Mudzakkar, **Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia**, Hasanudin, tanpa nama tempat, 1381, hal. 55 — 62.
25. **Ibid.**
26. Untuk memperoleh gambaran tentang pendapat Hasan Muhammad Di Tiro ini lihat bukunya yang berjudul: **Manifesto Tengku di Tiro Masa Depan Politik Kepulauan Kita**, Lembaga Persiapan Kemerdekaan Sumatra, Sulawesi dan Maluku, New York, 1964, **Passim**.
28. Abdul Qahhar Mudzakkar, **Revolusi Ketatanegaraan ....**, hal. 58.
29. **Ibid.**, hal. 10.
30. Untuk mengetahui isi surat Qahhar Mudzakkar yang pernah dikirimkannya kepada kedua pemimpin ini (Presiden Sukarno dan Andi Muhammad Yusuf) lihat **Ibid.**, hal. 15 — 39.
31. **Ibid.**, hal. 3
32. **Ibid.**
33. Mattulada, **Manusia dan Kebudayaan .....**, **loc. cit.**
34. Untuk mengetahui sekitar latar belakang pembentukan RPII oleh Qahhar Mudzakkar itu, lihat bukunya yang berjudul: **Tjataan Bathin Seorang pedjoang Islam Revolusioner**, tanpa nama penerbit dan nama tempat, 1382, hal. 66 — 112.
35. **Siliwangi Dari Masa Kemasa**, hal. 960.
36. **Ibid.**, hal. 569.
37. **Ibid.**, hal. 567 — 570.
38. Jumlah yang sebanyak ini diketahui dari **Propinsi Sulawesi**, hal. 336.
39. Badosono, **Peristiwa Sulawesi Selatan 1950**, Jajasan Pustaka Militer, Djakarta, 1955, hal. 91.
40. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ketiga pola dari teori Relative Deprivation yang disebut itu, lihat Robert Ted gurr, **op. cit.**, hal. 46 — 58.
41. Abdul Qahhar Mudzakkar, **Tjataan Bathin .....**, **loc. cit.**
42. A.Z. Abidin, "Beberapa Lembaga Adat Sulawesi Selatan". **Bingkisan**, hal. 55.
43. Bahar Mattalioe, **op. cit.** hal. 58.
44. Abdul Qahhar Mudzakkar, **Tjataan Bathin ....**, **op. cit.**, hal. 113.

45. Hendrik Th. Chabot, "Bontoramba, Sebuah Desa Goa, Makassar" di dalam Koentjaraningrat, **Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini**, Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Djakarta, 1964, hal. 286.
46. Untuk ini lihat buku-buku yang telah ditulisnya pada sekitar 1960-an, seperti **Revolusi Ketatanegaraan . . . . .** dan **Konsepsi Demokrasi . . . . .** serta **Tjataan Bathin . . . . .** dan lain-lainnya.
47. Hamka, **Tjahaja Baru**, Pustaka Nasional, Medan, 1950, hal. 93.

## PENGIRIMAN PERWIRA-PERWIRA SILIWANGI KE SUMATERA DALAM TAHUN 1948

Oleh: Amrin Imran

### I

Permulaan tahun 1948, sebagai akibat Perjanjian Renville, pasukan Siliwangi dihijrahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Beberapa orang perwira kemudian dikirim ke Sumatera untuk menduduki berbagai jabatan di lingkungan Komandemen Sumatera.

Pada umumnya penempatan para perwira tersebut tidak berjalan lancar. Ada di antara mereka yang terpaksa kembali ke Jawa. Hal itu disebabkan oleh sikap kurang tegas Panglima Sumatera, di samping adanya rasa curiga dari sebagian perwira Sumatera yang menganggap perwira-perwira Siliwangi ini sebagai saingan mereka.

### II

Dasar bagi pengiriman perwira-perwira Siliwangi adalah radiogram Panglima Komandemen Sumatera Mayor Jenderal Suharjo Harjowardoyo. Dalam radiogram itu ia meminta agar Divisi Siliwangi mengirimkan Kolonel Hidayat dan Letnan Kolonel Alex Kawilarang untuk mengisi kebutuhan akan tenaga-tenaga pimpinan di Komandemen Sumatera. Radiogram itu diterima oleh Menteri Pertahanan sebelum ia bersama Wakil Panglima Besar berkunjung ke Sumatera dalam bulan April 1948.

Permintaan Suharjo tidak segera dipenuhi. Kolonel Hidayat tidak mungkin dikirimkan, sebab ia sudah disiapkan untuk menduduki jabatan Wail Kepala Staf Angkatan Perang atau Panglima Divisi IV (gabungan dari Divisi Siliwangi dan Laskar Seberang). 1)

Tetapi permintaan itu tetap menjadi perhatian pemerintah. Hal itu sejalan pula dengan maksud pemerintah untuk menjadikan Sumatera sebagai basis kedua apabila terjadi lagi perang dengan Belanda.

Dalam bulan Juni 1948 Menteri Pertahanan mengirim Letnan Kolonel Daan Yahya. Pengiriman itu merupakan pengiriman gelombang pertama yang kelak akan diikuti oleh pengiriman berikutnya. Menteri Pertahanan sudah mengangkat Daan Yahya sebagai Kepala Staf Operasi Komandemen Sumatra. (Sebenarnya dalam bulan Mei ia sudah diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, tetapi ia kurang menyenangi jabatan tersebut). 2) Waktu Daan Yahya tiba di Bukittinggi, tempat kedudukan Komandemen Sumatera, ternyata Suharjo sudah mengangkat Kolonel Ismail Lengah sebagai Kepala Staf Operasi, menggantikan Mayor Jenderal Sutopo. Di samping itu Ismail Lengah masih tetap memegang jabatan sebagai Komandan Divisi IX/Banteng.

Suharjo tidak memberikan tugas lain kepada Daan Yahya. Kurang-lebih satu setengah bulan ia menganggur di Bukittinggi. Ketika ia mendesak agar Suharjo melantiknya sebagai Kepala Staf Operasi sesuai dengan pengangkatan Menteri Pertahanan, Suharjo mengatakan bahwa pengangkatan itu ditantang oleh Kolonel Ismail Lengah dan Letnan Kolonel Abdul Halim, seorang Komandan Resimen Divisi IX. Daan Yahya menemui Ismail Lengah dan Halim. Kedua perwira ini mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai maksud yang demikian. Bahkan Ismail Lengah merasa senang apabila Daan Yahya menjadi Kepala Staf Operasi, sebab dengan demikian ia akan dapat memusatkan perhatiannya untuk memimpin Divisi IX. 3)

Daan Yahya merasa dirinya dipermainkan oleh Suharjo. Sekali lagi ia mendesak panglima ini agar melaksanakan keputusan Menteri Pertahanan. Tetapi Suharjo tetap tidak mau melaksanakan. Akhirnya Daan Yahya mengancam akan kembali ke Yogyakarta dan melaporkan hal itu kepada Menteri Pertahanan. Laporan itu memang disampaikan setelah ia tiba di Yogyakarta. Dalam laporan itu ia menyarankan pula agar Menteri Pertahanan mengangkat seorang perwira yang cukup berwibawa sebagai Panglima Sumatera, menggantikan Jenderal Suharjo. Perwira yang diusulkannya ialah Kolonel Nasution atau Kolonel Hidayat. 4)

Dalam bulan Agustus 1948 Kawilarang tiba di Bukittinggi. 5) Nasib yang dialami oleh Daan Yahya, dialami pula oleh Kawilarang. Ia tidak diberi tugas oleh Suharjo, padahal Menteri Pertahanan sudah mengangkat Kawilarang sebagai Komandan Brigade Tapanuli-Sumatra Timur, 6) Tetapi Suharjo tidak menempatkannya pada jabatan tersebut.

Kebetulan Kawilarang bertemu dengan Mayor Malau yang menanyakan kepadanya beberapa hal mengenai organisasi ketentaraan. Atas permintaan Malau, Kawilarang kemudian berangkat ke Tapanuli. Waktu ia tiba di Sibolga, daerah Tapanuli sedang dilanda oleh bentrokan bersenjata antara pasukan Malau dengan pasukan Mayor Bejo. Di Sibolga tidak ada lagi kesatuan tentara (Brigade XI sudah bubar akibat bentrokan tersebut). Karena itu Kawilarang berangkat ke Tarutung, tempat kedudukan Malau. 7)

Posisi Kawilarang tertolong ketika Menteri Pertahanan, menjelang akhir November, tiba di Tapanuli untuk menyelesaikan sengketa Bejo-Malau. Kawilarang dilantik sebagai Komandan Tapanuli. Situasi memang menguntungkan Kawilarang. Sebagai akibat bentrokan bersenjata itu, di Tapanuli tidak ada lagi tokoh militer yang cukup berwibawa. Komandan Brigade XI, Kolonel Pandapatan Sitompul sudah ditarik ke Bukittinggi. Mayor Maraden Penggabean, seorang perwira Brigade XI, berada dalam tahanan di Sawahlunto setelah ia ditangkap oleh Bejo. 8) Keadaan itu, ditambah dengan pengalaman Kawilarang sebagai Komandan Brigade memungkinkan ia berhasil menata kembali organisasi ketentaraan di daerah tersebut.

Mungkin dipengaruhi oleh laporan Daan Yahya, akhirnya Menteri Pertahanan mengambil keputusan untuk mengirim Hidayat ke Sumatera, walaupun pada waktu itu ia sudah memegang jabatan Wakil I Kepala Staf Angkatan Perang. Ia tiba di Bukittinggi bulan September atau Oktober 1948. Tugas Hidayat ialah membantu Panglima Sumatera menyempurnakan organisasi tentara dan menyiapkan pertahanan di pulau itu untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Agresi Militer II Belanda. Untuk merampungkan tugas itu ia diberi waktu tiga bulan. 9) Tetapi Menteri Pertahanan sudah merencanakan untuk mengangkat Hidayat sebagai panglima menggantikan Jenderal Suharjo.

Kerjasama antara Hidayat dengan Suharjo tidak berjalan lancar. Bekas Kepala Staf Siliwangi yang pernah mendapat pendidikan militer dalam zaman Belanda itu memandang masalah ketentaraan semata-mata dari sudut teknis militer. Suharjo menilai tentara di Sumatera masih dalam taraf *volksleger*, belum mencapai taraf *staatsleger*. 10) Karena itu, ukuran yang terlalu teknis belum mungkin diberlakukan untuk tentara yang demikian.

Hidayat terikat dengan tugas yang diberikan Menteri Pertahanan dalam waktu tiga bulan sebelum Belanda melancarkan serangan yang diperkirakan akan terjadi setelah batas waktu itu berakhir. Karena itu ia mendesak Suharjo agar segera dibentuk pasukan-pasukan yang memiliki mobilitas tinggi. Ia juga meminta agar personalia markas komandemen dikurangi, agar markas itu lebih efektif. Tetapi permintaan itu tidak diindahkan oleh Suharjo. 11)

Hubungan kedua orang itu menjadi tegang. Waktu Menteri Pertahanan tiba di Bukittinggi dalam bulan November 1948, Hidayat meminta agar ia dikembalikan ke Yogya. Tetapi menteri Pertahanan tetap mempertahankan Hidayat di Sumatera. Dalam rapat dengan perwira-perwira di Bukittinggi. Menteri Pertahanan mengumumkan pengangkatan Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS) menggantikan Jenderal Suharjo. Surat pengangkatan disampaikan beberapa hari kemudian, yakni tanggal 26 Nopember 1948. Suharjo ditarik ke Yogya dan diangkat menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat.

Setelah resmi memangku jabatan sebagai PPTS. Hidayat menempatkan perwira-perwira Siliwangi yang sudah ada di Sumatera pada jabatan-jabatan tertentu. Malahan ada beberapa perwira yang sengaja didatangkan dari Yogya. Mayor Akil diangkat sebagai Kepala Staf Sub Teritorium Riau; Mayor Cakradipura dan Kapten Yunus sebagai Perwira PHB (Perhubungan) yang ditempatkan di Sumatera Barat bagian Utara; Letnan Kolonel Askari di Aceh sebagai perwira artileri dan Kapten Ibrahim Ajie ditempatkan di Tapanuli membantu Kawilarang.

### III

Umumnya, perwira-perwira yang dikirim ke Sumatera termasuk perwira inti dalam Divisi Siliwangi. Hidayat pernah menduduki jabatan kepala staf; Daan yahya dan Kawilarang adalah bekas komandan brigade; Akil, perwira intel; Cakradipura dan Yunus adalah perwira-perwira PHB.

Mereka mempunyai latarbelakang pendidikan yang cukup baik. Sebagian tamatan MULO atau HBS. Cakradipura, sebelum menjadi tentara adalah seorang mahasiswa.

Rata-rata mereka sudah pernah memperoleh pendidikan dan latihan militer dalam zaman Hindia Belanda maupun dalam masa pendudukan Jepang. Hidayat dan Kawilarang mendapat pendidikan militer Belanda, sedangkan Cakradipura, Akil Daan Yahya dan lain-lain adalah bekas anggota tentara Pembela Tanah Air (peta), kesatuan tentara yang dibentuk oleh Jepang. 12)

Selain itu mereka juga mempunyai pengalaman gerilya selama Agresi Militer I Belanda. Pengalaman itulah yang dijadikan dasar oleh Nasution (bekas Panglima Siliwangi) untuk menyusun konsep perang gerilya yang diterima dan dituangkan dalam Perintah Siasat No. 1 dari Panglima Besar. Perintah itu kemudian menjadi pegangan dalam menghadapi Agresi Militer II Belanda.

Dengan demikian, perwira-perwira Siliwangi yang dikirim ke Sumatera itu termasuk perwira yang cukup baik. Tetapi ternyata mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Sikap yang tidak tegas dari Suharjo menyulitkan posisi mereka, seperti yang dialami oleh Daan Yahya dan Kawilarang. Selain itu sebagian perwira Sumatera kurang pula memperhatikan sikap bersahabat.

Adanya sikap kurang bersahabat dari sebagian perwira Sumatera ini bersumber dari prasangka, bahwa perwira-perwira yang baru datang itu akan menggeser kedudukan mereka. Mereka pun merasa tidak dihargai lagi oleh Pemerintah, padahal mereka dengan segala susah-payah sudah membina tentara di daerah masing-masing. Dalam keadaan demikian wajarlah bila terdengar suara-suara negatif yang menuduh perwira-perwira Siliwangi sebagai perwira-perwira yang tidak terpakai di Yogyakarta. Pemerintah mengirim mereka ke Sumatera sekedar untuk tidak membiarkan mereka menganggur. 13)

Dalam keadaan demikian, komunikasi antara kedua golongan itu sulit dilaksanakan. Perubahan-perubahan yang ingin dilaksanakan oleh perwira-perwira baru dinilai oleh perwira-perwira lama sebagai usaha untuk memojokkan mereka. Akibatnya, perasaan tidak senang terhadap orang baru mulai berkembang. Sebaliknya dari perwira-perwira yang datang timbul pula anggapan merendahkan terhadap perwira-perwira Sumatera. Kedua hal itu terutama tampak dalam beberapa kasus yang menyangkut Hidayat.

Salah seorang perwira yang berpangkat kolonel pada mulanya tidak mau memberi hormat kepada Hidayat, walaupun ia sudah resmi memegang jabatan sebagai PTTS. Alasannya ialah, karena sama-sama berpangkat kolonel. 14) Malahan seorang letnan dua pernah menantang Hidayat untuk berduel senjata. 15)

Hidayat dikenal sebagai seorang yang keras, sedangkan perwira-perwira Sumatera sudah terbiasa dengan cara panglima yang lama. Salah satu tindakan Hidayat yang menimbulkan rasa kurang puas, khususnya di kalangan perwira-perwira Sumatera Barat, adalah pembentukan Sub Teritorium Riau dan Sub Teritorium Sumatera Barat yang merupakan dua komando yang berdiri sendiri-sendiri. Pada masa sebelumnya kedua daerah ini berada di bawah satu komando, yakni Divisi IX/Banteng. Dengan tindakan itu Hidayat dituduh dengan sengaja menghapuskan Divisi IX. 16) Dari sudut pertimbangan militer, mungkin tindakan itu benar, tetapi Hidayat kurang memperhatikan latarbelakang sejarah dan kebanggaan korps yang ada pada perwira-perwira Sumatera Barat.

dalam keadaan kurang mendapat dukungan dari perwira-perwira Sumatera, wajarlah bila Hidayat banyak bersandar kepada perwira yang datang dari Yogyakarta yang sudah lama dikenalnya dan ketetulan berasal dari korps yang sama. Tetapi ada juga beberapa perwira Sumatera yang mendapat kepercayaan Hidayat antara lain Letnan Kolonel Dahlan Jambek di Sumatera Barat dan Kolonel Maludin di Sumatera Selatan. Dahlan Jambek diangkat sebagai Kepala Staf markas Besar Komando Sumatera (nama baru untuk Komandemen Sumatera). Hubungannya dengan perwira-perwira lain boleh dikatakan kurang. Beberapa perwira Sumatera Selatan, misalnya Barlian, tidak mengenal Hidayat, bahkan tidak mengenal istilah PTTS maupun MBKS. 17) Dengan komandan militer Jambi, kolonel Abujani, hubungannya juga kurang baik. 18)

Dengan Gubernur Sumatera Selatan, dr. A.K. Gani, terjadi hal yang unik. Hidayat mengirimkan instruksi agar A.K. Gani menyiapkan rencana pertahanan gerilya untuk wilayah Sumatera Selatan. Instruksi itu dibalas A.K. Gani dengan sajak dan ia mengatakan akan melaksanakan instruksi tersebut. Ketika Hidayat mengirim instruksi berikutnya agar A.K. Gani menyiapkan rencana bumi-hangus, A.K. Gani menolak dan penolakan itu disampaikan juga dengan sajak. 19)

Kurang baiknya hubungan Hidayat dengan beberapa perwira Sumatera disebabkan pula oleh penilaian yang agak negatif terhadap perwira-perwira tersebut. Perwira-perwira Sumatera dikatakannya terlalu banyak memikirkan soal dagang dan sama sekali tidak memikirkan soal pertahanan. 20) Yang menjengkelkan para perwira tersebut ialah Hidayat tidak mau memahami keadaan yang mereka hadapi. Mereka harus membiayai sendiri pasukan, karena dari Pemerintah Pusat tidak mungkin diharapkan bantuan biaya. Salah-

satu cara untuk mencari biaya ialah dengan jalan melakukan penyelundupan ke luar negeri, terutama ke Malaya.

Hidayat kemudian menyadari posisinya. Karena itu ia berusaha mengadakan pendekatan pribadi sebelum mengambil sesuatu keputusan. Untuk menempatkan seorang perwira sebagai Kepala Staf Sub Territorium Riau, ia berunding terlebih dahulu dengan komandan territorium tersebut, yakni Letnan Kolonel Hasan Basri. Hidayat mengajukan tiga calon, yakni Akil, Cakradipura dan Ibrahim Ajie. Dengan persetujuan Hasan Basri barulah Hidayat mengangkat kil sebagai Kepala Staf. 21)

Sejauh itu tidak nampak adanya perasaan kedaerahan yang menjadi motif dari rasa kurang senang perwira-perwira Sumatera terhadap perwira-perwira Siliwangi. Mereka sudah terbiasa dengan adanya orang dari suku lain yang menjadi pemimpin mereka. Hal itu dapat dilihat dari sejarah pertumbuhan ketentaraan di Sumatera. Sejak semula yang menjadi panglima mereka adalah seorang dari suku Jawa, yakni Suharjo Harjowardoyo. Begitu pula Kepala Staf Umum pernah dijabat oleh Mayor Jenderal Sutopo, juga seorang Jawa.

Bila rasa tidak senang itu didasarkan atas perasaan kedaerahan, maka perwira Sumatera Barat akan mendesak Suharjo agar menerima Daan Yahya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Bahkan bukannya tidak mungkin ada perwira tertentu yang merasa taku disaingi, mempengaruhi Suharjo agar menolak Daan Yahya, walaupun perwira itu bukan Ismail Lengah atau Halim. 22)

Walaupun di kalangan perwira tidak terdapat perasaan kedaerahan, namun di kalangan masyarakat memang ada usaha untuk membangkitkan perasaan itu. Hal itu tampak dalam kasus pemindahan Ismail Lengah ke Yogya. Pemuka-pemuka masyarakat mengirim telegram kepada Presiden, meminta agar Ismail Lengah tidak dipindahkan dengan alasan ia adalah putera daerah dan telah banyak berjasa untuk daerah. 23) Bahkan ada usaha untuk menculik Ismail Lengah, sehingga dengan demikian pemindahannya akan menjadi batal. 24) Dalam acara perpisahan yang diadakan dengan Ismail Lengah beberapa orang berpidato tentang jasa "anak kita" dan secara halus, dengan pantun, menyindir Hidayat. 25)

#### IV

Penempatan perwira-perwira Siliwangi berhasil dilakukan setelah Hidayat diangkat menjadi PTTS. Tetapi ia kurang berhasil merampungkan rencananya. Hal itu dipengaruhi oleh faktor waktu. Hanya 23 hari setelah Hidayat secara resmi memangku jabatan PTTS, Belanda sudah melancarkan serangan. Lagipula, Hidayat keliru memperhitungkan kapan serangan itu akan dimulai. Dalam percakapannya dengan A. Halim pertengahan Desember 1948 ia

mengatakan bahwa tidak akan ada serangan Belanda sebelum tanggal 15 Januari 1949. 26)

Selama agresi militer Belanda berlangsung, selama delapan bulan. Hidayat tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak dapat menginspeksi semua daerah yang ada di bawah kekuasaannya, kecuali sebagian daerah Riau. Tapanuli dan akhirnya ia menetap di Aceh. Orang dapat menuduh bahwa ia hanya mengunjungi tempat-tempat yang ada di bawah kekuasaan perwira-perwira Siliwangi (di Riau ada Akil, di Tapanuli ada Kawilarang dan di Aceh ada Askari).

Dalam bulan Juni 1949 Hidayat bermaksud meninggalkan Aceh untuk kembali ke selatan. Tetapi rencana itu tidak jadi dilaksanakannya. Sewaktu tiga di Kutacane, ia dilapori bahwa Wakil Presiden akan datang di Banda Aceh untuk mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hidayat kembali ke Banda Aceh. 27)

Dari segi lain, agresi militer Belanda telah memperkecil jurang pemisah antara perwira-perwira Siliwangi dengan perwira-perwira Sumatera. Kawilarang dan Akil ternyata dapat melakukan kerjasama yang cukup baik dengan perwira-perwira setempat. Karena itulah setelah perang berakhir, untuk beberapa waktu lamanya perwira-perwira itu masih ditempatkan di Sumatera.

- 
1. Jenderal A.H. Nasution, *TNI, Tentera Nasional Indonesia*, jilid 2, cetakan pertama, Seruling Masa, Jakarta, 1968, hal 159.
  2. Wawancara dengan Kolonel Pur. Daan Yahya, Jakarta 6 November 1981.
  3. wawancara dengan Kolonel Pur. Ismail Lengah, Jakarta, 24 Mei 1977.
  4. Wawancara dengan Daan Yahya.
  5. Wawancara dengan Kolonel Pur. A.E Kawilarang, Jakarta, 11 September 1974.
  6. Nasution, *op. cit.* hal. 159.
  7. Mohammad Hatta, *Memoir*, Tintamas, Jakarta, 1979, hal. 534.
  8. Wawancara dengan Kolonel Pur. Bejo, Jakarta, 11 september 1974.
  9. Wawancara dengan Letnan Jenderal Pur. Hidayat, Jakarta, 28 Oktober 1981
  10. Dr. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, Disjarah AD, Bandung, 1978, hal 238.
  11. Wawancara dengan Hidayat.
  13. Wawancara dengan Letkol Pur. A.Halim, Jakarta, 11 September 1974.
  14. Wawancara dengan Kolonel Pur. Syarif Usman, Jakarta, 11 September 1974.
  15. Wawancara dengan Kolonel Anas Karim, Jakarta 11 April 1975.
  16. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia - Minangkabau, *SEjarah Perang Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 - 1950*, Jilid I, Jakarta 1978, hal 663.

17. Wawancara dengan Kolonel Pur. Barlian, Jakarta, 11 September 1974.
18. Wawancara dengan Kolonel Pur. Abunjani, Jambi 27 November 1979.
19. Wawancara dengan Hidayat.
20. Wawancara dengan Hidayat.
21. Wawancara dengan Letkol Pur. Hasan Basri, Jakarta, 11 September 1974.
22. Wawancara dengan Daan Yahya.
23. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia - Minangkabau, *op. cit.*, hAL. 445.
24. Wawancara dengan A. Halim.
25. Wawancara dengan Hidayat
26. Wawancara dengan A. Halim.
27. Wawancara dengan Hidayat.

## DAFTAR SUMBER

### A. BUKU

- Badan Pemurnian Sejarah Indonesia - Minangkabau, **Sejarah Perang Kemerdekaan di Minangkabau 1945 - 1950**, jilid 1, Jakarta 1978.
- Mohammad Hatta, **Memoir**, Tintamas, Jakarta 1979.
- Nasution, Dr. A.H., **Sekitar Perang Kemerdekaan**, jilid 7 Disjarah AD, Bandung 1978.
- Nasution, Jenderal A.H., **TNI, Tentara Nasional Indonesia**, jilid 2., Seruling Masa, Jakarta 1968.

### B. WAWANCARA

- Abdul Halim Letnan Kolonel Purnawirawan.
- Abunjani, Kolonel Purnawirawan.
- A. E. Kawilarang, Kolonel Purnawirawan.
- Barlian, Kolonel Purnawirawan.
- Bejo, Kolonel Purnawirawan.
- Daan Yahya, Kolonel Purnawirawan.
- Hasan Basri, Letnan Kolonel Purnawirawan.
- Hidayat, Letnan Jenderal Purnawirawan.
- Syarif Usman, Kolonel Purnawirawan.

## BOGOR SHU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG ( 1942 — 1945 )

### Perkembangan Nasionalisme di Bogor SHU Pada Masa Pendudukan Jepang : 1942 - 1945\*)

Oleh : Susanto Zuhdi

#### Pendahuluan

Diantara pelbagai aspek yang terdapat di dalam masa pendudukan Jepang 1942 - 1945, tumbuh dan berkembangnya nasionalisme pada amat banyak individu manusia Indonesia, menurut saya menarik untuk diamati. Sebab bukan saja dari pengalaman masa lalau itu telah membuahkan suatu jaringan solidaritas sosial yang berprioritas tinggi, melainkan juga suatu kajian yang relevan, justru pada saat kita sekarang ini bertekad untuk tetap ingin menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pembabakan sejarah nasional yang sudah diketahui, agaknya terkesan bahwa periode pergerakan nasional fokusnya mengecil. Dan yang sering terlihat adalah kepentingan-kepentingan Jepang. Perkembangan nasionalisme sejak masa terdahulu, juga berkelanjutan pada masa ini. Hanya saja karena situasilah yang menyebabkan timbulnya kelainan-kelainan. Saya malahan melihat adanya faktor penyebab yang sangat penting bagi terbentuknya bangsa atau **nasion** Indonesia, yakni pengalaman penjajahan Jepang di mana penderitaan hampir dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan yang ingin dikemukakan adalah memperhatikan perkembangan nasionalisme, khususnya di Bogor Shu (karesidenan), pada masa pendudukan, sebagai salah satu proses terwujudnya **nasion** Indonesia. Kalau di dalam konteks periode ini terlihat adanya hubungan antara pihak Jepang dan Indonesia, maka interaksi itu juga terjadi dalam kehidupan masyarakat di Bogor. Dengan maksud mencapai penjelasan analitis terhadap interaksi tersebut, sekaligus memperhatikan perkembangan nasionalisme, maka saya mencoba dengan menggunakan pendekatan analisa sistem lingkungan. Sebab pada hakekatnya periode ini merupakan ajang benturan sistem Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dan nasion Indonesia.

Benturan yang terjadi terutama pada tingkat sistem sosial, di mana lahirnya kelompok sosial dengan pelbagai aspek kegiatan masyarakat, dengan cara propaganda maupun kekerasan dimaksudkan untuk kepentingan Jepang. Sedang di pihak lain, meskipun tidak melalui cara yang eksplisit, sebab memang keadaan yang tidak memungkinkan, terlihat juga upaya yang sedang dilakukan rakyat Indonesia, di bawah pimpinan nasionalnya, justru melalui sarana-sarana yang diciptakan Jepang. Dalam konteks ini saya ingin memperhatikan sejauh mana hubungan itu telah mengakibatkan hancur-

\*) Makalah disampaikan dalam Seminar Sejarah Nasional III tanggal 10 - 14 di Jakarta

nya suatu sistem yang diciptakan Jepang, di satu pihak dan tumbuh berkembang sistem nasion Indonesia.

### **Konsep Nasion dan Analisa Sistem.**

Proses perkembangan nasion yang dimaksud di sini, saya menggunakan konsep yang telah dikembangkan Prof. Harsja W. Bachtiar, yang memperhatikan perkembangan nasion Indonesia dengan latar-belakang sejarah. Dengan lebih dulu memperhatikan konsep-konsep nasion dari Ernest Renan dan Han Kohn, Bachtiar kemudian meng-etrapkan pengertian itu ke dalam konteks masyarakat Indonesia. Pada hakekatnya konsep ini berakar dari suatu keadaan semangat, atau jiwa yang memperlihatkan suatu jaringan hubungan solidaritas dari segenap penduduk tertentu yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah masa lalu. Dan kala saya memperhatikan perkembangan itu disini, untuk melihat yang mikro, sehingga diharapkan dapat melengkapi gambaran menyeluruh (makro).

Sedangkan dengan analisa sistem, yang saya maksud adalah untuk melihat pada tingkat mana benturan sistem antara "Niponisasi" dan "Indonesianisasi" terjadi. Agaknya dapat disejajarkan atau paling tidak ada semacam kesamaan beberapa nilai yang dianggap hidup di dalam masyarakat kedua bangsa itu. Dan karena faktor kesamaan itu barangkali yang menyebabkan timbulnya simpati, terutama pada masa-masa awal pendudukan. Dan karena itu pula pemerintah militer Jepang memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Jawa, terutama, bisa dilihat dalam dunia pewayangan, pada haekaknya tidak berbeda dengan nilai-nilai yang memang selalu dipropagandakan Jepang, seperti misalnya semangat ksatria (*bushido*), semangat berbakti kepada negara (*seishin*). Persoalannya adalah diarahkan kepada tujuan yang mana, segala tindakan sosial yang dilakukan oleh baik tentara Jepang dan orang Indonesia sendiri. Sebab dalam kenyataan pelaksanaannya dapat bertolak belakang.

Perwujudan dari kontak antara kedua sistem itu sebenarnya terlihat pada tingkat sistem sosialnya. Ini bisa dimengerti kalau kita perhatikan bahwa baik tujuan yang ditetapkan Jepang maupun Indonesia, sepintas tidak ada perbedaan, yakni kemenangan perang melawan sekutu. Kemenangan perang Asia Timur Raya, yang dimaksud Jepang, sebenarnya juga diartikan sebagai kemenangan dalam arti kemerdekaan Indonesia. (Hatta, 1971, hal 5). Seperti diketahui bahwa didalam sistem sosial mewujudkan kolektiva-kolektiva sosial yang aktivitasnya terlihat dalam kegiatan-kegiatan seperti politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya. Di dalam bidang kegiatan ini kita dapati bagaimana potensi dikerahkan untuk kepentingan Jepang.

Perwujudan kelompok-kelompok sosial di atas, pada dasarnya dapat diamati pada lahirnya organisasi-organisasi seperti *tonarigumi* (rukun tetangga). Pusat Tenaga Rakyat (Putera). *Djawa Hokokai*

semuanya untuk aspek politik dan pemerintahan. Di bidang ekonomi misalnya **kumiai**, yang sesungguhnya tidak identik dengan koperasi. di bidang agama, adanya Majelis Islam A'laa Indonesia (MAI), serta Pusat Kebudayaan (**keimin Bunka Shidosho**). Dalam kenyataannya adalah jelas bahwa semuanya jitu dimaksudkan pemerintah Jepang untuk kepentingannya. Meskipun demikian sarana-sarana tersebut, ternyata juga telah dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Pada pokoknya yang ini diajukan dalam makalah ini adalah pertama, memperhatikan gejala yang pada hakekatnya merupakan proses tumbuhnya suatu sistem, paling tidak sejak awal abad ini, yakni nasion Indonesia, dan kedua, memperhatikan gejala memudarnya sistem yang diciptakan Jepang.

Upaya pemerintah pendudukan untuk meliputi pelbagai aspek kehidupan, dalam kenyataan tidak mampu menawarkan pilihan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Tidak berfungsinya sistem itu secara keseluruhan disebabkan, bukan saja karena penerapannya tidak cocok dengan aspirasi rakyat Indonesia, melainkan juga pada saat yang sama sedang tumbuh dan berkembang suatu jaringan solidaritas mekanis yang diperlihatkan rakyat Indonesia. Gejala itu pada hakekatnya merupakan berprosesnya suatu sistem **NASION** Indonesia. Suatu sistem yang kelak mempunyai bentuk yang tidak sama seperti yang pernah ada sebelumnya, karena ia merupakan suatu kesatuan sosial yang sungguh-sungguh baru dan mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas yang meliputi sekalian anggota-anggotanya.

Seperti yang dimaksud Ernest Renan bahwa suatu nasion adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan dalam masa depan bersedia dibuat lagi, maka dalam hal ini sebenarnya terlihat adanya dimensi sejarah. Dalam kaitan ini saya mencoba mengkaji dari aspek sejarah, yakni berupa bahasan terhadap peristiwa yang memperlihatkan gejala tersebut. Peristiwa itu menunjuk kepada bentuk pengorbanan yang diberikan rakyat, khususnya di Bogor. Pada masa itu pula telah terjalin perasaan yang sama sepenenderitaan, di bawah periode penjajahan. Dari kajian tersebut saya mampu mengetengahkan simpul-simpul yang melahirkan nasionalisme di daerah ini.

### **Simpul-Simpul Nasionalisme.**

Tema pembicaraan yang diajukan, bertitik-tolak dari sebuah studi jpada masa pendudukan Jepang di Bogor **Shu** 1942 — 1945. Struktur pemerintahan daerah ini samasekali berbeda struktur residensi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kekuasaan **shuchokan** (kepala daerah yang mempunyai kekuasaan eksekutif dan legislatif) sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah residensi. Sdangkan hirarki pemerintahannya, pada umumnya sama, kecuali nama-nama untuk desa, kecamatan, kawedanan, kabupaten, karesidenan diganti menjadi **ku, son, gun**,

ken, dan shu. Sedangkah untuk nama-nama kepala daerahnya ditambahkan kata **cho**, sehingga menjadi **kucho**, **soncho**, **guncho**, **kencho** dan **shuchokan**.

Secara geografis Bogor **shu** meliputi daerah-daerah Sukabumi **Ken**, Cianjur **ken**, dan Bogor **ken**. Di samping itu Sukabumi dan Bogor juga mempunyai administrasi pemerintahan sendiri berbentuk pemerintahan kota (**shi**), yang dikepalai oleh **shicho**. Dilihat dari karakteristik daerahnya, Bogor **shu** mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama pertanian. Daerah itu juga sumberdaya manusianya, telah banyak diambil untuk kepentingan Jepang. Di pihak lain terlihat karena kerjasama yang dilakukan pejabat pemerintahan militer, maka muncul elit pribumi yang merupakan pendukung gerakan nasional.

Munculnya golongan ini baik yang berasal dari kalangan nasionalis sekuler maupun yang konfensional (agama Islam, yang saya pinjam dari konsep Prof. Nugroho Notosusanto, dilatarbelakangi oleh kenyataan perubahan dalam struktur masyarakat. Agaknya dapat dikonstatasibahwa tekanan pada hancurnya struktur masyarakat lama dan munculnya tatanan yang baru yang juga masih dalam proses merupakan masalah yang paling banyak dibahas para pemerhati terhadap periode pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya. Dari segi di mana Pemerintah Jepang merangkul kekuatan nasionalis pribumi, maka berarti positif, meskipun dipihak lain terjadi rusaknya tatanan masyarakat pada umumnya. Proses ini berlangsung karena pemerintah pendudukan sangat memerlukan dukungan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Rusaknya sarana kelembagaan terutama di pedesaan, terlihat dari tidak berfungsinya lumbung-lumbung desa, lembaga musyawarah di desa dan sebagainya. Meskipun demikian suatu kenyataan menonjol yang patut dicatat adalah munculnya gejala kesadaran nasionalisme yang makin meluas di kalangan bangsa Indonesia.

Adanya perubahan dengan munculnya sejumlah elit nasionalis di tingkat Bogor **shu** dalam struktur pemerintahan, jelas membawa pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya dalam perkembangan nasionalisme. Sejumlah fakta dapat diajukan sehubungan dengan digunakannya sarana yang diciptakan Jepang oleh elit nasionalis untuk menyisipkan cita-cita kemerdekaan.

Di dalam sebuah rapt Gerakan Tiga A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pembela Asia), di awal pendudukan, tanggal 31 Mei 1942, Isa Sutadilaga, seorang tokoh nasionalis dari Sukabumi pernah berpidato :

".....usaha bangsa Indonesia telah lama dilakukan untuk melepaskan dirinya dari belenggu yang mengikat kita dari tangan sampai kaki, akan tetapi tidak berhasil dan hingga waktu datangnya saudara tua, Dai Nippon, sebab upaya kita hanya berhasil dengan bekerja keras". (Tjahaja, 8 Juni 1942).

Betapapun kecilnya makna yang dapat ditarik dari ucapan yang tersurat di atas, paling tidak terlihat adanya suatu proses perjuangan seorang individu untuk memperlihatkan upaya tersebut. Bahkan kedatangan tentara Jepang merupakan faktor yang menguntungkan bagi pergerakan nasional, pada akhirnya memang juga merupakan fakta yang sulit diingkari. Ditafsirkan ke dalam pengertian proses terbentuknya nasion, barangkali bisa dijelaskan dengan melihat bahwa dalam diri individu yang bersangkutan, pada waktu yang sama telah memainkan dua peranan sekaligus dalam sistem sosial tertentu. Konflik peranan, kalau boleh dikatakan demikian, dalam dirinya disebabkan di satu pihak ia merupakan bagian dari sistem sosial, dalam bentuk organisasi Gerakan Tiga A, buatan Jepang dan di pihak lain ia juga merupakan anggota jaringan solidaritas masyarakatnya yang sedang berkembang.

Persoalannya memang adalah sejauh mana ia mampu bermain dalam keadaan seperti itu. Apakah pada satu saat ia lebih mementingkan kedudukan pemerintah Jepang atau sebaliknya. Ini memang konsekuensi dari setiap orang yang melakukan kolaborasi dengan pihak penjajah.

Dalam pada itu tidak sedikit kesempatan-kesempatan yang telah digunakan oleh para elit nasionlis tingkat pusat dalam rangka melebarkan sayap-sayap kekuatan nasionalisme ke pelbagai daerah, termasuk ke Bogor **Shu**. Dalam masa persiapan pembentukan organisasi Pusat Tenaga Rakyat, meskipun hanya untuk mendapatkan sebuah batu "aseli" bagi pembuatan batu nisan maka Muhammad Husni Thamrin, Bung Karno telah memanfaatkan situasi ini. Mengapa beliau begitu ingin memperoleh benda ini, sebabnya adalah bahwa batu itu dianggap sebagai pelambang kekuatan yang tak lekang kena panas dan tak lapuk kena hujan. Demikian pula seharusnya semangat Thamrin yang begitu kokoh untuk kemerdekaan bangsanya terlihat juga pada rakyat Bogor (**Tjahaya**, 12 Januari 1943)

Sementara itu, pada suatu kesempatan kunjungan ke daerah di seluruh Jawa, untuk melihat pelaksanaan semangat "hidup baru gerakan Jawa, **Hokokal**", Ir. Sukarno Shimizu dari **Sendenbu** (Departemen Propaganda) dan Sudiro, dari Jawa **Hokokal** pusat, juga mengunjungi daerah Bogor. Setelah Shimizu mengatakan pentingnya potensi pertanian bagi kemenangan perang, kemudian Bung Karno mengingatkan tentang kesadaran politik. Kesadaran itu haruslah merupakan cerminan yang kuat untuk membebaskan diri dari keadaan yang membelenggu, sehingga kemerdekaan bukanlah sekedar "hadiah" dari Jepang. Hal ini dapat ditangkap dari apa yang terselip dalam kata-katanya : ".....walaupun Dai Nippon berkata **dozo** (silahkan) merdeka ! Tetapi kalau kita masih bersemangat budak dewi kemerdekaan tidak akan menjelma". (**Tjahaja**, 19 Maret 1945).

Akan halnya potensi yang terkandung di dalam kalangan Islam di daerah ini, dapat diketahui melalui munculnya elit pribumi.

Seperti halnya munculnya elit nasionalis sekuler di dalam pemerintahan Jepang, elit nasionalis yang berasal dari kalangan profesional juga muncul di bentuk kerjasama itu. Pada dasarnya karena potensi yang besar dari umat Islam inilah Jepang kemudian merangkul para pemimpin-pemimpinnya. Fenomena itu terlihat di dalam masa pendudukan di Bogor **shu**, yakni ketika K.H. Ahmad Sanusi, ajengan terkenal dari Gunung Puyuh, Sukabumi ditawarkan kedudukan di dalam pemerintahan. Padahal pada masa penjajahan Belanda ia pun pernah ditawarkan jabatan kepala Mahkamah Tinggi Islam, tetapi ditolaknya. Sedangkan ketika pemerintah militer Jepang menawarkan kerjasama, untuk duduk sebagai wakil kepala daerah Bogor **Shu (fuku Shuchokan)** diterima dengan senang hati. (**Asia Raya**, 27 Nopember 1944). Untuk menafsirkan fakta ini agaknya tidak berlebihan kalau motivasi yang menggerakkan ajengan itu, sejalan dengan motivasi Sukarno-Hatta, ketika kepadanya juga ditawarkan kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Mereka melihat bahwa cara seperti inilah yang tepat dan menguntungkan terutama untuk terus memelihara cita-cita kemerdekaan.

Pada dasarnya pembedaan antara golongan nasionalis sekuler dan yang profesional, terutama adalah untuk maksud penekanan saja. Sebab bukan berarti keduanya tidak pernah saling bersentuhan. Yang sekuler misalnya, bukan berarti tidak beragama dan sebaliknya. Sehingga sukar dielakkan, peranan kedua golongan itu dalam rangka memperkuat jaringan nasionalisme. Oleh sebab itu agaknya juga dapat dimengerti, karena peranan itu, maka pemerintah Jepang sangat mengharapkan bantuan sepenuhnya dari kedua golongan ini. Akan halnya potensi umat Islam, barangkali dapat diamati dari sebuah pidato dokter Marzuki Mahdi, seorang tokoh Masyumi Bogor, di depan sidang panitia istimewa **Chuo Sangi In** (Badan Penasehat/Pertimbangan Pusat Pemerintah Militer di Jawa). Di dalam sidang-sidang yang membahas pertanyaan **Saiko Shikikan** (Panglima Besar Tentara ke-16), bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Dokter itu berbicara bahwa untuk itu diperlukan keselarasan antara aspirasi dan cita-cita umat Islam dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia (**Tjahaja**, 23 Pebruari 1945) Ini dapat kita mengerti karena pada saat itu Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia kemudian hari.

Perwujudan dukungan itu sebenarnya telah lama berlangsung, tidak termasuk masa sebelum pendudukan. Bidang yang paling menonjol potensi itu adalah bidang kemiliteran; baik tentara Peta, maupun Barisan Hizbullah. Bahkan nama Peta itu sendiri tidak terlepas dari kota Bogor, tempat diadakan untuk pertamakali latihan Korps Pelatih Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Jawa **Bo-el Glyugun Kanbu Renseitai**).

Bagaimana kaitan yang erat antara umat Islam dengan sumbangan yang diberikan kepada bangsanya, di samping memang karena

ajaran-ajaran yang melandasinya, dapat diamati pada peristiwa di sawah ini. ketika suatu kesempatan meresmikan pembentukan Barisan Hizbullah, pada 17 Desember 1944 di Bogor. K.H. Ahmad Sanusi mengatakan bahwa agama dan negara itu merupakan dua badan yang satu sama lain tak bisa dipisahkan. Menurutnyanya lagi, bahwa memajukan agama berarti juga memajukan negara ..... (Asia Raya, 28 Desember 1944). Barangkali fenomena ini yang dimaksud oleh Harry J. Benda, bahwa Islam telah lebih dahulu mampu memberi ketegasan bentuk nasionalisme daripada yang lain. Sebab Islam memang bukan saja mempunyai tempat utama dan terpenting dalam melawan kembalinya kolonialisme barat, tetapi juga peranannya di dalam perjuangan tersebut telah memperdalam sentimen anti barat itu sendiri (Benda, 1980, hal 175).

Terjalannya jaringan solidaritas sosial sebenarnya juga diperkuat oleh adanya faktor pengalaman, umumnya yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kenyataan yang tidak menyenangkan itu terlihat di dalam munculnya masalah kemiskinan yang hebat, termasuk di Bogor Shu. Hal itu dapat diketahui dari beberapa fakta, yang antara lain terungkap misalnya dari rapat pembentukan Badan Pemeliharaan Orang-Orang Miskin (terlantar). Pada 22 Juni 1942, jadi belum lebih dari 4 bulan, badan itu telah mengadakan rapat untuk menangani masalah tersebut yang mencatat kurang lebih terdapat 1.000 orang-orang yang perlu dibantu (Tjahaja, 26 Juni 1942). Sudah barang tentu fakta ini sangat formal sifatnya, sebab kenyataannya jauh lebih besar daripada itu (Abdullah bin Nuh, wawancara, 19 Januari 1979 di Bogor. Beliau adalah *daidanco* (dan-yon Tentara Peta di Cianjur. Konstataasi itu didukung oleh kenyataan yang dapat diketahui sebulan kemudian. Ketika kepada mereka akan dibagikan bahan makanan ternyata jumlahnya bertambah banyak sehingga diperkirakan ternyata tidak mencukupi. Oleh sebab itu Badan Pemeliharaan Orang Miskin (Bapom) di Bogor memerintahkan kepada para pengurus di daerah-daerah untuk menghentikan kegiatan pencatatan orang-orang yang perlu ditolong itu (Sinar Baroe, 8 Juli 1942) Dalam pada itu di kantor-kantor penggadaan di Bogor setiap harinya penuh sesak, sehingga pihak kantor itu perlu mengeluarkan karcis yang harus dimiliki setiap orang yang datang (Ibid). Fakta ini pun memperkuat adanya proses kemiskinan di dalam masyarakat. Apa yang dilakukan penduduk di sini jelas bukan pemecahan yang mendasar, dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan itu. Sebab upaya itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari, yang makin lama proses itu bertambah gawat.

Proses di atas juga terjadi pada golongan masyarakat lainnya. Pada saat makin meningkatnya perang, sejalan dengan itu beban keluarga perajurit makin bertambah berat. Pada masa ini sudah banyak yang menggadaikan apa saja yang menjadi miliknya, termasuk sawah/tanah garapan. Kenyataan itu kemudian dibicarakan dalam rapat istimewa pengurus Badan Pembantu Prajurit (BPP) seluruh dae-

rah ken dan shi di Bogor SHU. Pada acara yang diadakan 8 Juli 1945 itu dibicarakan bagaimana caranya untuk mengatasi (Tjahaja, 11 Juli 1945).

Aspek sosial-ekonomis seperti dikemukakan di atas, mempunyai implikasi pada bidang kesehatan rakyat umumnya. Menjalarnya penyakit malaria besar-besaran pada masa itu terlihat dalam konteks itu. Pada mulanya Pemerintah Jepang, sehubungan dengan usaha pemberantasan penyakit malaria, melarang penduduk Cianjur untuk menanam padi **gadu**. Kemudian dinas pertanian di Cianjur mencabut larangan itu, karena pemerintah hendak menaikkan hasil tanaman padi. (Tjahaja, 12 Januari 1943).

Hubungan itu dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Pada musim hujan para petani mulai mengolah tanahnya untuk ditanami tanaman padi sampai menjelang musim kemarau, pada saat tanaman itu dapat dituai. Pada musim kemarau petani sebenarnya masih dapat memanfaatkan tanahnya untuk ditanami jenis tanaman yang tidak banyak memerlukan air, biasanya berupa kacang-kacangan seperti jagung, umbi-umbian dan sebagainya. Kegiatan itu dilakukan sembari menunggu musim hujan berikutnya tiba. Akan tetapi ada juga sebagian dari mereka yang masih ingin menanam padi pada masa itu. Tanaman pada musim kemarau itu disebut pada **gadu**. Tanaman ini dapat terseenggara kalau kebutuhan air dipenuhi. Untuk itu para petani biasanya membuat empang atau bendungan kecil dan sederhana sekali sifatnya. Karena biasanya tempat itu kotor sering menjadi sarang nyamuk termasuk jenis malaria. Itulah sebabnya ada hubungan antara tanaman padi gadu dengan pemberantasan penyakit malaria. Akan tetapi pada saat Jepang memerlukan beras dalam jumlah yang banyak, jenis tanaman itu dianjurkan lagi. Bahkan makin terlihat dengan dibukanya kembali tanaman padi gadu seluas 2.500 hektar, di Ciranjang **gun** dan 1.500 hektar di Cianjur **gun** (Tjahaja, 12 Januari 1943).

Seperti telah dikemukakan bahwa penyebab berkurangnya dukungan rakyat kepada pelaksanaan program Pemerintah Jepang, adalah tidak konsistennya antara cita-cita dengan kenyataan. Kalau kita perhatikan Gerakan Tiga A misalnya, memperlihatkan jauhnya panggang daripada api. Cakupan gerakan ini pada dasarnya luas sekali, sebab hampir di segala aspek kegiatan masyarakat tidak luput dari perhatiannya. Jadi tidak saja soal politik, juga ekonomi, bahkan sosial dan budaya. Akan tetapi justru karena itulah, ditambah karena kurangnya fasilitas/keuangan dan kurangnya dukungan rakyat sehingga organisasi ini tidak bertahan lama.

Di pihak lain dapat pula diketahui bahwa tidak berhasilnya upaya Jepang untuk mewujudkan sistem sosial untuk mendukung kemenangan perang adalah karena sesungguhnya sedang tumbuh cita-cita rakyat Indonesia yang berbeda. Kalau dengan jalan perang, dimaksudkan Jepang untuk tetap bercokol di kepulauan yang telah didudukinya, sementara bangsa Indonesia untuk membebaskan diri

dari belenggu penjajahan bangsa mana saja. Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa tidak ada apa yang dikenal dengan partisipasi secara penuh dari rakyat Indonesia. Yang ada adalah bentuk-bentuk mobilisasi, misalnya kegiatan-kegiatan gerak jalan, pengerahan tenaga pekerja secara massal. Dalam rangka mempersiapkan berdirinya **Poesat Tenaga Rakyat**, pada 7 Maret 1943, panitia persiapan dari **Bogor Shu** berangkat dengan berjalan kaki ke lapangan Ikada, Jakarta untuk acara itu (**Tjahaja**, 8 Maret 1943).

Demikian pula upaya pemerintah untuk mempengaruhi golongan pemuda dalam rangka mobilisasi tersebut. Itu dapat diperhatikan pada kegiatan golongan yang sangat potensial itu, mengadakan gerak jalan secara beranting dari ujung timur Pulau Jawa (**Banyuwangi**) dan dari **Kalianget (Madura)** dan dari **Merak** menuju Jakarta. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menyambut "Janji Indonesia Merdeka", dari **Pemerintah Jepang**. (**Djawa Baroe**, No. 22, 4 Desember 1944, hal 16-17). Kegiatan yang bermaksud propaganda itu, supaya penduduk memperkecil volume bepergian dengan kendaraan bermotor, adalah berkaitan dengan musyawarah Jawa **Hokokai** di Jakarta, pada 24 September 1944.

Rombongan pertama berangkat dari **Banyuwangi** melalui jalan selatan menuju Jakarta, pada 14 Oktober 1944 (**Tjahaja**, 17 Oktober 1944). Sedangkan rombongan kedua yang hampir bersamaan berangkatnya dari **Kalianget** menyusuri jalan-jalan di pantai utara Pulau Jawa. Pada 30 Oktober kedua rombongan itu bertemu di **Bandung**, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke **Bogor**. Sementara itu untuk menyambut kedatangan mereka, di **Bogor Shu** dibuat gapura 4 buah, yang bertuliskan "Selamat Berjuang". Sedangkan di batas kota memasuki kota **Bogor**, tepatnya di **Sukasari** diadakan upacara penyambutan. Sedangkan bagi rombongan yang berangkat dari **Merak**, yang juga akan ke Jakarta, disambut penduduk **Bogor** di **Panaragan**. Selanjutnya sebelum ketiga rombongan itu menuju Jakarta pada 2 Nopember pagi hari diadakan upacara penyerahan barang-barang bawaan, berupa padi, kelapa, jagung garam dan sebagainya. (**Tjahaja**, 28 Oktober 1944).

Barisan yang berjumlah ratusan pemuda itu didahului dengan bendera Jepang, **Hinomeru** dan **Sang Merah Putih**. Disusul pemuda yang membawa spanduk bertuliskan "Jalan Kaki Beranting **Kalianget Banyuwangi - Jakarta**", setelah itu di belakangnya pemuda yang membawa barang-barang bawaan. kemudian setelah menempuh jarak kurang lebih 2.000 kilo meter, tepat pada hari **Meiji Setsu** (perayaan hari lahir **Meiji Tenno** yang bernama **Mutsuhito**) tanggal 3 Nopember 1944, tiba di lapangan **Ikada, Gambir, Jakarta** untuk diadakan upacara penyambutan. Barang-barang bawaan dan surat-surat ucapan terimakasih dari **shucokan** di seluruh Jawa yang disinggahi diserahkan kepada **salkoshikikan**, sebagai bentuk ucapan terima kasih perkenan Indonesia merdeka (**Djawa Baroe**, 4 Desember 1944, hal. 16-17),

Pada sisi lain proses yang terjadi itu sebenarnya merupakan mudarnya suatu sistem sosial, terutama yang diciptakan Jepang itu. Demikian pula terlihat, meskipun telah banyak didirikan **kumisi** (yang pada hakekatnya sangat tidak mencerminkan ciri-ciri koperasi, di mana setiap anggota dapat memanfaatkan sarana itu.). Namun pemenuhan kebutuhan rakyat tidak segera terwujud. Ini terbukti ketika penduduk Cianjur mengalami kekurangan bahan pangan meskipun kemudian ada usaha pemerintah untuk mengatasinya (**Sinar Matahari**, 9 September 1942). Tetapi berapa besar? Ini dapat dilihat dari cara pemberian atau penjualannya kepada penduduk yang begitu ketat.

Kendati bahwa dukungan makin lama makin berkurang, bukan saja karena keengganan penduduk tetapi juga karena potensi sumberdaya alam yang terus-menerus terkuras, pemerintah militer dengan segala cara mencari dukungan itu. Atas inisiatif **sendembu** misalnya, pada 11 April malam di Bogor **shi** dipertunjukkan sandiwara dengan cerita "Menabung, Hidup Baru dan Jujur Mujur" (**Tjahaja**, 13 April 1945). Sandiwara ini dipertunjukkan dengan berkeliling antara di daerah-daerah seperti Cibada, Sukabumi, Cianjur, Pacet dan Depok (**Ibid**).

Dalam pada itu, berbicara tentang simbol-simbol nasionalisme, sebenarnya dapat muncul justru pada saat-saat di mana, biasanya kita merasa terdesak suasana yang menekan. Begitu pun seperti pada masa pendudukan ini. Kalau kita perhatikan dengan terisolasinya Pulau Jawa dari daerah luar selama masa ini, yang berarti sulitnya penduduk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup yang diimpor, justru telah mendorong mereka untuk mengatasinya. Dalam kehidupan yang srbasulit ini telah melahirkan inovasi penduduk untuk berkreasi menemukan barang-barang pengganti yang sukar itu. Begitulah, barang-barang seperti pelepah pisang, batang jagung, kulit pohon kapok dan kulit pohon lame untuk menyebut beberapa saja yang selama ini tidak diketahui kegunaannya, setelah diuji dapat dijadikan bahan soda pembuat sabun, untuk tiga yang pertama dan bahan untuk obat malaria (**Achmad Chon**, wawancara di Bogor 21 Januari 1979; ia adalah seorang bekas pegawai pada Balai Penyelidikan Kimia Bogor atau **Bogor Kagaku Kenkyuko**; sekarang menjadi guru di Sekolah Analisa Kimia Menengah Atas, Bogor) Sukarnya orang memperoleh sabun, karena bahan soda tidak lagi diimpor dari luar negeri, membuat orang berusaha mencari penggantinya. Achmad Chon, setelah melakukan penelitian cukup lama, berhasil menemukan bahan-bahan pengganti soda, yang bisa diperoleh di daerah Bogor sendiri. Usaha ini dilakukan hampir pada semua barang yang diduga mengandung soda, termasuk pelepah pisang, dan kulitnya, meskipun ternyata mengandung soda berkadar rendah. (**Ibid**). Kemudian hasil penelitian tersebut diperkenalkan kepada masyarakat. Pada 13 Pebruari 1943 bertempat di ruang Balai Penyelidikan Kimia Bogor, Achmad Chon memperagakan bagaimana membuat sabun dengan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia (**Tjahaja**, 16 Pebruari 1943).

Dalam hubungan ini bukankah watak nasionalisme juga bisa tercermin dari usaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari bahan-bahan yang dimiliki sendiri?

### **Kesimpulan**

Dalam konteks studi masa pendudukan Jepang di Bogor *stu* ini, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa terdapat potensi nasionalisme yang besar. Perwujudan ini dimungkinkan oleh adanya faktor di mana sarana dan prasarana yang diciptakan Jepang, dimanfaatkan untuk itu. Dalam hal ini dapat dijelaskan melalui konsep analisa sistem. Pada tingkat sistem budaya saja, meskipun ada beberapa kesamaan, misalnya nilai-nilai kesatria dianggap identik dengan nilai-nilai dalam pewayangan, khususnya masyarakat Jawa, akan tetapi pada hakekatnya berlainan dalam cita-cita. Meskipun pada masa-masa awal, berbagai organisasi yang diciptakan itu mampu mengambil sebesar-besarnya potensi sumber alam dan manusia, akan tetapi perasaan antipati bertambah meluas di kalangan rakyat Indonesia. Ini dapat dimengerti, kalau diperhatikan dalam keadaan seperti itu ternyata telah melahirkan sistem kepribadian, yang didukung sejumlah besar individu manusia Indonesia dan mempunyai tekad mewujudkan cita-cita itu, Indonesia merdeka.

Faktor kedua, yang memungkinkan perwujudan nasionalisme, adalah akibat pengalaman bersama berupa penderitaan dan pengorbanan yang diberikan penduduk di daerah ini pada masa pendudukan. Ini dimengerti kalau keadaan itu dapat melahirkan jaringan solidaritas berprioritas tinggi serta mekanis. Perwujudan itu pada dasarnya bisa diamati sebagai suatu proses terbentuknya suatu sistem, yakni nasion Indonesia. Sebab simpul-simpulnya terlihat, seperti telah dikemukakan di atas, dalam hal ini khususnya di daerah Bogor *stu*. Dimotori oleh para elit nasionalis di tingkat daerah Bogor, baik dari kalangan sekuler dan konfesional, proses itu makin terlihat jelas.

Sebagai bangsa yang sedang membangun, dalam arti untuk mengisi cita-cita kemerdekaan semacam ada keharusan untuk selalu menengok ke masa lalu dalam upaya menarik pelajaran-pelajaran yang berharga, memutar waktu ke arah belakang, seperti hampir 40 tahun yang silam, untuk maksud agar kita sekarang ini mengalami lagi perasaan-perasaan senasib-sepenanggungan, kalau boleh dikatakan demikian, maka sudah barang tentu suatu hal yang mustahil. Pada masa sekarang ini yang penting justru masih mam-

pukah kita memelihara jalinan ikatan-ikatan solidaritas itu. Dan bukankah, dengan demikian juga merupakan upaya kita untuk tetap melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa?

#### Daftar Bacaan

1. Azis, M.A., **Japan's Colonialism and Indonesia**, The Hague, Martinus Nijhoff, 1955.
2. Bachtiar, arsjia W., **The Indonesia Nation: Problems of Integration and Disintegration**, Singapore, Centre for Southeast Asian Studies, 1974.
3. Benda, Harry J, **Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang 1942 - 1945**, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980.
4. ----, James K. Irikura, and Koichi Kishi, **Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Document**, Southeast Asian Studies, Translation no. 6, Yale Univ. New Haven, 1965.
5. Hatta, Mohammad, **The Putera Reports: Problems in Indonesia-Japanese Wartime Cooperation**. Translation Series, Ithaca Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell Univ. 1971.
6. Kahin, George McTurnan, **Nationalism and Revolution in Indonesia**, Ithaca, Cornell Univ. Press. 1970.
7. Kanahale, George S, "The Japanese Occupation on Indonesia; Prelude to Independence", PhD thesis of Cornell University, 1967
8. Kohn, Hans, **Nationalism: Its Meaning and History**, rev. ed., Princeton N.J.D. van Nostrand Co., 1965.
9. Notosusanto, Nugroho, **The Japanese Occupation and Indonesia Independence**, Jakarta, Centre for Armed Forces History, 1975.
10. ----, **Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia**, Jakarta, PT. Gramedia, 1979.
11. Pringgodigdo, A.G., **Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember**. Jogjakarta, Fonds Universiteit Gadjah Mada, 1952.

#### Surat kabar dan majalah :

1. **Almanak Asia Raya**, majalah, 1943 — 1944.
2. **Asia Raya**, harian, 1942 — 1945.
3. **Berita Oemoem**, harian, 1942 — 1945.
4. **Sinar Baroe**, harian, 1942 — 1945.
5. **Sinar Matahari**, harian, 1942 — 1945.
6. **Soeara MIAI**, majalah, 1942 — 1943.
7. **Djawa Baroe**, majalah, 1944.

## PERKEMBANGAN PERANAN LAMA DALAM ARENA POLITIK ACEH UTARA

Oleh: P.P. Suwarno

### I. PENDAHULUAN

Bahwa golongan ulama pernah memainkan peranan di arena politik dan pemerintahan dalam masyarakat Aceh, kiranya dapat dibayangkan dengan peribahasa Aceh yang berbunyi:

**Adat bak Poteu Meureuhoom, hukoom bak Sylah Kuala (Ulama).**

**Hukoom ngon Adat, Lagee zat ngon sifeut.** Adat pada Raja, Hukum (Islam) pada Syiah Kuala (Ulama), Hukum dengan Adat, seperti zat dengan sifat.

Dua lembaga yang memegang dua pranata seperti disindirakan oleh peribahasa Aceh tersebut masih ditemui oleh C. Snouck Hurgronje yang mengadakan penelitian di Aceh Besar pada tahun 1891. Dalam buku *De Atjehers* ia menulis bahwa **keuchik** (kepala kampung) didampingi oleh **Imeum meunasah** (imam surau kampung). Dalam mengurus **gampong** (kampung) **keuchik** memegang adat, **Imeum** memegang hukum Islam. Di **nanggroe**, setingkat di atas **gampong**, **uleebalang** memegang adat, **kall** memegang hukum Islam. Menurut Snouck kehadiran **Imeum** dalam musyawarah **gampong** di **meunasah** hanya untuk kehormatan saja (**honoris causa**), ia tidak banyak mengeluarkan pendapat kecuali yang berhubungan dengan perkawinan. Dan Snouck menyimpulkan bahwa sebagai tuan, hukum Islam sebagai hamba yang melayani tuannya.1).

Ketika Perang Aceh-Belanda (1873) telah berlangsung beberapa tahun golongan ulama tampil ke arena politik memimpin rakyat memaklumkan perang sabil kepada Belanda, karena sultan sudah tidak bisa diharapkan dan **uleebalang** tak mampu mengerahkan rakyat 2). Dengan demikian Belanda baru bisa menguasai Aceh setelah banyak pengorbanan.

Keberhasilan ulama dalam hal ini Tengku Chik Di Tiro memimpin rakyat **gampong** melawan Belanda itu menurut Snouck hanya disebabkan oleh kekacauan perang. Mereka tentu akan kehilangan dukungan rakyat kalau perang itu diakhiri. Alasannya ialah kekacauan perang menghancurkan ikatan-ikatan yang menghubungkan rakyat **gampong** itu dengan **uleebalang**. Untuk mengganti ikatan-ikatan ini rakyat berpaling ke Islam. Ulama mengambil keuntungan dari keadaan itu untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang selalu mereka kehendaki. Dengan demikian mereka menumbangkan kekuasaan **uleebalang**.

Alasan Snouck itu dibantah oleh James T. Siegel dengan mengatakan bahwa ikatan-ikatan itu tidak ada. Andaikata ikatan-ikatan itu nyata jalan perang Aceh tentu akan lain. Pengalaman orang Eropa telah menjelaskan bahwa ikatan-ikatan semacam itu diperkuat daripada diperlemah dalam periode-periode kekacauan, karena petani-petani berpaling kepada tuan-tuannya untuk minta perlindungan. Orang seharusnya berpendapat bahwa kehancuran yang disebab-

kan oleh serbuan Belanda itu mengakibatkan semakin eratnya ikatan-ikatan antara petani dan **uleebalang**. Akan tetapi faktanya tetap bahwa ulama berhasil mengerahkan rakyat **gampung** sedangkan **uleebalang** tidak.

Siegel berpendapat bahwa sebabnya terletak pada hakekat panggilan ulama dan pengalaman mereka yang istimewa. Ikatan-ikatan antara **uleebalang** dan rakyat **gampung** ditekankan pada perbedaan antara tuan dan petani meskipun ikatan itu tidak kuat. Pandangan **uleebalang** terhadap kedudukannya sendiri di masyarakat Aceh bertentangan dengan tindakan-tindakan mereka, dan hal itu memperlemah kesetiaan rakyatnya. Ikatan-ikatan antara ulama dan rakyat **gampung** tidak paralel dengan ketegangan antara ulama dan rakyat **gampung** yang paralel dengan ketegangan antara tuan dan petani. Panggilan ulama itu bukan demi kewajiban orang dalam masyarakat; mereka tidak mengatakan misalnya tentang kewajiban rakyat **gampung** terhadap ulama. Mereka lebih suka memanggil petani-petani demi kesatuan umat manusia daripada demi identitas sosial yang memisahkan mereka. Dan asosiasi panggilan ini ialah suatu gagasan transisi pribadi yang mendorong orang untuk meninggalkan ikatan-ikatan kekerabatan dalam rangka bersatu sebagai orang Muslimin.

Sumber gagasan ulama itu berada dalam pengalaman mereka sendiri. Kita telah melihat, mereka sendiri mengalami dua cara hidup yang berbeda secara radikal. Mereka dilahirkan di **gampung** kemudian meninggalkan **gampung** itu serta ikatan-ikatan kekerabatannya dan hidup sebagai Muslimin di **dayan** 'pesantren' menjadi ulama. Oleh karena itu mereka mengerti batas-batas masyarakat dalam arti unsur-unsur umum dalam manusia, yang memungkinkan mereka menjadi orang Muslimin dan tidak memandang kedudukan sosial mereka. Mereka memanggil manusia berbuat tidak sebagai rakyat **gampung**, tetapi sebagai orang Muslimin; bagi ulama ini berarti melupakan identitas sosial tradisional.<sup>3</sup>)

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa baik Snouck maupun Siegel memandang **uleebalang**, ulama dan rakyat **gampung** terpisahkan dan melupakan bahwa sebenarnya ketiganya merupakan unsur-unsur dari satu masyarakat bulat yang memeluk agama Islam secara teguh. Ketiga unsur itu merupakan suatu sistem sosial yang pola tingkah-lakunya ditentukan oleh gagasan-gagasan yang mereka miliki bersama, seperti gagasan mereka tentang ulama misalnya yaitu orang yang telah belajar agama Islam, kemudian memiliki pengetahuan agama Islam secara "mendalam" dan dengan pengetahuannya itu mereka mengajar, memimpin dan beribadat.

Berdasarkan gagasan tentang ulama itu unsur-unsur masyarakat tadi merasa bahwa hal-hal yang berhubungan dengan agama harus diserahkan kepada ulama, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah duniawi diserahkan kepada **uleebalang**. Maka tidak mengherankan ketika keadaan kacau karena serangan Belanda yang tidak beragama Islam dirasa sudah mengancam eksistensi agama Islam di

Aceh, makin lama posisi ulama makin penting dalam memimpin perlawanan terhadap Belanda. Maka ketika Tgk. Chik Di Tiro menangani masalah itu dengan memaklumkan perang sabil, bukan hanya rakyat **gampong** yang terpanggil, tetapi juga banyak **uleebalang** bersedia menjadi panglima perang. Dengan demikian atas "restu" dan dukungan ulama, **uleebalang** sebagai panglima perang tetap memimpin rakyat **gampong** juga dan ternyata ketiga unsur itu bersatu menghadapi Belanda yang mereka anggap kafir dengan gigih, meskipun akhirnya kalah.

Politik kolonial Belanda dalam menguasai Aceh merangkul **uleebalang** untuk memerintah rakyat dan mencegah ulama masuk ke dalam arena politik dan pemerintahan, menyebabkan ulama hanya mendapat kesempatan memimpin rakyat dalam bidang keagamaan dan bidang sosial saja. Hal ini menimbulkan jurang yang dalam antara **uleebalang** dan ulama. Dalam bidang pemerintahan Belanda membagi Aceh menjadi dua macam daerah administratif yaitu daerah di sekitar ibukota yang terdiri dari 50 **Ke-uleebalang-an** diperintah secara langsung, sisanya dibagi menjadi 100 **Ke-uleebalangan** diperintah secara tidak langsung. **Uleebalang** yang memerintah di daerah yang kedua itu oleh Belanda disebut **Zelfbestuurder**.4)

Belanda berusaha mengikat golongan bangsawan dan **uleebalang** dengan memasukkan pendidikan barat untuk anak-anak mereka. Anak-anak ulama dan rakyat Aceh juga diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan barat itu tetapi tidak dimungkinkan untuk meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi seperti halnya anak-anak bangsawan dan **uleebalang**. Golongan ulama sendiri tidak suka memasukkan anaknya ke sekolah yang didirikan oleh Belanda itu. Mereka masih menganggap Belanda sebagai kafir yang harus dihindari. Hal ini ternyata ketika Tgk. Abdur Rahman Meunasah Meucap (Matang Glumpang Dua, Aceh Utara), pendiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), berusia 12 tahun, Pemerintah Belanda memerintahkan ayahnya untuk memasukkan ke **Volkschool** (Sekolah Rakyat) tetapi dengan sembunyi-sembunyi ayahnya mengirimi dia ke **dayah Samalanga** untuk belajar kitab.5)

Rupanya usaha Belanda untuk membendung ulama masuk ke arena politik dan pemerintahan itu tidak berhasil secara sempurna, sebab Islam modern yang akan memungkinkan ulama masuk ke arena politik dan pemerintahan mulai dikembangkan oleh Tgk. Abdul Wahab dalam sekolah agamanya yang didirikan di Seulimeum (Aceh Besar) pada tahun 1926. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain seperti Tgk. Abdur Rahman Meunasah Meucap mendirikan Madrasah Al Muslim Peusangan di Matang Glumpang Dua (Aceh Besar) pada tahun 1926. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain seperti Tgk. Abdur Rahman Meunasah Meucap mendirikan Maddrasah al Muslim Peusangan di Matang Glumpang Dua (Aceh Utara) pada tahun 1930 dan Tgk. M. Daut Beureueh mendirikan Madrasah Saadah Abadiyah di Palang Paseh (Sigli) pada tahun 1961.6)

Madrasah madrasah itu menghasilkan ulama-ulama baru, dan ketika tokoh-tokoh ulama baru merasa ada halangan-halangan yang merintang jalan kemajuan dalam lapangan agama maka mereka di bawah pimpinan Tgk. Abdur Rahman Meunasah Meucap bermusyawarah untuk mendirikan PUSA (tanggal 5 sampai dengan 8 ei 1939). Meskipun dalam surat yang dikeluarkan oleh PUSA pertama kali ditegaskan bahwa PUSA bukanlah satu perserikatan yang berdasarkan politik, tetapi walau bagaimana pun dalam perkembangan sejarah Aceh PUSA menghasilkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan yang pada suatu saat berhasil merintah daerah Aceh 7). Hal itu kiranya dapat dimaklumi, sebab sembilan bulan sesudah berdiri (tanggal 15 Desember 1939) PUSA mendirikan sekolah Normal Islam Institut di Bireuen (Aceh Utara). Tujuan dari sekolah itu ialah mencetak guru-guru yang bukan saja pandai dalam ilmu agama Islam, tetapi juga harus mengetahui pengetahuan umum, sehingga selain dapat mengajar di madrasah-madrasah, mereka juga bisa diketengahkan dalam masyarakat seluruhnya, baik di kota maupun di desa 8).

Keberhasilan ulama masuk ke arena politik dan pemerintahan itu mulai nampak pada waktu Jepang masuk ke Aceh menggantikan kedudukan Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1943 sudah terdapat tujuh ulama yang diangkat oleh Jepang menjadi anggota **Atjeh-shu-sangi-kal** (semacam Dewan Rakyat Aceh) di dalamnya terdapat **Hoofdbestuur** PUSA Tgk. M. Daud Bereueh. Kecuali menjadi anggota **Atjeh-shu-sangi-kal** mereka juga memegang jabatan pemerintahan yang diberikan oleh Jepang dari kepala Perusahaan Ulut Sutera sampai penjabat **Syukyo-holn** (Pengadilan Agama) di Kutaraja. Tetapi untuk memimpin administrasi pemerintahan di daerah-daerah, Jepang masih menggantungkan diri pada jasa-jasa **uleebalang**, yang diangkatnya menjadi **Guncho (Controleur)**9).

Pengaruh ulama memuncak pada tahun-tahun permulaan kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu keadaan kacau, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, Republik Indonesia sudah diproklamasikan tetapi belum kuat dan Belanda mau kembali ke aceh lagi. Dalam keadaan yang demikian ulama tampil sebagai pemimpin rakyat gampang baik di arena politik maupun pemerintahan dengan mengumandangkan jihad akbar. Oleh karena itu pada tahun 1946 Camat, Wedana dan Bupati seluruh Aceh dijabat menurut istilah politici Aceh utara oleh (golongan yang berkain sarung) 10).

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Aceh menjadi propinsi dari Republik Indonesia yang makin lama makin sering didatangi oleh penjabat-penjabat dari ibukota dan mulai diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang sama dengan propinsi-propinsi lain. Tetapi masuknya penjabat dan peraturan perundang-undangan dari Pusat itu ternyata menimbulkan hal-hal yang tidak cocok dengan adat istiadat mereka seperti pergaulan bebas antara wanita dan pria berpakaian wanita yang merangsang. Dan berlakunya **Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927 — 227** terutama mengenai per-

aturan berlakunya bukti cukup (*westttingbewijs*) untuk menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dan batasan *delict zina* yang tidak cocok dengan batasan adat dan hukum Islam di Aceh.

Hal tersebut di atas sebagai mengancam hidup keagamaan masyarakat Aceh. Dalam hal ini golongan ulama sudah mengajukan protes terhadap penjabat-penjabat dari luar Aceh itu, tetapi protes mereka hanya dicemoohkan saja, sehingga timbul ketidaktenteraman dalam masyarakat lebih di kalangan ulama. Ketidaktenteraman itu memuncak ketika pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang menghapus Propinsi Aceh.

Dalam keadaan tidak tenteram itu Tgk. M. Daud Bereuch memproklamkan daerah Aceh dan sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada tanggal 21 September 1953. Maka berkobarlah pemberoantakan Darul Islam (DI dengan Tentara Islam Indonesianya (TII) di Aceh II), yang baru berakhir setelah terjadi perang gerilya sampai tahun 1961. Akhirnya Aceh menjadi propinsi dari Republik Indonesia lagi dengan status Daerah Istimewa seperti yang telah diputuskan oleh musyawarah antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi, Pemerintah Daerah Aceh yang diwakili oleh Gubernur A. Hasjmy dan Panglima Syamaun Gaharu, dan DI/TII yang diwakili oleh Ayah Gani, Amir Husin Al Mujahid dan Hasan Saleh. Hasil keputusan musyawarah itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) perdana Menteri No. I/Missi/1959 yang menerangkan bahwa kata Istimewa itu artinya otonomi seluas-luasnya terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan. 12)

Dengan rumusan SK Perdana Menteri tersebut rupanya Pemerintah Republik Indonesia menghendaki agar ulama Aceh berperanan terutama dalam lapangan agama, peradatan dan pendidikan saja tidak dalam bidang politik, setidaknya-tidaknya secara formal.

Dalam situasi dan kondisi hukum yang demikian itu apakah peranan yang akan dimainkan oleh ulama dalam kehidupan politik, pemerintahan dan masyarakat di Aceh?

Propinsi Daerah Istimewa Aceh berpenduduk 2.008.747 (sensus 1971). Jumlah anggota DPRD yang dipilih pada tahun 1971 ditambah dengan anggota yang diangkat ialah 40 orang yang terdiri dari 16 orang anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, 18 orang anggota Fraksi Karya Pembangunan dan enam orang anggota Fraksi Karya ABRI. Komposisi yang demikian itu tidak banyak berbeda dengan komposisi DPRD TK II Aceh Utara yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan memiliki 20 orang anggota, Fraksi Karya Pembangunan memiliki 14 orang anggota dan Fraksi Karya ABRI memiliki enam orang anggota. Dati II Kab. Aceh Utara terdiri dari 23 kecamatan, 90 pemukiman, 1422 *gampong* dengan luas daerah 594.480 HA (10,73% dari luas Aceh) dan menurut, sensus 1971 berpenduduk 470.789 jiwa (25,53% penduduk Aceh) 13).

## PENGERTIAN ULAMA MENURUT MASYARAKAT ACEH UTARA

Ketika penulis bertanya tentang arti ulama kepada beberapa anggota DPRD TK II Aceh Utara, dalam menjawabnya ternyata bahwa mereka masih menghubungkan kata ulama itu dengan kata aslinya bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari 'allim yang berarti orang berilmu. Dari arti kata asli itu secara sadar mereka menggunakannya untuk menyebut seseorang atau segolongan orang yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam seperti tauhid, tasawuf, fikih dan sebagainya. Ada di antara mereka yang mengatakan secara ringkas bawa ulama ialah sarjana lengkap, sedangkan Snouck menyebut ulama sebagai **men learned in the scriptures** 'orang-orang yang terpelajar dalam kitab suci' dan **religious leaders** 'pemimpin-pemimpin agama' dan **religious teacher** (guru agama) 14).

Kalau diteliti agak mendalam pengertian tentang ulama di masyarakat Aceh Utara pada saat ini ternyata merupakan gabungan dari apa yang disebutkan itu mulai berkembang sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Kecuali itu ada sedikit perbedaan antara pengertian kaum politisi dan pengertian rakyat **gampong**. Meskipun perbedaan itu tidak prinsipial, walau bagaimana pun merupakan suatu petunjuk bahwa ada perbedaan pandangan terhadap ulama antara kaum politisi dan rakyat **gampong**.

Setelah mengadakan 225 wawancara dengan 168 responden baik dari kalangan politisi maupun dari kalangan rakyat **gampong**, dan mengamati tingkah laku serta mempelajari riwayat hidup dari orang-orang yang oleh mereka dianggap sebagai ulama itu maka dapatlah penulis merumuskan pengertian ulama masyarakat Aceh Utara. Menurut mereka ulama ialah **orang yang pernah belajar agama Islam sehingga memiliki ilmu pengetahuan agama Islam secara "mendalam" dan menggunakan ilmunya itu untuk mengajar, memimpin dan beribadat.**

Kata "mendalam" diberi tanda kutip sebab artinya relatif. Makin tinggi pengetahuan agama orang yang menyebut harus makin dalam pula pengetahuan agama orang yang disebut ulama tadi dan begitu pula sebaliknya, sehingga seseorang mungkin oleh beberapa orang dianggap sebagai ulama, tetapi mungkin saja oleh banyak orang ia dianggap bukan ulama dan begitu pula sebaliknya (lihat Tabel 1 sampai dengan Tabel 8). Dan karena pendidikan agama yang menghasilkan ulama itu berkembang, rupanya pengertian masyarakat tentang ulama juga berkembang. Masyarakat mulai menyebut-nyebut ulama atau ulama intelektual **wetenschap** di samping ulama kitab. Ulama intelektual atau ulama **wetenschap** yang dimaksud ialah ulama yang kecuali memiliki ilmu pengetahuan agama Islam, juga memiliki

ilmu pengetahuan umum, dalam arti pengetahuan agamanya dianggap lebih dalam daripada pengetahuan umumnya. Dalam hal mengajar, memimpin dan beribadat seorang ulama **wetenschap** tidak hanya berpedoman pada kitab saja, tetapi juga berpedoman pada pengetahuan umum, sehingga ia mudah menyesuaikan ajaran, pimpinan dan ibadatnya dengan perkembangan masyarakat. Ulama **wetenschap** biasanya lulusan madrasah ataupun sekolah agama umum. Kalaulah lulusan **dayah**, biasanya ia belajar lagi mengenai ilmu pengetahuan umum baik dengan kursus maupun dengan belajar sendiri, seperti Tgk. MTA, ulama Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia (PI Perti), setelah keluar dari **daya** masuk kursus persamaan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Tgk. ASy juga ulama PI Perti kursus dan belajar sendiri dengan banyak membaca buku-buku sejarah.

Ulama kitab kebalikan dari ulama **wetenschap**, mereka mengajar memimpin dan beribadat hanya berpedoman pada kitab (Qur'an dan Hadits), sehingga mereka sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Mereka ini ialah lulusan **dayah** dan tidak mempelajari pengetahuan umum. Biasanya mereka mendirikan **dayah** dan menjadi tokoh **gampong** seperti halnya Tgk. SL MD dari Lhoksukon, meskipun **dayahnya** hampir kosong ia tetap berada di posnya, katanya menunggu murid-murid yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya 15) Dan Tgk. IA kecuali membuka **dayah** di Kecamatan Muara Dua juga menjadi imeum **meunasah Gamong Blang Crum** yang disegani. Pengertian-pengertian ulama menjadi dua golongan itu kiranya dapat dimaklumi sebagai akibat perkembangan pendidikan agama yang secara nyata dimulai oleh Tgk. Abdul Wahab dari Sculimeum pada tahun 1926 seperti telah diuraikan pada bab I.

Di muka telah disebutkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara pengertian kaum politisi dan rakyat **gampong** mengenai ulama. Dalam mengutarakan pengertiannya tentang ulama kaum politisi lebih menekankan unsur pengetahuan agama Islam, sedangkan rakyat **gampong** lebih menekankan unsur mengajar atau pun menjelaskan agama seterang-terangnya. Perbedaan itu kiranya disebabkan oleh perbedaan cara mengerti mereka. Kalau kaum politisi memperhatikan lebih dulu pendidikan ijazah seseorang, dan sesudah mereka mengetahui bahwa seseorang memiliki pengetahuan agama atau pun ijazah dari sekolah agama, maka secara a priori mereka menganggap bahwa orang itu akan mengajar, memimpin dan beribadat berdasarkan pengetahuan agamanya, sehingga orang itu dianggapnya sebagai ulama. Hal ini antara lain nampak dari salah satu peristiwa sebagai berikut. Waktu penulis menunjuk salah satu nama (MTBA) pada daftar nama politisi Aceh Utara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, dan bertanya kepada salah seorang politikus apakah orang yang mempunyai nama itu seorang ulama? Ia mengiyakan, alasannya BA itu diperolehnya dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 16)

Lain halnya dengan orang **gampong**, mereka lebih dulu mendengarkan ceramah atau pun ajaran seseorang, baru setelah itu mereka menyimpulkan apa pengetahuan orang tersebut, dan berdasarkan kesimpulannya itu orang **gampong** menganggap seseorang sebagai ulama atau bukan. hal ini secara eksplisit pernah dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat di suatu **gampong** bahwa orang **gampong** mengerti seseorang berdasarkan pembicaraannya. Kalau seseorang banyak bicara masalah agama, maka orang **gampong** sudah menganggapnya sebagai ulama.

Perbedaan lain ialah penekanan unsur pengetahuan umum yang dimiliki oleh seorang ulama. Kaum politisi tidak begitu menekankan unsur itu. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa unsur pengetahuan umum itu dalam batas-batas tertentu sudah seharusnya dimiliki oleh ulama lebih-lebih ulama politisi, tetapi juga bisa ditafsirkan bahwa unsur itu dianggap tidak hakiki untuk pengertian ulama, sehingga jarang-jarang disebutnya. Tetapi pernah penulis bertanya kepada beberapa politisi, mana yang lebih disukai ulama kitab atau ulama **wetenschap**? Mereka menjawab ulama **wetenschap**.

Lain halnya orang **gampong**, dalam wawancara mereka sering menekankan bahwa pengetahuan umum perlu dimiliki oleh ulama. Rupanya hal itu dipengaruhi oleh pengalaman mereka di **gampong** yaitu bahwa ulama-ulama yang mempunyai pengetahuan umum di samping pengetahuan agama mengajar lebih lunak dan toleransinya lebih besar pada perkembangan masyarakat **gampong** daripada ulama yang mengajar hanya berdasarkan kitab saja. Menurut mereka ulama yang hanya memiliki pengetahuan agama saja sangat keras dalam mengajar dan toleransinya terhadap perkembangan masyarakat sangat kurang, bahkan sepakbola bagi pemudanya dilarangnya, karena tidak sesuai dengan kitab. Dengan demikian ulama yang memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan umum lebih disukai mereka, meskipun belum tentu lebih disegani dan dihormati daripada ulama kitab.

Untuk sekedar mendapat gambaran yang agak kongkrit mengenai perkembangan pengertian ulama dalam masyarakat Aceh Utara tersebut perlulah kiranya diikuti riwayat hidup seorang ulama yang pernah belajar di **dayah**, tetapi pernah juga mendapat pendidikan yang dimaksudkan oleh Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia ke Aceh.

ASy lahir pada tanggal 15 April 1926 di Meunasah Rayeuk Kareueng, Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Ayahnya seorang guru mengaji di **gampongnya**, maka ketika ASy berumur lima tahun sudah diajar mengaji Qur'an. Anak-anak **gampong** biasanya mulai diajar mengaji oleh **Imeum meunasah** pada umur enam tahun. Kalau pada umur itu anak tidak mengaji orang tuanya malu terhadap masyarakat **gampong**, lebih-lebih terhadap **Imeum meunasah**, dan biasanya **Imeum meunasah** menyuruh anak-anak yang sudah mengaji mengajak anak yang tidak mengaji itu.

ASy tamat mengaji Qur'an pada umur enam tahun, sedangkan anak-anak lain biasanya baru tamat sesudah mengaji selama dua atau tiga tahun, bahkan ada juga yang tidak pernah tamat. Setelah tamat Qur'an ASy belajar **masalah muhtadin** dan **bidayatul muhtadin** dan **bidayatul muhtadin**. Pada tanggal 1 Agustus 1933 ASy masuk **Volk-school** di Gampong Punteuet Syamtalira Bayu dengan uang sekolah lima sen sebulan, sebab abangnya juga sekolah di situ dengan uang sekolah sepuluh sen (satu sen sama dengan sepuluh rupiah sekarang). Ia tamat **Volk-school** pada tanggal 7 Juli 1936. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1936 ia meneruskan ke **Government Inlandsche School** yang pada waktu itu terkenal dengan nama **Tweede Klas** dan tamat pada tanggal 17 Juli 1938.

Tanggal 1 Januari 1939 ASy masuk ke **dayah** Tgk. Yahya, **qadli** Punteuet. Kawan seangkatannya berjumlah 40 orang. Dalam **dayah** itu mereka mendapat pelajaran nahu, fikih, akhlak tasawuf dan hadits. Pengajaran di **dayah** Tgk. Yahya tidak memakai sistem klas, tetapi anak yang pengetahuannya lebih tinggi mengajar anak-anak yang pengetahuannya masih di bawahnya, sehingga meskipun muridnya cukup banyak, **dayah** tidak pernah kekurangan guru. Mereka yang langsung mendapat pelajaran dari Tgk. Yahya hanya 20 orang. ASy belajar di **dayah** Tgk. Yahya sampai tahun 1953, tetapi sementara itu ia juga belajar di tempat lain dan sudah mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial-politik, meskipun posnya masih tetap **dayah** Tgk. Yahya.

Kegiatan ASy sementara belajar di **dayah** itu ialah: Pada bulan September 1946 ia mendapat panggilan dari bekas gurunya di **Gouverenement Inlandsche School** untuk mengikuti kursus guru cepat di Lhokseumawe. panggilan itu diturutinya dan kursus berakhir pada bulan Maret 1947. Pada tanggal 1 Mei 1947 ia mengajar di Sekolah Rakyat Jungka Gajah. Pada waktu itu kekuatan politik dan pemerintahan daerah Aceh berada di tangan golongan PUSA. Menurut ASy ulama tua (ulama kitab) tidak begitu senang dengan golongan PUSA, karena mereka menganut ajaran tasawuf yang tidak suka pada perkumpulan-perkumpulan. Namun demikian mereka juga diberi kedudukan dalam lingkungan pengadilan oleh golongan PUSA.

Pada saat itu ASy sebagai pemuda menjadi sekretaris Masyumi ranting Punteuet dan sekaligus dan sekaligus menjadi anggota staf divisi Tgk. Chik Di Tiro bagian perbekalan di Punteuet, tahun 1949 **Imeum** mesjid di Runteuet dan baru menikah pada tahun 1951. Namun masih tetap bertempat tinggal di **dayah** Tgk. Yahya dan baru berkumpul dengan isterinya setelah mempunyai seorang anak pada tahun 1952. Tetapi pada tahun 1953 ia dipisahkan lagi dari anak-isterinya karena ditangkapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dipenjara-

kan bersatu-sama dengan DI/TII lainnya di Lhokseumawe. Kemudian dipindah ke Pematang Siantar karena dipersalahkan melanggar pasal 110,111 dan pasal 112 Kitab Undang-undang Pidana.

Tahun 1955 dibebaskan, lalu aktif di bidang pendidikan dan masih sempat pula kursus persamaan Sekolah Guru Bawah sampai mendapat ijazah. Setelah itu kariernya dalam bidang kepegawaian dan politik lokal terus menanjak. Tahun 1959 ia menjadi Kepala Sekolah Rakyat Kandang, Kecamatan Muara Dua; tahun 1961 menjadi Penilik Pendidikan Masyarakat Kab. Aceh Utara; 1964 menjabat Sekretaris PI Perti Cabang Aceh Utara. Tahun 1967 ia menjadi Ketua PI Perti cabang Aceh Utara dan pada tahun 1968 ditunjuk menjadi anggota DPRD Gotong Royong Aceh Uara. Dalam pemilihan umum 1971 ia terpilih sebagai anggota DPRD Tk. II Aceh Utara sebagai wakil PI Perti. Pada tahun 1975 menjabat Kepala Pembina Pendidikan Masyarakat Kab. Aceh Utara dan terakhir pada tanggal 11 Nopember 1975 menjabat kepala Urusan Keuangan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh utara. 17)

## **ULAMA SEBAGAI POLITICI DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN ACEH UTARA**

Dengan kata politisi disini yang dimaksud ialah orang-orang yang ikut ambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan (**decislon-making process**) dalam arena politik dan pemerintahan daerah. Tegasnya orang-orang yang duduk dalam Pemerintah Daerah, Dewan Pimpinan partai Politik dan Dewan Pimpinan Golongan Karya baik sipil maupun ABRI di Aceh Utara. Pemerintah Derah menurut pengertian Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 18) sebagai berikut :

### **Bagian Keempat Pemerintah Dacrah Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah adalah Komite Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah.

Di Dati II Kab. Aceh Utara Bupati KDH beserta stafnya berjumlah 17 orang, di antaranya sepuluh orang yang ikut ambil bagian dalam **decision-making process**. Dan anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1971 berjumlah 32 orang dengan perincian lima orang dari Nahdlatul Ulama (NU), tujuh orang dari Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), seorang dari partai Setikat Islam Indonesia (PSII), tujuh orang dari PI Perti (keempat partai itu sejak tanggal 5 Januari 1973 telah berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan), dan 12 orang dari Golongan karya (Golkar) 19). Sesuai dengan pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (20), maka 32 orang yang terpilih itu ditambah delapan orang yang di angkat yaitu enam orang dari Golkar ABRI diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan dua orang dari Golkar sipil yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri sendiri.

Di antara 50 orang politisi tersebut diatas yang oleh kawan sejawatnya dianggap ulama serta memiliki unsur-unsur pengertian ulama seperti telah diuraikan di atas 14 orang (seorang dari staf Bupati KDH dan 13 orang dari DPRD). Di antara 14 orang itu yang paling sedikit mendapat pengakuan sebagai ulama dari kawan sejawatnya ialah MT BA. Ia mendapat 12 pengakuan dari 38 orang politisi, sedangkan yang terbanyak mendapat pengakuan ialah ALB dan AGD yang masing-masing mendapat 32 pengakuan dari 38 orang politisi sejawatnya. Hal ini diketahui dengan cara membagikan daftar nama dari 50 politisi itu kepada setiap politicus yang penulis wawancarai. Kemudian penulis minta kepada politikus itu untuk memberi tanda nama-nama yang dianggapnya sebagai ulama. Dari 38 responden yang menyebut 17 ulama hanya seorang pula, kebanyakan menyebut antara lima ulama dan sepuluh ulama. Hasil seluruhnya lihat Tabel 1.

Ketika penulis menanyai delapan orang dari 14 orang yang dianggap politisi ulama itu siapakah di antara 50 politisi itu yang dianggap sebagai ulama? Delapan orang menunjuk NA. Kemudian tujuh orang menunjuk ALB, sedangkan AGD hanya dianggap sebagai ulama oleh enam orang dari delapan orang tersebut, demikian juga MA, dan sepuluh orang lainnya yang tercantum pada Tabel 1 mendapat pengakuan sebagai ulama dari lima sampai dengan dua orang dari delapan orang yang dianggap ulama tersebut. Seperti halnya dalam Tabel 1 yang menduduki tempat paling bawah yaitu :

**Tabel 1**  
**Politisi Ulama di Pemerintah**  
**Daerah Tk. II Aceh Utara Menurut Anggapan 38 Politisi**  
**1976**

No.	Nama	Parpol/Golkar	Lembaga Pendidikan	Penganggap	%
1.	ALB	Parmusi	DPRD	PTAI	32 84,21
2.	AGD	Golkar	DPRD	PTAI	32 84,21
3.	NA	PI Perti	DPRD	Dayah	29 76,32
4.	MTA	PI Perti	DPRD	Dayah	28 73,68
5.	AHH	Golkar	DPRD	NII	27 71,05
6.	ASy	PI Perti	DPRD	Dayah	26 68,42
7.	AGA	PSII	DPRD	NII/Drs.	25 65,79
8.	MA	PI Perti	DPRD	Dayah (	16 42,11
9.	J	Golkar	DPRD	Dayah	16 42,11
10.	IM	Golkar	DPRD	NII	16 42,11
11.	SUM	Golkar	Staf	NII	14 39,47
12.	HH	PI Perti	DPRD	PTAI	13 34,21
13.	MAH	Parmusi	DPRD	PTAI	13 34,21
14.	MT BA	NU	DPRD	PTAI	12 31,58

Sumber : Angket penulis terhadap politisi Dati II Kab. Aceh Utara di Lhokseumawe 16 Maret s/d 30 April 1976

Keterangan : N = 38

PTAI = Pendidikan Tinggi Agama Islam

NII = Normal Islam Institut

Staf = Staf Bupati KDH.

MT BA yang mendapat anggapan dua orang dari delapan orang politisi yang dianggap kawan sejawatnya sebagai ulama. Jadi kalau keulamaan politisi itu hanya didasarkan pada anggapan kaum politisi saja maka politisi ulama di Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Utara itu sudah diketahui yaitu 14 orang. Tetapi apakah mereka itu juga dianggap ulama oleh masyarakat Aceh Utara ? untuk mengetahui itu pertama-tama dapat digunakan pengertian ulama menurut masyarakat Aceh Utara yang telah dirumuskan di muka. Jadi disini harus diadakan penelitian apakah unsur-unsur pengertian ulama itu terdapat pada diri ke 14 politisi tadi ?

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa keempatbelas orang itu pernah belajar agama baik di **dayah** maupun di sekolah agama modern, dengan perincian lima orang tamat mengaji di **dayah**, tiga orang tamat Sekolah Menengah Islam, lima orang pernah mengikuti kuliah di Pendidikan Tinggi Agama Islam (seorang tamat Sarjana Muda IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) dan seorang

Tabel 2  
Politisi Ulama di Pemerintah  
Daerah Tk. II Aceh Utara Menurut Anggapan 8 Politisi Ulama  
1976

No.	Nama	Partai/ Golkar	Lembaga	Pekerjaan	Penganggap	%
1	NA	PI Perti	DPRD	Guru <i>dayah</i>	8	100
2	ALB	Parmusi	DPRD	Juru dakwah Kab	7	87,5
3	AGD	Golkar	DPRD	Peg. KUA/Guru Agama	6	75
4	MA	PI Perti	DPRD	Guru <i>dayah</i> /Peg. Pengadil-an	6	75
5	IM	Golkar	DPRD	Petani	5	62,5
6	ASy	PI Perti	DPRD	Guru <i>dayah</i> /Peg. Kab.	5	62,5
7	MTA	PI Perti	DPRD	Guru <i>dayah</i> /Pedagang	5	62,5
8	AHH	Golkar	DPRD	Peg. Japen. Kab.	5	62,5
9	HH	PI Perti	DPRD	Guru madrasah	4	50
10	MAH	Parmusi	DPRD	Guru madrasah/Petani	4	50
11	AGA	PSI	DPRD	Dosen AIAS/Peg. KUA	3	37,5
12	J	Golkar	DPRD	Petani (?)	3	37,5
13	SUM	Golkar	Staf	Peg. Kab.	3	37,5
14	MT BA	NU	DPRD	Guru PGA	2	25

Sumber : Angke penulis terhadap politisi Dati II Kab. Aceh Utara di Lhokseumawe 16 Maret s/d 30 April 1976

Keterangan : N = 8.

KUA = Kantor Urusan Agama

AIAS = Akademi Ilmu Agama Swasta.

setelah tamat Normal Islam Institut meneruskan ke SMA, kemudian ke Fakultas Sosial Politik Universitas Cokroaminoto Surakarta, sehingga mencapai gelar Sarjana. Sepuluh orang pernah menjadi guru agama baik di *dayah* maupun di sekolah agama umum, dua orang menjadi petani dan dua orang lagi bekerja di kantor pemerintah. Empat orang yang terakhir itu meskipun tidak memegang jabatan guru agama, tapi mereka menjadi tokoh masyarakat yang sewaktu-waktu ada kesempatan tentu mengadakan dakwah kepada umat Islam. 21)

Dalam hal pendidikan yang agak menarik perhatian ialah MTba. Sarjana Muda Tarbiyah IAIN itu ternyata mendapat anggapan sebagai ulama paling sedikit baik dari 38 politisi maupun dari delapan politisi ulama. Hal ini bisa berarti para penganggap itu lupa dari mana asal gelar kesarjanaannya itu atau bisa juga berarti bahwa mereka lebih menghargai ulama lulusan *dayah* atau madrasah yang pernah didirikan oleh ulama-ulama pada zaman Belanda seperti Al Muslim Peusangan dan Normal Islam Institut. Kemungkinan kedua itu rupanya lebih dekat dengan kenyataan, sebab dalam wawancara-wawancara penulis sering mendengar bahwa ulama yang

selalu ditonjolkan ialah ulama **dayah** seperti Tgk. Abdul Azis dari Samalanga dan Tgk. Abdullah Tanoh Mirah Peusangan, sedangkan yang berada di DPRD Tk. II Aceh Utara menurut mereka hanya dapat digolongkan ulama saja. Hal ini sesuai pula dengan anggapan kaum politisi bahwa pengetahuan umum bagi ulama tidak begitu ditekankan seperti telah diuraikan dalam Bab II. Jadi dapatlah kiranya dikatakan bahwa jumlah politisi ulama dalam lembaga Pemerintah Daerah Tk. II Kab. Aceh Utara 14 orang atau 28 % dari seluruh jumlah yang ada.

Politisi yang duduk dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan) Aceh Utara berjumlah 12 orang yaitu : 1) HI : Ketua Koordinator (eks Parmusi); HIY: Ketua Pimpinan Cabang (eks Parmusi); MA: Wakil Ketua (eks PI Perti/DPRD); HB : Wakil Ketua (eks NU); AJ : Wakil Ketua (ekas PSII). 2) THAS : Ketua Majelis Pertimbangan (eks PSII); UA : Wakil Ketua Majelis Pertimbangan (eks Bupati KDH Aceh Utara); AS : Wakil Ketua Majelis Pertimbangan (eks NU); HIR : Wakil Ketua Majelis Pertimbangan (?). 3) M : Sekretaris (?); DH: Sekretaris (eks NU/DPRD) dan UB : Sekretaris (eks Parmusi/DPRD). Di antara 12 orang politisi itu yang sudah dikenal sebagai politikus ulama di DPRD yaitu MA. Politisi lain yang dianggap ulama oleh kawan sejawatnya dan oleh orang-orang **gampong** IALAH UA dan AS. Keduanya sudah cukup tua, UA pensiunan Bupati KDH sekarang menjadi **Imeum** mesjid Jami' Lhokseumawe dan AS bekas **Imeum** mesjid Jami' Lhokseumawe yang sekarang menjadi hakim anggota tidak tetap pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Lhokseumawe.

Politisi yang duduk dalam Dewan Pimpinan Daerah Golkar Aceh Utara berjumlah enam orang yaitu : 1) JA : Ketua (letkol Purnawirawan); AHH: Wakil Ketua (eks NU/DPRD); R : Wakil Ketua (Pembantu Bupati KDH), 2) AM : Sekretaris (Mayor TNI Angkatan Darat); RR : Sekretaris (Kepala Bagian DPRD). 3) AU : Bendahara (Kepala Sub Direktorat Keuangan Dati II Kab. Aceh Utara). Dari enam orang itu yang dianggap politikus ulama hanya AHH dari DPRD.

Untuk sekedar mengetahui pengetahuan agama yang dimiliki oleh politisi ulama itu serta sikap mereka terhadap keadaan politik dan pemerintahan sekarang, kiranya perlulah di sini diberikan sekedar gagasan-gagasan yang berhubungan dengan agama dari politisi ulama PI Perti, Parmusi dan politikus ulama Golkar.

Sebelum sidang DPRD dimulai ASy, seorang politikus ulama PI Perti menguraikan gagasannya tentang dunia, manusia dan Allah kepada penulis, Ia mengumpamakan dunia ini sebagai sebuah negara, Allah sebagai presidennya. Beliau mengeluarkan undang-undang dasar seperti halnya presiden menetapkan Undang-undang Dasar 1945 untuk Indonesia. Undang-undang yang dikeluarkan Allah itu untuk mengatur hubungan baik antara manusia dan Allah yang disebut **ibadat**, hubungan baik antara manusia dan sesamanya yang disebut **muamalat** dan hubungan buruk antara manusia satu dan manusia lain yang disebut **hinayat**.

Undang-undang itu diturunkan oleh Allah kepada para Nabi. Yang diturunkan kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim disebut Sufd. Undang-undang yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut Taurat, Zabur kepada Nabi Daut, Injil kepada Nabi Isa dan yang terakhir Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Undang-undang yang kemudian menyempurnakan yang terdahulu, sehingga Qur'anlah yang paling sempurna, karena yang terakhir dan membatalkan semua undang-undang yang terdahulu. Dengan demikian Nabi Muhammad menjadi Nabi universal.

Tentang manusia ia mengatakan bahwa menurut Qur'an ia dibuat dari darah dan mani, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa yang dibuat dari tanah. Kemudian dikatakan bahwa manusia terdiri dari akal dan nafsu. Akal mengendalikan nafsu untuk mengarahkan keperbuatan baik. Tetapi untuk bisa mengendalikan dengan baik akal dibantu oleh iman agar percaya kepada Allah. Oleh ilmu agar bisa membedakan yang buruk dan yang baik dan oleh malu agar berbuat yang baik-baik saja. 22)

Dari gagasan tersebut dapatlah diketahui bahwa menurut politikus ulama PI Perti itu agama lain sudah dibatalkan oleh agama Islam. Apakah gagasan ini tidak mencerminkan sikap seorang tokoh ulama PI Perti di Kecamatan Samudra, yang kepada penulis pernah diceritakan oleh Camat bahwa ulama itu tak pernah mau mengakui hasil pembangunan yang baik sebagai baik kalau itu masih karya Pemerintah ? 23). Demikian juga apa yang diterangkan oleh orang-orang **gamong** di Kecamatan Lhoksukon. Mereka mengatakan bahwaseorang ulama PI Perti yang sudah tua mengajar sangat keras dan sempit 24). Mungkin itu semua memberi petunjuk bahwa politisi ulama PI Perti tertutup dan kurang maju. Petunjuk ini kiranya diperkuat oleh kenyataan bahwa lima anggota DPRD eks PI Perti yang ulama, semuanya lulusan **dayah** dan empat orang di antaranya tinggal di luar kota Lhokseumawe.

Gagasan-gagasan politikus ulama Parmusi dapat diketahui dari teks kothbahnya waktu Hari Raya Idul Fitri tahun 1974 di Mesjid Jami' Lhokseumawe. Dalam kothbah itu ia berusaha mengemukakan gagasan-gagasan pembangunan, politik, sosial dan moral dengan memilih ayat-ayat Qur'an dan Hadits Nabi sebagai landasannya. Dalam hal pembangunan ia mengatakan :

.....memang dalam masa pembangunan ini kita seluruhnya dengan tidak ada kecuali dituntut untuk supaya selalu siap dan tabah lagi cakap menghadapi berbagai macam masalah pembangunan. Rasa "cepat puas" akan menimbulkan kekenyamanan dalam amal usaha kita dan akan mengurangi inisiatif-inisiatif untuk mengerjakan soal-soal yang baru dan hal-hal itu adalah bertentangan dengan tuntutan perjuangan.

Untuk melandasi gagasan itu ia memilih Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

- "Ambillah kesempatan lima hal sebelum ditimpa lima hal pula :
1. Hidupmu sebelum matimu ;
  2. SEhatmu sebelum sakitmu ;
  3. Senggangmu sebelum sibukmu ;
  4. Waktu mudamu sebelum pikunmu ;
  5. dan kayamu sebelum miskinmu". 25)

Mengenai sosial-politik ia berpendapat bahwa semuanya akan tertib keadaannya kalau masing-masing golongan yang ada di dalam masyarakat mau saling bekerjasama dan berbuat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maksudnya ulama mau mengajarkan ilmunya dan orang jahil mau belajar, Pemerintah mau memerintah dengan adil dan rakyat mau mentaatinya, orang kaya mau mendermakan kekayaannya, sedang orang miskin mau minta dema itu dan mau mendoakan orang kaya. Jadi masing-masing harus mau berbuat sesuai dengan kemampuannya, sebab itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kalau yang terjadi sebaliknya maka semua akan berantakan, negara akan lemah. Gagasan ini dikemukakan berdasarkan kitab Al-Amir Syakieb Arsalan yang berjudul : **Lima dzaa taakhkharal Muslimun ? Mengapa Kau Muslimin Mundur ?**

Mengenai ukuran perbuatan baik dan jahat ia hanya mengutip sabda Nabi sebagai berikut :

- "Bahwasanya Allah Ta'Ala telah menjadikan anak Adam delapan golongan : empat golongan dari padanya masuk syurga yaitu : 1. Muka manis atau senyum; 2. Lidah pashih tidak cabul; 3. Hati taqwa tidak membatu ; 4. Dan tangan murah tidak kikir. Adapun empat golongan lagi yang akan masuk neraka ialah : 1. Muka masam ; 2. Lidah kotor atau keji ; 3. Hati keras membatu ; 4. Dan tangan bakhil". 26)

Demikianlah sekedar gambaran gagasan dari seorang politikus ulama Parmusi. Dari gagasan itu dapatlah dilihat suatu pemikiran yang dinamis seperti misalnya menghindari rasa "cepat puas" dan cukup terbuka artinya selalu berusaha mencari yang lebih baik dan lebih sempurna dengan menggunakan apa yang ada. Meskipun tidak sengaja rupanya gagasan itu mencerminkan pula sikap tokoh-tokoh Parmusi lainnya. Camat Samudra pernah mengatakan bahwa tokoh-tokoh Parmusi lebih terbuka daripada tokoh-tokoh PI Perti. Mereka mau mengakui hasil pembangunan yang baik, meskipun itu hasil karya Pemerintah. 27) Politikus ulama Parmusi lain pernah mengatakan kepada penulis bahwa baginya bukanlah masalah siapa yang akan menang dalam pemilihan umum tahun 1977 nanti, tetapi yang penting ialah pembangunan berjalan terus sampai ke desa-desa seperti misalnya gedung-gedung sekolah Inpres yang sekarang. Sebelum pembangunan lima tahun berjalan menurut dia tak ada gedung sekolah yang bagus di desa-desa Aceh. 28)

Akhirnya sampailah pada gagasan keagamaan politikus ulama Golkar Dalam setiap kesempatan berceramah AHH mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang nilai ganda manusia. Ia mengemukakan bahwa manusia mempunyai nilai ganda yaitu "effiensi" juga disebut akal atau rasio yang menjurus ke teknologi serta materi, dan moral yang bersumber pada kepercayaan atau agama masing-masing orang. Pada masyarakat tradisional "effiensi" 20 %, "efektifitas" 80 %, sedangkan pada masyarakat modern kebalikannya. Kedua nilai itu dalam diri manusia tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi, kalau orang hanya menggunakan rasio saja, ia akan menjadi biadab, sebaliknya kalau ia hanya menggunakan emosinya saja tanpa dikendalikan oleh orang itu akan sinting. Orang yang menggunakan rasio dan emosi secara seimbang ia akan bermental sehat.

Mental sehat melahirkan ketenteraman baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk keluarga dan masyarakat. Ketenteraman melahirkan kepuasan yang disebutnya sebagai sesuatu yang hakiki bagi manusia. Katanya orang-orang komunis mencoba untuk menghilangkan "efektivitas" dari manusia, tetapi tidak berhasil. Terbukti dengan adanya penghormatan secara besar-besaran terhadap Chou En-Lai almarhum baru-baru ini. 29). Untuk memperjelas gagasannya ia menggunakan rumus aljabar :

$$\begin{aligned} \text{Rasio} - \text{Emosi} &= \text{Biadab} \\ \text{Emosi} - \text{Rasio} &= \text{Sinting} \\ \text{Rasio} + \text{Emosi} &= \text{Mental Sehat.} \end{aligned}$$

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politikus ulama Golkar dalam mengajarkan pengetahuannya agamanya sangat pandai menggunakan situasi dan kondisi, sehingga sangat mudah diterima oleh pendengarnya. Bahkan kadang-kadang pendengarnya tidak merasa bahwa ajarannya itu merupakan ajaran agama. Penulis sendiri ketika baru pertamakali mendengarkan gagasan tersebut juga tidak melihat hubungannya dengan ajaran agama, tetapi setelah mempelajarinya barulah mengerti bahwa gagasan tersebut semacam gagasan ulama Pidic tentang akal dan hawa nafsu yang diuraikan oleh Siegel. Dikatakannya bahwa Allah telah memberi kepada manusia dua tabiat yaitu hawa nafsu dan akal. Hawanafsu tanpa akal tentu akan menuju ke perbuatan dosa, sedangkan hawa nafsu yang dikendalikan akal melulu belum menjamin ke arah taat kepada Allah, bahkan katanya makin tajam akal itu makin menyeret manusia ke kesulitan yang lebih besar. Untuk menghindari ini akal manusia harus dibimbing oleh agama dan dengan menjalankan agama yaitu sembahyang, manusia dapat mengendalikan dirinya termasuk hawanafsunya ke arah taat kepada Allah. 31)

Gagasan politikus ulama Golkar tersebut mencerminkan pula tingkah laku politisi ulama Golkar dalam arena politik dan pemerin-

tahan. Mereka pandai sekali menyesuaikan diri serta menggunakan situasi dan kondisi. Orang gampong menyebut sangat "lihai" (dalam arti kurang baik) dan tokoh-tokoh politik Partai Persatuan menyebutnya sebagai orang pandai bicara yang suka berpindah-pindah dan kurang berpegang kepada ideologi atau menurut istilah politikus ulama PI Perti kurang idealis dan mencari fasilitas, memang politisi ulama Golkar berasal dari partai-partai Islam.

#### IV

### HUBUNGAN POLITISI ULAMA DAN POLITISI NON ULAMA

Hubungan antara politisi ulama dan politisi non ulama rupanya sesuai juga dengan pengertian mereka tentang ulama. Politisi non ulama menghormati politisi ulama sesuai dengan pengetahuannya, artinya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan agama mereka diberi kesempatan yang utama. Hal ini nampak pada pembicaraan-pembicaraan ataupun tingkah-laku tidak resmi, pembicaraan-pembicaraan resmi baik dalam sidang pleno maupun dalam rapat-rapat kecil, dan nampak juga pada penyusunan komisi-komisi dan Panitia-panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Dalam kelompok-kelompok pembicaraan tidak resmi, politisi ulama menjadi pusat perhatian (setiap kelompok terdiri dari empat atau delapan orang, biasanya di dalamnya terdapat satu atau dua politisi ulama), sebab tidak jarang dalam pembicaraan-pembicaraan tidak resmi sebelum sidang dimulai misalnya, yang dibicarakan masalah agama. Pembicaraan-pembicaraan tidak resmi yang pernah penulis ikuti, membicarakan masalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit ketujuh waktu isra' dan mi'raj. Pada mulanya seorang politikus non ulama bertanya kepada seorang politikus ulama bagaimana hal itu bisa diterangkan dengan rasio. Pembicaraan menjadi hangat karena beberapa orang lainnya ikut menggabung. Dalam kesempatan lain ada kelompok yang mempermasalahkan bagaimana caranya agar dalam bersembahyang orang tidak teringat kepada hal-hal duniawi. Ada pula kelompok yang memperbincangkan masalah perkawinan. Dalam saat demikian rupanya mereka menggunakan kesempatan untuk berkonsultasi, politisi dan non ulama dengan politisi ulama dan politisi ulama yang merasa kurang pengetahuan agamanya dengan politisi ulama yang dianggap sudah dalam ilmunya.

Penyerahan masalah yang berhubungan dengan agama kepada politisi ulama itu rupanya tidak terbatas pada pembicaraan-pembicaraan saja. tetapi kalau ada kejadian yang dianggapnya berhubungan dengan masalah agama politisi non ulama itu juga menyerahkannya

kepada politisi ulama. Pernah terjadi ketika sidang pleno DPRD dibatalkan malam itu Sekretaris Golkar membawa politisi ulama PI Perti dan Golkar ke warung remang-remang tempat pemuda-pemuda **gampang** belajar minum minuman keras dilayani pramuria-pramuria cantik. Maksud sekretaris Golkar itu untuk menunjukkan masalah yang kongkrit, sehingga politisi ulama itu bisa mencari jalan pemecahannya.

Dalam pembicaraan-pembicaraan resmi seperti sidang pleno DPRD, rapat-rapat Pansus atau pun Komisi, masalah-masalah yang berhubungan dengan agama biasanya diserahkan kepada politisi ulama untuk dipecahkan. Hal ini nampak pada sidang-sidang DPRD yang membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 1974/1975. Pada waktu itu kelihatan bahwa pihak Bupati KDH beserta staf yang membuat RAPBD sengaja meninggalkan pemerincian terhadap anggaran bantuan bidang sosial yang mencakup bidang kesejahteraan (didalamnya terdapat bidang agama) dan pendidikan yang berjumlah Rp. 4.000.000,- kepada politisi ulama DPRD. Dua orang politisi ulama dari PI Perti dan amusi masing-masing mengusulkan perinciannya. Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD yang telah disahkan dapat dilihat bahwa usul dari kedua politisi ulama itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan.

Politisi ulama rupanya sadar pula bahwa mereka dianggap kawannya sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama, maka minatnya pun seolah-olah disesuaikan pula dengan kesadarannya yaitu selalu diarahkan ke masalah agama. Hal ini nampak pada pembicaraan-pembicaraannya di dalam rapat-rapat Pansus ataupun komisi. Dalam sidang pleno pun setiap kali mendapat kesempatan naik mimbar, mereka tentu menyinggung **dayah**, sekolah agama umum, penyuluhan agama, mesjid, **musabaqah tilawatil qur'an** dan lain sebagainya.

Sengaja atau tidak rupanya anggota-anggota DPRD pun dalam menyusun komisi ataupun pansus selalu menyesuaikan tindakannya dengan pengertian mereka tentang ulama. Kalau diperhatikan dengan teliti dalam penyusunan lima komisi (32) DPRD (setiap komisi terdiri dari delapan orang) akan nampak bahwa Komisi C mendapat politisi ulama paling banyak yaitu empat orang. Komisi a, Komisi B dan Komisi D, masing-masing mendapat tiga politikus ulama pun. Mereka menempatkan politisi ulama paling banyak pada Komisi C sebab komisi itu membidangi kesejahteraan rakyat yang merupakan **counter-part** Sub Direktorat (Subdit) Kesejahteraan Rakyat pada staf Bupati KDH yang membidangi seksi-seksi sosial, agama, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat. Dalam urusan agama itulah yang mendorong politisi di DPRD untuk menempatkan politisi ulama sebanyak-banyaknya dalam Komisi C. Sebaliknya Komisi E yang membidangi ekonomi, keuangan dan industri yang semuanya urusan duniawi tidak mendapat politikus ulama seorang pun.

Pola tingkah-laku yang sesuai dengan pengertian mereka tentang ulama itu rupanya berulang lagi dalam penyusunan pansus DPRD tahun 1976.33) Dalam hal ini pansus yang mendapatkan paling banyak politisi ulama ialah Pansus II yang mendapat tugas meninjau Kecamatan-kecamatan Makmur, Gadapura, Muara Batu, Dewantara, Muara dan Banda Sakti. Dua kecamatan yang terakhir itu disinyalir oleh ketua DPRD sudah kejangkitan materialisme, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama dari anggota masyarakatnya seperti warung remang-remang, minuman-minuman keras, penggelapan uang ganti rugi dan sebagainya. Hal itu semua katnya akibat dari pembangunan proyek industri besar LNG (gas alam cair) yang bertempat di Kecamatan Muara Dua.

Berdasarkan pada anggapan itulah kiranya maka Pansus II yang terdiri dari sembilan orang itu empat orang di antaranya politisi ulama. Ini berarti 44,44 % dari seluruh anggota Pansus II dan merupakan persentasi yang paling besar daripada politisi ulama yang terdapat pada pansus-pansus lainnya (Pansus I : 30 %, Pansus III : 22,22 % dan Pansus IV : 12,5 %).

Sebaliknya dalam membicarakan masalah non agama yang oleh mereka disebut masalah duniawi, politisi non ulama dianggap sebagai yang berkompeten, sehingga pendapat-pendapat mereka dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan bersama. Namun politisi ulama tidak ditinggalkan begitu saja tetapi tetap diberi kehormatan untuk memberikan "restu" supaya diridlai oleh Allah. Kebanyakan politisi ulama mengerti hal itu, maka dalam masalah duniawi biasanya mereka hanya mengukuhkan saja pendapat politisi non ulama. Hal ini nampak pada sidang-sidang DPRD yang membahas Anggaran Tambahan/Perubahan APBD Dati II Kab. Aceh Utara 1975/1976. Dalam sidang DPRD tanggal 24 Juli 1976, setelah sidang mendengarkan laporan tanggapan panitia anggaran terhadap Anggaran Tambahan/Perubahan APBD tersebut, maka seorang politikus ulama PI Perti mendapat kesempatan mengemukakan tanggapan pribadinya dalam sidang itu. Setelah ia naik mimbar, membaca doa, kemudian menerangkan tujuan pembangunan akhirnya mendukung dan me-"restu"-i tanggapan panitia anggaran yang telah dilaporkan.

Tetapi dalam sidang DPRD bulan Juli itu ada pula seorang politikus ulama, sarjana muda lulusan IAIN yang menanggapi masalah pajak tontonan, sarjana muda lulusan IAIN yang menanggapi masalah pajak tontonan, pajak sepeda, anggaran pendapatan Dinas Perindustrian dan Dinas Pertanian secara agak mendalam. Hal ini menimbulkan reaksi hebat dari politisi non ulama dan politisi ulama. Reaksi itu kiranya bisa diamati dari jawaban Bupati KDH terhadap tanggapan politikus ulama tersebut. Dalam jawaban itu Bupati KDH membaca :

".....kami ingatkan bahwa yang menyusun RAPBD adalah manusia yang bersifat tidak sempurna, di mana kesalahan dan kesilapan tidaklah mutlak terletak pada kuantitas penyediaan mesin hitung. Mengenai saran untuk menghidupkan keairahan PHR Samalanga yang dalam keadaan hidup mati perlu ditambah target pajaknya, adalah bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak itu sendiri, karena pajak baru dapat dipungut setelah adanya pertunjukan dan bukan sebaliknya.

Kurangnya keaktifan Dinas Perindustrian dalam mencapai target penerimaan dapat kami hayati, tetapi penggulangan tikar suatu dinas yang merupakan **Verleng Stuk** dari suatu instansi di luar wewenang kami dan hal ini sudah diatur dengan perundang-undangan yang berlaku untuk dinas yang bersangkutan, sebab itu kami menganjurkan agar anggota Yth. Sdr. MT BA kiranya tidak mengajukan tanggapan atau saran yang begitu emosional. Usul terhadap penambahan pegawai akan ditentukan oleh volume pekerjaan dan jika anggota Yth. Sdr. MT BA berminat untuk menjadi pegawai harian lepas dalam rangka peningkatan penerimaan Dinas Perindustrian kami persilahkan Sdr. mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan. 34)

Setelah jawaban itu dibacakan keadaan menjadi tegang. Politisi non ulama mengatakan jawaban Bupati KDH itu dapat dimaklumi, ada pula yang mengatkan MT BA tidak mengerti bedanya target dan hasil. Tetapi beberapa politisi ulama yang sempat penulis wawancara mengatakan bahwa jawaban Bupati KDH disusun oleh stafnya yang ingin meruncingkan keadaan ia sendiri orang militer yang keras dan tidak begitu memperdulikan susunan jawaban yang dibacanya.

Dalam kasus ini politisi ulama dan lebih-lebih politisi non ulama sebenarnya mengakui bahwa politikus ulama memang kurang pengetahuannya tentang masalah duniawi atau setidaknya tidak seharusnya mencampuri urusan dunia secara terperinci seperti perpajakan, kepegawaian dan sebagainya. Namun demikian kebanyakan kaum politisi tidak mau melihat politikus ulama dihina di muka umum seperti itu. Akibatnya keadaan yang tegang itu hampir hampir menimbulkan perkelahian antara politikus ulama dan ketua Fraksi karya ABRI. Ketegangan ini menyebabkan sidang berikutnya ditangguhkan selama dua hari.

Setelah ketegangan dapat diredakan dengan beberapa musyawarah tidak resmi, maka sidang pleno diaktifkan kembali pada tanggal 15 Juli 1976. Sidang ini dan seterusnya sampai penutupan tanggal 28 Juli 1976 mendengarkan pendapat Komisi-komisi A, B, C, D, dan E tentang RAPBD 1976/1977 dan pendapat akhir atau **stemmotivering** dari Fraksi persatuan Pembangunan. Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Karya ABRI 35). Dalam kesempatan ter-

akhir ini lewat Fraksi Persatuan Pembangunan rupanya politisi ulama mencoba memulihkan kehormatannya dengan mengutip ayat Qur'an yang berbunyi :

**Wa 'asa an takrahu syalan, Wa hua khalrun lakum, Wa 'asa an tuhibbu syalan, Wa hua syarrun lakum.** 'Apa yang tidak kamu sukai malah itu yang baik untukmu. Apa yang kamu sukai malah itu yang tidak baik untukmu. 36).

Pengertian mereka tentang ulama rupanya nampak pula pada kecenderungan mereka dalam menempatkan politisi ulama dalam susunan dewan pimpinan organisasi politik dan pemerintahan. Hampir tidak ada politikus ulama ditempatkan pada jabatan ketua umum. Paling tinggi ia ditempatkan pada jabatan wakil ketua 37). Hal ini dapat dilihat pada susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Aceh Utara, demikian juga pada Dewan Pimpinan Daerah Golkar Aceh Utara. Dalam Pemerintahan Daerah pun Bupati KDH dalam menghadiri sidang-sidang DPRD sering diwakili oleh SUM, Kepala Bagian Personalia, seorang politikus ulama Golkar. Bahkan R, Wakil Bupati KDH yang resmi, meskipun tidak dianggap sebagai ulama baik oleh kawan sejawatnya maupun oleh orang **gampong**, sebenarnya ia lulusan Normal Islam Institut angkatan pertama, bahkan menurut bekas kawan sekolahnya **Imeum meunasah** Lancang Garam ia termasuk siswa yang pandai. Tetapi menurut pengakuannya sendiri sejak berumur 13 tahun ia sudah ikut mengutip ayahnya yang pada zaman Belanda menjadi **keuchik** di **gampong** Kandang Kecamatan Muara dua sekarang 38).

Di dalam kepengurusan organisasi-organisasi yang dibentuk DPRD yaitu tiga fraksi, lima komisi dan empat pansus, tak seorang politikus ulamapun yang menduduki jabatan ketua. Dalam hal ini jabatan Ketua DPRD yang dipegang oleh seorang politikus ulama Golkar merupakan sesuatu perkecualian. Tetapi kalau dianalisa agak tajam perkecualian itu dapat dimaklumi. Kebanyakan orang menganggap Ketua DPRD lebih sebagai politikus dari pada sebagai ulama. Bahkan pernah beberapa orang dari **gampongnya** menyatakan bahwa ia bukan ulama. Memang hal itu harus diperhatikan, tetapi dalam hal ini yang lebih menarik ialah bahwa jabatan ketua DPRD itu sebenarnya hasil perjuangan Golkar Aceh Utara yang mendapat perintah dari panglima untuk balas jasa, karena ketua DPRD semula tokoh NU yang baru masuk Golkar tujuh hari menjelang pemungutan suara 1971. Sebagai ketua DPRD, ia dibawah komando Golkar dengan pengawasan terus-menerus 39). Dan harus diingat bahwa ketua DPRD dalam susunan Dewan Pimpinan Daerah Golkar Aceh Utara menduduki jabatan wakil ketua pula.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan politisi ulama dan politisi non ulama sesuai dengan pengertian mereka tentang ulama. Dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan aga-

ma politisi ulama diberi kesempatan lebih besar, sedangkan dalam menghadapi masalah duniawi **politisi** non ulama mendapat kesempatan lebih besar. Selama **politisi** ulama bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan agamanya dalam menghadapi masalah tersebut, mereka akan dihormati, sedangkan mengenai masalah duniawi **politisi** ulama hanya diharapkan "restu"-nya saja. Kalau keadaannya berjalan demikian maka **decision making process** akan lancar. Tetapi kalau **politisi** ulama campur tangan dalam masalah duniawi agak mendalam dan **politisi** non ulama mengecamnya agak tajam maka hubungan akan menjadi tegang dan bisa sangat menghambat kelancaran **decision-making process**.

## V. HUBUNGAN POLITISI ULAMA DAN MASYARAKAT GAMPONG

Untuk mengetahui hubungan antara **politisi** ulama dan masyarakat **gampung** penulis mengambil empat **politisi** ulama yang bertempat tinggal di empat kecamatan (Banda Sakti, Muara Dua, Samudra dan Lhoksukon). Dari empat kecamatan itu penulis mengambil enam **gampung** yaitu satu **gampung** politikus ulama yang bersangkutan dari setiap kecamatan, ditambah satu **gampung** tetangganya di Kecamatan Samudra dan Kecamatan Lhoksukon

Waktu menjelajah keenam **gampung** tersebut penulis mendapat unsur-unsur hakiki yang sama di setiap **gampung**. Setiap **gampung** baik yang paling modern seperti Lancang Garam di Kecamatan hana seperti Teupin Blangan di Kecamatan Samudra mempunyai : 1) bangunan pusat yang disebut **meunasah** bagi orang **gampung** merupakan tempat sembahyang, musyawarah, belajar mengaji bagi anak-2 & sekaligus tempat menginap mereka atau tamu yg bermalam di **gampung** itu, 2) warga **gampung** yang beragama Islam (kalau ada yang tidak beragama Islam biasanya bukan orang Aceh). Orang Aceh asli yang tinggal di **gampung** itu sejak berumur enam tahun sudah diserahkan kepada **imeum meunasah** untuk belajar mengaji Qur'an. Sekarang di **gampung** Lancang Garam terdapat 150 anak mengaji di **meunasah**, namun tidak langsung diajar oleh **imeum**, melainkan diajar oleh tiga orang pembantunya 40); 3) seperangkat pengurus **gampung**, yang terdiri dari **keuchik** dan **imeum meunasah** dengan didampingi oleh **tuhapakat**. **Tuhapakat** terdiri dari empat sampai sepuluh orang atau lebih yang terbagi dalam dua golongan yaitu golongan cerdik dan golongan alim ulama. **Keuchik** bersama golongan cerdik menangani masalah duniawi, sedangkan **imeum** dan golongan alim ulama menangani masalah yang berhubungan dengan agama yang oleh mereka disebut masalah akhirat. Meskipun mereka mempunyai kompetensi yang berbeda tetapi dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya mereka merupakan kesatuan

yang tak terpisahkan, seperti misalnya dalam pesta perkawinan warga **gamongnya**: **Keuchik** yang mengatur pesta peresmiannya dan **Imeum** yang membereskan akas, nikahnya. Kalau memotong lembu **kechik** yang membereskan izin peda dan pajak potong dan **Imeum** yang memotong demi nama Allah seperti diwajibkan oleh Qur'an. Dalam memutuskan masalah-maslah **gamong** yang besar seperti kenduri maulud, **keuchik** dan **Imeum** tak pernah meninggalkan **tuhapat**.

Dengan unsur-unsur hakiki yang demikian itu dapatlah dikatakan bahwa tradisi Islam di **gamong** Aceh masih berakar, di mana ulama mendapatkan tempat terhormat di samping pemimpin-pemimpin duniawi. Dalam masyarakat **gamong** yang demikian itu apakah reaksi orang-orangnya kalau tokoh-tokoh yang dianggapnya sebagai ulama itu menjadi politisi atau pun menduduki jabatan pemerintahan? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis mendatangi delapan sampai 18 rumah di setiap **gamong** tersebut dan mengadakan wawancara dengan penghuninya. Kepada setiap responden penulis bertanya siapa saja orang **gamong** yang dianggapnya terkemuka. Biasanya responden menyebut antara dua dan sepuluh orang. Setelah orang-orang yang dianggap terkemuka itu penulis catat maka penulis menanyakan sekedar tanggapannya terhadap tokoh-tokoh yang disebut itu. Pertanyaan berikutnya ialah siapa saja orang **gamong** yang dianggapnya sebagai ulama, biasanya responden menyebut antara dua dan enam orang. Sesudah itu penulis bertanya tentang apa yang dimaksud ulama oleh responden itu dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang mereka sebut ulama itu. Dengan metode wawancara dan angket semacam itu penulis mendapatkan hasil seperti tercantum dalam Tabel 3 sampai dengan Tabel 8.

**Tabel 3**  
Orang Terkemuka/Ulama menurut  
Warga **Gamong** Lancang Garam di Kecamatan Banda Sakti 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Lancang Garam? Jawab :			Menurut anda siapakah ulama di g. Lancang Garam? Jawab:		
Nama Suara	Keterangan		Nama Suara	Keterangan	
AHH	10	Ketua DPRD	AMB	14	Guru SP LAIN
MAM	7	<i>Keuchik</i> /Kep. Din.	AHH	9	Ketua DPRD
AMB	7	Guru SP IAIN	SUM	8	Staf Bupati KDH
SUM	6	Staf Bupati KDH	SI	7	<i>Imeum meunasah</i>
UA	5	Imam mesjid	UA	4	Imam mesjid
AGH	4	Wakil ketua DPRD	FD	4	Adik putri AMB
TR	4	Ex tokoh PNI			
SI	3	<i>Imeum meunasah</i>			

Sumber : Wawancara penulis di Banda Sakti 4 - 14 April 1976  
Keterangan : N = 15. Lancang garam; G dari AHH (ulama Golkar)

Tabel 4  
Orang Terkemuka-Ulama menurut  
Warga **Gampong** Blang Crum di Kecamatan Muara Dua 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Blang Crum? Jawab:			Menurut anda siapakah ulama di g. Blang Crum? Jawab:		
Nama Suara	Keterangan		Nama Suara	Keterangan	
ASy	7	Anggota DPRD	IA	10	<i>Imeum meunasah</i>
IA	5	<i>Imeum meunasah</i>	D	7	Kepala <i>mukim</i>
D	5	Kepala <i>mukim</i>	ASy	7	Anggota DPRD
NHS	5	Peg. penjara	MH	5	Guru mengaji
I	4	Pens. Polri	IY	3	Petani
R	3	<i>Keuchik</i>	I	3	Pens. Polri
IY	3	Petani			

Sumber : Wawancara penulis di Muara Dua 10 Juli 1976  
Keterangan : N = 187. Blang Crum : G dari ASy (ulama PI Perti)

Berdasarkan suara yang diperoleh oleh politisi ulama dalam Tabel 3 sampai dengan Tabel 8, dapatlah dibuat dua penggolongan: Golongan pertama terdiri dari Tabel 3, Tabel 4, Tabel 7 dan Tabel 8 dan golongan kedua terdiri dari Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel golongan pertama kiranya bisa diartikan bahwa politikus ulama sebagai politikus orang terkemuka lebih dikenal dan dihormati oleh orang-orang **gampong**. Hal ini kecuali ternyata dari tabel-2 tsb. yaitu disebut oleh banyak orang juga tampak cara menyebutnya yang spontan waktu ditanya, sedangkan politikus ulama sebagai ulama disebut orang lebih sedikit dan dalam menyebutnya kurang spontan, malahan kadang-kadang dilupakan, baru setelah penulis sebut namanya responden itu ingat. Hal ini terutama terjadi di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua.

Tabel 5  
Orang Terkemuka/Ulama Menurut  
Warga **Gampong** Teupin Blangan di Kecamatan Samudra 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Teupin Blangan? Jawab:			Menurut anda siapakah ulama di g. Teupin Blangan? Jawab:		
Nama Suara	Keterangan		Nama Suara	Keterangan	
BS	1	<i>Keuchik</i>	AGD	5	Anggota DPRD
AGD	4	Anggota DPRD	MS	3	<i>Imeum meunasah</i>
MS	4	<i>Imeum meunasah</i>	H	2	Petani
H	3	Petani	S	2	Petani
S	2	Petani	MY	2	Petani

Sumber : Wawancara penulis di Samudra 3 - 5 Juli 1976.  
Keterangan : N = 10. Teupin Blangan : G dari AGD (ulama Golkar).

Tabel 6  
Orang Terkemuka Ulama Menurut  
Warga **Gampong** Meunasah Mancang di Kecamatan Samudra 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Mn. Mancang & Tp Blangan? Jawab:			Menurut anda siapakah ulama di g. Mn Mancang & Tp Blangan? Jawab:		
Nama	Suara	Keterangan	Nama	Suara	Keterangan
AGD	5	Anggota DPRD	AGD	6	Anggota DPRD
H	5	Usahawan	HS	4	Kepala <i>dayah</i>
A	3	Guru <i>MIN</i>	TH	2	Kep. KUA Kec.
HH	1	Pedagang	MYHR	2	Peg. KUA Kec.

Sumber : Wawancara penulis di Samudra 3 - 5 Juli 1976  
Keterangan : N = 8. Mn Mancang, g dekat g Tp. Blangan.

Mengapa hal tersebut demikian ? Kiranya bisa diterangkan sebagai berikut : Seorang politikus yang juga ulama akan dianggap lebih baik daripada seorang politikus non ulama, sebab politikus yang dianggap sebagai orang yang "lihai" (dalam arti kurang baik) oleh orang **gampong** tersebut kurang ke"lihai"annya, kalau ia memiliki pengetahuan hukum-hukum agama kurang keulamaannya itu. Jadi dapat dikatakan bahwa politikus ulama dianggap oleh orang **gampong** kurang jelek daripada politikus non ulama.

Tabel golongan pertama bagian kanan menunjukkan bahwa politikus ulama disebut oleh sedikit orang kalau dibandingkan dengan ulama non politikus Kiranya hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Di atas sudah disebut bahwa orang **gampong** memandang seorang politikus sebagai seorang yang "lihai", maka kalau seorang ulama yang menurut pengertian mereka juga orang yang lebih mementingkan akhirat itu juga mempunyai status politikus, maka dianggapnya akan kurang perhatiannya terhadap akhirat. Dan aktivitas politik akan mengurangi aktivitasnya sebagai ulama terutama mengajar agama bagi orang **gampong**.

Tabel 7  
Orang Terkemuka / Ulama Menurut  
Warga **Gampong** Meunasah Daya di Kecamatan Lhoksukon 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Mn Dayah? Jawab:			Menurut anda siapakah ulama di g. Mn Dayah? Jawab:		
Nama	Suara	Keterangan	Nama	Suara	Keterangan
MTA	14	Anggota DPRD/murid SMD	SMD	16	Kepala <i>dayah</i>
SMD	14	Kepala <i>dayah</i>	MTA	12	Anggota DPRD/murid SMD
MH	9	Keuchik	AB	4	Imeum meunasah
MY	4	Pens. PSK	SMH	1	Ulama g. lain
AB	3	Imeum meunasah			

Sumber : Wawancara penulis di Lhoksukon 7 — 8 Juli 1976  
 Keterangan : N = 16. Mn Dayah: G. dari MTA (ulama PI Perti).

Tabel 8  
 Orang Terkemuka/Ulama Menurut  
 Warga **Gampong** Meunasah Cibrik di Kecamatan Lhoksukon 1976

Menurut anda siapakah orang terkemuka di g. Mn. Cibrik & Mn Dayah? Jawab:			Menurut anda siapakah ulama di g. 'Mn Cibrik & Mn Dayah? Jawab:		
Nama	Suara	Keterangan	Nama	Suara	Keterangan
SMD	7	<i>Kepala dayah</i>	SMD	8	Kepala <i>dayah</i>
HI	7	Koordinator P3	YM	6	Ket. Majelis-Ulama Kec.
MTA	6	Anggota DPRD/murid SMD	SMH	4	Ulama g. lain
B	4	Usahawan	MTA	3	Anggota DPRD/murid SMD
P	4	<i>Keuchik</i>	MAN		Petani
M	3	Kepala MIN			
KU	2	Usahawan			

Sumber : Wawancara penulis di Lhoksukon 7 — 8 Juli 1976  
 Keterangan : N = 9 Cibrik, g dekat g Mn Dayah.

Tabel golongan kedua (Tabel 5 dan Tabel 6) kiranya bisa diartikan sebagai berikut, sebagai orang terkemuka politikus ulama itu dianggap sama dengan orang-orang terkemuka lain di gampong itu. Dia terkemuka karena bekerja di kabupaten, sedangkan orang lain karena kaya dan sbagainya, tetapi sebagai ulama tabel itu menunjukkan bahwa politikus ulama itu lebih banyak disebut dan dihormati daripada ulama non politisi. Kiranya hal ini dapat dimaklumi, sebab bagi orang-orang gampong dari Kecamatan Samudra ini sebenarnya tidak jelas apa yang dikerjakan oleh politikus ulama itu di kota Lhokseumawe, tidak seperti orang-orang Kecamatan Banda Sakti yang mengerti apa pekerjaan seorang politikus ulama di DPRD. Jadi di Kecamatan Samudra status politikus itu menurut orang **gampong** menunjang keulamaan politikus ulama. Pernah orang gampong Teupin Blangan mengatakan bahwa AGD lebih tinggi daripada ulama lain. Ketika penulis bertanya mengapa demikian, orang itu menjawab sebab kecuali ulama AGD orang cerdas yang bekerja di pemerintah. Dikatakan bahwa orang cerdas ialah orang yang panjang akal dan mampu memecahkan permasalahan orang **gampong** dengan tepat, sedangkan seorang ulama belum tentu panjang akalnya, bahkan mungkin malah sempit, karena hanya berpegang pada kitab saja. Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa perbedaan tabel golongan pertama dan tabel golongan kedua disebabkan terutama oleh kekurangan pengertian orang **gampong** di Kecamatan Samudra.

Apakah sebabnya mereka kurang pengertian kalau dibandingkan dengan orang-orang **gampong** di Kecamatan Banda Sakti, Muara

Dua dan Kecamatan Lhoksukon ? Mungkin dapat dikatakan bahwa sebab umumnya ialah pendidikan dan politik. Di Kecamatan Samudra pendidikan agama tingkat dasar dan menengah lebih banyak daripada sekolah umum dari tingkat yang sama yaitu tujuh berbanding lima, sedangkan di Kecamatan Banda Sakti lima berbanding dua-belas, di Muara Dua enam berbanding sebelas dan di Kecamatan Lhoksukon enam berbanding delapanbelas. Keadaan politik di Kecamatan Samudra dipengaruhi oleh PI Perti. Hal ini ternyata pada hasil pemilihan tahun 1971, PI Perti di Kecamatan Samudra mendapat suara terbanyak. Bahkan Gokar yang menjadi pemenang di ketiga kecamatan yang lain dikalahkan oleh PI Perti di Samudra. Di muka telah diuraikan bahwa tokoh-tokoh PI Perti kurang maju kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh partai dan golongan lain.

Jadi dapat dikatakan bahwa pola hubungan politisi ulama dengan orang **gampang** sesuai dengan pengertian mereka tentang ulama, Rakyat **gampang** mengerti bahwa ulama ialah orang yang memiliki pengetahuan agama secara "mendalam" dan menggunakan pengetahuannya untuk mengajar, memimpin dan beribadat. Maka kalau seorang ulama menjadi politikus akan lebih dihormati oleh orang **gampang** daripada politikus non ulama, sebab dengan pengetahuan agamanya itu seorang politikus ulama dianggap mampu menjinakkan ke"lihai"an dari tingkah laku politiknya. Sebaliknya sebagai ulama kurang dihargai daripada ulama non politikus, sebab orang menganggap pengetahuan agamanya sudah dicampuri pengetahuan duniawi.

## KESIMPULAN

Pendidikan umum yang dimaksudkan Pemerintah Belanda ke Aceh pada tahun-tahun permulaan abad duapuluh ternyata berpengaruh juga pada kehidupan sosial politik golongan ulama. Mungkin pengaruh itu tidak langsung, sebab para **teungku** belum begitu bisa menerima usaha-usaha Pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan. Mereka masih menganggap Belanda sebagai orang kafir, tetapi secara tidak langsung **teungku-teungku** itu didorong untuk memajukan lembaga pendidikan agama yang dikuasainya, meskipun harus memasukkan gagasan modern itu dari luar Aceh. Rasa kalah dan bencinya terhadap Belanda mendorong ulama untuk mendidik kader-kader ulama agar bisa bersaing atau setidaknya-tidaknya sejajar dengan Belanda atau pun orang-orang yang dirangkul oleh Belanda baik di desa maupun di kota, dan baik di bidang sosial maupun di bidang politik.

Hal tersebut di atas nampak dengan jelas pada terbentuknya PUSA yang disusul dengan berdiri PUSA itu dalam waktu tujuh tahun telah menjadi kenyataan, sebab pada tahun 1946 setelah peristiwa Cumbok, golongan ulama berhasil menguasai politik dan pe-

merintah daerah Aceh, meskipun belum berhasil memimpin berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya yaitu hukum agama Islam. Mereka secara resmi masih memimpin berdasarkan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Pengaruh dari pendidikan umum pada ulama itu tidak sekedar unuk mengalahkan saingannya dalam arena politik dan pemerintahan pada tahun 1946 itu saja, tetapi masuk lebih mendasar pada lembaga masyarakat, politik dan pemerintahan, yang sampai sekarang perkembangannya masih bisa dirasakan dan diamati. Perkembangan yang dimaksud ialah terutama dalam tubuh ulama sendiri. Pada saat sekarang dalam masyarakat mulai tumbuh apa yang disebut ulama intelektual atau ulama **wetenschap** disamping ulama kitab. Dari istilahnya sudah jelas bahwa ulama **wetenschap** ini hasil pendidikan sekolah agama, yang didirikan oleh tokoh-tokoh PUSA, yang sudah dimasuki pengetahuan duniawi seperti Al Muslim, Madrasah Abadiyah dan Normal Islam Instituut. Lulusan dari sekolah-sekolah itulah yang sekarang menyandang status ulama **wetenschap** di kabupaten-kabupaten Aceh. Mereka bergerak ditengah-tengah masyarakat baik sebagai tokoh sosial maupun sebagai tokoh politik dan pemerintahan lokal, sedangkan ulama kitab ialah lulusan **dayah**, yang kebanyakan masih menunggu dengan tekun datangnya santri-santri ke **dayah**nya untuk mendalami isi kitab. Lulusan **dayah** yang ikut bermain di arena politik dan pemerintahan biasanya menggabung ke golongan ulama **wetenschap** dengan menambah pengetahuan agamanya dengan pengetahuan duniawi dengan segala cara.

Masyarakat terutama golongan tua rupanya masih menyegani ulama kitab karena kesuciannya berkat penguasaan yang hampir sempurna terhadap isi kitab, namun dalam rasa segannya itu tersirat sikap menjauhi, meskipun hal ini tak mengurangi sikap hormatnya. Sebaliknya masyarakat terutama golongan muda terlihat makin akrab dengan ulama **wetenschap**. Bahkan dalam arena politik mereka merasa erat sebagai sahabat, meskipun penghormatan masih tetap diberikan karena pengetahuannya tentang wahyu ilahi itu, namun dalam keakraban tersebut tersiratlah suatu pengakuan akan adanya kemerosotan wibawa sakral dari ulama **wetenschap** ini. Kemerosotan itu makin terasa pada ulama **wetenschap** lulusan sekolah agama umum yang baru didirikan pada zaman Republik Indonesia, seperti pernah terjadi pada diri MT BA, sarjana muda dari IAIN yang di muka telah disinggung. Bahkan di DPRD Tk. II Aceh Utara terdapat seorang lulusan PGA, yang tak seorang pun menganggapnya sebagai ulama. Rupanya proses kemerosotan wibawa sakral keulamaan para ulama lulusan sekolah agama umum itu sampai sekarang masih berjalan, bahkan dapat diduga akan lebih cepat dan luas lagi setelah efektifnya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No. 36 Tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, yang intinya menyamakan tingkat

mata pelajaran umum dengan tingkat pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat.

Namun dengan pengorbanan wibawa sakral itu ulama dengan bebas masuk ke arena politik dan pemerintahan. Hal ini hampir tak mungkin dilakukan pada zaman Belanda, karena Belanda pada waktu itu tidak mentolerir masuknya ideologi Islam yang dibawa oleh ulama ke arena politik dan pemerintahan daerah Aceh. Sekarang pun Pemerintah Republik Indonesia juga tidak mengakui secara resmi berlakunya hukum Islam yang dikuasai oleh ulama itu dalam arena politik dan pemerintahan, tetapi masih mentolerir masuknya ulama serta pola hubungan politisi ulama dan politisi non ulama kedalam arena politik dan pemerintahan daerah Aceh.

Seperti di muka telah diuraikan bahwa pola hubungan tersebut merupakan perwujudan dari pengertian tentang ulama dari masyarakat **gampong** yang tradisi Islamnya masih kuat. Jadi politisi ulama telah berhasil membawa pola hubungan sosial tradisional Islam itu ke arena politik dan pemerintahan daerah, namun harus tetap diingat bahwa keberhasilan itu dicapai setelah mereka mengorbankan wibawa sakral keulamaannya. Rupanya makin dalam mereka masuk ke arena politik dan pemerintahan harus makin banyak korban yang **diberikan** dengan kata lain makin masuk ke arena politik dan pemerintahan ulama itu harus makin jauh menjalankan **awamisasi** diri. Hal ini nampak jelas pada politisi ulama Golkar, dengan masuk **Golkar** yang **diidentikkan** dengan partai pemerintah, ulama itu harus siap menerima anggapan sebagai ulama yang sudah melepaskan idealismenya baik dari kawan-kawan politisi maupun dari rakyat **gampong**.

Selama Pemerintah berhasil menjamin kesejahteraan materiil dan tidak mengancam kehidupan keagamaan umat Islam, rupanya mereka akan selalu siap sedia mengorbankan idealisme keulamaannya, meskipun secara diam-diam. Tetapi kalau pemerintah tidak berhasil menjamin kesejahteraan material dan tindakannya mengancam hidup keagamaan, maka mereka akan terkejut dan sadar akan idealisme keulamaannya. Dalam keadaan yang demikian ulama politisi akan dianggap menjadi lebih ulama daripada politisi dan fatwanya akan dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan politik dan pemerintahan. Masyarakat **gampong** yang tradisional itu akan bangkit sebagai umat Islam yang siap melaksanakan fatwa yang dianggap sebagai hukum negara.

Jadi dapat dikatakan makin banyak pengetahuan umum yang dimiliki oleh ulama makin dekatlah mereka dengan kaum awam dan makin masuk mereka ke arena politik dan pemerintahan Republik Indonesia makin banyaklah wibawa sakral dan idealisme keulamaannya yang dikorbankan. Keduanya akan berjalan terus, selama pemerintah mampu menjamin kesejahteraan material dan tidak mengancam hidup keagamaan masyarakat **gampong** sebagai umat Islam.

## Catatan:

- 1) C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, vol. I, translated by A.W.S. O'Sullivan, Leiden, E.J. Brill, 1906 : hal. 71 - 72, 102 dan 153.
- 2) C. Snouck Hurgronje, *op. cit.* : hal. 172 - 177
- 3) James T. Siegel, *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969 : hal 71 - 74.
- 4) A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, 'sGravenhague- Bandung, van Hoeve, 1949 : hal. 7.
- 5) Ismuha, *Ringkasan Riwayat Hidup dan Perjuangan Tgk. Abdur Rahman Matang Glumpang Dua alias Tgk. Meunasah Meutjap*, Djokjakarta, 1949 : hal 5.
- 6) Ismuha, "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 tahun jang Lalu", Sinar Darussalam, No. XIV dan XV Djuni dan Djuli 1969.
- 7) Ismuha, *op. cit.* (catatan no. 5) : hal. 19
- 8) Ismuha, *op. cit.* (catatan no. 6)
- 9) A.J. Piekaar, *op. cit.* : hal. 339 - 352
- 10) Cf. Tk. Alibajah Talsya, *Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pembontokan di Atjeh*, Djakarta, Kesuma, 1956 : hal. 19 - 20.
- 11) Mr. S.M. Amin, *Disekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Djakarta, Soerenggan, 1956 : hal. 40, 284 dan 249.
- 12) Wawancara penulis dengan Prof. A. Hasjmy di Banda Aceh 30 agustus 1976.
- 13) Bappeda Istimewa Aceh, *Aceh Utara dalam Angka 1974/1975*, Banda Aceh, 1976 : hal. 2
- 14) C. Snouck Hurgronje, *op. cit.* : hal. XV dan XVII. James T. Siegel, *op. cit.* : hal. 48 dan 288.
- 15) Wawancara penulis dengan Tgk. SI. MD di Lhoksukon 21 September 1976.
- 16) Wawancara penulis dengan AHH di Lhokseumawe, 16 Maret 1976.
- 17) Wawancara penulis dengan Tgk. ASy di Lhokseumawe 2 Oktober 1976.
- 18) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 38.
- 19) Hasil Pemungutan Suara tanggal 3 Juli 1971 dalam Surat Bupati KDH Ketua PPD A. Ut. No. 41/R/II-1 tgl. 4 - 7 - 1971 kepada Gubernur KDH Ketua PPD Tk.I Aceh (Surat Rahasia).
- 20) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59.
- 21) Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan Calon Anggota DPRD Tk. I/DPRD Tk. II, Arsip Sekretariat DPRD Tk. II Aceh Utara, 1970.
- 22) Wawancara penulis dengan ASy di Lhokseumawe 15 Juli 1976
- 23) Wawancara penulis dengan Camat Samudra di Samudra 3 Juli 1976.
- 24) Wawancara penulis dengan orang *gampong* di Lhoksukon 6 dan 7 Juli 1976.
- 25) Abdullatif Ben, *Khutbah Hari Raya Idul Fitri 1395 H.*, Lhokseumawe, Seksi Penerangan Agama Aceh Utara, 1975 : hal 6 - 7.
- 26) *Idem* : hal. 10.
- 27) Wawancara penulis dengan camat Samudra di Samudra 3 Juli 1976.
- 28) Wawancara penulis dengan MAH di Lhokseumawe 27 Juli 1976
- 29) Wawancara penulis dengan AHH di Lhokseumawe 29 April 1976.  
Pada waktu itu surat kabar baru ramai memberitakan bentrokan antara pendukung Chou En-lai alm. dan Teng Shiao-p'ing melawan Extrim Kiri yang dihasut oleh Ciang-ching, istri Mao Tse-tung.
- 30) Wawancara penulis dengan AH di Lhokseumawe, 5 Mei 1976.
- 31) James T. Siegel, *op. cit.* : hal. 102 - 103.
- 32) Komisi dan Pansus adalah alat perlengkapan DPRD untuk memperlancar tugasnya, masing-masing dibentuk dengan SK DPRD.  
SK. No. 09/DPRD/1975 membentuk Komisi ABCDE. Komisi a : Prasarana Ekonomi/Irigasi, Komisi B : Peningkatan Produksi, Komisi C : Kesejahteraan Rakyat, Komisi D : Pemerintahan Umum dan Komisi E : Ekonomi, Keuangan dan Industri.

- 33) SK. DPRD No. 22/DPRD/1976 membentuk empat Pansus untuk mengadakan peninjauan ke 23 kecamatan yang terdapat di Aceh utara. Setiap Pansus terdiri dari delapan sampai sepuluh orang. Maksud peninjauan ini untuk mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan APBD tahun yang lalu, sehingga DPRD mempunyai bekal yang kongkrit dalam membahas RAPBD yang akan diajukan oleh Bupati KDH beserta stafnya untuk tahun mendatang.
- 34) Abdullah Yacob, *Penjelasan Jawaban Bupati KDH Aceh Utara terhadap Pemandangan Umum Para Anggota DPRD Tk. II Aceh Utara dalam Pembahasan RAPBD Lhokseumawe*, 12 Juli 1976; Bab V.
- 35) Suatu Rencana Perda (Reperda) biasanya diajukan oleh Bupati KDH kepada DPRD. Kalau Reperda itu menyangkut masalah keuangan, Panitia Anggaran DPRD menanggapi terlebih dulu, baru tanggapan umum anggota-anggota DPRD, berikutnya tanggapan masing-masing Komisi dan yang terakhir pendapat masing-masing Fraksi, baru disahkan menjadi Perda.
- 36) Surat Al-Baqarah ayat (216) dalam Mahmud Junus, *Tafsir Alqur'an Alkarim Bahasa Indonesia*, Bandung - Djakarta, Alma'arif, 1952 : hal 31 dibaca oleh seorang politicus ulama PI Perti.
- 37) Dalam keadaan biasa seorang wakil ketua tugasnya hanya memberi pertimbangan dan me"restu"i keputusan ketua umum.
- 38) wawancara penulis dengan R di Lhokseumawe 29 April 1976.
- 39) Wawancara penulis dengan AM, sekretaris Golkar Aceh Utara di Lhokseumawe 27 Juli 1976.
- 40) Wawancara penulis dengan SI di Banda Sakti 19 September 1976.

## BIBLIOGRAFI

Abdullah Yacob.

1976 **Penjelasan Jawaban Bupati KDH Aceh Utara terhadap Pemandangan Umum Para Anggota DPRD Tk. II Aceh Utara dalam Pembahasan RAPBD**. Lhokseumawe.

Abdullatif Ben

1975 **Khutbah Hari Raya Idul Fitri 1395 H**. Lhokseumawe : Seksi Penerapan Agama aceh utara.

Alibasyah Talsya, Tk.

1956 **Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Atjeh**. Djakarta : Kesuma.

Amin, S.M.

1956 **Disekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh**. Djakarta : Soeroengan.

BAPPEDA Istimewa Aceh (kerja sama dengan Fak. Ekonomi Un-

1976 syiah **Aceh Utara dalam Angka 1974/1975**. Banda Aceh.

Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan Tjalon Anggota DPRD

1971 Tk. II Atjeh Utara (Arsip Sekretariat DPRD Tk. II Atjeh Utara).

Ismuha

1949 **Ringkasan Riwayat Hidup dan Perdjuangan Tgk. Abdur Rahman Matang Glumpang Dua allas Tgk. Meunasah Meutjap**. Djokjakarta.

Ismuha

1969 "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 Tahun jang Lalu". **Sinar Darussalam** no. XIV dan XV Djuni dan Djuli).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 59

1969 **Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38.

1974 **Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.**

Mahmud Junus.

1952 **Tafsir Al Qur'an Al karim bahasa Indonesia.** Bandung-Djakarta : Al ma'ARIF.  
Djakarta : Al ma'arif.

Piekaar A.J.

1949 **Atjeh en de Oorlog met Japan** (Aceh dan Perang dengan jepang). 'sGravenhague-Bandung : van Hoeve.

Siegel, James T.

1969 **The Rope of God** (Tali Allah). Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.

Snouck Hurgronje, C.

1906 **The Achehnese** (Orang aceh). Translated by A.W.S. O'Sullivan. Vol I. Leiden : E. J. Brill.

Surat Rahasia Bupati KDH/Ketua PPD Atjeh Utara No. 41/R/II-1

1971 tgl. 4 - 7 - 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD Tk. I Atjeh **Hasil Pemungutan Suara tanggal 3 Djuli 1971.**

Surat Keputusan DPRD Tk. II Aceh Utara No. 09/DPRD/1975.

1975 **Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Tk. II Aceh Utara.**

Surat Keputusan BERSAMA Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan

1975 Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975, No. 36 Tahun 1975.

**Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.**

Surat Keputusan DPRD Tk. II Aceh Utara No. 22/DPRD/1976.

1976 **Pembentukan Panitia Khusus I s/d IV DPRD Tk. II Aceh Utara.**

**Lampiran I**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 26/A.1/1981**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesejarahan di Jakarta;
- b. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesejarahan di Jakarta".
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
  - c. Nomor 47 Tahun 1979;
  - d. Nomor 237/M Tahun 1978;
  - e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
  - b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesejarahan mencapai hasil yang diharapkan.
2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesejarahan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesejarahan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesejarahan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.

- KEEMPAT** : Apabila pelaksanaan Seminar Kesejarahan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan mewajibkan Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 1981.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123

#### SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. *Ybs. untuk seperlunya.*

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan,

ttd

Sutarso, SH

NIP. 130186291

**LAMPIRAN** Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 26/A.I/1981  
Tanggal : 17 Juli 1981.

**Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab  
Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta**

**PELINDUNG:**

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

**PANITIA PENGARAH:**

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;
4. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto — Sebagai Anggota;
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;
8. Drs. Uka Tjandrasmita — Sebagai anggota;
9. Drs. Abdurachman Surjomihardjo — Sebagai anggota.  
Sutrisno Kutoyo — Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 1981  
DIREKTUR JENDERAL KEBU-  
DAYAAN

ttd.

Sutarso S.H.

NIP. 130186291

ttd

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

## Lampiran II

### DAFTAR PESERTA SEMINAR SEJARAH NASIONAL III.

#### I. PANITIA PENGARAH

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Pelindung
2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Ketua/Anggota
3. Dr. S. Budhisantoso — Wakil Ketua/anggota
4. Drs. Anhar Gonggong — Sekretaris
5. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Anggota
6. Dr. R.P. Suyono — Anggota
7. Drs. Bastomi Ervan — Anggota
8. Drs. Buchari — Anggota
9. Drs. Uka Tjandrasasmita — Anggota
10. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo — Anggota

#### II. PANELIS

1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Taufik Abdullah
3. Dr. Kuntowijoyo
4. Dr. Edi Ekadjati
5. Drs. Amir Ruchiatmo
6. Prof. Dr. Mattulada
7. Dr. Nico Kana
8. Drs. Mundardjito
9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
10. Dr. Steve Jawanae
11. Dr. T. Ibrahim Alfian
12. Dr. Onghokham
13. Dr. Yang Aisyah
14. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto
15. Dra. Mona Lohanda
16. Dra. Sumartini
17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno
18. Dr. Sri Wulan Rudjiati
19. Dr. Ayat Rochaedy
20. Drs. F.X. Sutjipto
21. Dr. Nico L. Kalangie

#### III. Seksi-Seksi:

##### Seksi Pra Sejarah

1. Dr. R.P. Suyono — Ketua
2. Drs. Goenadi Nitihaminoto — Anggota/pembawa naskah
3. Drs. Hary Truman Simanjuntak : Anggota/pembawa naskah
4. Drs. D. Suryanto — Anggota/pembawa naskah
5. Drs. Haris Sukendar — Anggota/pembawa naskah
6. D.D. Bintarti — Anggota/pembawa naskah
7. Dr. R.P. Suyono — Anggota/pembawa naskah
8. Drs. Santoso Soegondo — Anggota/pembawa naskah
9. R. Budi Santosa Azis — Anggota/pembawa naskah

10. Ny. Nies A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Panggabean : Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaba — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semade Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusumah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjosuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyai Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uka Tjandrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Darban — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullah Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Gde Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marleily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantining-sih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Hudan — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullah — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sauki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Daud Limbu Gau — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjanto, MA — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Djoko Sukiman /Dr. T. Ibrahim Alfian — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

49. Firdaus Burhan — Anggota/pembawa naskah
50. Drs. Nasief Chatib — Anggota/pembawa naskah
51. Drs. Imam Hilman — Anggota/pembawa naskah
52. Ida Bagus Sideman — Anggota/pembawa naskah
53. Drs. H. Siahaan — Anggota/pembawa naskah
54. Drs. A.A. Bagus Wirawan — Anggota/pembawa naskah
55. Drs. Suwardi, MS — Anggota/pembawa naskah
56. Dra. Tiurma L. Tobing — Anggota/pembawa naskah
57. Drs. Helliuss Syamsuddin, MA — Anggota/pembawa naskah
58. Drs. R.Z. Leirissa — Anggota/pembawa naskah
59. Dra. Julianti Parani — Anggota/pembawa naskah
60. Drs. Didi Suryadi — Anggota/pembawa naskah
61. Drs. M. Idwar Saleh — Anggota/pembawa naskah
62. Drs. Rosad Amidjaja — Anggota/pembawa naskah
63. A.M. Djuliaty Suryoyo — Anggota/pembawa naskah
64. Moh. Noor ARS — Anggota/pembawa naskah
65. Drs. Djoko Utomo — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Pergerakan Nasional

66. Drs. Abdurrahman Suryo-  
mihardjo — Ketua
67. Tengku Lukman Sinar, SH — Anggota/pembawa naskah
68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo — Anggota/pembawa naskah
69. Wardiningsih Soerjohardjo — Anggota/pembawa naskah
70. Drs. Rusdi Sufi — Anggota/pembawa naskah
71. Drs. Mardanas Safwan — Anggota/pembawa naskah
72. Drs. Yusmar Basri — Anggota/pembawa naskah
73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Mutakhir

74. Prof. Dr. Nugroho Notosu-  
santo — Ketua
75. H.A.M. Effendy, SH — Anggota/pembawa naskah
76. Drs. Gazali Usman — Anggota/pembawa naskah
77. I Gde Putu Gunawan — Anggota/pembawa naskah
78. Drs. Suranto Sutanto — Anggota/pembawa naskah
79. J.R. Chaniago, Drs — Anggota/pembawa naskah
80. Drs. Adisusilo S.J. — Anggota/pembawa naskah
81. Ariwiadi — Anggota/pembawa naskah
82. Tri Wahyuning Mahrus  
Irsyam, SS — Anggota/pembawa naskah
83. Husain Haikal — Anggota/pembawa naskah
84. Drs. Sutopo Sutanto — Anggota/pembawa naskah
85. Tanu Suherly — Anggota/pembawa naskah
86. J. Yogaswara — Anggota/pembawa naskah
87. Drs. Anhar Gonggong — Anggota/pembawa naskah
88. Susanto Zuhdi — Anggota/pembawa naskah
89. Amrin Imran — Anggota/pembawa naskah
90. Saleh A. Djamhari — Anggota/pembawa naskah
91. Masfar R. Hakim — Anggota/pembawa naskah
92. M. Idwar Saleh — Anggota/pembawa naskah
93. Moela Marboen — Anggota/pembawa naskah

## Lampiran III

### LAPORAN HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

#### PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesadaran bersejarah melalui penggalakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

#### A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
  - b. "Studi Kasus Komuniti Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
  - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
  - d. "Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mundardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkauan masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis menulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana bercermin dalam kebudayaan materiil.

2. *Historiografi Tradisional* dengan 5 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
  - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rudjiati Mulyadi.
  - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
  - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
  - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: Historiografi Tradisional sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan historiografi modern, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional amat penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:
  - a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
  - b. "Sebuah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
  - c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Onghokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Wawancara Simultan: Suatu Experimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
  - b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
  - c. "Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah pengaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

## B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
  2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
  3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
- ## C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta junior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

## 1. PRASEJARAH:

- a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
- b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
- c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.

## 2. SEJARAH KUNA

- a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
- b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
- c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupa-rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
- d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosesusual, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
- e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kunadihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filosofis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.

## 3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

- a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
- b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan. Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berciri Indonesia.

## 4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

Minat dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.

## 5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.

## 6. SEJARAH MUTAKHIR

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah Mutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

### Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran

umum sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:

1. **PRASEJARAH**

- a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
- b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
- c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

2. **SEJARAH KUNA**

- a. Diharapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.

3. **SEJARAH ABAD XVI — XVIII**

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.

4. **SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH**

- a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT*, *TNI*, *TBG*, *BKI*, dan lain-lain.
- c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.

5. **SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

6. **SEJARAH MUTAKHIR**

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Jakarta, 13 Nopember 1981

Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional III

## **Lampiran IV**

### **DAFTAR MAKALAH SEMINAR SEJARAH NASIONAL III**

#### **I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:**

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harri Truman Simanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryanto.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Hâris Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indraningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Larantuka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

#### **II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO**

1. Teori tentang asal usul Ratu Ciri Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Retna Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kedu, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Oemar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jenggala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Cangkuang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyai Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaely Asmuni.

### III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 – 18

1. Sejarah Kauman Yogya. Sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaopu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sagimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Catatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantiningsih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Mataram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

### IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Bekel dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sutan Mangkurat terhadap Belanda di Mandiling, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24 Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Puputan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 – 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengkristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha mempertahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiurma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 – 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

#### Leirissa

- 12 Tradisi lokal dan penulisan sejarah Buton, Dra Julianti Parani.
- 13 Pemberontakan Petani di Tangerang 1924, Drs Didi Suryadi
- 14 Wajib kerja di Karesidenan Kedu pada abad ke-19, oleh A.M. Djulianti Suroyo
15. Pangeran Panji dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
16. Pemogokan Buruh tani di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

#### V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL.

1. Tuhan Sang Nahualu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukei Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentratic; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalaman wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provincien, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Irna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkunegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

#### VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.AM. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Gde Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joesoeph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Haikal
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri. Suatu Sisi situasi gerakan

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.

13. Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Susanto Zuhdi
14. Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.
15. Kekuatan-kekuatan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh A. Djamhari.
16. Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.
17. Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marboen.
18. Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notokusanto.
19. Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.
20. Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.

Panitia Seminar Sejarah  
Nasional III

**Perpustakaan  
Jenderal**